



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENDIDIKAN DAN DEMOKRASI:  
PERAN KURIKULUM TERSELUBUNG TERHADAP  
PEMBENTUKAN PERILAKU DEMOKRATIS SISWA  
(STUDI PADA SMA NEGERI “X” JAKARTA)**

**SKRIPSI**

**RAHMAT SALEH  
0706284906**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENDIDIKAN DAN DEMOKRASI:  
PERAN KURIKULUM TERSELUBUNG TERHADAP  
PEMBENTUKAN PERILAKU DEMOKRATIS SISWA  
(STUDI PADA SMA NEGERI “X” JAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial**

**RAHMAT SALEH  
0706284906**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rahmat Saleh**

**NPM : 0706284906**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : Januari 2012**

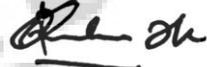
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Rahmat Saleh  
NPM : 0706284906  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Pendidikan dan Demokrasi:  
Peran Kurikulum Terselubung terhadap  
Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa (Studi  
pada SMA Negeri “X” Jakarta)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Erna Karim, M.Si. (  )

Sekretaris Sidang : Putu Chandra D. K., S.Sos, M.Si. (  )

Pembimbing : Dra. Indera Ratna Irawati P., M.A. (  )

Penguji Ahli : Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2012



*Secara khusus, skripsi ini aku dedikasikan...  
untuk Bapak-Ibuku dan Kakak-Adikku,  
atas dukungan semangat dan doa yang tiada henti...  
Karena kalian lah skripsi ini ada..*

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Kalau boleh jujur, sebenarnya penulisan naskah skripsi ini pada mulanya dipicu oleh sebuah romantisme. Adalah lika-liku perjalanan saya untuk menemukan arti cinta yang hakiki, di awal semester enam yang lalu. Romantisme ini tidaklah terlepas dari kehendak-Nya. Sungguh, merupakan anugerah terindah. Karena itu, puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara akademis, penulisan naskah skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Rasa-rasanya perlu saya kemukakan bahwa penyelesaian skripsi ini yang *ngaret*, terus terang saja, tidak menunjukkan betapa amat sangat mendalamnya saya melakukan riset. Akan tetapi juga di lain sisi menceritakan betapa penulisan naskah skripsi ini telah begitu banyak diselingi di sana-sini dengan beragam aktivitas. Ditambah pula kebingungan saya untuk melawan rasa capek, letih, dan bosan yang disebabkan oleh kegalauan hati. Anehnya, berpaling dari skripsi tapi melarikan diri dengan menulis naskah juga (diary, esai, dan opini).

Melalui proses yang rumit, lika-liku yang panjang, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penulisan naskah skripsi, hingga pada akhirnya terciptalah *kitab* seperti yang Anda pegang ini. Karenanya, ijinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT -Tuhanku-. Engkau hadir dalam setiap langkahku.
2. *Mbak* Ira, selaku dosen pembimbing akademis dan sekaligus dosen pembimbing skripsi ini yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu saya dalam banyak hal. Terimakasih, selama empat tahun lebih, telah berkenan untuk menjadi Ibu di kampus perjuangan ini. Telah sabar membimbing saya yang senang bermanja-manja dengan waktu dan ketidakdisiplinan. Di tengah kesibukan beliau yang sedang studi doktoral, maaf saya selalu merepotkan. Sekali lagi saya haturkan terimakasih ya *mbak*;

3. Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si. selaku dosen penguji ahli yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Dr. Erna Karim, M.Si. selaku ketua sidang dan juga ketua Program Studi Sosiologi FISIP UI yang telah mengayomi mahasiswa-mahasiswa Sosiologi FISIP UI, serta Putu Chandra D.K, S.Sos, M.Si. selaku sekretaris sidang yang juga memberikan masukan yang berarti bagi penyempurnaan skripsi ini;
4. Dosen-dosen Sosiologi FISIP UI yang telah mengajari saya selama menjalani perkuliahan di Sosiologi FISIP UI dan telah memberikan ilmu-ilmu yang berarti bagi saya untuk dapat menyusun skripsi ini, serta pihak kampus UI pada umumnya yang turut membantu saya selama perkuliahan di FISIP UI;
5. Para pemberi beasiswa: Eka Tjipta Foundation (ETF), Bank Rakyat Indonesia (BRI), India Women's Association (IWA), Dana Sosial Mushala (DSM FISIP UI), PPA/BBM, dan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE)  
Terimakasih yang dahsyat saya sampaikan kepada pihak Yayasan KSE atas *sharing-networking-developing*. Salam suKSEs!
6. Pihak sekolah SMA Negeri "X" Jakarta, atas bantuan dan informasinya sesuai dengan yang saya butuhkan;
7. Teman-teman Sosiologi FISIP UI secara umum yang telah memberikan atmosfer pertemanan yang sangat menyenangkan. Terutama angkatan 2007 yang telah memberikan persahabatan yang sangat berkesan selama saya menjalani perkuliahan di Sosiologi FISIP UI;
8. Rekan-rekan di BEM FISIP UI dan juga rekan-rekan di BEM UI. Teman-teman ngding-dong di FISIPers, Bursa'ers Asrama UI, Paguyuban KSE UI, dan keluarga besar Perhimak-UI serta Bimbel Salemba Group;
9. Para aktivis HmI Komisariat se-UI (FISIP, FIB, FH, FE, FT, FKM, dan FIK). Tak lupa dengan laskar hijau-hitam di Komisariat PNJ. Sungguh melelahkan, tapi saya senang sekali dapat berhimpun di organisasi ini. Himpunan ini telah memberikan banyak hal bagi saya. Semoga himpunan yang kita cintai ini tak akan lekang oleh waktu sampai kapan pun. Juga untuk para Kakanda/Ayunda di KAHMI dan KBA HMI UI. Salam Yakusa!;

10. Thank you so much buat segala sesuatunya komplotan darah muda “darmud” (Sarce, Alia, Arum, Vina, Rara, Dayen, Windy, Ania, Rijal, dkk);
11. Teruntuk seorang mahasiswi di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, terimakasih atas perjumpaannya: jumpa muka, jumpa gagasan, dan jumpa hati. Sekali lagi, hatur nuhun atas segalanya. Ijinkanlah, segalanya itu kan ku jadikan sebagai kenangan yang terindah. Dan aku akan selalu ingat dengan pesan singkatmu: “Akhir dari sesuatu adalah awal dari sesuatu yang lain”. Juga untuk seorang mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, terimakasih atas bantuannya: SPSS dan ngentri datanya.
12. *Batman Community*. Terimakasih atas tradisi intelektualnya. Semoga obrolan dengan dibarengi curhat dan acapkali terjadi benturan mainstream, bisa menjadi kisah klasik untuk masa depan bagi kita semua. Tak lupa keluarga kecil di Rumah Pelangi, thanks bro atas *buku, pesta, dan cinta*.
13. Ayahanda: Slamet Riyadi dan Ibunda: Sulastri. atas doa restu, motivasi, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada saya selama menempuh studi. Juga untuk Kakak saya beserta Istrinya (Mas Harry dan Mbak Eny), dan juga Tika, adik saya tercinta.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sungguh, jikalau semua lautan dijadikan tinta, daun-daun dijadikan kertas dan ranting-ranting yang ada dijadikan penanya untuk menuliskan segala kebaikan kalian, niscaya tak akan cukup itu semua. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu saya.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Bekasi-Depok, Januari 2012

Penulis: Rahmat Saleh

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Saleh  
NPM : 0706284906  
Program Studi : Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pendidikan dan Demokrasi: Peran Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa (Studi pada SMA Negeri “X” Jakarta)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan



(Rahmat Saleh)

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Saleh  
Program Studi : Sosiologi  
Judul : Pendidikan dan Demokrasi:  
Peran Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan  
Perilaku Demokratis Siswa (Studi pada SMA Negeri “X”  
Jakarta)

Sekolah dengan kapasitasnya sebagai sebuah institusi sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi dan sekaligus agen kontrol sosial. Dalam fungsinya tersebut misalnya membentuk perilaku seseorang, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pelajaran-pelajaran formal saja, diperlukan adanya perbuatan nyata, yang jika dalam lingkup sekolah bisa dicontoh melalui segala bentuk interaksi antara aktor-aktor di sekolah. Hal inilah yang dinamakan dengan kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) yang sudah barang tentu terdapat di setiap sekolah. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri “X” Jakarta yang mana salah satu visi-misi-tujuannya adalah ingin mewujudkan sikap/perilaku siswanya menjadi demokratis. Penelitian ini ingin mencoba melihat hubungan antara kurikulum terselubung terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum terselubung memiliki peranan/pengaruh dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Terdapat hubungan yang cukup/sedang dan arah yang positif antara variabel kurikulum terselubung dengan variabel perilaku demokratis siswa. Lebih jauh lagi, telah dibuktikan dalam penelitian ini tentang pentingnya penanaman nilai-nilai demokrasi melalui penerapan kurikulum terselubung yang cukup efektif.

Kata kunci:  
Kurikulum Terselubung, Nilai-Nilai Demokrasi, dan Perilaku Demokratis Siswa

## ABSTRACT

Name : Rahmat Saleh  
Study Program : Sociology  
Title : Education and Democracy:  
The Hidden Curriculum Role as a Shaper of Student  
Democratic Behavior (Study in SMA Negeri "X" Jakarta)

School with its capacity as a social institution has a function to become an agent of socialization and social control. Its function for example to form a person's behavior, not enough just to rely on any formal lessons, concrete action is needed, that if within the scope of the school can be emulated by all forms of interaction among actors in the school. This is called the hidden curriculum (hidden curriculum), which of course contained in each school. As performed by SMA Negeri "X" Jakarta where one of the vision-mission-goal is to establish the democratic attitude/behavior of students. This study try to see the relationship between the hidden curriculum to formation of student democratic behavior. The results of this study empirically indicate that application of the hidden curriculum has a role/influence in internalize democratic values in students. There is a moderate relationship and positive direction between hidden curriculum variable with student's democratic behavior variable. Furthermore, it has been proved in this study on the importance of cultivation of democratic values through the application of the hidden curriculum is quite effective.

Key words:

Hidden Curriculum, Democratic Values, and Student Democratic Behavior

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Signifikansi Penelitian .....	15
1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Studi Literatur .....	
2.1.1 Tesis “ <i>Pembentukan Modernitas Individu Melalui Kurikulum Terselubung (Studi Komparatif di Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pendidikan Formal)</i> ditulis oleh Albina Rosalina Saragih, FISIP UI Depok 2001 .....	19
2.1.2 Tesis “ <i>Memahami Proses Demokrasi Pendidikan Melalui Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Etnografi Ruang Kelas di SDN Kranji X Bekasi</i> ” ditulis oleh Zulifma Nathalia, FISIP UI Depok 2006.....	21
2.1.3 Tesis “ <i>Praktek Demokrasi di Kota Depok (Studi tentang Demokratisasi di Tingkat Lokal)</i> ” ditulis oleh Wahidah Rumondang Bulan, FISIP UI Depok 2003 .....	22
2.1.4 Skripsi “ <i>Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus mengenai Sekolah sebagai Agen Sosialisasi)</i> ” ditulis oleh Francisia S.S.E Seda, FISIP UI Depok 1987 .....	24
2.1.5 Skripsi “ <i>Pengaruh Kurikulum Terselubung terhadap Keberhasilan Siswa Sekolah Lanjutan Atas (Studi Kasus SMA Negeri 8 Jakarta)</i> ” ditulis oleh Ricardi S. Adnan, FISIP UI Depok 1992 .....	24

2.1.6	Skripsi “Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kegiatan OSIS di Sekolah (Studi pada SMPN 5 Kota Malang)” ditulis oleh Zia Ulhak, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 2009 .....	25
2.1.7	Skripsi “Hubungan Sosialisasi Sekolah dan Sosialisasi Keluarga dengan Perilaku Multikulturalis Siswa (Studi pada SMA Negeri 78 Jakarta)” ditulis oleh Syarifah Nuraini, FISIP UI Depok 2009 .....	27
	Matriks Tinjauan Pustaka .....	30
2.2	Kerangka Pemikiran .....	35
2.2.1	Pendidikan dan Demokrasi .....	35
2.3	Kerangka Konsep .....	35
2.3.1	Variabel Independen (Kurikulum Terselubung) .....	35
2.3.2	Variabel Dependen (Perilaku) .....	38
2.3.3	Nilai-Nilai Demokrasi .....	42
2.3.4	Perilaku Demokratis .....	43
2.3.5	Konsep-konsep lain .....	44
2.4	Skema Alur Berfikir .....	48
2.5	Asumsi Penelitian .....	48
2.6	Hipotesis Penelitian .....	49
2.7	Model Analisis Variabel .....	49
2.7.1	Arah Hubungan .....	49
2.7.2	Bentuk Hubungan .....	50
2.8	Identifikasi Variabel .....	50
2.9	Operasionalisasi Konsep .....	52
	Matriks Operasionalisasi Konsep .....	53
<b>3.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>57</b>
3.1	Metode Penelitian .....	57
3.2	Pendekatan Penelitian .....	57
3.3	Jenis Penelitian .....	58
3.3.1	Berdasarkan Manfaat .....	58
3.3.2	Berdasarkan Tujuan .....	59
3.3.3	Berdasarkan Waktu .....	59
3.3.4	Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.4	Populasi dan Sampel .....	60
3.5	Teknik Penarikan Sampel .....	62
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.7	Teknik Analisis Data .....	65
3.8	Keterbatasan Penelitian .....	67
<b>4.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN</b> .....	<b>69</b>
4.1.	Gambaran Umum SMA Negeri “X” Jakarta .....	69
4.1.1	Sejarah SMA Negeri “X” Jakarta .....	69
4.1.2	Letak Geografis SMA Negeri “X” Jakarta .....	70
4.1.3	Visi Misi SMA Negeri “X” Jakarta .....	71
4.1.4	Kondisi Umum Tenaga Pengajar dan Pengelola .....	73

4.1.5 Kondisi Umum Fasilitas.....	75
4.1.6 Kurikulum dan Kegiatan Kulikuler.....	76
4.1.6.a Kurikulum .....	76
4.1.6.b Kegiatan Kurikuler.....	76
4.2 Karakteristik Responden .....	78
4.2.1 Jumlah Jurusan Responden .....	79
4.2.2 Jenis Kelamin Responden .....	80
4.2.3 Umur/Usia Responden .....	80
4.2.4 Agama Responden .....	81
4.2.5 Media Informasi .....	82
4.2.6 Suku/Etnis Ayah Responden.....	83
4.2.7 Suku/Etnis Ibu Responden.....	84
4.2.8 Latar Belakang Suku/Etnis Responden.....	85
4.2.9 Pendidikan Orang Tua Responden.....	86
4.2.10 Pekerjaan Orang Tua Responden.....	87
4.2.11 Penghasilan Orang Tua Responden.....	88
<b>5. PEMBAHASAN .....</b>	<b>89</b>
5.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	89
5.1.1 Gambaran Variabel Dependen Penelitian.....	90
5.1.1.a Dimensi Pengetahuan.....	92
5.1.1.b Dimensi Sikap.....	97
5.1.1.c Dimensi Tindakan Nyata .....	102
5.1.2 Gambaran Variabel Independen Penelitian.....	108
5.2.1.a Dimensi <i>Generalization</i> .....	111
5.2.1.b Dimensi <i>Modelling</i> .....	116
5.2.1.c Dimensi <i>Reward-Punishment</i> .....	121
5.2 Perbedaan Perilaku Demokratis Siswa IPA dan IPS.....	128
5.3 Analisis Hubungan Antar-Variabel Penelitian.....	129
5.3.1 Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa .....	130
5.3.2 Hubungan antara mekanisme <i>Generalization</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa .....	138
5.3.3 Hubungan antara mekanisme <i>Modelling</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa .....	141
5.3.4 Hubungan antara mekanisme <i>Reward-Punishment</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa .....	144
5.3.5 Perbandingan pengaruh hubungan antara mekanisme Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa .....	148
<b>6. PENUTUP .....</b>	<b>151</b>
6.1 Kesimpulan.....	151
6.2 Rekomendasi .....	154
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendidikan Penduduk Indonesia .....	7
Tabel 1.2 Distribusi Isu Konflik dan Kekerasan 2009-2010 .....	10
Tabel 1.3 Wilayah Distribusi Konflik dan Kekerasan 2009-2010.....	11
Tabel 1.4 Kasus Pengeroyokan Massa 2005-2009 .....	11
Tabel 3.1 Jumlah Siswa SMA Negeri “X” Jakarta .....	61
Tabel 3.2 Distribusi Siswa Kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta .....	64
Tabel 4.1 Struktur SMA Negeri “X” Jakarta .....	74
Tabel 5.1 Pernyataan Terkait Dimensi Pengetahuan .....	96
Tabel 5.2 Pernyataan Terkait Dimensi Sikap .....	101
Tabel 5.3 Pernyataan Terkait Dimensi Tindakan Nyata.....	105
Tabel 5.4 Persentase Dimensi Perilaku Demokratis Siswa .....	107
Tabel 5.5 Pernyataan Terkait Dimensi <i>Generalization</i> .....	115
Tabel 5.6 Pernyataan Terkait Dimensi <i>Modelling</i> .....	119
Tabel 5.7 Pernyataan Terkait Dimensi <i>Reward and Punishment</i> .....	125
Tabel 5.8 Persentase Dimensi Kurikulum Terselubung .....	127
Tabel 5.9 Perbandingan Persentase Perilaku Demokratis Siswa jurusan IPA dan IPS.....	128
Tabel 5.10 Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	131
Tabel 5.11 Uji Somers’d Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	132
Tabel 5.12 Hubungan antara Mekanisme Generalisasi terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	138
Tabel 5.13 Uji Somers’d Hubungan antara Mekanisme Generalisasi terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	139
Tabel 5.14 Hubungan antara Mekanisme <i>Modelling</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	141
Tabel 5.15 Uji Somers’d Hubungan antara Mekanisme <i>Modelling</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	142
Tabel 5.16 Hubungan antara Mekanisme <i>Reward-Punishment</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	145
Tabel 5.17 Uji Somers’d Hubungan antara Mekanisme <i>Reward-Punishment</i> terhadap Perilaku Demokratis Siswa.....	145
Tabel 5.18 Perbandingan Pengaruh Pada Dimensi Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa .....	148
Tabel 5.19 Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa.....	149

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jurusan Responden: IPA/IPS .....	79
Grafik 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	80
Grafik 4.3 Umur/Usia Responden.....	80
Grafik 4.4 Agama Responden.....	81
Grafik 4.5 Media Informasi .....	82
Grafik 4.6 Suku/Etnis Ayah Responden .....	83
Grafik 4.7 Suku/Etnis Ibu Responden.....	84
Grafik 4.8 Latar Belakang Suku/Etnis Responden .....	85
Grafik 4.9 Pendidikan Terakhir Orang Tua Responden .....	86
Grafik 4.10 Jenis Pekerjaan Orang Tua Responden .....	87
Grafik 4.11 Penghasilan Orang Tua Responden.....	88
Grafik 5.1 Perilaku Demokratis Siswa.....	92
Grafik 5.2 Perilaku Dimensi Pengetahuan .....	94
Grafik 5.3 Perilaku Dimensi Sikap .....	99
Grafik 5.4 Perilaku Dimensi Tindakan Nyata.....	104
Grafik 5.5 Kurikulum Terselubung.....	110
Grafik 5.6 Kurikulum Terselubung Dimensi <i>Generalization</i> .....	112
Grafik 5.7 Kurikulum Terselubung Dimensi <i>Modelling</i> .....	118
Grafik 5.8 Kurikulum Terselubung Dimensi <i>Reward and Punishment</i> .....	122
Grafik 5.9 Bentuk <i>Reward</i> .....	124
Grafik 5.10 Bentuk <i>Punishment</i> .....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 SMA Negeri “X” Jakarta .....	69
Gambar 4.2 Pintu Gerbang SMA Negeri “X” Jakarta .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran .....	163
-------------------------	-----



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu konsep yang sangat luas dalam proses pemahamannya. Weber (dalam Sowarsono dan Alvin, 2006: 66) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan seperangkat rintangan panjang yang melintang sejak dari garis permulaan (masyarakat tradisional) sampai garis terakhir (masyarakat modern). Dalam konteks ini, garis terakhir yang dimaksud Weber yakni kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain pembangunan merupakan upaya sengaja untuk mentransformasikan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu pembangunan merupakan hal yang pasti dilakukan oleh setiap negara. Seperti pembangunan di Indonesia, yang kita kenal dengan konsepsi *pembangunan nasional* ([http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/195207251978031%20ACE%20SURYADI/Risalah\\_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/195207251978031%20ACE%20SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf)).

Pembangunan pada umumnya, dan pembangunan nasional pada khususnya, setidaknya terdiri dari beberapa bidang, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial-budaya (<http://old.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=viewcat&ceid=-2&catid=4>). Capaian atas pembangunan nasional dari masing-masing bidang tersebut tentu dapat dirasakan oleh kita semua. Proses restrukturisasi partai politik dengan sistem multipartai, tidak adanya satu lembaga konstitusional yang terlalu dominan, berjalannya mekanisme “*checks and balances*”, dan tumbuh suburnya ornop/LSM/NGO’s merupakan bukti nyata dari keberhasilan pembangunan nasional di bidang politik. Di sisi lain, memang selama ini pembangunan nasional tampak begitu memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Ini terlihat di mana struktur ekonomi berubah dari yang semula didominasi oleh pertanian tradisional beralih ke arah kegiatan ekonomi yang lebih modern dengan penggerak utama pada sektor industri. Meskipun demikian pembangunan di bidang sosial-budaya juga terus dilakukan oleh

pemerintah. Salah satu aspek yang selalu diperhatikan dalam bidang sosial-budaya ini yaitu menjaga stabilitas sosial dengan cara mendorong masyarakat untuk menciptakan interaksi yang positif, dialogis, dan harmonis.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa suksesnya pembangunan nasional di berbagai bidang tersebut di atas tidaklah terlepas dari peran warga negaranya. Dalam artian tingkat pendidikan warganya (kualitas sumber daya manusia). Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas sumber daya manusia dalam sebuah negara merupakan modal utama bagi berjalannya roda pembangunan. Oleh karenanya berkaitan dengan tingkat pendidikan warganya, bisa dimengerti bahwasanya sektor pendidikan adalah hal yang inheren dalam proses pembangunan di setiap negara. Pada titik inilah sektor pendidikan hendaknya memberdayakan lembaga-lembaga dan tenaga kependidikan yang mutakhir sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman guna menopang pembangunan itu sendiri. Dan suatu keniscayaan bahwa pada Abad 21 ini, pascareformasi di mana adanya semangat demokratisasi yang semakin menguat di berbagai sektor, maka mendayagunakan sektor pendidikan yang bertumpu pada kerangka *demokrasi*<sup>1</sup> perlu dikedepankan (<http://www.ispi.or.id/2010/08/12/arah-kebijakan-pembangunan-pendidikan-di-indonesia/>). Dalam hal ini melalui kerangka demokrasi, sektor pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dan dirinya.

Pengamat pendidikan dari *Education and Culture Society Fondation* di Jakarta, Baruna Wijayandaru, mengatakan bahwa penerapan demokrasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu kerangka yang dapat menyerap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi heterogenitas linguistik, budaya, agama, serta geografis. Hal ini tentu selaras dengan kondisi sosial di Indonesia yang majemuk, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku,

---

<sup>1</sup> Selama ini persepsi yang muncul adalah bahwa istilah demokrasi lebih diidentikkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Sehingga yang terjadi kemudian isu-isu mengenai demokrasi lebih berkembang pesat di kalangan politisi.

Peneliti sependapat dengan Anthony Giddens yang menjadikan demokrasi sebagai persoalan sosial, bukan lagi semata-mata persoalan politik, melainkan suatu tata sosial baru yang dibutuhkan dalam masyarakat saat ini.

ras, agama, dan keyakinan yang berbeda. Kita akui bahwa kemajemukan yang ada memang menjadi kekayaan tersendiri bagi negeri ini. Akan tetapi hal tersebut (kemajemukan) jika tidak dikelola dengan baik maka memiliki kecenderungan akan mendatangkan persoalan. Menurut Mega Hidayati (dalam skripsi Syarifah Nuraini, 2009: 5) persoalan tersebut antara lain ialah: **pertama**, timbulnya prasangka-prasangka tertentu mengenai budaya dan agama berbeda; **kedua**, timbulnya kesalahpahaman, mulai dari tingkat kecil (contoh: antarkeluarga dengan budaya berbeda) maupun tingkat besar (melibatkan antarkelompok); serta yang **ketiga** ialah timbulnya konflik dan kekerasan, yang merupakan akumulasi dari persoalan pertama dan kedua. Dengan demikian demokrasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu kondisi tata nilai yang harus ditumbuhkembangkan pada masyarakat kita yang heterogen, sehingga kemudian dimungkinkan dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat. Meminjam pemikiran Anthony Giddens (dalam Tesis Rheinatus Alfonsus Beresaby, 2004: 127-130) bahwa demokrasi dengan nilai-nilainya, merupakan sistem yang perlu dipertahankan. Walaupun mendapat berbagai tantangan, ia terus mampu memperbaiki diri atau mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan masyarakat di setiap zamannya. Atau setidaknya menurut Dahl (2001) terdapat beberapa keuntungan bagi tatanan sosial yang menggunakan demokrasi sebagai berikut:

1. Menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.

6. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral.
7. Membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan.
8. Membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Adapun sebagai wujud keseriusan pemerintah pasca Orde Baru, penerapan kerangka demokrasi pada sektor pendidikan itu tampak dengan diimplementasikannya Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan *bahwa pendidikan nasional difungsikan sebagai pengembang kemampuan dan pembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.* (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas). Tentunya cukup beralasan bagi pemerintah ketika kemudian pendidikan nasional diarahkan agar mampu mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang demokratis, maka akan lahir tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kondisi demikian dimungkinkan, menurut Juan Linz (2000), jika memiliki tiga dimensi, yakni dimensi konstitusional dari negara (*state*), dimensi sikap, dan dimensi perilaku dari warga negaranya.

Berkenaan dengan hal di atas, peneliti kiranya sependapat dengan Anthony Giddens yang menjadikan demokrasi sebagai persoalan sosial, bukan lagi semata-mata persoalan politik, melainkan suatu tata sosial baru yang dibutuhkan dalam masyarakat saat ini. Sejalan dengan itu meskipun negeri ini telah memiliki dimensi konstitusional, tatanan sosial yang demokratis dewasa ini belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia. Karena selama ini persepsi

yang muncul adalah bahwa istilah demokrasi lebih diidentikkan kepada hal-hal yang bersifat politis. Sehingga yang terjadi kemudian isu-isu mengenai demokrasi tersebut lebih berkembang pesat di kalangan politisi. Pendek kata, demokrasi belum bisa menyentuh kepada sendi-sendi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri belum bisa menerapkan sikap dan perilaku demokratis dalam kehidupan berorganisasi atau bermasyarakat. Serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Diantara urgensi nilai-nilai demokrasi tersebut adalah (<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.uwsp.edu/education/lwilson/kencus's-area/transformasi-nilai-nilai-demokrasi-dalam-lembaga-dan-masyarakat.htm>):

1. kebebasan untuk berpendapat,
2. kebebasan untuk membuat kelompok,
3. partisipasi,
4. kesetaraan antar warga,
5. saling percaya,
6. kerjasama,
7. menghormati perbedaan.

Berangkat dari sinilah dibutuhkan adanya langkah-langkah intensif dan strategis guna menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Diantara langkah-langkah strategis tersebut adalah melalui sektor pendidikan. Karena menurut Muchtar Bukhori (2002) salah satu acuan ideologis pendidikan selain mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban atau mendukung diseminasi nilai keunggulan adalah mengembangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan keagamaan. Sementara menurut John Dewey (seorang filosof pendidikan) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi (<http://luznadamai.wordpress.com/2010/03/13/john-dewey-dan-demokrasi/>). Pendidikan dan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat semakin baik dalam memahami nilai-nilai demokrasi, maka akan semakin memberikan partisipasi positif terhadap negara dari segala aspek (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007).

Dewasa ini memang pendidikan dan demokrasi kurang begitu mendapatkan “ruang penghubung”. Padahal jika kita lihat substansi pendidikan itu sendiri menurut UNESCO (dalam skripsi Dwi Andini, 2004: 3-5), dalam konferensi tahunan di Melbourne tahun 1998 tentang serangkaian prinsip yang akan mendasari masyarakat belajar di Abad 21, haruslah mengandung empat unsur sebagai berikut:

1. Belajar untuk tahu (*learning to know*), untuk membentuk masyarakat belajar yang efektif di masa mendatang, diperlukan pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu diketahui, bagaimana mendapatkan dan pengetahuan itu dan siapa yang akan menggunakan pengetahuan tersebut. Unsur ini menandakan bahwa pendidikan, relevansinya dengan penelitian ini, dapat membuat masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai adanya keanekaragaman/perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan.
2. Belajar untuk berbuat (*learning to do*). Belajar tidak hanya sekedar proses pematangan pengetahuan dan pemahaman akan sesuatu (konsep/teori), tetapi juga belajar akan mengarahkan seorang individu untuk dapat melakukan sesuatu secara tepat dalam kondisi tertentu. Unsur pendidikan ini menuntut masyarakat untuk dapat memiliki perilaku yang sesuai dengan kondisi sosial negeri ini. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka perilaku yang memuat nilai-nilai demokrasi sangatlah relevan dengan kondisi masyarakat kita yang heterogen.
3. Belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*). Artinya bahwa dalam konteks kehidupan bersama seperti di Indonesia maka unsur pendidikan ini menjadi sangat penting. Dengan pendidikan, terkait penelitian ini, maka individu dapat belajar untuk hidup bersama dengan individu ataupun masyarakat lainnya yang memiliki identitas berbeda, yang pada dasarnya memiliki hak-hak asasi yang sama, ada kesetaraan.
4. Belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*). Setiap manusia secara sadar belajar bagaimana untuk hidup sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki pertimbangan dan tanggung jawab pribadi, sosial, dan moral. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendidikan dapat dipahami sebagai cara individu untuk menjadi diri sendiri, dengan identitas yang

mereka punya tetap dapat memiliki tanggungjawab, yang bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk lingkungan sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti meyakini akan besarnya harapan dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui sektor pendidikan. Nilai-nilai demokrasi yang terinternalisasi pada diri peserta didik akan memberi dampak dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat kita lihat secara statistik tentang pendidikan penduduk Indonesia dengan Indikator Terpilih: Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=28&notab=34](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=34)):

**Tabel 1.1**  
**Pendidikan Penduduk Indonesia**

<b>Indikator Terpilih: Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan</b>	<b>Tahun 2005</b>	<b>Tahun 2006</b>	<b>Tahun 2007</b>
SD (Sekolah Dasar)	32.34 %	31.67 %	31.19 %
SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	17.06 %	17.56 %	17.49 %
SMA (Sekolah Menengah Atas)	21.32 %	22.56 %	23.37 %

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah oleh peneliti)*

Data diatas menunjukkan bahwa hampir semua generasi saat ini pernah menyentuh sektor pendidikan (SD, SLTP, SMA). Pada sekolah tingkat atas terjadi peningkatan  $\pm 1\%$  dari tahun ke tahun. Itu artinya bahwa mengenyam pendidikan tingkat atas sudah cukup disadari oleh sebagian masyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka patut untuk digarisbawahi bahwa secara sosiologis, melalui pendidikan seorang individu tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai serta aturan-aturan yang harus ia pahami agar nantinya ia bisa menempatkan diri di dalam masyarakat. Dengan demikian apabila sektor pendidikan tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah, dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi, maka akan membuahkan hasil yang signifikan dalam membentuk perilaku warga negara yang demokratis. Lantas hal ini akan bermuara pada “budaya demokrasi” yang kokoh di tengah masyarakat.

Dalam kerangka itulah, keberadaan institusi pendidikan (sekolah), peran dan fungsinya guna internalisasi nilai-nilai demokrasi, menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagaimana menurut Dreeben, pada era sekarang ini proses sosialisasi banyak terjadi di institusi (sekolah) ketimbang di institusi (keluarga), sebagai agen sosialisasi yang besar pengaruhnya terhadap seorang individu (siswa). Hal senada juga diungkapkan oleh Emile Durkheim yang mengatakan bahwa di dalam sekolah tiap-tiap individu belajar bekerjasama dan berinteraksi satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat menurut aturan-aturan tertentu. Sangatlah jelas bahwa Durkheim melihat fungsi pendidikan (sekolah) ialah untuk mentransmisikan nilai dan norma ke dalam diri individu (Haralambos and Holoborn, 2004). Karena disadari ataupun tidak disadari, sekolah merupakan miniatur dari masyarakat atau sebuah model dari sistem sosial (Paul Vedder, 1974).

Dalam menjalankan fungsinya pendidikan tersebut di atas, institusi pendidikan (sekolah) dapat menggunakan berbagai cara. Misalnya melalui kurikulum formal, yakni segala bentuk instrumen pendidikan yang terdapat dalam pelajaran-pelajaran formal, dimulai dari buku cetak, tugas dan evaluasi pengajaran. Di Indonesia kurikulum pendidikan sudah beberapa kali mengalami reformasi kurikulum yaitu dari kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004 dan KTSP 2006 hingga sekarang. Perlu digarisbawahi bahwa dalam membentuk perilaku seseorang tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pelajaran-pelajaran formal saja, diperlukan adanya perbuatan nyata, yang jika dalam lingkup sekolah bisa dicontoh melalui segala bentuk interaksi antara aktor-aktor di sekolah. Hal inilah yang dinamakan dengan kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) yang terdapat di sekolah, yaitu kurikulum yang di dalamnya diajarkan mengenai norma dan juga nilai yang ditransmisikan melalui aturan, rutinitas, tampilan kelas, dan lain sebagainya (Lawson, Jones & Moores, 2000: 64). Maka dari itu, selain dengan kurikulum formal, sekolah juga memiliki cara untuk menanamkan nilai dan pengetahuan dengan pengajaran tidak langsung, yakni melalui kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Tidak ada suatu definisi yang pasti mengenai *hidden curriculum* namun keberadaannya dapat dilihat pada tiga dimensi, yaitu: 1) interaksi guru–murid, struktur ruang kelas, dan struktur

interaksi di dalam sekolah; 2) proses yang terjadi di dalam atau melalui sekolah, termasuk pola penanaman nilai dan; 3) *degrees of intentionality* dalam kejadian yang tidak disengaja terjadi di dalam pembelajaran, sebagai hasil dari proses belajar mengajar di sekolah (Henry Giroux). *Hidden curriculum* ini tidak tercetak dalam buku pelajaran tetapi lebih merupakan suatu pembelajaran alami yang terjadi dalam proses pendidikan, yang misalnya terlihat di dalam interaksi seorang pendidik--peserta didik, antara sesama peserta didik maupun kegiatan anak di luar pelajaran resmi. Yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan yang umumnya bisa diselenggarakan di sekolah, seperti ibadah berjamaah, peringatan hari nasional, dan lain sebagainya.

## 1.2 Permasalahan

Sudah cukup lama penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan, yang mana bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis<sup>2</sup>. Namun demikian ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hampir semua elemen masyarakat Indonesia mempersoalkan arah pendidikan nasional saat ini. Hal tersebut tentunya cukup beralasan. Indikasinya nampak jelas bahwa dewasa ini masih banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang, yang seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat. Misalnya terjadi aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau bahkan kematian, kebebasan pers yang berujung pada pertikaian, lebih ironis lagi dengan makin maraknya perkelahian antar-mahasiswa, praktek *bullying*, tawuran pelajar yang mengarah kepada destruktivisme dan barbaritas di tengah kemajemukan yang hidup di negeri ini. Berikut data mengenai distribusi isu konflik dan kekerasan sepanjang tahun 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2010.

---

<sup>2</sup> Mengingat UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah. Begitu juga dalam HandOuts Kuliah Sosiologi Politik oleh Iwan Gardono Sudjatmiko mengatakan bahwa negara Indonesia sejak tahun 1998-2004 termasuk ke dalam negara yang semi-demokratis. Sedangkan tahun 2005-2009 dikategorikan sebagai negara yang demokratis.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Isu Konflik dan Kekerasan 2009-2010**

Isu	Tahun 2009	Semester I tahun 2010
	Jumlah	Jumlah
Agama	6	10
Etniks	5	15
Politik	74	117
Antar-aparat	5	4
Sumber daya alam	54	74
Ekonomi	30	59
Tawuran	182	231
Penghakiman massa	158	171
Pengeroyokan	53	40
Lain-lain	33	31
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>752</b>

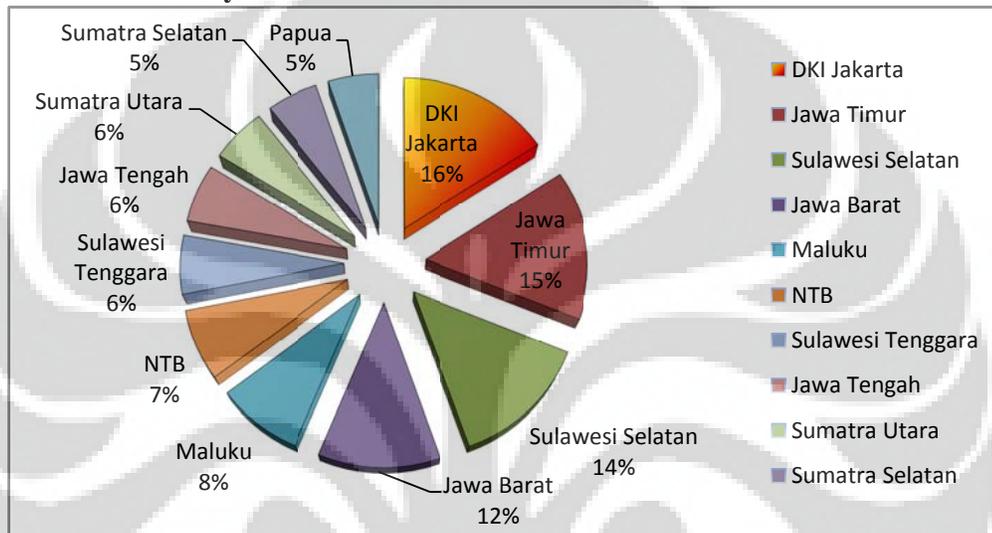
*Sumber: Harian Republika, Kamis 3 Maret 2011 (diolah oleh peneliti)*

Melihat tabel di atas maka secara sepintas kita dapat mengatakan bahwa tren kekerasan di Indonesia terus meningkat. Ini cukup beralasan, dari data yang dirangkum Institut Titian Perdamaian, Yogyakarta, pada tahun 2008 rata-rata terjadi 1,5 kekerasan per hari. Jumlah ini meningkat menjadi 4 kasus per hari pada tahun 2010. Jika media massa dan media sosial ingar-bingar memberitakan konflik berbau agama, ternyata data dari institut itu memberikan fakta yang berbeda. Dari 600 kasus kekerasan pada tahun 2009 ternyata hanya 6 kasus yang berbau agama. Sementara hingga semester pertama di tahun 2010 kekerasan berbau agama pun hanya 10 kasus dari 752 peristiwa yang terdata.

Patut kita cermati secara seksama bahwa data diatas memperlihatkan adanya tren peningkatan kekerasan -terbesar- bertumpu pada tawuran dan penghakiman massa yang mana di dalamnya melibatkan kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari 600 kasus kekerasan pada tahun 2009 ternyata terdapat 182 kasus tawuran dan 158 kasus penghakiman massa. Kedua kasus kekerasan tersebut mengalami peningkatan yakni hingga semester pertama di tahun 2010 dari 752 peristiwa yang terdata, tercatat 231 kasus tawuran dan 171 kasus penghakiman massa. Kedua kasus tersebut tentu menjadi tamparan bagi penyelenggaraan pendidikan di negeri ini.

Selain itu penyebaran konflik juga terjadi cukup merata. Meskipun demikian terdapat tiga lokasi yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan penyelenggaraan pendidikan, masih menjadi lokasi terbanyak (16%) kasus kekerasan horizontal. Kemudian disusul oleh Jawa Timur (15%) dan Sulawesi Selatan (14%). Di bawah ini peneliti sajikan wilayah distribusi konflik dan kekerasan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

**Tabel 1.3**  
**Wilayah Distribusi Konflik dan Kekerasan 2009-2010**



*Sumber: Harian Republika, Kamis 3 Maret 2011*

Untuk memperjelas diagram di atas maka peneliti juga menyajikan data mengenai konflik dan kekerasan, tepatnya kasus pengeroyokan massa (termasuk di dalamnya terdapat unsur tawuran pelajar) di wilayah DKI Jakarta. Berikut tabel kasus pengeroyokan massa sepanjang tahun 2005-2009:

**Tabel 1.4**  
**Kasus Pengeroyokan Massa 2005-2009**  
**(termasuk di dalamnya terdapat unsur tawuran pelajar)**

NO	KESATUAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Polres Metro Jakarta Pusat	283	262	201	52	13
2	Polres Metro Jakarta Utara	0	0	0	9	8
3	Polres Metro Jakarta Barat	354	359	372	365	264
4	Polres Metro Jakarta Selatan	101	77	82	55	36
5	Polres Metro Jakarta Timur	0	96	244	198	5
6	Polresta Tangerang	376	393	264	93	3

7	Polres Pelabuhan	0	0	0	0	0
8	Polresta Bekasi	0	1	12	3	0
9	Polresta Depok	97	169	170	20	5
10	Polres Bandara Soekarno-Hatta	0	0	0	5	7
11	Polresta Tangerang Kabupaten	26	0	0	0	0
12	Polresta Bekasi Kabupaten	0	1	98	6	82
13	Polres Kepulauan Seribu	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1237</b>	<b>1358</b>	<b>1443</b>	<b>806</b>	<b>423</b>

*Sumber: DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA, 06 April 2011*

Dua tabel di atas (Tabel 1.3 dan 1.4) memperlihatkan bahwa kasus pengeroyokan massa dimana termasuk di dalamnya terdapat unsur tawuran antar-pelajar menjadi potret buram sistem pendidikan nasional. Terlebih yang tertinggi terjadi di DKI Jakarta (16%), sebagai ibukota, pusat penyelenggaraan pendidikan. Meskipun secara khusus polda metro jaya menyatakan telah terjadi penurunan angka pengeroyokan massa, pihaknya mengakui masih sering terjadi pengeroyokan massa yang di dalamnya terdapat unsur pelajar. Tentunya ini menjadi suatu ironi dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang menghendaki lahirnya warga negara yang demokratis. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pendidikan mengajarkan hal-hal demikian (kekerasan)? Benarkah hal-hal demikian itu (kekerasan) yang dimaksud merupakan arti dari “kebebasan”? Ataukah memang sitem pendidikan nasional, yang menghendaki lahirnya warga negara yang demokratis, justru yang terjadi mengikisnya rasa kemanusiaan dari bangsa ini?

Seperti yang kita ketahui, reformasi di negeri ini sudah berjalan lebih dari satu dasa warsa. Tentunya termasuk di dalamnya reformasi di dunia pendidikan. Jika kita menilik kembali pada sejarah mengenai tujuan pendidikan pada awal pendirian republik ini maka sangatlah jelas dengan tegas menyatakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah, Bab II, Pasal 3). Sejarah panjang Pendidikan Indonesia mencatat bahwa rumusan tujuan tersebut merupakan pengejawantahan dari keseluruhan isi, jiwa, dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu nilai-nilai

dasar sekaligus prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, ialah memberi pembinaan kepada peserta didik agar menjadi manusia susila yang cakap, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Maka nilai-nilai dasar dan prinsip itu kemudian dikukuhkan sebagai “dasar, fungsi, dan tujuan” dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peneliti menyadari bahwa kehidupan masyarakat demokratis yang beradab tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan proses. Untuk mewujudkannya, diperlukan berbagai macam pendekatan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku demokratis sesungguhnya. Salah satu pendekatan sosiologis yang perlu dilakukan adalah melalui internalisasi di lembaga pendidikan formal. Terkait dengan hal ini, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat “*ing madya mangun karsa*” yang intinya berporos pada proses pembelajaran dan pemberdayaan. Dalam artian, di sekolah, hendaknya guru senantiasa membangkitkan semangat bereksplorasi, berkreasi, dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia robot yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, sekolah akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi guru dan siswa bukanlah sebagai subjek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jatidiri, dan kepribadian. Singkatnya, sekolah merupakan “forum” yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Mengacu pada hal di atas, menjadi menarik untuk dikaji yaitu sejauh mana generasi saat ini khususnya pelajar (siswa) dalam memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Seperti yang sudah peneliti tekankan diawal bahwa membentuk perilaku seseorang (siswa) tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pelajaran-pelajaran formal saja, diperlukan adanya perbuatan nyata, yang jika dalam lingkup sekolah bisa dicontoh melalui segala bentuk interaksi antara aktor-aktor di sekolah. Dalam konteks ini, peneliti meyakini bahwa langkah yang dianggap paling efektif dalam menginternalisasikan nilai-

nilai demokrasi adalah melalui kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Keyakinan tersebut berdasar atas, peneliti melihat dua pengkajian yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP UI di mana kajian pertama dilakukan di tahun 1987 oleh Seda dan kajian kedua oleh Adnan pada tahun 1992 menemukan bukti empirik bahwa kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk perilaku siswa. Meskipun dari hasil dari dua kajian ini, perilaku yang dimaksud adalah perilaku modernitas. Diakui bahwa masih jarang atau bahkan belum ada pengkajian mengenai peran kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dalam membentuk perilaku demokratis siswa. Justru inilah yang menjadi tantangan dan ketertarikan bagi peneliti, serta menjadi keunikan dari penelitian ini.

Tentunya semua sekolah memiliki kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) masing-masing. Untuk keperluan penelitian ini maka peneliti memilih **SMA Negeri “X” Jakarta** yang mana sekolah tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (dilihat dari visi-misi-tujuan sekolah serta cukup beragam secara agama, etnis, suku; status sosial-ekonomi: menengah, dan proporsi dari jumlah siswa-siswinya). Dengan pertimbangan bahwa secara prinsipil SMA (sekolah menengah atas) akan sedikit banyak menuntut individu (siswa) untuk memiliki pemahaman lebih yang terkait langsung dengan kehidupan sosial-kemasyarakatan, berbeda dengan siswa SMK (sekolah menengah kejuruan) yang memang lebih dipersiapkan untuk dunia kerja. Alasan lain, kenapa peneliti memilih sekolah negeri adalah bahwa karena sekolah negeri berada dalam naungan dan pengawasan langsung pemerintah, itu berarti, secara luas, kurikulum dalam sekolah negeri mencerminkan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Lain halnya dengan sekolah swasta, yang tentunya cukup leluasa dalam hal otonomisasi sekolah. DKI Jakarta masih menjadi lokasi terbanyak terjadinya kasus kekerasan, termasuk di dalamnya terdapat unsur tawuran pelajar. Selain itu, kota Jakarta merupakan kota pusat pemerintahan, juga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan nasional, oleh karenanya peneliti beranggapan bahwa sekolah-sekolah di Jakarta akan lebih bisa secara cepat “menyerap” hal-hal yang berkenaan dengan demokratisasi.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dalam pembentukan perilaku demokratis siswa. Adapun permasalahan yang peneliti rumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) mengenai nilai-nilai demokrasi terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa?
2. Identifikasi, secara sosiologis, faktor-faktor apa saja (di luar kurikulum terselubung) yang turut andil terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri “X” Jakarta yang bertujuan untuk melihat dan menjelaskan secara eksplanatif:

1. hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa,
2. identifikasi, secara sosiologis, faktor-faktor apa saja (di luar kurikulum terselubung) yang turut andil terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

**Secara akademis** penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan data empirik bagi perkembangan ilmu sosiologi, terutama sosiologi pendidikan dan sosiologi politik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumbangan wacana dan dapat dijadikan referensi penelitian dan berbagai karya akademis lainnya yang terkait.

**Secara praktis** penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait (*stakeholders*) pengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan; pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak SMA Negeri “X” Jakarta itu sendiri, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah strategis.

### 1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

- a) Penelitian ini fokus pada SMA Negeri “X” Jakarta yang mana sekolah tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (dilihat dari visi-misi-tujuan sekolah). Alasan lain, kenapa peneliti memilih sekolah negeri adalah bahwa karena sekolah negeri berada dalam naungan dan pengawasan langsung pemerintah, itu berarti, secara luas, kurikulum dalam sekolah negeri mencerminkan tujuan dari sistem pendidikan nasional. DKI Jakarta masih menjadi lokasi terbanyak terjadinya kasus kekerasan, termasuk di dalamnya terdapat unsur tawuran pelajar.
- b) Penelitian ini hanya melihat siswa kelas XII dimana sudah lebih banyak mengetahui dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah, memiliki pola pikir dan pengetahuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang kelas dibawahnya. Kelas XII telah menerima sosialisasi sekolah yang lebih lama dibandingkan kelas yang lebih rendah, baik itu secara formal maupun terselubung, lebih jauh lagi, kegiatan kurikuler (baik intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler) telah lebih dipahami oleh para siswa tingkat akhir dibanding dengan kelas X dan XI.
- c) Penelitian ini lebih memfokuskan pada variabel kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) sebagai variabel independen dan perilaku demokratis siswa sebagai variabel dependen. Tidak melihat adanya variabel lain (variabel kontrol) karena langkah yang dianggap paling efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai adalah melalui kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Keyakinan tersebut berdasar atas, beberapa pengkajian yang dilakukan di mana kajian pertama dilakukan di tahun 1987 oleh Seda, kajian kedua oleh Adnan pada tahun 1992 dan kajian ketiga oleh Saragih di tahun 2001, menemukan bukti empirik bahwa kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk perilaku siswa. Temuan ini juga diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2009 yang

menjelaskan bahwa institusi sekolah memiliki peran yang signifikan dalam penanaman nilai-nilai serta membentuk perilaku siswa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **BAB 1 Pendahuluan**

Pada bagian ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan pijakan untuk mengembangkan penelitian pada bab-bab berikutnya.

- **BAB 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi mengenai studi literatur, kerangka pemikiran yang memuat teori atau konsep-konsep yang menjadi landasan bagi penelitian ini, skema alur berfikir, asumsi penelitian, dan hipotesis penelitian. Pada bab ini juga digambarkan model analisis variabel penelitian dan dijabarkan/identifikasi definisi dari variabel independen dan variabel dependen yang akan menjadi acuan pada operasionalisasi konsep.

- **BAB 3 Metode Penelitian**

Menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan dan pengukuran data, teknik analisis data, dan keterbatasan penelitian.

- **BAB 4 Deskripsi Lokasi Penelitian dan Karakteristik Responden**

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan mengenai tempat/lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga akan mendeskripsikan mengenai karakteristik responden dan informan dari penelitian ini.

- **BAB 5 Pembahasan**

Bab ini menjabarkan hasil pengolahan data secara statistik, lalu diinterpretasikan untuk menguji hipotesis penelitian, secara kuantitatif maupun kualitatif.

- **BAB 6 Penutup**

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi. Pada dasarnya bagian ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Fokus utama dari bagian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini menegaskan kembali temuan studi yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan beberapa kepustakaan berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Di dalam tinjauan pustaka ini, akan dijabarkan tujuh penelitian (tiga tesis dan empat skripsi) yang mana sedikit banyak memiliki keterkaitan, baik dalam segi kajian yang dibahas, maupun dalam penggunaan konsepnya.

**2.1.1** Tesis dengan judul “*Pembentukan Modernitas Individu Melalui Kurikulum Terselubung (Studi Komparatif di Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pendidikan Formal)*” yang ditulis oleh Albina Rosalina Saragih. Tesis yang diajukan untuk memperoleh gelar M.Si dalam bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan dari FISIP UI tahun 2001 (<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=72269>).

Sebagai rujukan pertama adalah penelitian (tesis) yang ditulis oleh Albina Rosalina Saragih dengan judul “*Pembentukan Modernitas Individu Melalui Kurikulum Terselubung (Studi Komparatif di Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pendidikan Formal)*”. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara kurikulum terselubung dengan modernitas individu di lembaga pendidikan nonformal dan lembaga pendidikan formal serta perbedaan kemampuan/efektivitas kedua lembaga pendidikan tersebut dalam menanamkan modernitas bagi pesertanya. Adapun yang menjadi alasan dari Saragih mengkaji topik di atas adalah mengingat nilai modernitas masih dan tetap dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat bertahan di era industrialisasi dan globalisasi ini.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan noneksperimen yang berbentuk korelasi dan komparasi. Pengumpulan datanya melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu peserta pelatihan program setara D1

kejuruan Elektronika di BLKI Pasar Rebo dan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Kejuruan Elektronika Semester 2. Teknik samplingnya adalah sampel jenuh dengan jumlah responden 36 orang peserta pelatihan dan 80 orang mahasiswa. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) adakah hubungan kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal?; (2) adakah hubungan kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal?; (3) apakah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal pada periode waktu belajar yang sama?.

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan antara kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal, dimana skor  $r = 0,165$ , dan  $r^2 = 0,027$ . Dari hasil uji t persamaan regresi  $Y = 158,736 + 0,275X$  didapatkan hasil bahwa koefisien konstanta 158,736 sangat signifikan sedangkan koefisien  $b = 0,275$  tidak signifikan. Selanjutnya, dari uji F didapatkan hasil bahwa persamaan regresi di atas tidak signifikan pada  $\alpha = 0,05$ .

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa ada hubungan antara kurikulum terselubung dengan tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan formal meskipun kekuatan hubungan tersebut cenderung rendah, dimana  $r = 0,263$  signifikan pada  $\alpha = 0,05$  sedangkan  $r^2 = 0,069$ . Dari hasil uji t persamaan regresi  $Y = 150,073 + 0,377X$  didapatkan hasil bahwa koefisien konstanta 150,073 sangat signifikan sedangkan koefisien  $b = 0,377$  signifikan pada  $\alpha = 0,019$ . Dari uji F didapatkan hasil bahwa persamaan regresi di atas signifikan pada  $\alpha = 0,019$ .

Hasil uji Z menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat modernitas individu di lembaga pendidikan non-formal dengan di lembaga pendidikan formal pada waktu belajar yang sama (2 semester). Perhitungan statistik memperlihatkan hasil  $Z_o = 0,1038$  dan  $Z$  tabel = 1,96 pada  $\alpha = 0,05$  maka  $Z_o$  berada di daerah penerimaan  $H_o$ . Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada lembaga pendidikan formal ditemukan bahwa dimensi kurikulum terselubung: sikap guru yang tidak diskriminatif memiliki hubungan

yang signifikan dengan dimensi modernitas: keterbukaan dan kesediaan untuk menerima perubahan sosial; selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler berhubungan dengan aspirasi pekerjaan.

**2.1.2** Tesis berjudul “*Memahami Proses Demokrasi Pendidikan Melalui Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Etnografi Ruang Kelas di SDN Kranji X Bekasi*”. Ditulis oleh Zulifma Nathalia. Tesis yang diajukan untuk memperoleh gelar M.Si dalam bidang Sosiologi (Manajemen Pembangunan Sosial) FISIP UI Depok tahun 2006.

Rujukan kedua adalah tesis berjudul “*Memahami Proses Demokrasi Pendidikan Melalui Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Etnografi Ruang Kelas di SDN Kranji X Bekasi*” yang ditulis oleh Zulifma Nathalia. Tesis ini mencoba mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di sekolah dasar. Pelaksanaan KBK dilihat dalam kerangka pemikiran yaitu bagaimana nilai-nilai atau prinsip demokrasi yang terdapat dalam KBK diterapkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana prinsip kebebasan dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat, bertindak, dan menghargai perbedaan hadir di dalam proses pembelajaran yang tercermin dalam interaksi antara guru dengan murid, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan KBK tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif melalui etnografi di dalam ruang kelas, yaitu studi mengenai proses pendidikan yang terfokus pada interaksi antara guru dan murid di ruang kelas. Nathalia menjadikan teori interaksionisme simbolik sebagai *guide* untuk menjelaskan masalah yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kurikulum baru (KBK) telah memberi dampak pada cara guru mengajar dalam proses pembelajaran. Guru lebih menghargai pendapat siswa, memberikan pelajaran kepada siswa yang membuat siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya (praktik), dan terciptanya suasana belajar yang dialogis. Adapun pelaksanaan KBK dipengaruhi

oleh beberapa faktor, yakni peran guru, tersedia sarana dan prasarana penunjang KBK, serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Catatan penting yang bisa dipetik dari penelitian Nathalia ini adalah bahwa pelaksanaan kurikulum (KBK) berimplikasi pada dibangunnya proses pendidikan yang demokratis, di mana kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat ada di dalamnya. Membangun pendidikan yang demokratis berarti menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam proses pembelajaran.

**2.1.3** Tesis berjudul "*Praktek Demokrasi di Kota Depok (Studi tentang Demokratisasi di Tingkat Lokal)*". Ditulis oleh Wahidah Rumondang Bulan. Tesis yang diajukan untuk memperoleh gelar M.Si dalam bidang Sosiologi (Manajemen Pembangunan Sosial) FISIP UI Depok tahun 2003.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidah Rumondang Bulan adalah untuk mendapat gambaran tentang praktek demokrasi di tingkat lokal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menyusun rekomendasi bagi pengembangan demokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan praktek demokrasi hanya dapat digambarkan lebih baik dengan melakukan penelusuran dan menemukan jawaban terhadap motif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data dari sejumlah narasumber baik dilingkungan eksekutif (11 orang), legislatif (13 orang), lembaga kemasyarakatan (11 orang) dan media massa (5 orang). Peneliti juga melakukan pengamatan berperan serta dan analisis dokumen serta media massa selain menggulirkan kuesioner untuk mendapat informasi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek demokrasi di Kota Depok belum berjalan baik. Meski hak-hak masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, berpolitik, berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan beragama dijamin, namun terdapat sejumlah catatan berkenaan dengannya. Hak masyarakat untuk mencalonkan diri untuk dipilih dan memilih walikota Depok pada tahun 2000 relatif buruk karena diwarnai praktek politik uang, sedang hak masyarakat mendapat informasi pada kegiatan pemilihan walikota dan

penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2003 belum optimal karena rendahnya aktivitas sosialisasi dan belum efektifnya kegiatan sosialisasi.

Implikasi teoretik menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Kota Depok. Pertama, mengutip teori Carol C. Gould, karena masyarakat baru sebatas mendapat kebebasan negatif atau kebebasan menggunakan hak dan belum mendapat kebebasan positif atau kebebasan memperoleh daya dukung untuk menggunakan hak seperti tingkat pendidikan dan ekonomi yang memadai dan pengetahuan yang cukup tentang politik, demokrasi, ataupun tentang Depok. Kedua, berdasarkan teori Amitai Etzioni, masyarakat Depok tidak tergolong kepada kriteria masyarakat aktif, yaitu masyarakat yang dapat menggerakkan dirinya sendiri yang ditandai dengan tingginya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen baik dikalangan masyarakat maupun aktor pengambil keputusan. Sikap pasif masyarakat selain disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen; dari sudut perencanaan pembangunan sikap pasif juga disebabkan karena tidak jelasnya manfaat partisipasi bagi masyarakat. Seringnya program usulan masyarakat dianulir atau “hilang” ditengah jalan lantaran proses perencanaan pembangunan yang panjang dan tidak diberikannya penjelasan yang memadai mengenai mengapa sebuah program diterima dan program lain ditolak, menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk terus berpartisipasi.

Penelitian dari Wahidah Rumondang Bulan ini merekomendasikan: DPRD untuk meningkatkan intensitas komunikasinya dengan masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan dan komitmen moral anggota dengan membentuk majelis kehormatan. Pemkot direkomendasikan melakukan simplifikasi mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan, membentuk Dewan Kelurahan dan Dewan Kota menggantikan keberadaan LPM yang terlalu identik dengan LKMD, dan merevisi mekanisme komunikasi dengan masyarakat (menjadi lebih dialogis, intensif, dan mendalam). Kepada seluruh pihak terkait direkomendasikan untuk aktif melakukan *civic education* untuk peningkatan kesadaran politik masyarakat, sehingga mendorong penciptaan iklim yang demokratis di tingkat lokal.

**2.1.4** Skripsi yang berjudul “*Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus mengenai Sekolah sebagai Agen Sosialisasi)*” ditulis oleh Francisia S.S.E Seda. Skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar Dra. dalam program studi Sosiologi di FISIP UI Depok tahun 1987.

Penelitian yang dilakukan oleh Francisia S.S.E Seda ini menggunakan konsep modernitas individu sebagai variabel dependennya, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah kurikulum terselubung. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa kurikulum terselubung mempunyai pengaruh terhadap pembentukan modernitas individu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif, sedangkan dalam penarikan sampelnya digunakan teknik *random sampling* dengan teknik pengumpulan data survey dan wawancara. Penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan kurikulum terselubung mampu mempengaruhi pembentukan modernitas individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum terselubung sebagai agen sosialisasi itu mampu membentuk modernitas individu di sekolah. Hal ini secara langsung telah menunjukkan modernitas yang terbentuk di dalam individu merupakan hasil proses kurikulum terselubung sebagai pembentuk sikap dan perilaku siswa di sekolah. Dari penelitian ini patut untuk kita garisbawahi adalah bahwa kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk perilaku siswa.

**2.1.5** Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Kurikulum Terselubung terhadap Keberhasilan Siswa Sekolah Lanjutan Atas (Studi Kasus SMA Negeri 8 Jakarta)*” ditulis oleh Ricardi S. Adnan. Skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar Drs. dalam program studi Sosiologi di FISIP UI Depok tahun 1992.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ricardi S. Adnan menggunakan konsep keberhasilan siswa sebagai variabel dependennya, dan yang menjadi variabel independennya adalah kurikulum terselubung. Hampir sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Francisia S.S.E Seda, penelitian ini membuktikan bahwa kurikulum terselubung mempunyai pengaruh terhadap

keberhasilan siswa. Untuk penelitian ini, metode yang di gunakan adalah metode kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif, sedangkan dalam penarikan sampelnya digunakan teknik *cluster-proporsional*. Penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan kurikulum terselubung itu mampu mempengaruhi keberhasilan siswa. Dalam penelitian ini ditemukan faktor lainnya seperti sosialisasi keluarga sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari siswa sehingga dapat dilihat bahwa masih ada faktor lainnya yang mampu mempengaruhi keberhasilan siswa selain faktor pembentukan dari kurikulum terselubung di sekolah. Namun, kurikulum terselubung tetap menjadi faktor utama dalam penentuan keberhasilan siswa, kecenderungannya adalah bahwa penerapan kurikulum terselubung yang baik akan berdampak langsung pada keberhasilan siswa.

**2.1.6** Skripsi yang berjudul “*Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kegiatan OSIS di Sekolah (Studi pada SMPN 5 Kota Malang)*” ditulis oleh Zia Ulhak. Skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar S.Pd. dalam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2009 ([karya-ilmiah.um.ac.id](http://karya-ilmiah.um.ac.id)).

Pustaka lain yang dianggap mendekati penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zia Ulhak (2009). Skripsi yang berjudul “*Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kegiatan OSIS di Sekolah (Studi pada SMPN 5 Kota Malang)*” merupakan skripsi program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Penelitian yang melihat bahwa kehidupan sekolah merupakan jembatan atau transisi bagi anak dalam rangka penanaman nilai-nilai demokrasi dalam diri seorang anak. Hal ini dilakukan sekolah yang merupakan pengganti orang tua dalam mendidik seorang anak. Penanaman-penanaman nilai-nilai demokrasi ini bisanya dilakukan dengan mengajarkan kepada anak tentang nilai-nilai demokrasi misalnya melalui pembelajaran di kelas. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu seringkali dirasakan kurang.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang telah diajarkan maka sekolah memberikan sarana kepada siswa berupa organisasi-organisasi.

Organisasi ini bertujuan mengajarkan kepada siswa untuk lebih bersifat demokratis, bertanggung jawab, serta menghargai sehingga ini diharapkan dapat berguna sebagai bekal siswa yang nantinya akan terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari organisasi-organisasi yang ada tersebut OSIS merupakan salah satu organisasi yang dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi di sekolah, karena OSIS merupakan suatu organisasi yang berada dalam lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tata cara pemilihan ketua OSIS di SMPN 5 Malang, (2) Untuk mengetahui tata cara penetapan kepanitiaan dalam kegiatan OSIS di SMPN 5 Malang, (3) Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus OSIS di SMPN 5 Malang, (4) Untuk mengetahui keterlibatan OSIS dalam pengambilan kebijakan sekolah di SMPN 5 Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Subjek penelitiannya adalah pembina OSIS, Pengurus OSIS dan kepala sekolah SMPN 5 Malang. Adapun tahapan pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam pemilihan ketua OSIS adalah adanya persamaan hak, dimana para siswa diberikan kesempatan yang sama untuk memilih dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani masing-

masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu juga pemilihan ketua OSIS mengajarkan kepada para siswa

kebebasan untuk menyatakan pendapat, sekaligus mengajarkan kepada para siswa tentang cara berdemokrasi secara baik dan benar sejak dini, (2) nilai-nilai demokrasi dalam proses penetapan kepanitiaan dalam OSIS di SMPN 5 Malang dapat dilihat dari kegiatan musyawarah penetapan kepanitiaan. Adapun nilai-nilai demokrasinya

adalah musyawarah, menaati dan menjalankan hasil keputusan yang ditetapkan, bertanggung jawab, saling berkomunikasi dan bekerjasama saling bahu membahu di antara sesama pengurus OSIS, serta menghargai pendapat orang lain, (3) nilai-nilai demokrasi yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, tanggung jawab bersama atas hasil musyawarah, kerjasama antar pengurus OSIS, dan persamaan hak antara MPK dan pengurus OSIS, (4) nilai-nilai demokrasi yang diperoleh dari kegiatan pengambilan kebijakan sekolah di SMPN 5 Malang adalah musyawarah, partisipasi siswa dalam kebijakan sekolah, kerjasama antar warga sekolah (guru, siswa, dan staff sekolah), kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan persamaan hak (keikutsertaan siswa dalam kebijakan sekolah). Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diajukan yaitu: (1) Pihak sekolah seharusnya lebih banyak melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan dan proses pengambilan kebijakan sekolah termasuk juga didalamnya OSIS. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih banyak pengalaman terkait dengan pelaksanaan nilai demokrasi, dimana pengalaman ini nantinya berguna sebagai bekal para siswa yang akan terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang, (2) Terkait dengan proses pemilihan ketua OSIS diharapkan semua

sekolah dapat melaksanakan proses pemilihan ketua OSIS secara langsung dan demokratis yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh siswa. Hal tersebut

berguna sekali karena akan wawasan siswa terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi secara baik dan benar.

**2.1.7** Skripsi dari Syarifah Nuraini yang berjudul “*Hubungan Sosialisasi Sekolah dan Sosialisasi Keluarga dengan Perilaku Multikulturalis Siswa (Studi pada SMA Negeri 78 Jakarta)*”. Skripsi yang diajukan untuk memperoleh gelar S.Sos. dalam bidang Sosiologi, FISIP UI Depok tahun 2009.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nuraini, mahasiswa Sosiologi FISIP UI pada tahun 2009, dengan judul “*Hubungan Sosialisasi Sekolah dan Sosialisasi Keluarga dengan Perilaku Multikulturalis Siswa (Studi pada SMA Negeri 78 Jakarta)*”. Penelitian yang berangkat dari keprihatinan peneliti terhadap realitas (persoalan: prasangka, kesalahpahaman, dan bahkan konflik) di tengah masyarakat yang beragam secara suku, bahasa, ras, serta agama. Singkatnya, perilaku multikulturalisme menjadi penting. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba melihat dan menjelaskan bahwa institusi keluarga dan sekolah dirasa merupakan suatu media/agen yang strategis dalam rangka penanaman nilai-nilai multikulturalis dalam diri seorang anak. Adapun nilai-nilai multikulturalis yang diangkat oleh peneliti, yakni toleransi dan keadilan/kesetaraan. Hasil temuannya menyatakan adanya hubungan antara sosialisasi sekolah dengan keluarga (melalui *multicultural education*) dalam pembentukan perilaku multikulturalis siswa, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Artinya bahwa tingginya sosialisasi sekolah dan juga sosialisasi dalam nilai-nilai multikulturalisme menyebabkan semakin tingginya kecenderungan perilaku multikulturalis siswa, dan sebaliknya. Terkait dengan hasil analisis tersebut, patut dicatat bahwa dimensi *modeling* cukup signifikan dalam mempengaruhi perilaku multikulturalis siswa. Wujud dari dimensi *modeling* ini dilihat dari bagaimana agen sosialisasi di sekolah, baik guru maupun sesama siswa, dapat memberikan teladan yang baik berkenaan dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keadilan/kesetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan datanya melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu siswa kelas XII Reguler SMA N 78

Jakarta. Teknik samplingnya adalah *stratified random sampling* dengan total responden 150 siswa (90 siswa IPA, 60 siswa IPS).

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas, melalui kajian Nathalia, Bulan, dan Uihak, peneliti melihat bahwa penerapan demokrasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu kerangka yang dapat menyerap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi heterogenitas linguistik, budaya, agama, serta geografis. Hal ini tentu selaras dengan kondisi sosial di Indonesia yang majemuk, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan keyakinan yang berbeda. Dengan demikian demokrasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu kondisi tata nilai yang harus ditumbuhkembangkan pada masyarakat kita yang heterogen, sehingga kemudian dimungkinkan dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat. Berkaitan dengan itu langkah yang dianggap paling efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi adalah melalui kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Keyakinan tersebut berdasar atas, beberapa pengkajian yang dilakukan di mana kajian pertama dilakukan di tahun 1987 oleh Seda, kajian kedua oleh Adnan pada tahun 1992 dan kajian ketiga oleh Saragih di tahun 2001, menemukan bukti empirik bahwa kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk perilaku siswa. Temuan ini juga diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2009 yang menjelaskan bahwa institusi sekolah memiliki peran yang signifikan dalam penanaman nilai-nilai serta membentuk perilaku siswa. Meskipun dari hasil dari beberapa kajian tersebut, perilaku yang dimaksud adalah perilaku modernitas dan perilaku multikulturalis. Diakui bahwa masih jarang atau bahkan belum ada pengkajian mengenai peran kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) terhadap membentuk perilaku demokratis siswa. Tentu ini menjadi sesuatu yang baru dalam penelitian-penelitian yang menelaah peran kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) terhadap membentuk perilaku siswa.

Maka dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian seperti terurai diatas, peneliti bisa melihat perbedaan dan persamaan dari masing-masing penelitian. Dari sini peneliti dapat mengambil hal-hal yang relevan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, lihat matriks di bawah ini:

<b>Matriks Tinjauan Pustaka</b>
---------------------------------

<b>JUDUL DAN PENELITIAN</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>ISI</b>	<b>TEORI/KONSEP</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
<p>Tesis. “<i>Pembentukan Modernitas Individu Melalui Kurikulum Terselubung (Studi Komparatif di Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pendidikan Formal)</i>”.</p> <p>Penulis: Albina Rosalina Saragih. 2001. FISIP UI.</p>	<p>Studi kasus dengan pendekatan noneksperimen yang berbentuk korelasi dan komparasi.</p> <p>Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner.</p> <p>Responden: peserta pelatihan program setara D1 kejuruan Elektronika di BLKI Pasar Rebo dan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Kejuruan Elektronika Semester 2.</p> <p>Teknik samplingnya adalah sampel jenuh</p>	<p><b>Permasalahan:</b> untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara kurikulum terselubung dengan modernitas individu di lembaga pendidikan non formal dan lembaga pendidikan formal serta perbedaan kemampuan/efektivitas kedua lembaga pendidikan tersebut dalam menanamkan modernitas bagi pesertanya.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> pada lembaga pendidikan formal ditemukan bahwa dimensi kurikulum terselubung: sikap guru yang tidak diskriminatif memiliki hubungan yang signifikan dengan dimensi modernitas: keterbukaan dan kesediaan untuk menerima perubahan sosial; selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler berhubungan dengan aspirasi pekerjaan.</p>	<p>Kurikulum terselubung: mekanisme atau cara sekolah menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi guna mentransformasikan nilai-nilai kepada individu. Mekanisme ini berupa proses-proses interaksi seperti <i>reward-punishment</i> (imbalan dan sanksi), <i>modelling</i> (mengikuti contoh), dan <i>generalization</i> (generalisasi)</p>	<p>Melihat kurikulum terselubung di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk perilaku siswa (menginternalisasikan nilai-nilai).</p> <p>Pendekatan kuantitatif</p> <p>Pengumpulan datanya melalui kuesioner</p>	<p>Lokasi penelitian: Politeknik - SMAN</p> <p>Mengkaji: Modernitas - Demokratisasi</p>

<p>Tesis. "Memahami Proses Demokrasi Pendidikan Melalui Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Etnografi Ruang Kelas di SDN Kranji X Bekasi". Penulis: Zulifma Nathalia. 2006. FISIP UI</p>	<p>Pendekatan: kualitatif.</p> <p>Teknik pengumpulan data: etnografi, pengamatan terlibat, wawancara, dan studi kepustakaan.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan KBK di tingkat sekolah dasar. Pelaksanaan KBK dilihat dalam kerangka bagaimana nilai-nilai/prinsip demokrasi yang termuat dalam KBK diterapkan dalam proses pembelajaran.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> KBK membuat Guru-Murid sama-sama berperan sebagai subjek pendidikan. Guru lebih memberi kesempatan kepada muridnya untuk terlibat (dialogis). Guru mulai mengurangi peran dominan yang selama ini dilakoninya.</p>	<p>John Dewey: <i>Democracy in Education</i>. Sekolah harus menjadi masyarakat mini, di mana praktik demokrasi yang ada di dalam masyarakat perlu diadakan secara nyata dalam sekolah.</p>	<p>Melihat pelaksanaan demokrasi pada institusi sekolah. Interaksi guru-murid; kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, bertindak dan menghargai perbedaan.</p>	<p>Lokasi penelitian: SDN - SMAN</p> <p>Pendekatan: Kualitatif - Kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data: Wawancara - Survey</p>
<p>Tesis. "Praktek Demokrasi di Kota Depok (Studi tentang Demokratisasi di Tingkat Lokal)". Penulis: Wahidah Rumondang Bulan. Sosiologi (Manajemen Pembangunan Sosial). 2003. FISIP UI.</p>	<p>Pendekatan: kualitatif.</p> <p>Teknik pengumpulan data: wawancara, studi kepustakaan, dan kuesioner.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> bagaimana gambaran tentang praktek demokrasi di tingkat lokal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menyusun rekomendasi bagi pengembangan Demokrasi.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> bahwa praktek demokrasi di Kota Depok belum berjalan baik. Pemilu Walikota Depok pada tahun 2000 relatif buruk karena diwarnai praktek politik uang,</p>	<p>Perkembangan demokrasi (teori Carol C. Gould): kebebasan negatif atau kebebasan menggunakan hak, kebebasan positif atau kebebasan memperoleh daya dukung untuk menggunakan hak seperti tingkat pendidikan dan ekonomi yang memadai dan</p>	<p>Melihat hak-hak masyarakat: untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, berpolitik, berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebebasan beragama dijamin.</p>	<p>Lokasi penelitian: Kotamadya - SMAN</p> <p>Pendekatan: Kualitatif - Kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data: Wawancara - Survey</p>

		sedang hak masyarakat mendapat informasi pada kegiatan pemilihan walikota dan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2003 belum optimal karena rendahnya aktivitas sosialisasi dan belum efektifnya kegiatan sosialisasi. Rekomendasi: meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat (menjadi lebih dialogis, intensif, dan mendalam) dan meningkatkan kedisiplinan dan komitmen moral anggota. Seluruh pihak terkait untuk aktif melakukan <i>civic education</i> .	pengetahuan yang cukup.  Teori Amitai Etzioni: masyarakat aktif-partisipatif, yaitu masyarakat yang dapat menggerakkan dirinya sendiri yang ditandai dengan tingginya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen baik dikalangan masyarakat maupun aktor pengambil keputusan.		
Skripsi. “ <i>Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus mengenai Sekolah sebagai Agen Sosialisasi)</i> ”. Penulis:Francisia S.S.E Seda. 1987. Sosiologi FISIP UI.	Studi kasus dengan pendekatan metode kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif.  Teknik pengumpulan datanya melalui survey dan wawancara. Teknik samplingnya adalah <i>random sampling</i> .	<b>Permasalahan:</b> bagaimana hubungan antara kurikulum terselubung dengan modernitas individu di lembaga pendidikan formal (sekolah). <b>Kesimpulan:</b> kurikulum terselubung sebagai agen sosialisasi mampu membentuk modernitas individu di sekolah. Secara empirik kurikulum terselubung ( <i>hidden curriculum</i> ) di lembaga pendidikan formal berperan dalam membentuk sikap dan perilaku siswa di sekolah.	Kurikulum terselubung : mekanisme atau cara sekolah menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi. Mekanisme ini berupa proses-proses interaksi seperti <i>reward-punishment</i> (imbalan dan sanksi), <i>modelling</i> (mengikuti contoh), dan <i>generalization</i> (generalisasi).	Melihat kurikulum terselubung berperan dalam membentuk perilaku siswa (agen sosialisasi/ menginternalisasikan nilai-nilai).  Pendekatan kuantitatif  Pengumpulan datanya melalui kuesioner dengan responden siswa SMA	Mengkaji: Modernitas - Demokratisasi

<p>Skripsi. <i>"Pengaruh Kurikulum terselubung terhadap keberhasilan siswa Sekolah Lanjutan Atas (Studi kasus SMA Negeri 8 Jakarta)"</i>. Penulis: Ricardi S. Adnan. 1992. Sosiologi FISIP UI</p>	<p>Studi kasus dengan pendekatan metode kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif.</p> <p>Teknik pengumpulan datanya melalui survey dan wawancara. Teknik samplingnya adalah <i>cluster-proporsional</i>.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> bagaimana hubungan antara kurikulum terselubung dengan modernitas individu (keberhasilan siswa=prestasi) di lembaga pendidikan formal (sekolah).</p> <p><b>Kesimpulan:</b> bahwa penerapan kurikulum terselubung itu mampu mempengaruhi keberhasilan siswa (menjadi faktor utama), juga ditemukan faktor lainnya seperti sosialisasi keluarga.</p>	<p>Kurikulum terselubung : mekanisme atau cara sekolah menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi. Mekanisme ini berupa proses-proses interaksi seperti <i>reward-punishment</i> (imbalan dan sanksi), <i>modelling</i> (mengikuti contoh), dan <i>generalization</i> (generalisasi).</p>	<p>Melihat kurikulum terselubung berperan dalam membentuk perilaku siswa (agen sosialisasi/ menginternalisasikan nilai-nilai).</p> <p>Pendekatan kuantitatif.</p> <p>Pengumpulan datanya melalui kuesioner dengan responden siswa SMA</p>	<p>Mengkaji: Modernitas - Demokratisasi</p>
<p>Skripsi. <i>"Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kegiatan OSIS di Sekolah (Studi pada SMPN 5 Kota Malang)"</i>. Penulis: Zia Ulhak. 2009. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Malang.</p>	<p>Pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.</p> <p>Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> melihat bagaimana sekolah sebagai sarana untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> adanya persamaan hak, dimana para siswa diberikan kesempatan yang sama untuk memilih dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. kebebasan untuk menyatakan pendapat, kegiatan musyawarah dalam penetapan keputusan, menaati dan</p>	<p>Pendidikan dan demokrasi: sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, meghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat</p>	<p>Melihat implementasi nilai-nilai demokrasi di sekolah; persamaan hak, kebebasan, partisipasi, dan menghormati perbedaan.</p>	<p>Lokasi penelitian: SMPN - SMAN</p> <p>Pendekatan: Kualitatif - Kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data: Observasi (wawancara) - Survey</p>

		menjalankan hasil keputusan yang ditetapkan, menghargai pendapat orang lain, partisipasi siswa dalam pengambilan kebijakan sekolah.			
Skripsi. “ <i>Hubungan Sosialisasi Sekolah dan Sosialisasi Keluarga dengan Perilaku Multikulturalis Siswa (Studi pada SMA Negeri 78 Jakarta)</i> ”. Penulis: Syarifah Nuraini. 2009. Sosiologi, FISIP UI.	<p>Pendekatan: kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data: kuesioner yang dibagikan kepada 150 responden/siswa (90 siswa IPA, 60 siswa IPS). Teknik samplingnya adalah <i>stratified random sampling</i>.</p>	<p><b>Permasalahan:</b> mencoba melihat dan menjelaskan bagaimana institusi keluarga dan sekolah sebagai suatu media/agen yang strategis dalam fungsinya menanamkan nilai-nilai multikulturalis pada diri seorang anak (siswa).</p> <p><b>Kesimpulan:</b> bahwa adanya hubungan antara sosialisasi sekolah dengan keluarga (melalui <i>multicultural education</i>) dalam pembentukan perilaku multikulturalis siswa, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Artinya bahwa tingginya sosialisasi sekolah dan juga sosialisasi dalam nilai-nilai multikulturalisme menyebabkan semakin tingginya kecenderungan perilaku multikulturalis siswa, dan sebaliknya.</p>	Teori perilaku, yakni kognitif ( <i>cognitive</i> ), afektif ( <i>affective</i> ), dan psikomotor ( <i>psychomotor</i> ), diukur dari pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), sikap ( <i>attitude</i> ), dan praktek ( <i>practice</i> ). (Notoatmodjo: 2003)	<p>Lokasi penelitian: SMAN</p> <p>Pendekatan: kuantitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data: survey (kuesioner)</p> <p>Melihat toleransi dan keadilan/kesetaraan. Patut dicatat bahwa dimensi <i>modeling</i> cukup signifikan dalam mempengaruhi perilaku multikulturalis siswa. Wujud dari dimensi <i>modeling</i> ini dilihat dari agen sosialisasi di sekolah, baik guru maupun sesama siswa, memberikan teladan yang baik berkenaan dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keadilan/kesetaraan.</p>	<p><i>Multicultural education</i> dalam rangka pembentukan perilaku multikulturalis siswa.</p> <p>- <i>Hidden curriculum</i> dalam rangka pembentukan perilaku demokratis siswa.</p>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pendidikan dan Demokrasi

Adalah John Dewey (dalam Tilaar, 2003) filosof pendidikan yang melihat hubungan yang begitu erat antara pendidikan dan demokrasi. Dewey mengatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai demokrasi maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Pendidikan dan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara pendidikan dan demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dalam segala aspeknya. Jika masyarakat semakin baik dalam memahami nilai-nilai demokrasi, maka akan semakin memberikan partisipasi positif terhadap negara dari segala aspek.

### 2.3 Kerangka Teori/Konsep

Pada bagian ini, akan menjelaskan teori dan konsep-konsep yang akan digunakan pada penelitian yaitu mengenai *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) sebagai variabel independen, dan perilaku sebagai variabel dependen.

- **Variabel Independen**

#### 2.3.1 *Hidden Curriculum* (kurikulum terselubung)

Di dalam sebuah institusi pendidikan, terdapat adanya kurikulum standar yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Dalam implementasinya pun, sekolah juga dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain kurikulum sekolah, terdapat pula yang dinamakan dengan *hidden curriculum* (kurikulum terselubung). Tidak ada pendefinisian yang jelas mengenai *hidden curriculum*. Dalam artian bahwa definisi *hidden curriculum* bervariasi tergantung pada sudut pandang dan ahli pemberi definis tersebut. Istilah *hidden curriculum* juga memiliki beberapa variasi

seperti kurikulum terselubung (dalam bahasa Indonesia), *hidden curriculum*, *unstudied curriculum*, *unwritten curriculum*, *tacit latent*, *unnoticed den paracurriculum*, *informal curriculum* (dalam Tesis Saragih, 2001:29). Untuk kekonsistenan pemakaian istilah, pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan istilah kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Dibawah ini ada beberapa pengertian kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dari beberapa ahli, seperti:

Michael W. Apple (1919) menyatakan bahwa *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) adalah suatu pengajaran diam atau tidak dibicarakan dengan terbuka (*tacit*) dari norma-norma, nilai nilai dan disposisi yang berlangsung dengan adanya kehidupan dan usaha para siswa untuk memenuhi harapan institusional dan rutinitas sekolah setiap hari untuk sekian tahun (dalam Tesis Saragih, 2001:31). Sedangkan Nicholas Abercrombie, dkk. (1984:101) mengungkapkan bahwa *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) merupakan seperangkat nilai-nilai, sikap atau prinsip yang secara implisit disampaikan guru pada siswa. Atau dengan kata lain, *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) merupakan praktek-praktek sekolah yang memperngaruhi para siswa tanpa dinyatakan sebagai tujuan-tujuan nyata dari pengajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Judith Purta-Torney dan John Schwilie (1986: 44). Ahli lain, Roland Meighan (dalam Seda, 1987: 8), menyatakan bahwa mekanisme atau cara sekolah menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi guna mentransformasikan nilai-nilai kepada individu adalah melalui apa yang dinamakan *hidden curriculum* (kurikulum terselubung). Mekanisme ini berupa proses-proses interaksi seperti *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan *reward-punishment* (imbalan dan sanksi). Secara umum *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) ini mempunyai pengertian semua hal lain yang dipelajari bersekolah, selain kurikulum formal (Meighan, 1981: 52 dalam Skripsi Seda). *Hidden curriculum* (kurikulum terselubung) merupakan apa yang diajarkan pada siswa-siswa oleh keteraturan institusional, oleh rutinitas, dan ritual-ritual dalam kehidupan guru/siswa selama kurang lebih 180 hari setahun, dan hal ini berlangsung dari tahun ke tahun (Weis, 1982: 492 dalam Skripsi Seda). Adapun *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) menurut Benson Snyder (dalam Adnan, 1992: 33) pada tahun 1971, ia mengatakan:

“ ... It refers to the implicit demands (as opposed to the explicit obligation of the ‘visible curriculum’) that are found in every learning institution and which students have to find out and respond to in order to survive within it. The Hidden curriculum refers to the three R’s – rules, regulations, and routine – to which school participants must adapt. The lesson is clear in the way in which classrooms are organized, the reward system, and the moral socialization which is passed on through the three R’s ... ”

*Hidden curriculum* (kurikulum terselubung) dapat diartikan sebagai keseluruhan aspek dan proses-proses sosial yang relatif konsisten terjadi di dalam kelas atau lingkungan sekolah dan merupakan hal-hal yang akan diserap oleh siswa-siswa, secara langsung atau tidak langsung, serta membawa pengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan.

*Hidden curriculum* (kurikulum terselubung), secara umum juga dapat dideskripsikan sebagai “hasil (sampingan) dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan”. (Martin, Jane. *What Should We Do with a Hidden Curriculum When We Find One?* The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry, dan David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 122-139). Elizabeth Vallance (dalam Giroux,1983:10) menyatakan bahwa *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) memiliki tiga dimensi yaitu:

(1) *hidden curriculum can refer to any of contexts of schooling, including the student-teacher interaction unit, classroom structure, the whole organizational pattern of the educational establishments as a microcosm of the social value system;* (2) *hidden curriculum can bear on a number of processes operating in or through schools, including values acquisition, socialization, maintenance of class structure;* (3) *hidden curriculum can embrace differing degrees of intentionality and depth of hidden curriculum as perceived by the investigator, ranging from incidental and quite unintended by-products of curricular arrangements to outcomes more deeply embedded in the historical social function of education.*

Konsep *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) yang ada pada tiga dimensi di atas merupakan komposisi dari beberapa perspektif yang menonjol dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli (dalam Tesis Saragih, 2001:33).

Teramat sulit bagi peneliti untuk membuat definisi dari konsep *hidden curriculum* (kurikulum terselubung); karena memang *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) memiliki banyak perspektif dalam menganalisis fenomena yang terjadi di sekolah. Fungsi *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) pada umumnya ditekankan pada alat untuk mengidentifikasi dan menjelaskan efek-efek samping dari proses belajar-mengajar yang terjadi secara sistematis, yang dapat kita rasakan tetapi tidak dapat dijelaskan secara seksama/jelas. Valiance mengungkapkan:

*The idea of hidden curriculum functions most use fully as device for identifying those systematic side effects of schooling that we sense but which cannot be adequately accounted for by reference to the explicit curriculum.*

*Hidden curriculum* (kurikulum terselubung) terwujud dalam interaksi-interaksi yang terjadi di dalam kelas dan lingkungan lembaga pendidikan, cenderung bersifat konsisten. Bentuk interaksi tersebut antara lain bagaimana guru mengorganisasikan kelasnya, penerapan *reward and punishment* oleh guru maupun manajemen sekolah, sikap guru terhadap siswa di luar kelas, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di mana siswa dimungkinkan untuk mengalami bagaimana berorganisasi, berkompetisi, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, untuk keperluan penelitian ini, peneliti menetapkan definisi kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) adalah keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang terjadi di dalam/luar kelas atau lingkungan lembaga pendidikan (sekolah) serta membawa pengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan. Sehubungan dengan keterbatasan penelitian maka peneliti menetapkan dimensi dari *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) yaitu *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan *reward-punishment* (imbalan dan sanksi).

- **Variabel Dependen**

### 2.3.2 Perilaku

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teori terkait konsep perilaku yang berdasarkan dari tokoh-tokoh yang mendefinisikan perilaku. Seperti,

Benjamin Bloom (1908), seorang psikolog pendidikan, membedakan adanya tiga bidang perilaku, yakni kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*). Kemudian dalam perkembangannya, domain perilaku yang diklasifikasikan oleh Bloom dibagi menjadi tiga tingkat:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya.

2. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan.

3. Tindakan atau praktek (*practice*)

Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki.

Selain itu, Skinner (1938) juga memaparkan definisi perilaku sebagai berikut: perilaku merupakan hasil hubungan antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respon). Ia membedakan adanya dua bentuk tanggapan, yakni:

- a. *Respondent response* atau *reflexive response*, ialah tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan yang semacam ini disebut *eliciting stimuli* karena menimbulkan tanggapan yang relatif tetap.
- b. *Operant response* atau *instrumental response*, adalah tanggapan yang timbul dan berkembangnya sebagai akibat oleh rangsangan tertentu, yang disebut *reinforcing stimuli* atau *reinforcer*. Rangsangan tersebut dapat memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme. Oleh sebab itu, rangsangan yang demikian itu mengikuti atau memperkuat sesuatu perilaku tertentu yang telah dilakukan.

Skinner (1938, dalam Notoatmodjo: 2006) juga mengungkapkan bahwa ada dua bentuk perilaku, yaitu:

1. Bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Perilaku mereka ini masih terselubung (*covert behavior*).
2. Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Perilaku mereka ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata (*overt behavior*).

Sedangkan ahli lain, Theodorson & Theodorson (1969: 27) mendefinisikan perilaku adalah bahwa mencakup segala hal yang individu lakukan, katakan, pikirkan, dan rasakan. Perilaku manusia menjadi perilaku sosial manakala seseorang bertindak dengan cara tertentu yang ditujukan ke orang lain, dan ia mendapat imbalan atau hukuman dari perilaku orang lain tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan untuk kepentingan hasil pendidikan, ketiga ranah perilaku secara umum, yakni kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*), diukur dari (Notoatmodjo: 2003):

- a. Pengetahuan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan (*knowledge*).

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan ranah yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*).

- b. Sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan (*attitude*).

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas tetapi merupakan predisposisi tindakan atau

perilaku. Atkinson, dkk (1993, dalam Harahap & Andayani, 2004: 5) menyatakan sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu, bentuk reaksinya dengan positif dan negative sikap meliputi rasa suka dan tidak suka, mendekati dan menghindari situasi, benda, orang, kelompok, dan kebijaksanaan sosial.

- c. Praktek yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan (*practice*).

Untuk mewujudkan sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau situasi kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas dan juga dukungan dari orang lain. Hal ini dinyatakan oleh Azwar (1995, dalam Harahap & Andayani, 2004: 5) bahwa sekalipun sikap diasumsikan sebagai predisposisi evaluasi yang banyak menentukan cara individu bertindak (berperilaku), akan tetapi sikap dan perilaku seringkali jauh berbeda. Hal ini dikarenakan perilaku ditentukan tidak hanya oleh sikap, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal lainnya. Sikap tidaklah sama dengan perilaku, dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap seseorang, sebab seringkali terjadi bahwa seseorang memperlihatkan perilaku yang bertentangan dengan sikapnya. Sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan informasi tentang objek tersebut, melalui persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya. (Sarwono, 1993, dalam Harahap & Andayani, 2004: 5)

Menurut Sarwono, 1993, (dalam Harahap & Andayani, 2004: 5) perilaku merupakan pengumpulan dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat terjadi melalui proses belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang didasari oleh perilaku terdahulu.

Individu atau masyarakat dapat merubah perilakunya bila dipahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sebagian terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor intern, dan sebagian terletak diluar dirinya yang disebut faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan sosial. Perilaku seseorang sangat bergantung pada

sejauhmana internalisasi nilai-nilai. Dalam artian bagaimana penanaman nilai-nilai yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat kepada individu dapat *internalized*.

### 2.3.3 Nilai-nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo (dalam HanOuts Draft Kuliah Pengantar Ilmu Politik oleh Meidi Kosandi):

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in the changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Mohtar Mas' oed, dosen Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam demokrasi, yakni *kebebasan*, *kesetaraan*, dan *toleransi*. Cara kerja dan perilaku berpolitik yang memungkinkan warga masyarakat menerapkan hak berpartisipasi secara demokratik dengan menjunjung tinggi toleransi dan kesetaraan. Seperti:

- Penghargaan atas kesamaan
- Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama
- Penghargaan atas kebebasan
- Penghargaan atas perbedaan

Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi

menyebabkan masyarakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman.

### 2.3.4 Perilaku Demokratis

Belum ada tokoh/ahli yang secara tegas mendefinisikan mengenai perilaku demokratis (*democratic behavior*). Namun memang ada beberapa usaha untuk melukiskan “kepribadian demokratis” akan tetapi kebanyakan dari usaha tersebut lebih bersifat teoritis daripada berdasarkan riset. Inkeles dan Laswell, misalnya, mengemukakan sifat-sifat yang sama, namun sedikit berbeda (Rush: 1995, 46-47):

Inkeles	Laswell
Menerima orang lain	Sikap yang hangat terhadap orang lain
Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru	Menerima nilai-nilai bersama orang-orang lain
Bertanggung jawab namun bersikap waspada terhadap kekuasaan	Memiliki sederetan luas mengenai nilai-nilai
Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan	Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan
Emosi-emosinya terkontrol	Memiliki kebebasan yang relatif sifatnya terhadap kecemasan

Berdasarkan uraian di atas, untuk keperluan penelitian ini, peneliti menetapkan definisi perilaku demokratis adalah keseluruhan atau segala hal yang meliputi aspek kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*) pada individu yang diukur dari pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti merangkum nilai-nilai demokrasi (secara umum) dari beberapa ahli dan berbagai sumber (*literature review*). Berikut nilai-nilai demokrasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah:

#### Nilai-Nilai Demokrasi

- Menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya.
- Kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan.
- Kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi.
- Penghargaan atas kebebasan individu.
- Memiliki kebebasan yang relatif sifatnya terhadap kecemasan.

- Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama.
  - Jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (dipilih dan memilih).
  - Memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral.
  - Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.
  - Ketersediaan akses.
- 
- Sikap yang hangat terhadap orang lain.
  - Kesetaraan antar warga.
  - Menghormati perbedaan.
  - Menerima orang lain.
  - Menerima nilai-nilai bersama orang-orang lain.
  - Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
  - Penghargaan atas kesamaan.
  - Penghargaan atas perbedaan.
  - Bertanggung jawab.
  - Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan.

### 2.3.5 Konsep-konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini

#### **Sekolah**

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Sekolah (Satuan Pendidikan) adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam hal ini, Sekolah dengan kapasitasnya sebagai sebuah institusi sosial yang berperan sebagai agen sosialisasi dan agen kontrol sosial, melakukan kegiatan reproduksi. Dimana sekolah menghasilkan sebuah produk tidak dalam bentuk material tetapi cenderung sebagai *human capital*. Membicarakan sekolah sebagai alat reproduksi berarti kita melihat sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri atas tiga komponen dasar, yaitu; input, proses, dan output. Artinya bahwa sekolah sebagai suatu institusi dalam pendidikan, melakukan kerja yang mengolah masukan (*input*) menjadi sebuah keluaran (*output*) yang benar-benar diakui oleh masyarakat luas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengolah input menjadi output harus tersedia agar proses kerjanya dapat berlangsung. Bahan-bahan tersebut dapat berupa bentuk fisik seperti fasilitas sekolah, mulai dari bangunan sekolah hingga berbagai

macam peralatan yang menunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Fasilitas non-fisik dalam sekolah dapat berupa kurikulum ataupun sumber daya manusia seperti guru dan murid. Lebih jauh lagi sekolah dapat dikatakan sebagai agen sosialisasi, dalam hal ini sekolah melakukan proses sosialisasinya melalui dua cara, yaitu pertama dengan kurikulum formal, dimana di dalamnya diajarkan *skill* (keahlian) dan *knowledge* (pengetahuan), dan kedua melalui dengan *hidden curriculum* (kurikulum terselubung), yang di dalamnya diajarkan mengenai norma dan juga nilai yang ditransmisikan melalui aturan, rutinitas, tampilan kelas, dan lain sebagainya (Lawson, Jones & Moores, 2000: 64).

### **Budaya Sekolah**

Budaya diartikan sebagai *the truths, norms, and goals that people come to share in interaction over time*. Semua masyarakat, komunitas, organisasi formal, dan kelompok memiliki budaya yang mempengaruhi apa yang dilakukan dan diajarkan kepada tiap anggota baru ketika memasuki organisasi sosial (Aryani, 2008: 12).

Seperti layaknya organisasi lainnya, sekolah juga memiliki budaya. Menurut Deal dan Peterson (1999) (dalam Aryani, 2008:12), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Sementara Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan budaya sekolah sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah.

Saphier dan King membuat definisi budaya sekolah yang sesuai dengan pengembangan budaya sekolah. Mereka mengartikan budaya sekolah sebagai seperangkat kepercayaan, nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh warga sekolah mengenai bagaimana segala sesuatu dilakukan dalam sekolah (Aryani, 2008: 12). Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Budaya sekolah adalah suatu kompleks keyakinan, nilai-nilai dan tradisi, cara berpikir dan bertingkah laku yang merupakan corak

khas dari sekolah yang membedakannya dari institusi-institusi lainnya (Vembrianto, 1993: 82).

Dalam definisi tersebut disebutkan setidaknya tiga indikator yang membentuk budaya sekolah, yaitu nilai, norma, dan kepercayaan. Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para siswanya. *Value* (nilai) merupakan suatu ukuran normativ yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya (Sudrajat, 2007). Nilai terdiri atas visi, misi, dan tujuan. Misi merupakan tindakan untuk merealisasikan visi, sementara tujuan merupakan apa yang akan dicapai oleh sekolah dan kapan kan dicapai.

Sementara *norms* (norma) berisi tentang standar perilaku dari anggota sekolah, baik bagi siswa maupun guru. Standar perilaku ini bias berdasarkan pada kebijakan intern sekolah itu sendiri maupun pada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Sudrajat, 2007). Sedangkan kepercayaan terdiri dari dua tipe, yaitu percaya akan kemampuan termasuk persepsi individu tentang kemampuan personal yang dimiliki dan dibutuhkan untuk dapat berfungsi secara efektif. Kedua kepercayaan akan konteks, yaitu persepsi individu mengenai seberapa responsive lingkungan dalam mendukung fungsinya secara efektif.

### **Siswa**

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahap ini, menurut Erickson (dalam Hanum, 2000) siswa memasuki tahap awal dari perkembangan remaja. Siswa adalah subjek atau pribadi yang unik (khas untuk dirinya) sehingga perlu adanya peraturan program belajar yang selaras dengan kemampuan dasar sikap siswa (Samana, 1992). Menurut Monks (dalam Hanum, 2000), pada umumnya siswa adalah remaja masih belajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Rata-rata remaja menyelesaikan sekolah lanjutan pada usia kurang lebih 18 tahun.

### **Kontrol Sosial**

Kontrol sosial adalah suatu mekanisme di mana masyarakat melatih lingkungannya di luar individu dan membentuk konformitas terhadap norma dan nilainya (Ross). Makna kontrol sosial yang di gunakan oleh Ross mengarah kepada institusi yang meregulasi perilaku individu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai dan norma yang ditentukan oleh masyarakat berasal dari kepercayaan, opini publik, agama, dan hukum (Coser, 1976: 80).

### **Internalisasi**

Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara alamiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksikan. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas dasar suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing (Eriyanto, 2004: 13-15). Hal inilah yang disebut sebagai proses internalisasi.

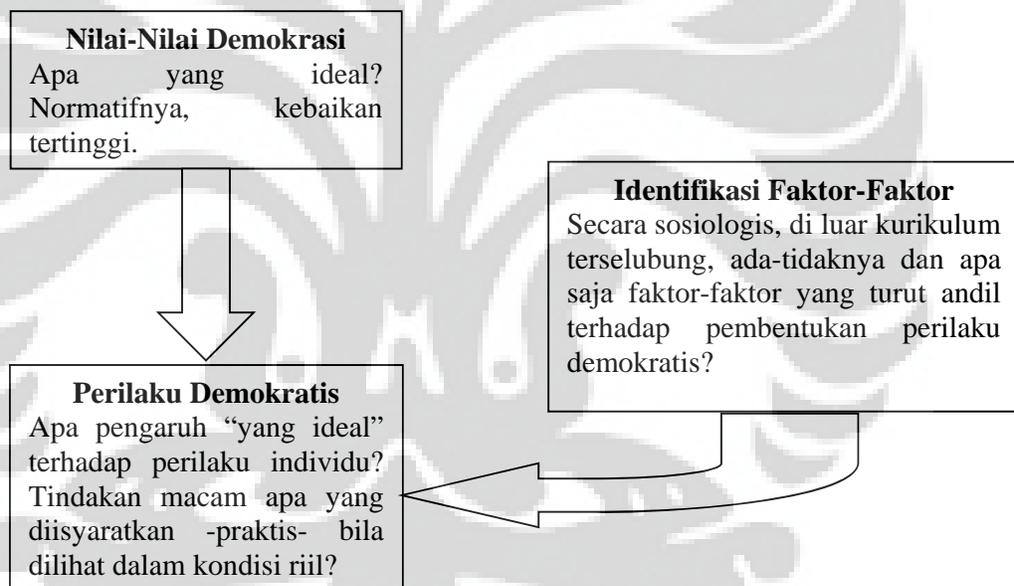
Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala relitas diluar kesadrannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. (Berger, Peter L, dan Thomas Luckman, 1991 : 154-155).

Salah satu wujud internalisasi adalah sosialisasi. Bagaimana suatu generasi menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial (termasuk budaya) yang ada kepada generasi berikutnya. Generasi berikut diajar (lewat berbagai kesempatan dan cara) untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang telah diobjektifikasikan. Generasi baru mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut. Mereka tidak hanya mengenalnya tetapi juga mempraktikkannya dalam segala gerak kehidupannya. (Eriyanto, 2002: 15).

## 2.4 Skema Alur Berfikir

Terus terang bahwa berbagai analisis demokrasi dari berbagai perspektif (ilmu politik) seringkali hanya berhenti pada deskripsi dan eksplanasi demokrasi secara umum dan agak abstrak. Karena itu, publik tidak mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan demokrasi pada keseharian individu di masyarakat. Dengan kata lain, pengukuran demokrasi masih terfokus pada tataran makro seperti ketatanegaraan, hubungan antarlembaga, kebebasan berparpol, dan pemilu, namun seringkali kurang memperhatikan atau mengukur tingkat demokrasi pada tataran mikro (individu). Karenanya peneliti mencoba memberanikan diri untuk mengukur tingkat demokrasi pada tataran mikro (individu: perilaku).

Berikut skema alur berfikir pada penelitian ini:



## 2.5 Asumsi Penelitian

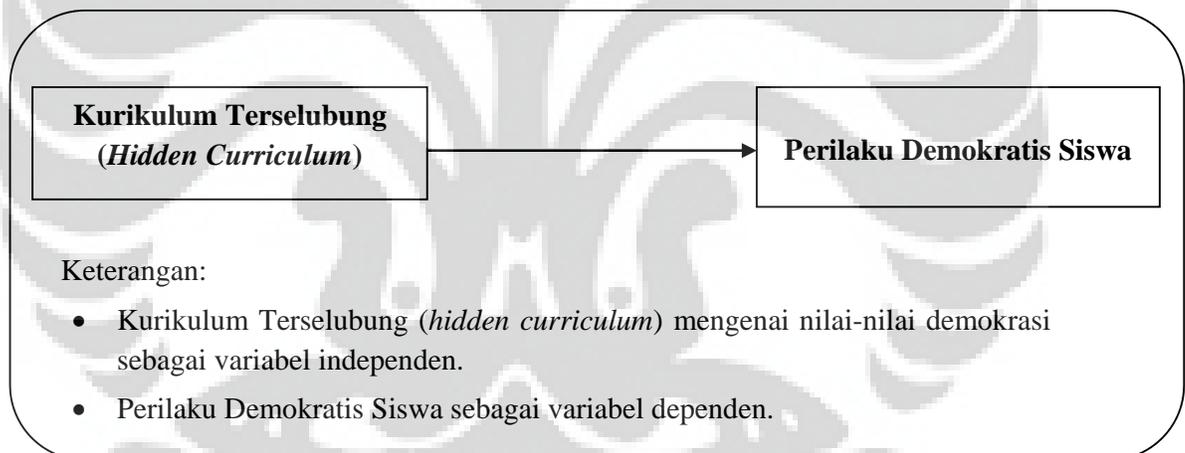
Terdapat hubungan yang positif antara tingkat kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) mengenai nilai-nilai demokrasi dengan kecenderungan perilaku demokratis siswa.

## 2.6 Hipotesis Penelitian

- Semakin tinggi kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) -mengenai nilai-nilai demokrasi- maka semakin tinggi tingkat perilaku demokratis siswa.
- Semakin rendah kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) - mengenai nilai-nilai demokrasi- maka semakin rendah tingkat perilaku demokratis siswa.

## 2.7 Model Analisis Variabel

Secara skematis hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) -mengenai nilai-nilai demokrasi- terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa dapat digambarkan sebagai berikut:



### 2.7.1 Arah Hubungan

Penelitian ini memiliki arah hubungan yang bersifat asimetris, yaitu arah hubungan yang menunjukkan bahwa suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya, namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Variabel yang mempengaruhi umumnya disebut dengan variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen. Terkait dengan penelitian, kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) mengenai nilai-nilai demokrasi sebagai variabel independen. Sedangkan perilaku demokratis siswa sebagai variabel dependen.

Arah hubungan yang terjadi yaitu antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) mengenai nilai-nilai demokrasi akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa.

### 2.7.2 Bentuk Hubungan

Bentuk hubungan dalam penelitian ini bersifat linier yang terjadi jika perubahan nilai dalam suatu variabel diikuti oleh perubahan nilai pada variabel lain secara konsisten atau tetap. Peneliti melihat adanya bentuk hubungan linier yaitu semakin tinggi kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) -mengenai nilai-nilai demokrasi- maka semakin tinggi tingkat perilaku demokratis siswa. Sebaliknya, semakin rendah kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) -mengenai nilai-nilai demokrasi- maka semakin rendah tingkat perilaku demokratis siswa.

### 2.8 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *hidden curriculum* (kurikulum terselubung) adalah keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang terjadi di dalam kelas atau lingkungan lembaga pendidikan (sekolah). Dimensi kurikulum terselubung di sini yakni berupa *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan *reward-punishment* (imbalan dan sanksi). Adapun dimensi dari kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) yang akan dikaji adalah:

(1) *Generalization* merupakan proses dimana individu memperoleh pengalaman yang memuaskan dalam suatu kegiatan tertentu sehingga pengalaman itu meyakinkan akan kemampuannya untuk mendapatkan keberhasilan yang sama dalam kegiatan yang berbeda. Dalam hal ini, sekolah sebagai agen sosialisasi menjelaskan mengenai model-model peranan dan gagasan yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Dari proses ini, seorang individu juga diberikan berbagai macam pengalaman melalui praktik yang berkaitan langsung dengan tujuan dari

kurikulum sekolah. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler siswa.

(2) *Modelling* adalah suatu proses dimana individu menirukan cara berpikir, berperasaan, bertabiat dari orang lain yang dianggap paling berarti (*significant others*) dan berkuasa di dalam lingkungannya. Bagi seorang murid, guru merupakan salah satu pihak yang dianggap berkuasa di dalam lingkungan sekolah khususnya di dalam kelas. Sehingga proses ini dapat dilihat melalui:

- a. Keterbukaan sikap dan perilaku guru dalam berinteraksi dengan siswa.
- b. Tidak diskriminatifnya guru dalam berinteraksi dengan siswa

Mekanisme dalam *modelling* ini diawali dengan perhatian anak terhadap perilaku yang dianggap *significant other* dan mengingatnya dalam memori. Tahap selanjutnya adalah imitasi perilaku *significant other* dan mengingatnya dalam memori. Perilaku diulangi terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Seorang guru yang bertindak demokratis akan membentuk perilaku demokratis juga pada siswanya.

(3) *Reward and punishment* yakni proses dimana para siswa dihukum bila melanggar aturan tata tertib sekolah dan di lain pihak mendapatkan imbalan bila patuh terhadap aturan tersebut. Proses ini dilihat dari tingkat disiplin yang dijalankan di sekolah dalam menjalankan aturan tata tertib secara konsekuen serta akibat yang dikenakan pada siswa. Kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) ini termasuk juga dalam unsur penting budaya sekolah yaitu nilai dan peraturan sekolah. Konsekuensi peraturan disini merupakan hasil dari persetujuan antara *significant others* dengan siswa sebagai pihak yang meniru dan mengulangi perilaku dari *significant others*. Persetujuan tersebut secara verbal maupun non-verbal, kadang-kadang berupa ganjaran yang konkrit (John E. Farley, 1992. dalam Nuraini, 2009: 26).

Terkait dengan variabel dependen maka pengertian kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) disini diarahkan kepada penanaman nilai-nilai demokrasi sehingga yang terbentuk dalam output variabel dependennya adalah sebuah perilaku demokratis siswa. Oleh karenanya kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen yang

mempengaruhi variabel dependennya yaitu perilaku demokratis siswa. Semua penelitian terkait kurikulum terselubung (dalam studi letiratur penelitian ini) telah membuktikan bahwa segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, mampu membawa perubahan, khususnya pada perubahan sikap dan perilaku pada siswa. Dengan perubahan yang ada pada pengetahuan, akan berpengaruh juga pada sikap dan juga perilaku siswanya. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan digunakan konsep kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dengan melihatnya dari pola interaksi antar aktor yang tidak hanya dilihat dari kurikulum nyata.

Peneliti menegaskan, seperti pada uraian sebelumnya, bahwa perilaku demokratis siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yakni suatu perilaku yang dilihat dari bagaimana individu/siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjabaran dalam bagian operasionalisasi konsep.

## **2.9 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi secara sederhana mengacu pada langkah-langkah, prosedur-prosedur, atau operasi-operasi yang akan melalui pengukuran dan identifikasi variabel-variabel yang akan kita obeservasi. Dalam penelitian ini, konsep utama yang dioperasionalisasikan adalah kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dan perilaku demokratis siswa. Penjabaran kedua konsep tersebut peneliti sajikan ke dalam bentuk matriks operasionalisasi konsep di bawah ini:

<b>Matriks Operasionalisasi Konsep</b>
--

<b>Teori/Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Pernyataan Indikator</b>	<b>Kategori</b>	<b>Skala</b>
Kurikulum Terselubung ( <i>Hidden Curriculum</i> )	Kurikulum Terselubung mengenai nilai-nilai demokrasi	<i>Generalization</i>	Guru membiasakan siswanya untuk berperilaku demokratis. Guru mengingatkan siswanya untuk terus berperilaku demokratis.	Tinggi Rendah	Ordinal
		<i>Modelling</i>	Guru memberikan contoh keteladanan (perilaku demokratis) kepada siswanya. Guru mencontohkan segala perilaku yang mengarah pada nilai-nilai demokrasi.	Tinggi Rendah	Ordinal
		<i>Reward and Punishment</i>	Guru memberikan hadiah/imbalan berupa pujian/dsb ketika siswa berperilaku demokratis. Guru memberikan sanksi/hukuman berupa teguran/dsb ketika siswa tidak berperilaku demokratis.	Tinggi Rendah	Ordinal

Teori/Konsep	Variabel	Dimensi	Pernyataan Indikator	Kategori	Skala
Perilaku	Perilaku Demokratis Siswa	Pengetahuan ( <i>cognitive</i> )	Siswa memiliki pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi.	Tinggi Rendah	Ordinal
		Sikap ( <i>affective</i> )	Siswa memiliki sikap/ penilaian mengenai nilai-nilai demokrasi.	Tinggi Rendah	Ordinal
		Tindakan Nyata ( <i>psychomotor</i> )	Siswa telah bertindak/berperilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.	Tinggi Rendah	Ordinal

Adapun indikator Perilaku Demokratis Siswa dalam penelitian ini adalah:

Dimensi Pengetahuan (*cognitive*)

- Pengetahuan mengenai adanya jaminan kebebasan pribadi.
- Pengetahuan mengenai kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan.
- Pengetahuan mengenai kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi.
- Pengetahuan mengenai kebebasan individu lain.
- Pengetahuan mengenai partisipasi dalam kehidupan bersama (pengambilan keputusan/musyawarah).
- Pengetahuan mengenai jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (dipilih dan memilih).
- Pengetahuan mengenai adanya kesempatan/ketersediaan akses publik yang sama.
- Pengetahuan mengenai adanya kesetaraan antar-warga.
- Pengetahuan mengenai perlunya menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada.
- Pengetahuan mengenai adanya tanggung jawab atas perbedaan-perbedaan.
- Pengetahuan mengenai toleransi di dalam kehidupan bersama.

Dimensi Sikap (*affective*)

- Penilaian terhadap adanya jaminan kebebasan pribadi.
- Penilaian terhadap kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan.
- Penilaian terhadap kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi.
- Penilaian terhadap kebebasan individu lain.
- Penilaian terhadap partisipasi dalam kehidupan bersama (pengambilan keputusan/musyawarah).

- Penilaian terhadap jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (dipilih dan memilih).
- Penilaian terhadap adanya kesempatan/ketersediaan akses publik yang sama.
- Penilaian terhadap adanya kesetaraan antar-warga.
- Penilaian terhadap perlunya menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada.
- Penilaian terhadap adanya tanggung jawab atas perbedaan-perbedaan.
- Penilaian terhadap toleransi di dalam kehidupan bersama.

Dimensi Tindakan Nyata (*pschycomotor*)

- Tindakan terhadap adanya jaminan kebebasan pribadi.
- Tindakan terhadap kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan.
- Tindakan terhadap kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi.
- Tindakan terhadap kebebasan individu lain.
- Tindakan terhadap partisipasi dalam kehidupan bersama (pengambilan keputusan/musyawarah).
- Tindakan terhadap jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (dipilih dan memilih).
- Tindakan terhadap adanya kesempatan/ketersediaan akses publik yang sama.
- Tindakan terhadap adanya kesetaraan antar-warga.
- Tindakan terhadap perlunya menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada.
- Tindakan terhadap adanya tanggung jawab atas perbedaan-perbedaan.
- Tindakan terhadap toleransi di dalam kehidupan bersama.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian dan dijadikan acuan peneliti dalam memperoleh data hingga menganalisis data. Butir penting pada bagian ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana metodologi penelitian (proses dan cara) yang dilakukan dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai metodologi penelitian ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data hingga teknik analisa data.

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat dilihat sebagai cara berpikir dan bertindak, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan sebuah penelitian serta untuk mencapai suatu tujuan penelitian (Kartono: 1990). Oleh sebab itu cara-cara yang digunakan harus relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam suatu penelitian agar tercapai tujuannya. Dalam pelaksanaannya perlu ditekankan pentingnya perumusan yang jelas dan terbatas, dalam arti tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya, dilakukan pengungkapan aspek-aspek yang jelas dalam perumusan masalah agar mempermudah pemilihan penggunaan metode. Dengan demikian penggunaan metode penelitian yang tepat dapat menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif, melalui pendekatan ini peneliti berharap mampu melihat permasalahan secara objektif. Karena pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan pada objektivitas, prosedur standar, reliabilitas, serta fokus terhadap variabel.

Penelitian ini menggunakan logika deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori untuk menjawab permasalahan penelitian.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis, yaitu dengan mencoba menjelaskan hubungan yang terdapat di antara variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel yang kemudian akan diuji kekuatan hubungannya, sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) sedangkan variabel dependennya adalah perilaku demokratis siswa. Di sini peneliti ingin melihat “hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa”.

Dalam pendekatan penelitian ini, guna memperoleh data, peneliti menggunakan metode *survey* dan metode kualitatif (observasi dan wawancara). Kemudian data yang berhasil dikumpulkan, akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel statistik (univariat dan bivariat) dimana masing-masing tabel diinterpretasikan dan dicari hubungannya sebagai analisa data sehingga akan dapat mengungkapkan fenomena yang diteliti secara tepat.

### **3.3 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian terbagi dalam empat dimensi, yaitu (1) penelitian berdasarkan manfaat penelitian, (2) penelitian berdasarkan tujuan penelitian, (3) penelitian berdasarkan dimensi waktu, dan (4) penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data (Neuman, 2004: 21-33).

#### **3.3.1 Berdasarkan Manfaat**

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian murni (*basic research*), karena sifatnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah baru dalam ilmu sosiologi. Penelitian murni merupakan penelitian yang memiliki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian murni mencoba menjelaskan pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini sangat didukung dengan teori yang akan menjelaskan bagaimana dunia sosial, serta apa yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi.

### 3.3.2 Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal bagaimana suatu fenomena sosial terjadi dan pengujian hipotesa. Dengan kata lain penelitian eksplanatif berusaha membuktikan secara empiris ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen (Neuman, 2004: 20). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat fenomena sosial yaitu hubungan antara kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) terhadap pembentukan perilaku demokratis pada siswa. Sesuai dengan tujuan yaitu melihat hubungan kasual antara variabel independen kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) dan variabel dependen perilaku demokratis siswa, maka penelitian ini bersifat eksplanatif.

### 3.3.3 Berdasarkan Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* mengambil satu bagian dari suatu gejala (populasi) pada satu kurun waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November 2011.

### 3.3.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *survey* yaitu dengan menentukan sejumlah responden dan mengumpulkan data melalui kuesioner. Survey biasa digunakan dalam penelitian, dimana beberapa orang akan diberikan pertanyaan dalam kuesioner. Setelah itu peneliti tersebut akan menarik kesimpulan dari seluruh jawaban responden dalam suatu penghitungan statistik yang disajikan dalam tabel atau diagram (Neuman, 2004: 267-268).

Selain pengumpulan sumber data secara primer melalui instrumen kuesioner, juga dilakukan melalui:

Observasi, dengan mendatangi lokasi di mana subjek penelitian berada, untuk melihat secara langsung segenap interaksi (perilaku dan aktivitas) yang mereka lakukan (Creswell, 2003: 185).

Wawancara sambil lalu, dilakukan untuk menggali informasi awal.

Wawancara mendalam (*in-dept interview*), dilakukan dengan menggali data (informasi) melalui tanya-jawab dalam rangka *understanding of understanding* (Faisal, 2005: 67) mengenai topik penelitian. Wawancara mendalam ini yang diajukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum/kesiswaan, guru/staff pengajar, siswa, dsb.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang akan diteliti (Wim Van Zanten, 1991: 2). Menurut Masri Singarimbun, populasi adalah sejumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga atau seringkali diidentifikasi sebagai kumpulan unsur yang menjadi objek penelitian (Singarimbun, 1982: 18). Untuk menentukan populasi, peneliti harus memperhitungkan sejauh mana generalisasi yang ingin dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari unit analisis dan unit observasi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan Babbie (1998: 201-202) unit analisis adalah satuan yang akan diteliti, bisa berupa individu, kelompok, organisasi, kata-kata, simbol dan masyarakat atau negara; sedangkan yang dimaksud unit observasi adalah satuan darimana data diperoleh, dapat berupa individu, kelompok, pasangan, dokumen, dan lain-lain. Dalam populasi juga terdapat sampel, yaitu himpunan bagian dari populasi (Zanten, 1991: 5). Sampel dianggap sebagai wakil yang representatif dari keseluruhan populasi sehingga nantinya kondisi sampel akan digunakan untuk memprediksi dan membuat generalisasi dari kondisi populasi. Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta. Terkait dengan ini maka berikut peneliti sajikan (Tabel 3.1) jumlah siswa SMA Negeri “X” Jakarta tahun ajaran 2011/2012:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Siswa SMA Negeri “X” Jakarta**  
**Tahun Ajaran 2011/2012**

Kelas	Jumlah Siswa		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
X	98	152	250
XI	143	187	330
<b>XII</b>	<b>116</b>	<b>170</b>	<b>286</b>
Jumlah	357	509	866

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Alasan peneliti menjadikan kelas XII sebagai populasi target dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan karakteristik sekolah tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian (visi-misi sekolahnya eksplisit) dan siswa kelas XII sudah lebih banyak mengetahui dan mengikuti kegiatan kurikuler (baik intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler) dibanding dengan kelas X dan XI. Selain itu siswa kelas XII juga sudah berinteraksi lebih lama dengan para guru serta siswa/siswi lainnya. Secara singkat perumusan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Isi : Siswa/siswi kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta
- Satuan : Seluruh siswa/siswi kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta
- Cakupan : SMA Negeri “X” Jakarta
- Waktu : September s.d. November 2011

Populasi tersebut juga berkaitan dengan unit analisis dan unit observasi yang ditetapkan oleh peneliti. Seperti yang telah dijelaskan di awal, unit analisis adalah satuan yang akan diteliti, bisa berupa individu, kelompok organisasi, kata-kata, simbol dan masyarakat, atau negara (Babbie, 1998: 201). Sedangkan unit observasi adalah satuan darimana data diperoleh, dapat berupa individu, kelompok, pasangan, dokumen, dan lain-lain (Babbie, 1998:202). Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu siswa/siswi kelas XII yang masih bersekolah di SMA Negeri “X” Jakarta. Sementara itu, unit observasi dalam penelitian ini ialah

individu dan keadaan lingkungan sekolah. Individu dalam unit observasi ini ialah siswa/siswi kelas XII yang masih bersekolah sebagai siswa SMA Negeri “X” Jakarta, sedangkan keadaan lingkungan sekolah yang dilihat disini adalah lingkungan SMA Negeri “X” Jakarta.

### 3.5 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah cara-cara untuk memperkecil kekeliruan dari sampel ke populasi. Dengan teknik penarikan sampel yang sesuai, diharapkan peneliti dapat memperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi. Ada dua macam teknik penarikan sampel, yaitu teknik penarikan sampel probabilita dan teknik penarikan sampel non-probabilita (Malo, 1986: 153). Dalam penelitian ini, perlu dikemukakan bahwa faktanya di lapangan peneliti tidak dapat memberi peluang yang adil, yang sama, kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel (ada suatu persoalan tertentu di mana kerangka sampel tidak mungkin dibuat)<sup>3</sup>. Dalam situasi yang demikian maka peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terambil sebagai sampel, atau *non-random sampling* (cara pengambilan sampel yang tidak acak) (Malo, 1986: 153). Peneliti menyadari betul bahwa kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan, konsekuensi atau kekurangannya adalah peneliti mempunyai keterbatasan dalam melakukan inferensia. Dalam artian belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Generalisasi yang dapat dilakukan peneliti terbatas.

Dari beberapa jenis teknik penarikan sampel non-probabilita, peneliti menggunakan teknik secara *purposive sampling*. Istilah *purposive* sering diterjemahkan bertujuan, karena *purpose* artinya maksud atau tujuan; jadi *purposive sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Kalau membuka kamus (semisal *Oxford Advances Learner’s Dictionary*) akan ditemukan memang salah satu arti *purpose* adalah tujuan. Akan tetapi dalam hal ini bukan sebatas itu yang dimaksud, karena tidak ada pengambilan sampel yang

---

<sup>3</sup> Lebih lanjut akan dijelaskan pada sub-bab keterbatasan penelitian

tidak mempunyai tujuan, semua bertujuan. Jika dibaca lebih cermat kamus tersebut maka akan ditemukan arti lain dari *purpose*, antara lain: kesengajaan (*intention*), tidak sekedar secara kebetulan (*accidental*), juga berarti alasan tertentu (*reason*), dan juga tuntutan keadaan tertentu (*the requirements of a particular situation*), atau jelasnya, menurut persyaratan tertentu.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (tentunya yang mencerminkan populasinya).

Berdasarkan “penilaian” pihak sekolah SMA Negeri “X” Jakarta dan peneliti sendiri mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel maka yang “dituju” adalah siswa-siswa tertentu yang (dengan alasan atau latar belakang logis) memenuhi persyaratan (tuntutan persyaratan) sebagai “responden” (yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian). Oleh karena pihak sekolah (wakasek bidang kurikulum) yang mana mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya), pada akhirnya peneliti yakin mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

Adapun alasan peneliti mengambil teknik penarikan sampel ini karena sampel bersifat heterogen, dalam hal ini pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa di setiap jenjang kelas memiliki perbedaan. Peneliti menganggap bahwa siswa kelas XII sudah lebih banyak mengetahui dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah, karenanya kelas XII memiliki pola pikir dan pengetahuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang kelas dibawahnya. Kelas XII telah menerima sosialisasi sekolah yang lebih lama dibandingkan kelas yang lebih rendah, baik itu secara formal maupun terselubung, lebih jauh lagi, kegiatan kurikuler (baik intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler) telah lebih dipahami oleh para siswa tingkat akhir dibanding dengan kelas X dan XI. Selain itu, penting untuk ditegaskan bahwa teknik ini diambil karena jumlah siswa/siswi yang berbeda pada jurusan

IPS dan IPA. Perbedaan jurusan ini dilakukan karena asumsi awal peneliti mengenai adanya perbedaan mata pelajaran yang diberikan di antara keduanya dapat mempengaruhi perilaku demokratis siswa. Distribusi siswa kelas XII sebagaimana berikut:

**Tabel 3.2**  
**Distribusi Siswa Kelas XII**

<b>Kelas XII IPS</b>	<b>Kelas XII IPA</b>
XII IPS 1 : 34 Siswa	XII IPA 1 : 38 Siswa
XII IPS 2 : 37 Siswa	XII IPA 2 : 39 Siswa
XII IPS 3 : 36 Siswa	XII IPA 3 : 40 Siswa
	XII IPA 4 : 40 Siswa
	XII KI : 22 Siswa
<b>Total : 107 Siswa</b>	<b>Total : 179 Siswa</b>

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Matriks di atas menunjukkan dimana perbedaan perbandingan total jumlah siswa IPA/IPS yang tidak terlalu jauh (mendekati proporsional) antara siswa jurusan IPS dan IPA yaitu 107 : 179 dengan total 286 siswa terdiri siswa 116 laki-laki dan siswa 170 perempuan. Berdasarkan penghitungan<sup>4</sup>, sampel untuk siswa jurusan IPS sebanyak 40 siswa, sedangkan untuk siswa jurusan IPA sebanyak 65 siswa. Dengan demikian total responden yang diambil adalah sebanyak 105 responden.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yakni siswa/siswi SMA Negeri "X" Jakarta, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara berstruktur dengan instrumen daftar pertanyaan (wawancara terstruktur). Namun untuk menambah data peneliti juga melakukan observasi di sekolah dan melakukan wawancara mendalam sebagai penunjang data dengan beberapa informan yang terkait, yang bertujuan untuk

<sup>4</sup> Di mana  $107/286 \times 100\% = 37,41\%$  dan  $179/286 \times 100\% = 62,58\%$

Dengan demikian sampel yang diambil sebanyak: 40 siswa IPS dan 65 siswa IPA.

mendapatkan informasi yang berguna untuk melengkapi keterangan-keterangan tentang variabel-variabel pokok yang telah ditanyakan dalam wawancara berstruktur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap dua orang siswa yang sebelumnya telah menjadi responden. Kedua informan ini dipilih dengan mempertimbangkan faktor jenis kelamin yang diasumsikan mempengaruhi skor akhir pada variabel dependen yaitu perilaku demokratis siswa. Dan juga untuk keragaman jawaban maka peneliti juga membuat variasi pada informan yaitu dengan melihat perbedaan latar belakang agama, suku, dan status sosial ekonomi yang berbeda. Selain pada siswa wawancara juga dilakukan pada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum/kesiswaan dan juga beberapa guru/staff pengajar di SMA Negeri "X" Jakarta. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber informasi tidak langsung seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, internet dan data dokumentasi dari kepustakaan, pusat penelitian seperti statistik Depdiknas, arsip sekolah (buku profil SMA Negeri "X" Jakarta ataupun kurikulum yang ada di dokumen Sekolah) dan lain sebagainya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data-data tersebut diinput kemudian diolah dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 17.0* dan kemudian dilakukan uji realibilitas dan validitas untuk mengetahui nilai koefisien *Alpha Cronbach* dan nilai *r* hitung dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam variabel dependen dan variabel independen. Beberapa pernyataan yang tidak realibel akan digugurkan, setelah semua pernyataan telah dianggap realibel maka pengolahan data dapat dilanjutkan. Perlu dilakukan uji realibilitas dan validitas terhadap kuesioner karena kuesioner ini merupakan alat ukur dalam penelitian. Sehingga ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan antar variabel penelitian ini akan sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Dalam hal ini pengujian hipotesa tidak akan mengenai sarannya jika data yang dipakai dalam pengujian tersebut tidak realibel dan tidak valid karena tidak mampu menggambarkan secara tepat konsep yang ingin diukur.

Pengolahan data menggunakan SPSS ini dilakukan dengan melalui beberapa proses. Proses yang dilakukan antara lain adalah *compute* (penggabungan skor data) agar setiap dimensi ataupun variabel dalam penelitian ini memiliki akumulasi nilai atau score yang dijumlahkan dari seluruh pernyataan (*items*) dalam sebuah dimensi atau variabel. Kemudian dilakukan pula sebuah proses yang dinamakan *recode* (pengkodean kembali). Dengan proses recode ini seluruh nilai dalam dimensi ataupun variabel yang telah diakumulasikan akan di kodekan kembali sesuai dengan kategorisasinya. Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Dengan menggunakan skala ini, objek penelitian dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yang berjenjang. Variabel Kurikulum Terselubung dan Perilaku Demokratis Siswa dapat dibedakan kedalam kategori tinggi dan rendah.

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat dalam penelitian ini dilakukan melalui statistika deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi yang pada nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Sedangkan analisis bivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat korelasi<sup>5</sup> antara variabel kurikulum terselubung terhadap variabel perilaku demokratis siswa. Lebih jauh lagi, untuk melihat dimensi yang paling berpengaruh dan memiliki kekuatan hubungan yang kuat maka setiap dimensi dalam variabel independen: kurikulum terselubung (*hidden curriculum*) juga akan dianalisis secara bivariat dengan variabel dependen (perilaku demokratis siswa). Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Somer's d*.<sup>6</sup> Sedangkan kuat atau lemahnya suatu hubungan tersebut dapat dilihat dari ketentuan berikut: (Walizer & Weiner, 1987: 91)

- (a) Nilai 0,15 atau kurang digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan antar variabel yang sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.

<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan skala ordinal untuk mengukur variabel dan dengan penggunaan korelasi dapat diketahui kekuatan serta arah hubungannya

<sup>6</sup> Uji statistik *Somer's d* digunakan untuk mengukur hubungan asimetris pada data dengan data dengan skala ordinal yang bersifat asimetris

- (b) Nilai 0,16 sampai 0,3 digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan antar variabel yang cukup lemah.
- (c) Nilai 0,31 sampai 0,42 digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan antar variabel yang cukup atau sedang.
- (d) Nilai 0,43 sampai 0,63 digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan antar variabel yang cukup kuat.
- (e) Nilai yang lebih besar dari 0,64 digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan antar variabel yang kuat.

Lebih lanjut, dalam menguji hubungan antar variabel, peneliti menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk melihat apakah hubungan-hubungan antar variabel tersebut di tingkat sampel. Pun apakah hubungan-hubungan antar variabel tersebut berlaku di tingkat populasi, sekali lagi peneliti tegaskan bahwa penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan secara tidak acak. Tingkat kepercayaan 95% itu berarti kesalahan dalam penelitian yang dapat ditoleransi kurang dari 5% ( $\alpha=0,05$ ). Jika signifikansi yang tercantum dalam tabel uji statistik sama dengan atau lebih besar dari 0,05 maka hubungan tidak berlaku di tingkat populasi karena terdapat kesalahan yang lebih besar dari 5%.

### 3.8 Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha menyusun rancangan penelitian sebaik mungkin, namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan metodologis, merupakan keterbatasan terkait dengan metode penelitian. Penelitian ini memiliki kelemahan/keterbatasan dalam melakukan inferensia. Dalam artian belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Generalisasi yang dapat dilakukan peneliti terbatas. Yakni hanya berlaku pada tingkat sampel, tidak berlaku di tingkat populasi. Meski hal ini coba diantisipasi peneliti dengan memanfaatkan *fieldnotes*, namun data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai analisa dasar, melainkan sekedar tambahan informasi data saja.
2. Peneliti mengalami kesulitan dalam pembuatan kuesioner. Hal ini dikarenakan konsep “demokratis” ini belum pernah diturunkan sebelumnya menjadi indikator-indikator tertentu, sehingga akhirnya

peneliti mencoba untuk menurunkan konsep tersebut ke dalam indikator dengan merumuskannya dengan mengacu pada beberapa bahan bacaan terkait.

3. Penggunaan kuesioner dalam penelitian kuantitatif membuat pertanyaan yang dibuat oleh peneliti kurang dapat memancing jawaban subjektif dari responden. Dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat cenderung dijawab normatif oleh para responden. Responden sangat terpaku pada kategori-kategori jawaban yang sebelumnya telah diprediksi oleh peneliti. Sehingga, jawaban responden –mau tidak mau– ‘dipaksa’ untuk memberikan jawaban sesuai kategori yang tersedia. Dengan demikian, kekayaan informasi dari responden sangat terbatas. Meski hal ini coba diantisipasi peneliti dengan memanfaatkan *fieldnotes*.
4. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pembahasan melalui satu faktor yang mengubah perilaku siswa di sekolah yaitu kurikulum terselubung dengan mengabaikan faktor lainnya. Peneliti tidak memperhitungkan secara lebih mendalam (dalam hal ini peneliti hanya sebatas identifikasi) adanya agen sosialisasi lain, seperti keluarga, *peer group*, media massa ataupun organisasi lainnya, yang memiliki kemungkinan untuk turut menanamkan nilai-nilai dan memiliki hubungannya tersendiri dalam pembentukan perilaku demokratis siswa.
5. Keterbatasan juga dirasakan ketika peneliti melakukan observasi mengenai pergaulan siswa di dalam sekolah ini. Karena peneliti mengalami keterbatasan jarak, ruang, dan waktu untuk melakukan observasi di dalam kelas maka observasi yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah.
6. Adanya hambatan di lapangan yang tidak terduga sebelumnya. Hal ini terkait dengan target atau sasaran awal yang hendak dijadikan responden dari kuesioner dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini dikarenakan suatu alasan yang klasik, yakni pihak sekolah yang birokratis-prosedural. Sekolah tidak mau “diganggu”. Hal ini dirasa peneliti cukup menghambat jalannya (proses dan cara) penelitian. Bahkan menjadikan rancangan penelitian ini tidak sesuai harapan semula.

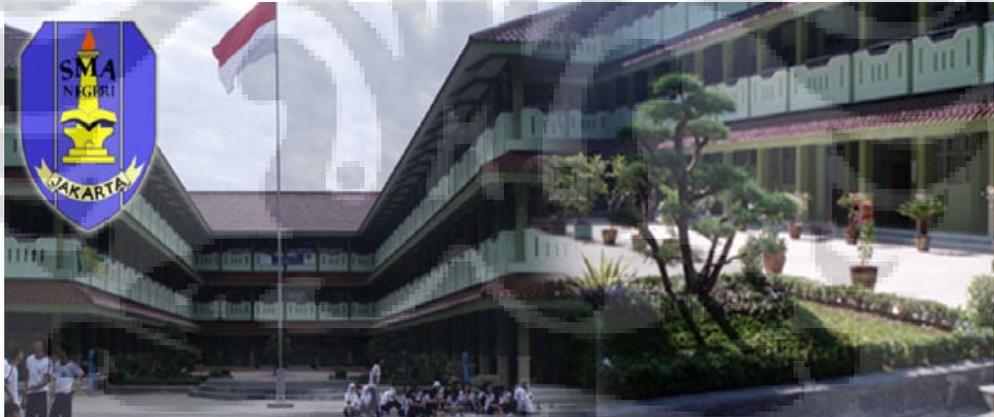
## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Pada bab ini peneliti menyajikan dua bagian besar. Pada bagian pertama, peneliti menguraikan lebih jauh mengenai SMA Negeri “X” Jakarta yang menjadi studi dalam penelitian ini. Meliputi latar belakang berdirinya, sejarah, keadaan geografis, visi, misi, tujuan, kurikulum, gambaran mengenai guru, murid serta segala macam kegiatan yang ada sekolah ini. Selanjutnya peneliti menguraikan karakteristik responden dalam penelitian ini. Bab ini mempunyai arti penting dalam keseluruhan tulisan ini yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai konteks masyarakat yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

#### **4.1 Gambaran Umum SMA Negeri “X” Jakarta**

##### **4.1.1 Sejarah SMA Negeri “X” Jakarta**



Gambar 4.1

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Sekolah Menengah Atas Negeri “X” Jakarta atau dikenal juga dengan nama GALAS berdiri pada tanggal 18 Agustus 1964. Pada awalnya sekolah ini hanya sebagai filial atau kelas jauh dari SMA Negeri 1 Jakarta. Seiring berjalannya waktu dan dalam perkembangannya maka tahun 1968 ditetapkan menjadi sekolah mandiri. Kemudian sejak tahun 1994 sekolah ini ditetapkan menjadi sekolah unggulan di wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 2004 ditetapkan

sebagai sekolah unggulan di wilayah DKI Jakarta. Sekarang sekolah ini menyangand sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Prestasi yang telah diraih tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang ekstrakurikuler. Pada tahun 2004, SMA Negeri “X” Jakarta dijadikan tempat acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri.

#### 4.1.2 Letak Geografis SMA Negeri “X” Jakarta



Gambar 4.2

*Sumber: Data Penelitian 2011*

SMA Negeri “X” Jakarta terletak di Jalan Seroja No.1 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Di wilayah ini terdapat pula gedung/instansi pemerintahan seperti Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, Mapolsek Jakarta Utara, yang tidak jauh dengan gedung SMA Negeri “X” Jakarta. Letak dari sekolah ini terdapat diantara perumahan penduduk dan bersebelahan langsung dengan rumah-rumah penduduk. Dapat dikatakan bahwa secara geografis letak SMA Negeri “X” Jakarta ini cukup strategis di kawasan Jakarta Utara. Hal ini dikarenakan letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan utama sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menjangkau sekolah ini pun tergolong cukup mudah, karena cukup banyak angkutan umum yang melewati jalan utama.

### 4.1.3 Visi Misi SMA Negeri “X” Jakarta

#### VISI

Visi dari SMA Negeri “X” Jakarta adalah “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”

#### MISI

Adapun misi dari SMA Negeri “X” Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran yang dianutnya.
- 2) Membentuk watak siswa yang berperilaku, berbudi pekerti luhur sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
- 3) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional dan internasional.
- 4) Membentuk siswa kreatif, inovatif dan cerdas yang mampu berkompetisi di era globalisasi.
- 5) Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab.
- 6) Mendidik dan melatih siswa agar mampu bersaing di Perguruan Tinggi terbaik di dalam maupun diluar negeri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Seperti yang tertera dalam visi misi sekolah di atas, maka dapat dilihat bahwa secara garis besar kurikulum yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi ini salah satunya diarahkan ke dalam penanaman nilai-nilai demokrasi guna menghasilkan siswa-siswi yang bersikap/berperilaku demokratis. Tentunya ini berkaitan langsung dengan fokus dalam penelitian ini yaitu penanaman nilai-nilai demokrasi melalui suatu kurikulum terselubung dalam pembentukan sikap siswa, khususnya sikap/perilaku demokratis. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Sekolah sebagai berikut:

*“...Nah dari visi tersebut diturunkan ke dalam misi. Dan ini agar tepat sasaran maka harus diselaraskan dengan tujuan dari sekolah. Visi, misi, tujuan sekolah ini kamu bisa lihat, di depan sekolah terpampang spanduk besar-jelas, di ruang TU, guru, wakasek, dan ruang kelas juga bisa kamu lihat. Tentunya output yang dihasilkan adalah generasi-generasi penerus bangsa, yang berkualitas. Dan kaitannya dengan visi sekolah tersebut (demokratis) kita semua bersepakat bahwa saat ini kita hidup di tengah era keterbukaan, demokrasi sebagai suatu model yang diyakini akan membawa perubahan perbaikan pada semua aspek kehidupan. Termasuk juga di bidang pendidikan, demokratisasi ini menjadi suatu keharusan. Sesuai visi, misi, tujuan dari sekolah ini tentunya ada penanaman nilai-nilai demokrasi. Seperti kegiatan diskusi dalam belajar mengajar di kelas, siswa dibiasakan untuk bisa bekerja kelompok, berani berpendapat menyampaikan aspirasi, sekolah memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi, mengadakan acara-acara. Maka dari itu guru-guru harus selalu memberikan contoh yang baik. Selain itu sekolah juga mengadakan rapat komite yang mana mengajak, melibatkan semua komponen.”*  
(wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)

Untuk menjadi catatan bahwa selama penelitian, peneliti mendapatkan beberapa data/informasi/fakta yang peneliti anggap cukup memperkuat argumentasi tentang bagaimana pembentukan sikap siswa, khususnya sikap siswa/perilaku yang demokratis, antara lain:

- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sjahrudin Rasul, mengunjungi SMU Negeri “X” Jakarta utara. Kemudian bertatap muka dan berdiskusi dengan siswa terkait program pendidikan antikorupsi KPK, berlangsung pada hari Jumat 17 November 2006.
- SMA Negeri “X” Jakarta bekerja sama dengan ICW dan KPK menggelar seminar pendidikan Anti Korupsi bagi para siswa. Pada seminar tersebut menghasilkan sebuah deklarasi. Dalam deklarasi ini, mereka menyatakan empat sikap, antara lain mendukung tegaknya hukum dan gerakan pemberantasan korupsi di semua instansi dan lembaga negara, *prihatin dengan saling serang antar lembaga negara yang seharusnya menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi* dan kepastian hukum di negara Indonesia tercinta, menyesalkan pemberantasan hukum di Indonesia yang bisa dibeli dan dipermainkan oleh para makelar kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, dan menaruh hormat kepada semua instansi, terutama

Mahkamah Konstitusi yang bersedia membongkar kasus-kasus korupsi dan diperdengarkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

- Pada tahun 2004, SMA Negeri “X” Jakarta dijadikan tempat acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri.
- Fasilitas “Kotak Saran Membangun” yang hampir tersedia di setiap lorong/anak tangga. “Kotak Saran Membangun” ini disediakan bagi Peserta Didik, Guru dan Karyawan SMA Negeri “X” Jakarta, untuk memberi masukan bagi peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan pegawai sekolah dan kegiatan belajar mengajar.

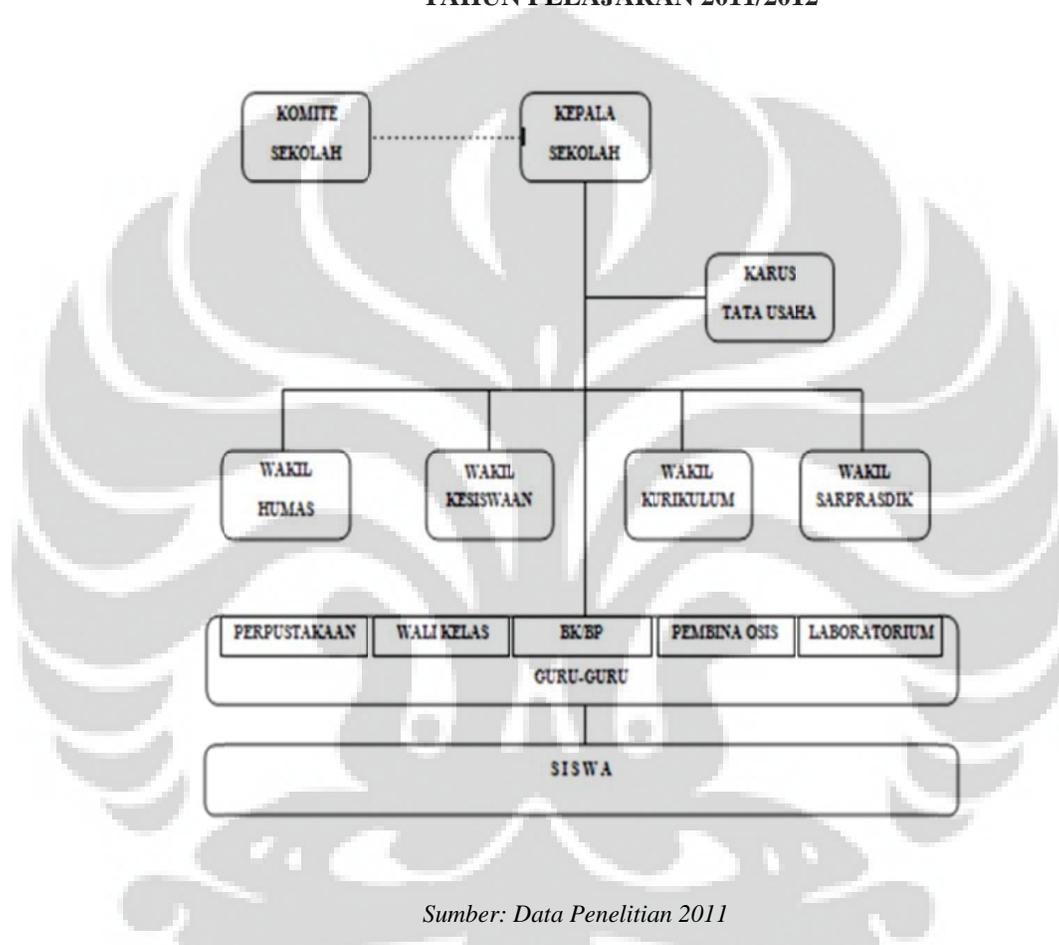
#### **4.1.4 Kondisi Umum Pengajar dan Tenaga Pengelola**

SMA Negeri “X” Jakarta ini memiliki struktur organisasi yang berisi struktur koordinasi dalam melaksanakan segala program dan kebijakan sekolah ini. Bagian ini akan membahas mengenai pembagian kerja yang terkait dengan pencapaian dari visi dan misi sekolah yang secara khusus diarahkan kepada hal yang terkait dengan tujuan sekolah. Secara keseluruhan, semua warga sekolah baik itu kepala sekolah, guru, ataupun siswa memiliki peranan dalam mewujudkan visi, karena itu merupakan tanggung jawab bersama, semua individu yang ada di dalam sekolah tersebut. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

*“...Secara umum adalah prinsip dari, oleh, dan untuk kita. Institusi pendidikan, sekolah ini pun dikembangkan atas prinsip itu. Artinya apa, bahwa partisipasi, peran serta semua warga sekolah, orang tua/wali murid, komite, masyarakat, mitra sekolah, merupakan subjek sekaligus objek utama. Sekali lagi saya tegaskan guna mewujudkan itu (visi-misi-tujuan sekolah) dibutuhkan kerja sama, partisipasi dari semua pihak (stakeholder), para guru-pengajar, staff dan seluruh warga sekolah ini, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat secara luas.” (wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)*

Untuk struktur organisasi sekolahnya sendiri terdapat komite sekolah, kepala sekolah, tata usaha, wakil kepek-bidang, staff pengajar, dan siswa. Berikut ini struktur organisasi SMA Negeri “X” Jakarta:

**Tabel 4.1**  
**STRUKTUR SMA NEGERI “X” JAKARTA**  
**TAHUN PELAJARAN 2011/2012**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Jumlah guru (staf pengajar) di sekolah ini adalah sebanyak 53 orang (PNS), dan tenaga pengajar honorer 9, dengan rata-rata berpendidikan sarjana maupun magister. Sedangkan jumlah pegawai administratif atau tata usaha adalah sebanyak 9 orang dan tenaga honorer sebanyak 7 orang, dengan rata-rata berpendidikan diploma maupun sarjana. Untuk menjaga keamanan sekolah baik siang ataupun malam SMA Negeri “X” Jakarta memiliki 5 orang satpam. Sedangkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan dipercayakan pada 5 orang penjaga sekolah/office boy-girl.

#### 4.1.5 Kondisi Umum Fasilitas

SMA Negeri “X” Jakarta ini menempati tanah seluas  $\pm 3800 \text{ m}^2$ . Sekolah ini nyaman dan kondusif untuk belajar karena tersedia sarana/prasarana dan lingkungan yang menunjang. Sekolah ini memiliki gedung berlantai 3 yang terdiri dari 7 ruangan kelas X, 4 ruangan kelas XI IPS, 5 ruangan kelas XI IPA, 1 ruangan kelas internasional (kelas internasional dikategorikan sebagai kelas IPA). Sedangkan untuk kelas XII IPA ada 4 ruangan, kelas XII IPS ada 3 ruangan, 1 ruangan kelas internasional. Ruangan administrasi/kantor tata usaha berjumlah 2 ruang dan sedang dalam proses pembangunan masjid dengan tiga lantai yang cukup besar untuk beribadah atau untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan hari besar agama Islam. Selain itu, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas ruangan lainnya seperti: kamar kecil dan ruang ganti putra, kamar kecil dan ruang ganti putri, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha (TU), kantin, ruang unit kesehatan sekolah (UKS), laboratorium (biologi, fisika, kimia, dan bahasa), perpustakaan, ruang bimbingan konseling (BP/BK), mini bus sekolah, ruang computer, koperasi, dan tempat parkir.

Untuk ruangan kelasnya terdapat meja dan kursi yang biasa digunakan siswa dalam proses belajar mengajar, satu kursi dan meja guru, 40 kursi siswa dan 20 meja siswa, *whiteboard*. Tiap ruang kelas di SMA Negeri “X” Jakarta, di dalamnya terdapat foto garuda pancasila yang diapit foto presiden dan wakil presiden, tersedia satu LCD proyektor, satu komputer serta layar. Ruangan ber-AC. Juga terpampang foto-foto pahlawan nasional, struktur pengurus kelas, jadwal piket, jadwal mata pelajaran, papan inventaris ruangan, papan absensi. Untuk ruang kelas X dan XI sudah dipasang CCTV. Di sekolah ini juga terdapat sarana pendukung sekolah seperti aula pertemuan, lapangan basket sekaligus lapangan futsal, lapangan bulutangkis, lapangan tenis meja. Lapangan basket juga berfungsi sebagai tempat upacara atau bahkan rapat besar (komite dan orang tua/wali murid).

Peningkatan kualitas sikap/perilaku warga sekolah di dalam sekolah ini dilakukan dengan cara: menempelkan motto-motto disekitar sekolah yang

divisualisasikan ke dalam pesan yang berupa tulisan dan gambar yang kemudian dijadikan penunjang dalam keberlangsungan proses penanaman nilai kepada siswa. Di sekolah ini juga terdapat kebiasaan untuk bekerja kelompok, musyawarah, berdiskusi bagi siswa di dalam kelas maupun di luar kelas.

#### **4.1.6 Kurikulum dan Kegiatan Kurikuler**

##### **4.1.6.a Kurikulum**

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri “X” Jakarta adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai diterapkan sejak tahun 2006 kepada setiap siswa yang bersekolah di SMA Negeri “X” Jakarta. Namun untuk lebih memenuhi tujuan sekolah, materi-materi di dalam KTSP tersebut diolah kembali oleh tim kurikulum sekolah sesuai kebutuhan. Mulai tahun ajaran 2006-2007 telah di buka kelas internasional di SMA Negeri “X” Jakarta yang bekerja sama dengan sebuah universitas dari luar negeri (kelas internasional dikategorikan sebagai kelas IPA).

##### **4.1.6.b Kegiatan Kurikuler**

Untuk kegiatan kurikuler secara garis besar dikelompokkan menjadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan alokasi waktu (jam belajar) yang dimulai mulai pukul 06.30 dan berakhir pukul 15.00 WIB. Dengan dua kali jam istirahat, yang mana istirahat pertama selama 15 menit. Sedangkan istirahat kedua selama 45 menit. Untuk jam istirahat kedua memang cukup lama. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan beribadah bagi siswa ataupun guru yang beragama Islam. Kegiatan belajar mengajar secara efektif dari hari Senin sampai dengan Jumat (selama 5 hari kerja). Hari sabtu dan minggu, libur. Namun terkadang (sabtu/minggu) digunakan untuk rapat komite atau kegiatan kesiswaan;

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler (di luar jam belajar) untuk memenuhi penguasaan kompetensi, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler dan non akademis lainnya berada di bawah bidang

kesiswaan. Para siswa diberi kepercayaan menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, sejak pengelolaan dana, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan juga evaluasi, sedangkan fungsi sekolah dan juga guru hanya sebagai pengawas jalannya kegiatan. Kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri dari berbagai macam jenis yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi para siswanya. Ekstrakurikuler ini selain menjadi salah satu sarana bagi para siswa untuk menyalurkan hobi dan kegemaran mereka masing-masing namun juga membuka kesempatan untuk berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain:

- Rohani Islam (SRI)
- Rohani Kristen (PRK)
- Rohani Katolik (Mudika)
- Pramuka (Pragalas)
- Bridge
- English Thirteen Society (ETS)
- Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
- Pecinta Alam (Galaspala)
- Basket (Galas Basket)
- Kempo
- Palang Merah Remaja (PMR)
- Seni Tari (Saman, Modern Dance)
- Paskibra
- Paduan Suara & Vokal Grup (PSVG)
- Sepak Bola (Galas Bola)
- Futsal
- Taekwondo
- Green School

- Pusat Dokumentasi dan Informasi (Mading, Majalah Sekolah)
- Fotografi

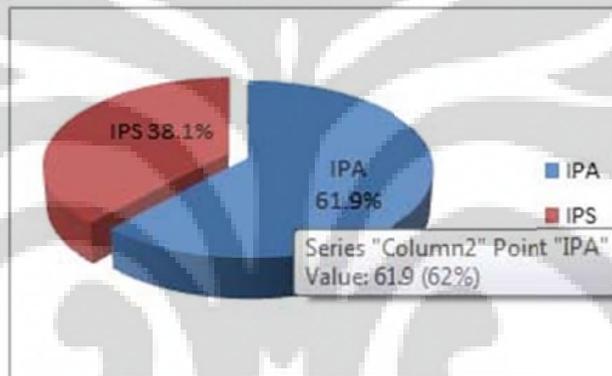
Dari ekstrakurikuler ini para siswa dapat mengikuti kompetisi yang diadakan tingkat lokal ataupun tingkat nasional. Di luar kegiatan ekstrakurikuler di atas pun sekolah ini sering melakukan kegiatan atau acara bersama dengan pihak luar seperti sponsorship perusahaan-perusahaan nasional, perguruan tinggi negeri/swasta, pers, ICW dan KPK, dan lain sebagainya. Perlu untuk diketahui bahwa sebagai motor penggerak kegiatan adalah MPK dan OSIS. MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) di SMA Negeri "X" Jakarta ini layaknya DPR/MPR pada sistem pemerintahan kita, presidensial. Salah satu fungsi majelis ini adalah menampung aspirasi siswa yang kemudian disampaikan kepada OSIS. Sedangkan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang ada di SMA Negeri "X" Jakarta telah berjalan dengan baik menjalankan fungsi eksekutifnya. Untuk setiap pemilihan Ketua MPK dan OSIS di SMA Negeri "X" Jakarta, dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh siswa-siswi SMA Negeri "X" Jakarta. Kampanye misi dan visi setiap calon Ketua MPK dan OSIS yang dilakukan ketika upacara bendera (mimbar bebas) dan di dalam kelas-kelas selama masa orasi. Masa jabatan dari ketua OSIS adalah satu tahun masa kepengurusan MPK/OSIS.

#### **4.2 Karakteristik Responden**

Pada sub-bab ini peneliti akan menggambarkan beberapa karakteristik umum dari siswa yang menjadi responden penelitian ini. Karakteristik umum tersebut meliputi jenis kelamin, usia, agama, media informasi yang paling sering dikonsumsi oleh responden, dan juga latar belakang keluarga atau orang tua responden yang terkait dengan penelitian ini (suku bangsa, pendidikan terakhir, penghasilan). Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling* melalui kelas pada tingkat XII yang ada di SMA Negeri "X" Jakarta. Selain itu bahwa jumlah siswa IPS dan IPA pada kelas XII memiliki jumlah perbedaan perbandingan yang tidak terlalu jauh (mendekati proporsional) antara siswa jurusan IPS dan IPA yaitu 107 : 179 dengan total 286 siswa terdiri siswa 116 laki-laki dan siswa 170 perempuan.

Berdasarkan penghitungan, sampel untuk siswa jurusan IPS sebanyak 40 siswa, sedangkan untuk siswa jurusan IPA sebanyak 65 siswa. Dengan demikian total responden yang diambil adalah sebanyak 105 responden. Populasi kelas XII dipilih karena kelas XII ialah tingkatan akhir dimana peneliti berasumsi bahwa penanaman nilai yang dilakukan sekolah, baik itu secara formal maupun terselubung, melalui berbagai macam kegiatan kurikuler telah lebih dipahami oleh para siswanya dipahami dibandingkan dengan jenjang kelas dibawahnya. Untuk awal, peneliti akan menerangkan mengenai jumlah sampel berdasar jurusan IPA dan IPS, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.1**  
**Jurusan Responden: IPA/IPS**  
**n=105**

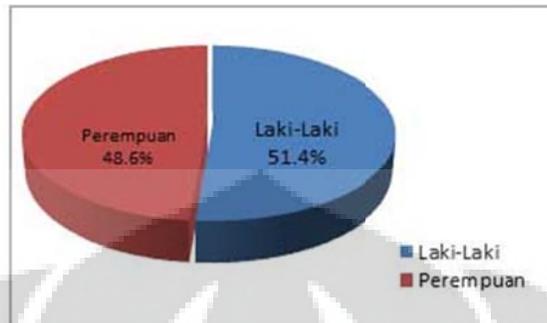


*Sumber: Data Penelitian 2011*

Grafik 4.1 memperlihatkan bahwa dari 105 siswa kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini, responden yang berlatar belakang jurusan IPA sebanyak 61,9% (65 responden) sedangkan responden yang berlatar belakang jurusan IPS sebanyak 38,1% (40 responden). Perbedaan jurusan ini dilakukan karena peneliti beranggapan mengenai adanya perbedaan mata pelajaran yang diberikan di antara keduanya, di mana berkecenderungan dapat mempengaruhi perilaku siswa, khususnya perilaku demokratis.

Berikutnya mengenai gambaran jenis kelamin dari responden pada penelitian ini (lihat grafik 4.2).

**Grafik 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**  
**n=105**

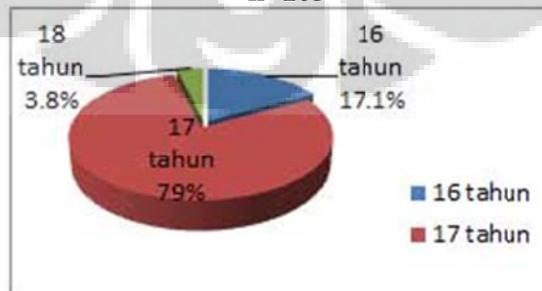


*Sumber: Data Penelitian 2011*

Grafik 4.2 di atas memberikan informasi bahwa dari 105 siswa Kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini, responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang berbeda yakni responden laki-laki sebanyak 51,4% (54 responden) dan perempuan sebanyak 48,6% (51 responden). Meskipun dari 105 responden penelitian jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan, namun perbedaan di antara keduanya tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini secara jenis kelamin cukup berimbang atau tidak condong pada satu jenis kelamin tertentu.

Selanjutnya akan dilihat komposisi umur siswa Kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Untuk umur siswa pada kelas XII baik IPA maupun IPS tidaklah memiliki perbedaan yang cukup jauh, gambaran tersebut akan diperlihatkan dari grafik persebaran umur siswa seperti berikut:

**Grafik 4.3**  
**Umur/Usia Responden**  
**n=105**

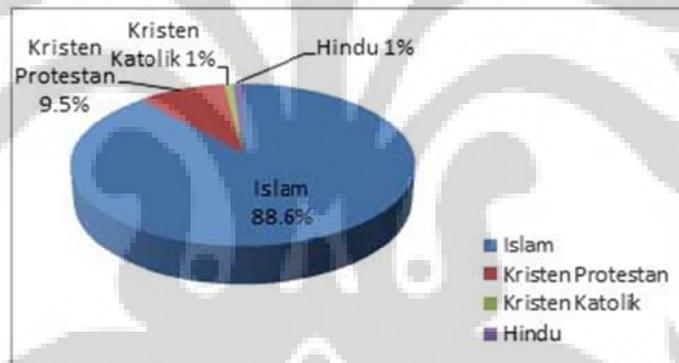


*Sumber: Data Penelitian 2011*

Gambaran grafik 4.3 tersebut memberikan informasi bahwa mayoritas responden berumur 17 tahun dengan persebarannya sebesar 79% (83 responden). Diikuti oleh siswa yang berumur 16 dengan persebarannya sebesar 17,1% (18 responden), serta siswa yang berumur 18 tahun dengan persebaran sebesar 3,8% (4 responden) dari jumlah sampel dalam penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum responden dalam penelitian ini berumur 17 tahun, hal tersebut terlihat dari jumlah persebarannya yang melebihi 50%. Peneliti beranggapan bahwa di umur tersebut (17 tahun) merupakan masa di mana individu/seseorang sedang menuju dewasa dan bagaimana mempersiapkan diri untuk bermasyarakat secara langsung.

Setelah umur, variabel berikutnya yang peneliti deskripsikan ialah mengenai agama yang dianut oleh responden yang digambarkan seperti pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.4**  
**Agama Responden**  
**n=105**

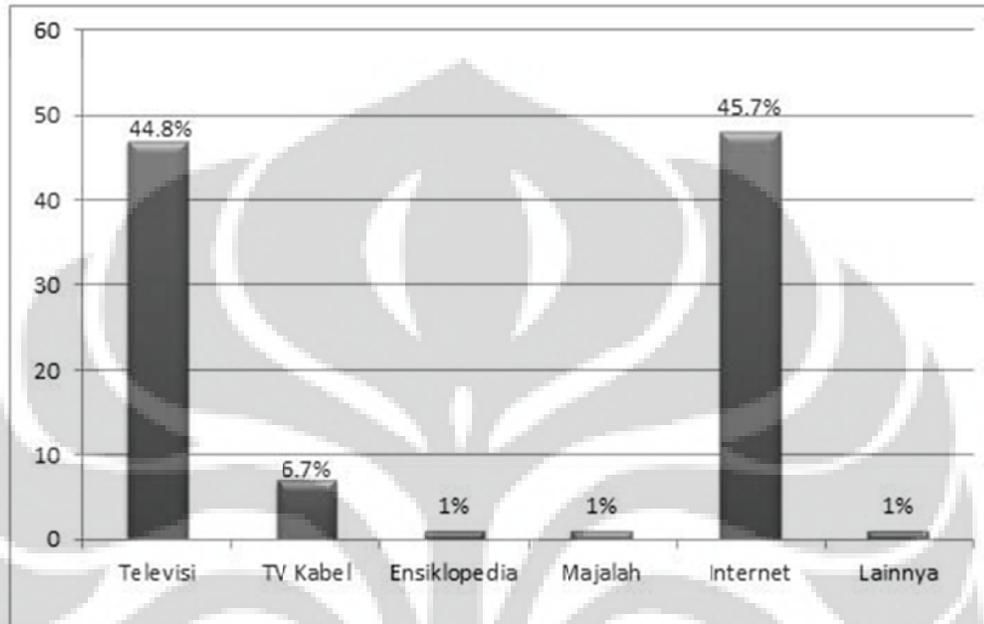


*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dari grafik 4.4 di atas terlihat bahwa dari total 105 siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, maka mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebesar 88,6% (93 responden), yang diikuti berturut-turut oleh agama Kristen Protestan sebesar 9,5% (10 responden), Kristen Katholik sebesar 1% (1 responden) dan terakhir agama Hindu sebesar 1% (1 responden). Hal ini cukup dapat memperlihatkan bahwa sekolah ini, meskipun mayoritasnya pemeluknya beragama Islam, namun di dalam sekolah ini terdapat siswa dari golongan agama lainnya. Namun pada 105 responden ini agama lain, yaitu agama Budha dan Konghucu, tidak terdapat di dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data mengenai media informasi yang paling sering dikonsumsi oleh responden. Berikut data yang didapat di lapangan:

**Grafik 4.5**  
**Media Informasi**  
**n=105**



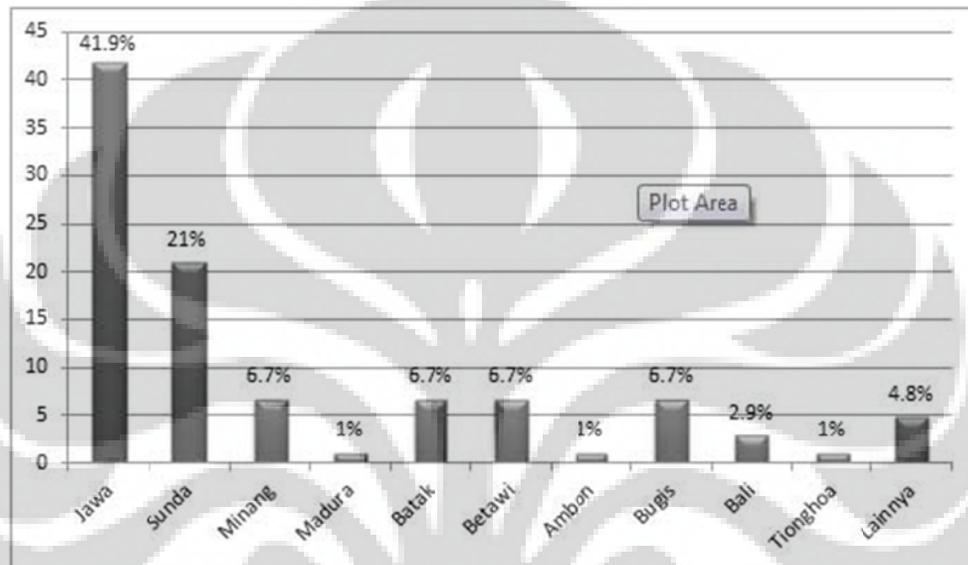
*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasar grafik 4.5 di atas memperlihatkan bahwa dari total 105 siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, ada sebanyak 45,7% (48 responden) menyatakan paling sering mengkonsumsi internet sebagai media informasinya. Ada sebanyak 44,8% (47 responden) yang menyatakan paling sering mengkonsumsi televisi sebagai media informasinya. Kemudian sebanyak 6,7% (7 siswa) yang menyatakan paling sering mengkonsumsi TV kabel sebagai media informasinya, di susul sebanyak 1% (masing-masing 1 responden) yang menyatakan paling sering mengkonsumsi ensiklopedia, majalah, dan media informasi lainnya (handphone).

Berikut mengenai latar belakang suku/etnis responden. Dalam penyajian data mengenai latar belakang suku/etnis responden ini peneliti menjabarkannya melalui suku/etnis yang dimiliki oleh orangtua dari responden, baik ayah maupun ibu dari masing-masing responden. Hal ini dikarenakan suku/etnis seseorang merupakan warisan dari orangtua mereka, dan acapkali orangtua memiliki latar

belakang suku/etnis yang berbeda antara ayah dan ibu responden, sehingga suku/etnis seseorang pun dapat lebih dari satu suku/etnis tertentu. Data mengenai latar belakang suku/etnis responden dengan berdasarkan suku/etnis orangtua masing-masing responden akan disajikan pada grafik di bawah ini:

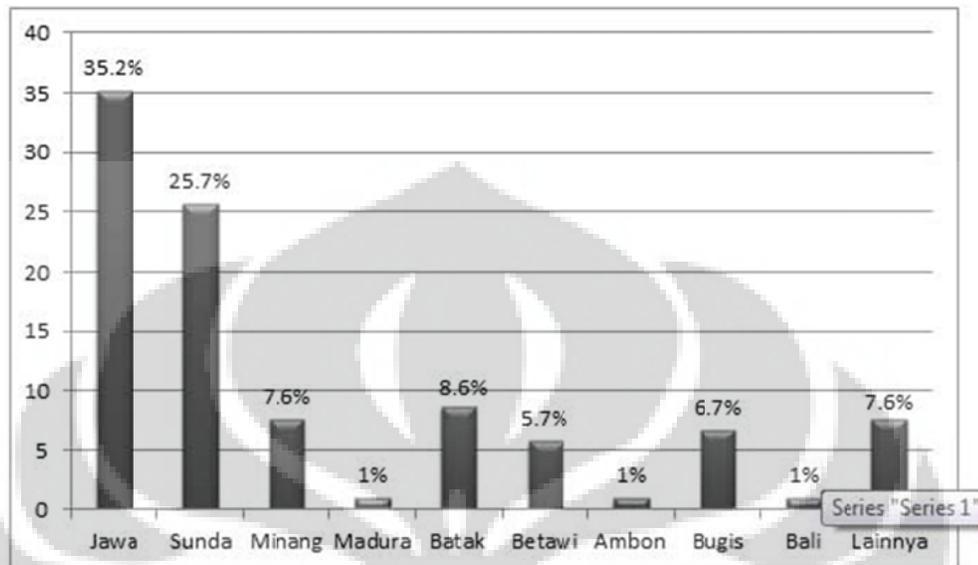
**Grafik 4.6**  
**Suku/Etnis Ayah Responden**  
**n=105**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Grafik 4.6 di atas merupakan grafik latar belakang suku/etnis ayah responden. Dengan melihat grafik latar belakang suku/etnis ayah responden maka dapat dilihat bahwa paling banyak ayah responden berasal memiliki latar belakang suku Jawa yaitu sebesar 41,9% (44 responden), diikuti oleh suku Sunda sebesar 21% (22 responden), Minang, Batak, Betawi, dan Bugis di mana masing-masing sebesar 6,7% (masing-masing 7 responden). Adapun Bali sebesar 2,9% (3 responden), Madura, Ambon, dan Tionghoa yang mana masing-masing sebesar 1% (masing-masing 1 responden), dan lain-lain sebesar 4,8% (5 responden). Selanjutnya di bawah ini merupakan grafik latar belakang suku/etnis ibu responden:

**Grafik 4.7**  
**Suku/Etnis Ibu Responden**  
**n=105**



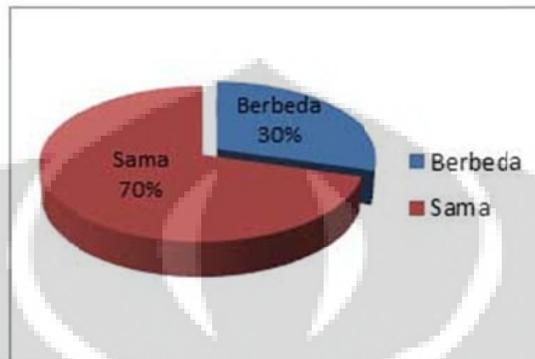
*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dengan melihat grafik latar belakang suku/etnis ibu responden seperti yang ditampilkan pada grafik 4.7 di atas, maka dapat dilihat bahwa paling banyak ibu responden berasal memiliki latar belakang suku Jawa yaitu sebesar 35,2% (37 responden), diikuti oleh suku Sunda sebesar 25,7% (27 responden), Batak sebesar 8,6% (9 responden), Minang sebesar 7,6% (8 responden), Bugis sebesar 6,7% (7 responden), Betawi sebesar 5,7% (6 responden), Madura, Ambon, dan Bali di mana masing-masing 1% (1 responden), dan lain-lain sebesar 7,6% (8 responden). Dari kedua grafik 4.6 dan 4.7 di atas maka dapat disimpulkan bahwa suku Jawa merupakan suku yang menjadi suku terbanyak sebagai latar belakang orang tua dari responden. Lalu diikuti oleh suku/etnis sebagai berikut (dengan tidak berurutan): Sunda, Betawi, Minang, Batak, Bugis, Bali serta Tionghoa. Untuk suku etnis lain-lainnya, dari 105 responden maka dapat diidentifikasi beberapa suku lainnya, yaitu suku Melayu, Manado, Palembang, Lampung, Bangka Belitung, Aceh, Bengkulu, Makasar, Kupang, dan Banjar.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, latar belakang orang tua terdiri tidak hanya dari satu suku/etnis namun juga memungkinkan untuk adanya latar belakang suku/etnis yang berbeda, begitupun juga dengan responden dalam

penelitian ini, dimana responden bisa saja berasal dari lebih dari satu latar belakang suku/etnis. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.8**  
**Latar Belakang Suku/Etnis Responden**  
**n=105**

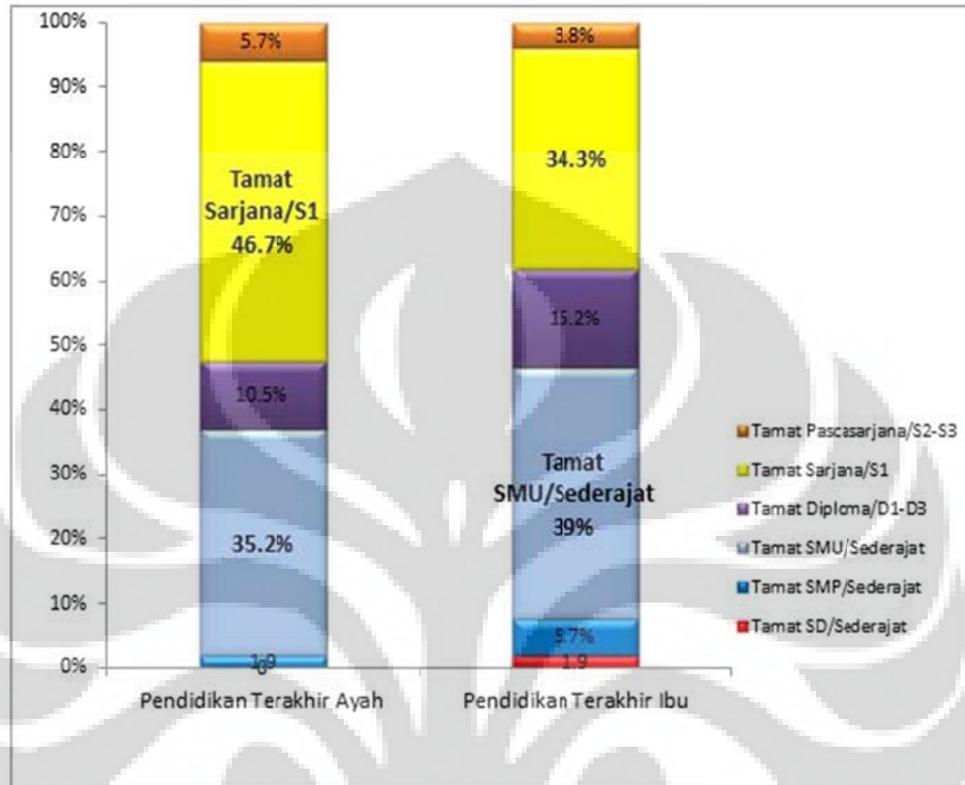


*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dari grafik 4.8 maka terdapat 70% (73 responden) yang memiliki latar belakang suku/etnis satu karena kesamaan suku/etnis yang dimiliki oleh ayah serta ibunya, dan sisanya sebesar 30% (32 responden) berasal dari percampuran antara dua ataupun tiga suku etnis, dimana ayah dan ibunya memiliki latar belakang suku/etnis yang berbeda. Hal ini dapat menggambarkan bahwa meskipun bukan sebagai mayoritas, namun diantara keseluruhan responden penelitian, terdapat responden-responden yang memungkinkan untuk menerima lebih dari satu macam kebudayaan karena latar belakang orangtua yang berbeda. Peneliti mengasumsikan bahwa dengan perkawinan antar suku/etnis orang tua maka menjadi masukan atau pengaruh tersendiri bagi responden dalam melihat keberagaman/perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang status sosial ekonomi keluarga responden. Untuk melihat gambaran mengenai kondisi status sosial ekonomi keluarga tersebut, peneliti akan melihatnya dari latar belakang pendidikan orang tua responden, pekerjaan orang tua responden, dan juga penghasilan/pendapatan orang tua responden.

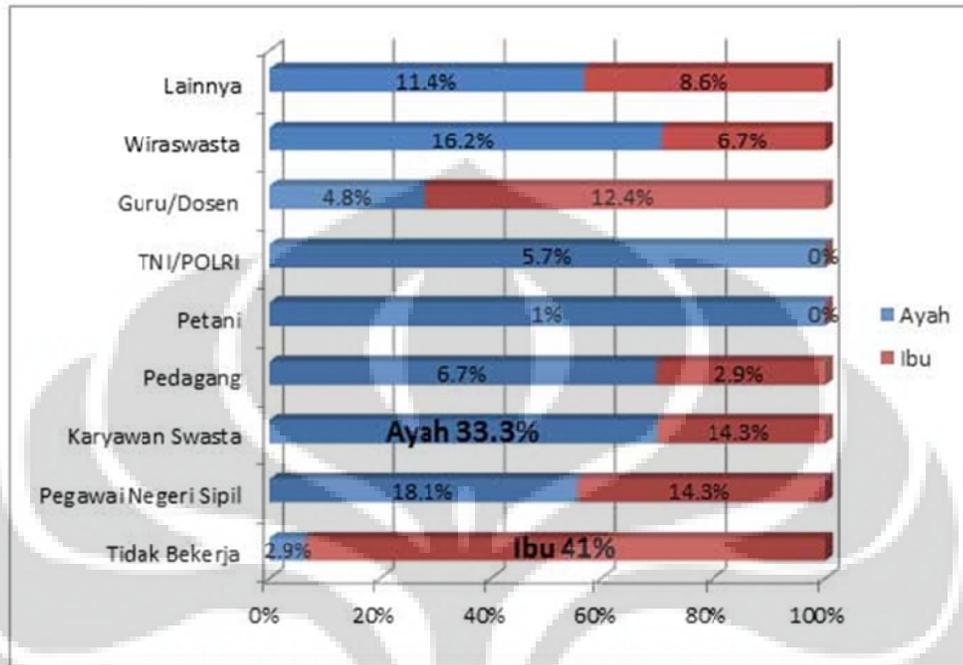
**Grafik 4.9**  
**Pendidikan Orang Tua Responden**  
**n=105**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Grafik 4.9 di atas menunjukkan mengenai latar belakang pendidikan orang tua responden, baik ayah maupun ibu responden. Untuk pendidikan terakhir ayah responden kecenderungan ialah tamatan sarjana/S1 yaitu sebesar 46,7% (49 responden), sebesar 35,2% (37 responden) berpendidikan tamat SMU/ sederajat, sebesar 10,5% (11 responden) tamatan diploma, dan sebesar 5,7% (6 responden) tamatan pascasarjana, sisanya sebesar 1,9% (2 responden) tamatan SMP/ sederajat. Sedangkan untuk pendidikan terakhir ibu responden kecenderungan ialah tamatan SMU/ sederajat yaitu sebesar 39% (41 responden), sebesar 34,3% (36 responden) berpendidikan tamat sarjana/S1, sebesar 15,2% (11 responden) tamatan diploma, dan sebesar 5,7% (6 responden) tamatan SMP/ sederajat, sisanya sebesar 3,8% (4 responden) tamatan pascasarjana, serta sebesar 1,9% (2 responden) tamatan SD/ sederajat.

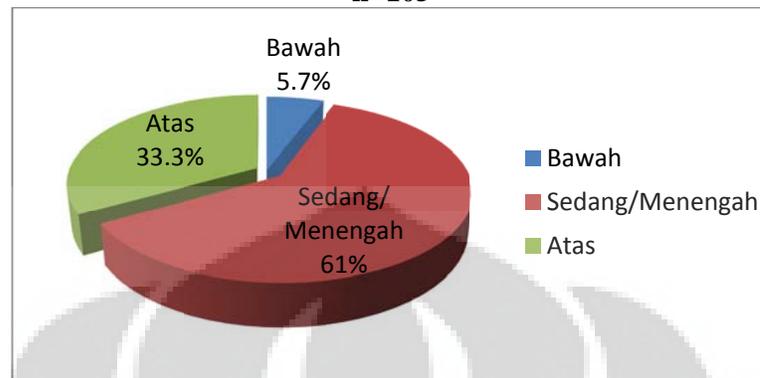
**Grafik 4.10**  
**Pekerjaan Orang Tua Responden**  
**n=105**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dengan melihat grafik 4.10 di atas menunjukkan mengenai latar belakang pekerjaan orang tua responden, baik ayah maupun ibu responden. Di sini peneliti mendeskripsikan sebagian besar pekerjaan orang tua responden (urutan tiga terbanyak). Untuk ayah responden kebanyakan bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 33,3% (35 responden). Ada sebanyak 18,1% (19 responden) yang ayahnya bekerja menjadi pegawai negeri sipil, dan terdapat sebanyak 16,2% (17 responden) yang ayahnya bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan untuk ibu responden kebanyakan tidak bekerja, yakni sebanyak 41% (43 responden). Diikuti sebanyak 14,3% (15 responden) yang ibunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pun jumlah yang sama yaitu sebanyak 14,3% (15 responden) yang ibunya bekerja menjadi karyawan swasta. Selain itu terdapat sebanyak 12,4% (13 responden) yang ibunya bekerja sebagai guru/dosen.

**Grafik 4.11**  
**Penghasilan Orang Tua Responden**  
**n=105**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasarkan Grafik 4.11 di atas memperlihatkan penghasilan<sup>7</sup> orang tua responden. Di sini terlihat bahwa sebesar 5,7% (6 responden) di mana orang tuanya berpenghasilan rendah (kurang dari s.d. Rp 1,5 juta per bulan), kemudian sebesar 61% (64 responden) di mana orang tuanya berpenghasilan sedang/menengah (lebih dari Rp 1,5 s.d. 6 juta per bulan), dan sebesar 33,3% (35 responden) di mana orang tuanya berpenghasilan tinggi (lebih dari Rp 6 juta per bulan). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (61%) berkecenderungan berasal dari keluarga kelas menengah, diikuti sebesar 33,3% dari keluarga kelas atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum responden dalam penelitian ini berasal dari keluarga kelas menengah dan atas, hal tersebut terlihat dari jumlah persebarannya yang melebihi 50%.

<sup>7</sup> Mengingat UMP atau Upah Minimum Provinsi, untuk wilayah DKI Jakarta pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1.290.000,- (Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2010). Padahal standar hidup di Jakarta Rp 1,4 juta per bulan. Menurut Martin Ravallion dari World Bank, “Kelas Menengah” (yang didefinisikan sebagai pendapatan orang antara US\$2 – US\$13 per hari). Berikut adalah komposisi “Kelas Menengah” Indonesia sesuai dengan tingkat pendapatannya, yaitu yang terbagi dalam empat kelas. Pertama, pendapatan US\$2-4 per hari atau Rp1,5 -2,6 juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas pendapatan US\$4-6 per hari atau Rp1,5 -2,6 juta per bulan (11,7 persen). Kelas berpendapatan US\$6-10 per hari atau Rp2,6-5,2 juta per bulan (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US\$10-20 per hari atau Rp5,2-6 juta per bulan (1,3 persen). Dengan demikian yang pendapatannya diatas Rp 6 juta adalah termasuk kelas atas.

Berdasarkan hal di atas maka dalam penelitian ini peneliti menetapkan kategori sebagai berikut: sesuai dengan tingkat pendapatannya

Kelas Bawah : kurang dari s.d. Rp 1,5 juta per bulan

Kelas Menengah : lebih dari Rp 1,5 juta s.d. Rp 6 juta per bulan

Kelas Atas : lebih dari Rp 6 juta per bulan

## **BAB 5**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Deskripsi Variabel Penelitian**

Pada sub bab ini memuat gambaran umum tentang variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan, baik variabel dependen maupun variabel independen. Pada bagian ini akan dideskripsikan analisa univariat dari karakteristik setiap variabel yang diamati dalam penelitian ini. Pada bagian ini peneliti berusaha menguraikan masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perilaku demokratis siswa sebagai variabel dependen dan kurikulum terselubung sebagai variabel independennya. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama menggambarkan karakteristik variabel dependen yang menggambarkan perilaku demokratis siswa. Bagian kedua akan dijelaskan mengenai independen penelitian, yaitu kurikulum terselubung.

Bagian pertama berisi deskripsi dan analisa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kecenderungan perilaku demokratis siswa di SMA Negeri “X” Jakarta. Perilaku merupakan setiap tanggapan atau reaksi individu yang mencakup reaksi dan gerakan tubuh serta pernyataan-pernyataan verbal dan pengalaman-pengalaman subjektif. Perilaku mencakup segala hal yang individu lakukan, katakan, pikirkan, dan rasakan (Theodorson & Theodorson, 1969: 27). Menurut Skinner (1938, dalam Notoatmodjo: 2006) yang mengungkapkan bahwa ada dua bentuk perilaku, yaitu bentuk pasif yang mencakup pengetahuan (kognitif) dan sikap; serta perilaku aktif yang mencakup tindakan (perilaku nyata).

Perilaku demokratis siswa merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini hendak melihat bagaimana perilaku demokratis siswa yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu kurikulum terselubung. Dalam pembahasannya peneliti akan memulainya dengan menggambarkan kecenderungan perilaku secara keseluruhan, kemudian diikuti dengan mendeskripsikan dimensi-dimensi pembentuk perilaku yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan secara lebih rinci.

Pada bagian kedua akan berisi deskripsi dan analisa dari kedua variabel independen yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kurikulum terselubung yang berupa keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang dijabarkan dalam mekanisme yang menurut Roland Meighan terdiri dari dimensi *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan pemberian *reward- punishment* (imbalan-sanksi).

### 5.1.1 Gambaran Variabel Dependen Penelitian

Dalam sub-bab ini peneliti akan menggambarkan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu perilaku demokratis siswa. Perilaku merupakan setiap tanggapan atau reaksi individu yang mencakup reaksi dan gerakan tubuh serta pernyataan-pernyataan verbal dan pengalaman-pengalaman subjektif. Perilaku mencakup segala hal yang individu lakukan, katakan, pikirkan, dan rasakan (Theodorson & Theodorson, 1969: 27). Benyakin Bloom (1908, dalam dalam Notoatmodjo: 2003) seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku itu kedalam 3 *domain* (ranah/kawasan), yaitu:

- pengetahuan (*knowledge*), menyangkut pengetahuan atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek tertentu melalui indera yang dimilikinya.
- sikap (*attitude*), reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi.
- tindakan (*practice*), perilaku yang dapat berupa tindakan nyata (dapat diobservasi) yang mana merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki.

Para ahli pendidikan menetapkan ketiga ranah perilaku tersebut diukur dari pengetahuan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan, sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan, dan praktek yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan (Notoatmodjo: 2003).

Terkait dengan fokus penelitian ini maka perilaku yang akan dibahas adalah mengenai perilaku demokratis, yaitu keseluruhan atau segala hal yang

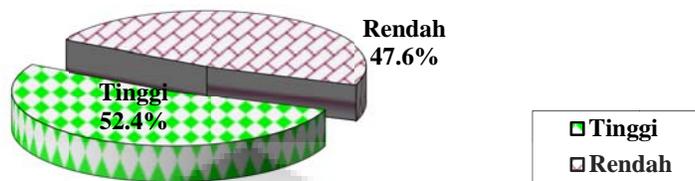
meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan dari seseorang/individu yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Perilaku ini tentunya diharapkan tumbuh-berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Mengingat masyarakat kita yang heterogen, demokratisasi menyentuh berbagai bidang kehidupan maka sejauhmana praktek seseorang/individu terkait dengan kebebasan yang dimiliki, kesempatan akan partisipasi, tanggungjawab, dan bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Seseorang/individu yang memiliki perilaku demokratis akan memberikan implikasi yang positif terhadap masyarakat, lebih luas lagi terhadap negara.

Berdasarkan teori perilaku di atas, perilaku demokratis ini juga akan diukur berdasarkan ketiga dimensi yang ada di dalamnya, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan (perilaku nyata). Pengetahuan disini ialah mencakup bagaimana siswa mengetahui sekaligus memaknai nilai-nilai demokrasi dan pentingnya berperilaku demokratis. Sedangkan dimensi terakhir, yaitu tindakan melihat bagaimana siswa telah melakukan tindakan yang demokratis.

Perilaku demokratis yang tinggi menandakan bahwa siswa telah memiliki kecenderungan untuk bertindak bebas, aktif berpartisipasi, bertanggung jawab, serta bertoleran terhadap orang lain yang berbeda latar belakang agama, suku/etnis maupun kelas sosial. Sedangkan kecenderungan perilaku demokratis yang rendah menandakan bahwa siswa kecenderungan tidak/kurang bertindak bebas, tidak/kurang aktif berpartisipasi, tidak/kurang bertanggung jawab, serta tidak/kurang bertoleran terhadap orang lain yang berbeda latar belakang agama, suku/etnis maupun kelas sosial.

Penyajian kategori perilaku pada penelitian ini akan menggunakan dua kategori yakni tinggi dan rendah. Kategori perilaku tersebut dibuat dengan menggabungkan skor dari dimensi pengetahuan, sikap dan juga tindakan kemudian dibagi menjadi kategori rendah dan tinggi menggunakan rumus statistik. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan untuk melihat arah perilaku demokratis siswa, didapatkan hasil sebagaimana yang tersaji dalam grafik 5.1 di bawah ini:

**Grafik 5.1**  
**Perilaku Demokratis Siswa**  
**n=105**



Sumber: Data Penelitian 2011

Grafik 5.1 di atas didapatkan dari perhitungan statistik dari keseluruhan 105 responden penelitian, yang mana memperlihatkan bahwa siswa yang berkecenderungan memiliki perilaku demokratis yang tinggi yaitu sebanyak 52,4%. Sedangkan dengan hasil yang tidak berbeda jauh, siswa yang berkecenderungan memiliki perilaku demokratis rendah adalah sebanyak 47,6%. Bahwa di sini perilaku demokratis siswa terdiri dari ketiga dimensi perilaku seperti yang telah dijabarkan di atas. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi pengetahuan (*cognitive*) serta dimensi sikap yang termasuk dalam perilaku pasif (*covert behavior*) dan terakhir dimensi tindakan nyata yang termasuk dalam perilaku aktif (*overt behavior*). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dimensi yang merupakan bagian dari dimensi dalam variabel perilaku demokratis siswa secara utuh.

#### **5.1.1.a Dimensi Pengetahuan (*Cognitive*)**

Dimensi pengetahuan (*knowledge*) ini merupakan aspek kognitif dari variabel perilaku. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (Bloom: 1908). Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan ranah yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*) (Notoatmodjo: 2003). Dalam penelitian ini, dimensi pengetahuan dijabarkan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya

kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dimensi pengetahuan dalam variabel perilaku di sini merupakan unsur dasar untuk pembentukan tingkatan-tingkatan ranah kognitif berikutnya yang meliputi tingkat pemahaman, penerapan, analisa, sintesa dan terakhir penilaian. Pengetahuan disini menjadi salah satu domain penting dalam membentuk tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang individu. Komponen pengetahuan dalam perilaku adalah hal-hal yang diketahui oleh individu mengenai sebuah perilaku terhadap suatu objek atau stimulus. Dimensi pengetahuan ini dikategorikan menjadi 2 yaitu tinggi dan rendah.

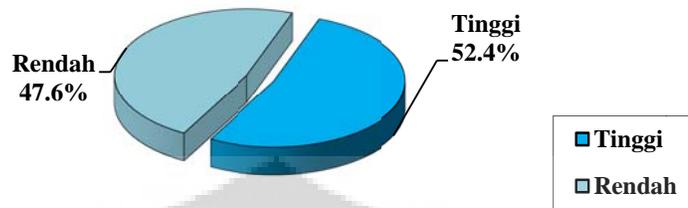
Pengetahuan yang tinggi menandakan bahwa siswa mengetahui dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, untuk pengetahuan yang cenderung rendah menandakan bahwa siswa belum atau kurang mengetahui atau kurang memahami segala sesuatu segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dimensi pengetahuan ini peneliti menggunakan 4 pilihan jawaban, yaitu Tidak Tahu (TT), Kurang Tahu (KT), Tahu (T), dan Sangat Tahu (ST).<sup>8</sup> Penggunaan keempat pilihan jawaban ini disediakan untuk pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan untuk melihat pengetahuan siswa terhadap nilai-nilai demokrasi, didapatkan hasil sebagaimana yang tersaji dalam grafik 5.2 dibawah ini:

---

<sup>8</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut dijawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Skor terkecil yang diberikan adalah 1 untuk Tidak Tahu (TT) hingga skor terbesarnya yaitu 4 untuk pilihan jawaban Sangat Tahu (ST).

**Grafik 5.2**  
**Perilaku Dimensi Pengetahuan**  
**n=105**



Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan grafik 5.2 di atas terlihat bahwa dari perhitungan statistik dengan total 105 responden, dimana sebanyak 52,4% responden pada dimensi pengetahuan (kognitif) memiliki kecenderungan pengetahuan yang tinggi. Sedangkan selebihnya sebanyak 47,6% memiliki kecenderungan pengetahuan yang rendah. Pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. merupakan segala pengetahuan yang responden pelajari dari sekolah. Menurut mereka pengetahuan tersebut perlu untuk dipelajari, dan mereka mengakui bahwa sekolah mengajarkan pengetahuan tersebut.

Adanya kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi) menurut mereka adalah suatu hal yang dianggapnya wajar dan lumrah ada di masyarakat saat ini. Hal ini menjadi lumrah karena mereka memiliki pemahaman akan kesetaraan (kesempatan yang sama) antar-warga negara. Namun mereka menegaskan bahwa kebebasan itu hendaknya bisa dipertanggung jawabkan. Dan perlunya seseorang untuk berlapang dada, terbuka, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada itu. Menurut mereka pengetahuan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, di negara Indonesia yang majemuk. Seperti yang diutarakan oleh informan A berikut ini:

*“Penting banget.. Indonesia itu majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, etnis, bahasa daerah, budayanya, beda agama, keyakinan, beda status sosial, ada yang kaya-miskin. Kan bisa menimbulkan perbedaan pendapat, pemahaman. Makanya toleransi penting, ...terbuka terhadap*

*perbedaan-perbedaan itu.” (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)*

Pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi yang terwakili oleh 52,4% responden menandakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui dan memaknai arti pentingnya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. Seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Menurut saya, itu penting. Kita harus menghormati semua orang, siapa aja dia. Kalau kebebasan ya kita bebas mo ngapain aja tapi tetep pada batasan tertentu, bebas yang sopan, bisa dipertanggung jawabkan. Kalau partisipasi itu ikut serta, terlibat deh. Toleransi itu saling menghargai pendapat, menerima saran dari orang lain.” (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)*

*“Enggak masalah dengan adanya keragaman, justru kita bisa belajar saling menghargai satu sama lain. ...paham kebebasan ialah sikap lepas, bebas berbuat sesuka hati. Partisipasi: mengikuti sesuatu, membantu. Toleransi itu sikap saling menghargai sesama.” (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)*

Pengetahuan dalam konteks ini tumbuh sebagai hasil dari pendidikan, pengajaran yang selama ini telah mereka dapatkan. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan dari kurikulum sekolah ini yaitu untuk mengubah perilaku siswa khususnya sikap dan perilaku demokratis. Seperti yang diutarakan oleh beberapa guru pengajar selaku informan dalam penelitian ini:

*“Secara sederhana kurikulum adalah segala apa yang kita butuhkan. Apapun itu. Bagaimana mencapainya. Langkah-langkah strategis apa yang mesti dipersiapkan.*

*Ya jelas penting, sangat penting. Kalau gak ada kurikulum, mau apa kita coba. Yang ada omong kosong. Perlu diketahui bahwa kurikulum itu banyak. Memang diantaranya ada kurikulum formal dan terselubung. Kurikulum formal itu apa yang tertulis dengan jelas di visi, misi, tujuan, program kerja sekolah. Nah, untuk mewujudkan yang formal ini diperlukan “skenario” melalui rutinitas, aktivitas keseharian.*

*..ini penting untuk memberikan “ruang” interaksi, nilai-nilai demokrasi itu ya (bagian kecil), tapi memang penting seperti memberi kebebasan, melihat kebutuhan siswa dengan melibatkannya, mengajarkan toleransi,*

(porsi besar) mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang lain, seperti kejujuran.” (wawancara mendalam dengan informan Y, 10 Oktober 2011)

“Visi, misi, tujuan sekolah ini secara umum menghendaki akan lahirnya siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur, tidak hanya pintar, cerdas. Selain itu kami, kita semua tentu berharap nantinya siswa bisa lebih menghargai orang lain, menghormati adanya perbedaan, dan mandiri, serta siap bermasyarakat.

Betul bahwa salah satu visi, misi, dan tujuan dari sekolah ini adalah membentuk perilaku demokratis siswa. Bisa mas lihat di depan (maksudnya: papan/spanduk visi, misi, dan tujuan sekolah). Untuk itu siswa terbiasa dengan diskusi, musyawarah, pada setiap pelajaran atau kegiatan di kelas/luar kelas. Mereka membiasakan diri untuk diskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Tentunya ini bukan dalam rangka contek-mencontek. Disamping itu metode belajar di sini adalah pemecahan masalah secara kelompok/bersama. Ini artinya menuntut siswa untuk bertukar pikiran, berani menyampaikan pendapatnya.” (wawancara mendalam dengan informan Z, 10 Oktober 2011)

Akan tetapi jika melihat persentase di atas, maka masih terdapat siswa yang kurang memiliki pengetahuan mengenai perilaku demokratis yaitu sebesar 47,6%, dimana pengetahuan mengenai perilaku cenderung negatif. Kecenderungan pengetahuan negatif ini menandakan bahwa masih adanya siswa yang kurang dapat memahami pentingnya suatu bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

**Tabel 5.1**  
**Pernyataan Terkait Dimensi Pengetahuan**

No	Pernyataan	TT	KT	T	ST
	Saya Tidak Tahu (TT) /Kurang Tahu (KT) /Tahu (T) /Sangat Tahu(ST):				
1.	mengenai adanya jaminan kebebasan pribadi	5,7%	12,4 %	50,5 %	31,4 %
2.	mengenai adanya kebebasan individu lain	2,9%	6,7%	54,3 %	36,2 %
3.	mengenai kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	0%	1%	40%	59%
4.	mengenai kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi	0%	2,9%	52,4 %	44,8 %
5.	setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	0%	3,8%	54,3 %	41,9 %
6.	mengenai partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	0%	1,9%	68,6 %	29,5 %

7.	setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk ikut-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan	0%	1%	56,2 %	42,9 %
8.	mengenai adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)	0%	2,9%	54,3 %	42,9 %
9.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah	0%	1%	46,7 %	52,4 %
10.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini	0%	1%	53,3 %	45,7 %
11.	mengenai adanya jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)	0%	4,8%	49,5 %	45,7 %
12.	mengenai adanya kesetaraan antar-warga	0%	13,3 %	56,2 %	30,5 %
13.	setiap siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi, sebagai siswa di sekolah ini	0%	3,8%	43,8 %	52,4 %
14.	mengenai perlunya saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)	0%	1,9%	41%	57,1 %
15.	mengenai adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)	1%	7,6%	57,1 %	34,3 %
16.	mengenai toleransi di dalam kehidupan bersama	0%	1,9%	41,9 %	56,2 %
17.	perlunya sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	0%	0%	48,6 %	51,4 %

Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pengetahuan siswa terkait perilaku demokratis. Pengetahuan tentang adanya jaminan kebebasan pribadi, adanya kebebasan individu lain, adanya kesetaraan antar-warga, adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan, belumlah dipahami secara baik oleh beberapa siswa sehingga dapat berakibat langsung kepada perilakunya.

#### 5.1.1.b Dimensi Sikap (*Affective*)

Dimensi sikap (*attitude*) ini merupakan aspek afektif dari variabel perilaku. Sebagai salah satu komponen dari konsep perilaku yang mana merupakan tingkat lanjutan dari dimensi pengetahuan (kognitif) yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya. Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang menunjukkan perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek yang sifatnya masih tertutup terhadap stimulus atau objek dan belum

merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi dari tindakan atau perilaku (Notoatmodjo: 2003). Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup bukan merupakan reaksi/tingkah laku yang terbuka (*covert behavior*). Lebih jauh lagi, dimensi sikap ini ditentukan oleh keyakinan individu tentang suatu objek atau stimulus tertentu. Dalam hal ini asumsinya bahwa jika seseorang sudah membentuk suatu keyakinan terhadap suatu objek, maka dengan sendirinya orang itu akan memperoleh sikap terhadap benda itu. Dalam penelitian ini, dimensi sikap dijabarkan untuk mengetahui seberapa besar perasaan suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju siswa mengenai mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. Oleh karenanya dimensi sikap ini akan menunjukkan aspek-aspek emosional individu siswa yang bersangkutan.

Dimensi sikap pun dalam kategorinya dibagi menjadi 2, yaitu sikap yang tinggi dan sikap yang rendah. Sikap yang tinggi menandakan bahwa siswa telah memiliki sikap yang mana berpijak pada nilai-nilai demokrasi, seperti bagaimana sikap mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, sikap menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan bersikap toleran. Sedangkan sikap yang rendah menandakan bahwa siswa belum/kurang memiliki sikap yang berpijak pada nilai-nilai demokrasi itu.

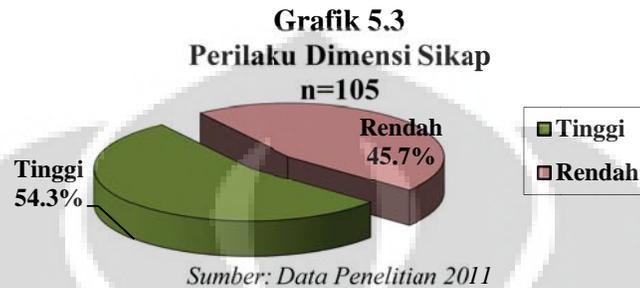
Untuk dimensi sikap ini peneliti menggunakan 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS)<sup>9</sup>. Penggunaan keempat pilihan jawaban ini digunakan bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tentang sikap yang terkait langsung dengan stimulus atau objek dalam penelitian ini, yaitu nilai-nilai demokrasi. Aspek yang ingin diukur dan dilihat dalam dimensi sikap ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perasaan suka atau tidak suka siswa mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti bagaimana sikap mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang

---

<sup>9</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut dijawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur sikap yang dimiliki oleh siswa. Skor terkecil yang diberikan adalah 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) hingga skor terbesarnya yaitu 4 untuk pilihan jawaban Sangat Setuju (SS).

sama/partisipasi, kesetaraan, sikap menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan bersikap toleran.

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan untuk melihat dimensi sikap siswa tersebut, didapatkan hasil sebagaimana yang tersaji dalam grafik 5.3 dibawah ini:



Berdasarkan grafik 5.3 di atas terlihat bahwa dari perhitungan statistik dengan total 105 responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada dimensi sikap memiliki kecenderungan tinggi yakni sebanyak 54,3%. Sedangkan sebanyak 45,7% memiliki sikap yang rendah.

Sikap itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Bentuk reaksinya pun dengan positif dan negatif yang meliputi rasa suka dan tidak suka, mendekati dan menghindari situasi, benda, orang, kelompok, dan kebijaksanaan sosial (Atkinson, dkk, 1993, dalam Harahap & Andayani, 2004: 5). Dalam mengukur sikap ini peneliti membuat pernyataan dalam kuesioner dengan mengaitkannya dengan situasi yang menghadapkan responden pada predisposisi tindakan atau perilaku demokratis di lingkungan sekolah sebagaimana bentuk representasi dari masyarakat luas. Seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Menyikapi perbedaan-perbedaan.. menurut saya perbedaan itu indah, dengan cara saling menghormati. (toleransi) sangat penting.. Perilaku demokratis itu adalah perilaku yang sifatnya terbuka dengan adanya perbedaan.”* (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

*“Ehm.. ya gitu deh.. misalnya kayak ngasih kesempatan buat nanya pas diskusi kelas, pas ada presentasi, trus nerima kritik dan saran, pokoknya saling nerima.. ng-hargaiin pendapat orang lain.”* (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

Pengetahuan tentang pentingnya bersikap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan bersama dan menjadi lebih efektif lagi ketika sekolah melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi, melalui pembiasaan dalam praktik-praktik yang berkaitan langsung dengan *learning to do and learning to live together*. Dan pada akhirnya akan diperoleh kesadaran akan pentingnya membiasakan diri untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hal tersebut sama seperti yang diutarakan oleh informan A berikut ini:

*“Di sekolah misalnya siswa bebas mengikuti kegiatan yang disukainya. Mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di sekolah, bisa terlibat jadi panitia. Toleransi antarsiswa yang beda agama, menghargai hari-hari besar agama masing-masing. Oo.. misalnya dengan saling memberi pendapat dan saran, pas dulu saya bebas memilih jurusan IPA atau IPS, partisipasi nentuin menu makanan di rumah.. (demokratis) penting banget..”* (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

Sikap yang terlihat dari perasaan suka seperti yang dinyatakan oleh informan di atas ternyata juga didasari oleh kesadaran akan pentingnya untuk ikutserta menjaga keharmonisan masyarakat melalui nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. Hal tersebut cukup memperlihatkan bahwa dengan pembiasaan, seorang siswa semakin menyukai dan menyadari pentingnya tatanan kehidupan yang demokratis. Hal tersebut juga seperti yang diutarakan oleh informan A berikut ini:

*“Menurut saya, itu penting. Indonesia itu majemuk, jadi kita harus menghormati semua orang, siapa aja dia.... kita bebas mo ngapain aja tapi tetep pada batasan tertentu, bebas yang sopan, bisa dipertanggung jawabkan. berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan, terlibat deh. Toleransi, saling menghargai pendapat, menerima saran dari orang lain.”* (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

Jika melihat persentase dari tingginya sikap mengenai nilai-nilai demokrasi yang dimiliki siswa yakni sebesar 54,3%, maka dapat dikatakan bahwa hal ini cukup terkait dengan berbagai macam pengetahuan yang diberikan oleh guru di kelas tentang pentingnya bersikap berlandaskan pada nilai-nilai

demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan pribadi dan orang lain, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi. Dengan luasnya wawasan siswa yang diiringi dengan pembiasaan sikap tersebut maka sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa suka, bangga, setuju akan demokratisasi. Hal ini cukup terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa seseorang akan memiliki perasaan (*afektif*) atau keyakinan (*belief*) terhadap suatu objek ketika mereka mempunyai pengetahuan (*knowledge*) tentang objeknya.

Namun jika melihat persentase dari rendahnya sikap mengenai nilai-nilai demokrasi sebesar 45,7%, dimana sikap tersebut cenderung negatif, maka dapat dikatakan bahwa di sekolah ini masih terdapat siswa yang kurang menyukai dan mencintai berbagai macam kegiatan yang berkaitan langsung dengan demokratisasi. Tentunya ini menarik untuk diketahui indikator sikap mana yang menunjukkan rendahnya sikap siswa terhadap nilai-nilai demokrasi (lihat tabel 5.2)

**Tabel 5.2**  
**Pernyataan Terkait Dimensi Sikap**

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	mengenai adanya jaminan kebebasan pribadi	0%	1%	45,7 %	53,3 %
2.	mengenai adanya kebebasan individu lain	0%	2,9%	49,5 %	47,6 %
3.	mengenai kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	0%	0%	26,7 %	73,3 %
4.	mengenai kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi	0%	1,9%	46,7 %	51,4 %
5.	setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	0%	0%	34,3 %	65,7 %
6.	mengenai partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	0%	0%	38,1 %	61,9 %
7.	setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk ikut-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan	0%	0%	40%	60%
8.	mengenai adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)	0%	0%	37,1 %	62,9 %
9.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah	0%	0%	28,6 %	71,4 %
10.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini	0%	0%	37,1 %	62,9 %

11.	mengenai adanya jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)	0%	0%	47,6 %	52,4 %
12.	mengenai adanya kesetaraan antar-warga	0%	1,9%	44,8 %	53,3 %
13.	setiap siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi, sebagai siswa di sekolah ini	0%	1%	21%	78,1 %
14.	mengenai perlunya saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)	0%	0%	25,7 %	74,3 %
15.	mengenai adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)	0%	1%	42,9 %	56,2 %
16.	mengenai toleransi di dalam kehidupan bersama	0%	0%	28,6 %	71,4 %
17.	perlunya sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	0%	0%	21,9 %	78,1 %

Sumber: Data Penelitian 2011

Dari beberapa indikator pernyataan yang diberikan kepada responden, nampak bahwa terdapat sebagian kecil responden tidak setuju terhadap adanya kebebasan individu lain, kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi, kesetaraan antar-warga, dan tanggungjawab atas kebebasan yang dimilikinya. Hal ini menandakan bahwa sekolah belum secara penuh melakukan sosialisasi-internalisasi tentang adanya kebebasan individu lain, kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi, kesetaraan antar-siswa, dan tanggungjawab atas kebebasan yang dimilikinya di sekolah. Meskipun secara persentase tidaklah signifikan, namun dalam hal ini, mengindikasikan bahwa sekolah belum secara penuh terfokus pada sosialisasi-internalisasi yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi itu.

#### 5.1.1.c Dimensi Tindakan Nyata (*Psychomotor*)

Tindakan (*practice*) merupakan dimensi terakhir dari variabel perilaku dimana tindakan merupakan suatu kesimpulan dari sikap dan pikiran seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi tindakan ini ditentukan oleh keyakinan serta pengetahuan individu tentang suatu objek atau stimulus. Pada dimensi tindakan ini merupakan aspek yang paling konkret, berupa praktik-praktik/pengalaman-pengalaman dari individu seseorang. Skinner (1938) mengungkapkan bahwa tindakan merupakan dimensi terakhir dari variabel

perilaku dimana tindakan merupakan praktek atau yang disebut dengan *overt behavior*, dimana perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung, tampak dalam bentuk tindakan nyata (dalam Notoatmodjo: 2006).

Dalam penelitian ini, dimensi tindakan dijabarkan untuk mengetahui seberapa besar tindakan siswa yang memiliki implikasi positif terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti mengenai adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan toleransi.

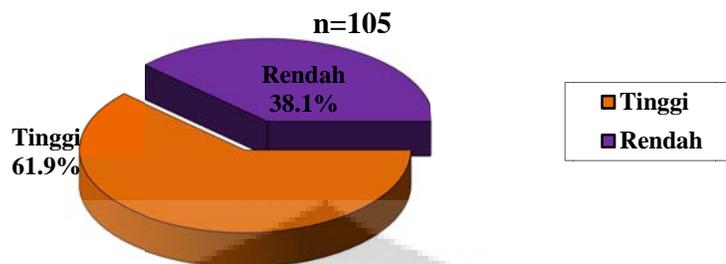
Dimensi tindakan pun dalam kategorinya dibagi menjadi 2, yaitu tindakan yang tinggi dan tindakan yang rendah. Tindakan yang tinggi menandakan bahwa siswa telah berperilaku demokratis yang mana telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti bagaimana perilaku terhadap adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, perlunya menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan bertindak toleran. Sedangkan tindakan yang rendah menandakan bahwa siswa belum/kurang memiliki perilaku demokratis, tindakan mereka belum/kurang berpijak pada nilai-nilai demokrasi itu.

Untuk dimensi tindakan ini peneliti menggunakan 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS)<sup>10</sup>. Penggunaan keempat pilihan jawaban ini digunakan bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan nyata yang terkait langsung dengan stimulus atau objek dalam penelitian ini, yaitu nilai-nilai demokrasi. Aspek yang ingin diukur dan dilihat dalam dimensi tindakan ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman/praktik-praktik langsung dari siswa mengenai nilai-nilai demokrasi, seperti bagaimana bentuk nyata perilaku terhadap adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, perlunya menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan bertindak toleran. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan untuk melihat dimensi tindakan nyata siswa tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut dijawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur sikap yang dimiliki oleh siswa. Skor terkecil yang diberikan adalah 1 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS) hingga skor terbesarnya yaitu 4 untuk pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS).

**Grafik 5.4**  
**Perilaku Dimensi Tindakan Nyata**



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasarkan grafik 5.4 di atas melalui perhitungan statistik dari dimensi tindakan, dari keseluruhan 105 responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada dimensi tindakan memiliki kecenderungan tinggi yaitu sebesar 61,9%. Sedangkan sisanya, responden yang memiliki tindakan berkecenderungan rendah adalah sebesar 38,1%. Berdasarkan grafik 5.4 juga terlihat bahwa sebagian besar responden pada pengukuran dimensi tindakan, memiliki kecenderungan yang tinggi, yaitu sebanyak 61,9%. Tindakan siswa yang tinggi ini menandakan bahwa siswa telah berperilaku demokratis yang mana telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti bagaimana perilaku terhadap adanya kebebasan, kesempatan yang sama/partisipasi, kesetaraan, perlunya menghormati/menghargai, tanggung jawab, dan bertindak toleran.

Siswa yang memiliki tindakan demokratis yang tinggi pada dasarnya telah memiliki sikap dan pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi yang tinggi juga. Hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan merupakan suatu kesimpulan dari sikap dan pikiran seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi tindakan ini ditentukan oleh keyakinan serta pengetahuan individu tentang suatu objek atau stimulus. Tindakan yang dilakukan oleh siswa, khususnya yang berkaitan langsung dengan praktik-praktik/pengalaman-pengalaman merupakan hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah terhadapnya, sehingga dengan pembiasaan tersebut segala siswa menjadi terbiasa dan memahami arti penting dari perilaku demokratis di kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Iya, misalnya kegiatan OSIS, ekskul. Di pelajaran PKn, pelajaran yang lain juga kan presentasi di depan kelas trus diskusi gitu. Menurut saya itu (penanaman nilai-nilai/praktik demokrasi) cukup efektif.”*

...dari temen kita bisa belajar untuk saling menjaga perasaan, menghargai pendapat.

*Iyalah.. (perilaku demokratis di masyarakat) penting.”* (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

Tindakan yang terlihat dari kebiasaan dalam berperilaku demokratis merupakan hasil pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah kepada siswanya. Pembiasaan dalam berperilaku demokratis ini mulai ditanamkan dan dipraktikkan sejak siswa baru duduk di bangku kelas satu. Tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi tersebut tidak hanya dipraktikkan di sekolah, tetapi juga di rumah.

*“Oo.. (di rumah ) misalnya dengan makan malam bersama.. membicarakan hal-hal yang terjadi atau topik tertentu. Iya, baik. Seperti mendengarkan pendapat kita. .. untuk melatih kita biar bisa terbuka, toleransi.”* (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

Tingginya tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dimiliki siswa ini terkait dengan berbagai macam pengetahuan dan keyakinan siswa akan implikasi positif dari demokratisasi. Pengetahuan dan keyakinan dari siswa sekolah ini dibentuk dan ditanamkan oleh sekolah melalui proses pembiasaan. Semakin matang keyakinan dan pengetahuan siswa akan pentingnya nilai-nilai demokrasi maka akan menghasilkan sebuah tindakan yang demokratis. Namun jika melihat persentase dari 5.4 di atas, maka dari hasil survey menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang kurang bertindak yang demokratis yaitu sebesar 38,1%, dimana tindakan cenderung negatif.

Untuk mengetahui indikator mana yang memperlihatkan tinggi rendahnya tindakan siswa terkait langsung dengan praktik-praktik/pengalaman-pengalaman yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, peneliti memaparkannya dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.3**  
**Pernyataan Terkait Dimensi Tindakan Nyata**

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	Saya Sangat Tidak Sesuai (STS) /Tidak Sesuai (TS) /Sesuai (S) /Sangat Sesuai (SS):				
1.	pengalaman akan adanya jaminan kebebasan pribadi	1%	12,4 %	70,5 %	17%
2.	selama ini bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, mengingat adanya kebebasan individu lain	0%	4,8 %	71,4 %	23,8 %

3.	pengalaman menggunakan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	0%	3,8 %	58,1 %	38,1 %
4.	menggunakan kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi	0%	5,7 %	58,1 %	36,2 %
5.	menggunakan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	1%	10,5 %	64,8 %	23,8 %
6.	berpartisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	1,9%	3,8 %	68,6 %	25,7 %
7.	selama ini ada kesempatan yang sama untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan	0%	10,5 %	59%	30,5 %
8.	selama ini saya telah menggunakan akses publik yang tersedia (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)	0%	2,9 %	60%	37,1 %
9.	pengalaman selama ini adanya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah ini	0%	5,7 %	61%	33,3 %
10.	menggunakan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini	1%	7,6 %	62,9 %	28,6 %
11.	pernah menggunakan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)	2,9%	7,6 %	50,5 %	39%
12.	selama ini saya telah memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan antar-warga	0%	5,7 %	72,4 %	21,9 %
13.	pengalaman sebagai siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi di sekolah ini	0%	2,9 %	53,3 %	43,8 %
14.	pengalaman saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)	0%	2,9 %	51,4 %	45,7 %
15.	selama ini saya telah bertanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)	1%	1,9 %	66,7 %	30,5 %
16.	selama ini saya telah melakukan toleransi di dalam kehidupan bersama	1%	1,9 %	53,3 %	43,3 %
17.	selama ini saya telah berlapang dada, terbuka, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	0%	4,8 %	58,1 %	37,1 %

Sumber: Data Penelitian 2011

Dari beberapa pernyataan indikator yang diberikan kepada responden, nampak bahwa terdapat beberapa responden yang tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti terlihat pada indikator adanya jaminan kebebasan pribadi, menggunakan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kesempatan yang sama untuk berperan-serta, menggunakan hak (dipilih dan memilih) dalam suksesi, dan memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan. Hal ini menandakan bahwa sekolah belum secara penuh melakukan sosialisasi-internalisasi tentang adanya kebebasan individu pribadi, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kesempatan yang sama untuk berperan-serta, penggunaan hak (dipilih dan

memilih) dalam suksesi, dan memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan. Meskipun secara persentase tidaklah signifikan, namun dalam hal ini, mengindikasikan bahwa sekolah belum secara penuh terfokus pada sosialisasi-internalisasi yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi tersebut.

Berdasarkan ketiga dimensi yang telah dijelaskan di atas, maka hasil yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 105 siswa, terlihat kecenderungan siswa di SMA ini telah memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang tinggi, yaitu sebesar 52.4%. Sedangkan sisanya sebesar 47.6% memiliki perilaku yang cenderung masih rendah. Lebih banyaknya siswa memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang tinggi dikarenakan dari tiga dimensi yang menjadi pembentuk perilaku (yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata), yang mana masing-masing dimensi tersebut juga memiliki persentase yang lebih besar pada kelompok tinggi. Untuk lebih mudahnya berikut merupakan gambaran tabel persentase semua dimensi yang membentuk perilaku demokratis siswa:

**Tabel 5.4**  
**Persentase Dimensi Perilaku Demokratis Siswa**

<b>Dimensi Perilaku Demokratis</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>
Pengetahuan ( <i>cognitive</i> )	47.6%	52.4%
Sikap ( <i>affective</i> )	45.7%	54.3%
Tindakan Nyata ( <i>psychomotor</i> )	38.1%	61.9%

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dari tabel 5.4 di atas, terlihat bahwa masing-masing dimensi dalam perilaku demokratis siswa menunjukkan persentase terbesarnya yang terdapat pada kolom tinggi. Untuk dimensi pengetahuan (*cognitive*) ditunjukkan dengan persentase sebesar 52,4%, dimensi sikap (*affective*) ditunjukkan dengan persentase sebesar 54,3% dan dimensi tindakan (*psychomotor*) ditunjukkan dengan persentase sebesar 61,9%. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku dibagi menjadi 3 domain yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan terakhir tindakan (psikomotor). Ketiga tataran ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk perilaku individu/seseorang. Unsur pengetahuan seseorang tentunya mempengaruhi sikap seseorang dalam melihat suatu objek atau stimulus yang

pada akhirnya menjadi dasar keyakinan mereka dalam bertindak. Tabel 5.4 di atas membuktikan secara empirik bahwa pengetahuan yang tinggi cenderung akan menghasilkan sikap yang tinggi (positif) yang pada akhirnya membentuk tindakan yang tinggi (positif) pula. Meskipun begitu tidak selalu pengetahuan yang tinggi akan menghasilkan sikap dan tindakan yang tinggi (positif) pula. Pengetahuan hanyalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi pembentukan sikap. Dalam pembentukan sikap individu turut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lainnya. Begitupun juga dengan dimensi tindakan. Jumlah siswa yang memiliki tindakan yang cenderung tinggi (positif) tidak sebanyak jumlah siswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi maupun sikap yang tinggi. Selain faktor pengetahuan dan sikap sebagai pembentuk tindakan, namun tindakan ini bisa terlaksana manakala adanya fasilitas yang mendukung serta adanya ketersediaan waktu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu maka akan ada kemungkinan dimana seseorang individu dengan pengetahuan dan sikap yang tinggi tidak dapat melakukan tindakan karena ketiadaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, ketiadaan fasilitas untuk melaksanakannya, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan tindakan tersebut.

### **5.1.2 Gambaran Variabel Independen Penelitian**

Dalam sub-bab ini peneliti akan menggambarkan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kurikulum terselubung (*hidden curriculum*). Kurikulum terselubung merupakan salah cara penanaman yang cukup berperan terhadap perkembangan seorang individu, baik itu pengetahuan, kemampuan hingga perilaku individu. Kurikulum terselubung dalam sebuah sekolah dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang tidak tertulis yang dapat menunjang siswa dalam mempersiapkan kehidupan yang nyata. Melalui aturan, peraturan, dan rutin (*rules, regulations, and routine*), siswa akan diharuskan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh sekolah dalam kurikulumnya (Benson Snyder, 1971). Kurikulum terselubung dalam penelitian ini adalah berupa keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang dijabarkan dalam mekanisme yang menurut Roland

Meighan terdiri dari dimensi *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan pemberian *reward- punishment* (imbalan-sanksi). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kurikulum terselubung dalam sebuah instansi pendidikan seperti sekolah ini berfungsi sebagai sosialisasi moral kepada murid-murid karena targetnya dalam mengubah perilaku siswa.

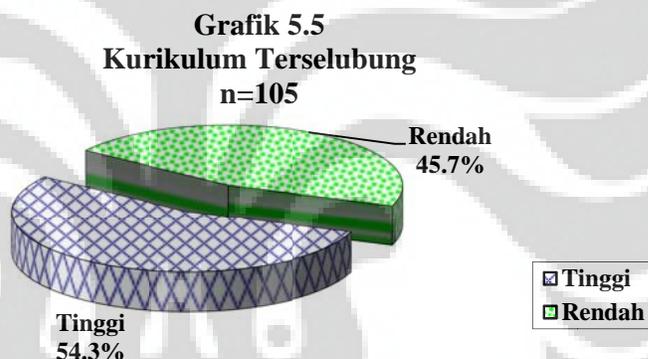
Sekolah menjadi agen sosialisasi yang cukup efektif dalam melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi pada individu/seseorang yang dapat membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka melalui mekanisme kurikulum terselubung. Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kurikulum terselubung yang berjalan di dalam sekolah ini terkait dengan proses penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah ini. Dan apakah mekanisme kurikulum terselubung tersebut turut-serta mewujudkan visi-misi-tujuan dari sekolah. Untuk mengukur dan melihat mekanisme yang terjadi di dalam penanaman nilai-nilai, Benson Snyder menyebutkan bahwa kurikulum terselubung dapat dilihat melalui 3 pola interaksi sosial, yaitu:

1. Generalisasi (*generalization*), merupakan sebuah proses dimana seorang individu memperoleh pengalaman yang memuaskan dalam suatu kegiatan tertentu
2. Menirukan contoh (*modelling*), merupakan sebuah proses dimana seorang individu menirukan cara berpikir, berperasaan, serta bertabiat dari orang lain yang dianggap berarti.
3. Imbalan dan sanksi (*reward and punishment*), merupakan sebuah proses dimana seorang individu diberikan sanksi ketika melanggar aturan dan diberikan imbalan ketika patuh terhadap aturan yang dijalankan oleh sekolah.

Mekanisme dalam kurikulum terselubung yang telah dijelaskan diatas merupakan fokus dalam penelitian ini, karena peneliti mengasumsikan ketiga mekanisme tersebut sebagai mekanisme yang paling berperan di dalam proses penanaman nilai di sekolah, walaupun dalam hal ini masih terdapat faktor-faktor lain yang berperan dalam penanaman nilai dalam mengubah sikap dan perilaku seseorang.

Penyajian kategori dalam variabel kurikulum terselubung ini akan disajikan dalam bentuk kategori tinggi dan rendah. Kategori kurikulum terselubung tersebut dibuat dengan menggabungkan skor dari ketiga dimensi dalam variabel kurikulum terselubung, yaitu dimensi *generalization*, *modelling* dan *reward and punishment* yang kemudian dibagi kembali dalam kategori tinggi dan rendah menggunakan rumus statistik.

Kurikulum terselubung tinggi menandakan bahwa sekolah telah memiliki kecenderungan proses penanaman nilai yang efektif. Sedangkan kecenderungan kurikulum terselubung yang rendah menandakan bahwa sekolah telah memiliki kecenderungan proses penanaman nilai yang kurang/tidak efektif. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan untuk melihat proses penanaman nilai dalam kurikulum terselubung, didapatkan hasil sebagaimana yang tersaji dalam grafik 5.5 dibawah ini:



*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasarkan grafik 5.5 di atas, melalui perhitungan statistik dari variabel kurikulum terselubung, secara keseluruhan dari 105 responden, dapat dilihat bahwa kecenderungan mekanisme kurikulum terselubung yang tinggi yaitu sebesar 54,3%. Sedangkan sisanya terlihat bahwa kecenderungan mekanisme kurikulum terselubung yang rendah adalah sebesar 45,7%. Hal tersebut telah memperlihatkan perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara kurikulum terselubung yang tinggi atau dapat dikatakan bahwa sekolah ini sebagai tempat proses penanaman nilai yang efektif. Sedangkan mekanisme kurikulum terselubung yang rendah dapat dikatakan bahwa sekolah ini sebagai tempat proses penanaman nilai yang kurang/tidak efektif.

Variabel kurikulum terselubung merupakan kumpulan dari berbagai macam mekanisme dan proses yang mempengaruhi proses penanaman nilai. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum terselubung merupakan gabungan dari dimensi-dimensi yang telah dijabarkan di atas. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi dari proses generalisasi (*generalization*), proses menirukan (*modelling*) dan juga imbalan dan sanksi (*reward and punishment*). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dimensi yang merupakan bagian dari dimensi dalam variabel kurikulum terselubung secara utuh.

#### **5.1.2.a Dimensi *Generalization***

Dimensi pertama dari variabel kurikulum terselubung adalah mekanisme *generalization* ini merupakan mekanisme yang dilakukan sekolah melalui penanaman nilai, pemberian pengalaman dengan memberikan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan visi-misi-tujuan dari kurikulum sekolah. Berbagai macam pengalaman yang diberikan oleh sekolah kepada siswanya dilakukan dengan mengadakan berbagai macam praktik-praktik langsung yang berkaitan dengan tujuan dari kurikulum sekolah yang bersangkutan. Seperti yang tertuang dalam visi-misi-tujuan dalam kurikulum SMA Negeri “X” Jakarta yaitu “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”, - “Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab”. Sehingga praktik-praktik yang diberikan oleh sekolah ini, salah satunya adalah segala macam praktik yang berkaitan langsung dengan mewujudkan-membentuk siswa yang memiliki sikap/perilaku demokratis. Dengan asumsi bahwa semakin baik pengalaman yang diberikan melalui praktik-praktik yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi maka akan semakin baik juga perilaku demokratis siswanya. Oleh karenanya mekanisme *generalization* dalam kurikulum terselubung ini cukup berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku siswa. Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme *generalization* ini juga disampaikan melalui interaksi antar agen sosialisasi sekolah, yang bisa terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas.

Dimensi *generalization* dalam variabel kurikulum terselubung disini merupakan salah satu unsur yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku siswa. Pengetahuan, sikap dan perilaku siswa akan terbentuk karena di dalam sekolah, siswa diberikan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi.

Kemudian dimensi *generalization* ini dikategorikan menjadi 2 yaitu tinggi dan rendah. Dalam hal ini *generalization* yang tinggi menandakan bahwa proses penanaman nilai, pemberian pengalaman yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme pemberian pengetahuan dan pengalaman oleh guru di sekolah telah berjalan efektif. Sebaliknya, untuk *generalization* yang rendah menandakan bahwa proses penanaman nilai, pemberian pengalaman yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme pemberian pengetahuan dan pengalaman oleh guru di sekolah kurang/tidak berjalan efektif.

Untuk *generalization* ini peneliti menggunakan 3 pilihan jawaban, yaitu Selalu, Kadang-Kadang, Tidak Pernah<sup>11</sup>. Penggunaan ketiga pilihan jawaban ini digunakan bersamaan dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan proses *generalization* yang terjadi di sekolah ini. Seperti cara seorang guru dalam memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan mengubah perilakunya dengan melakukan pembiasaan. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan hasil sebagaimana yang tersaji dalam grafik 5.6 dibawah ini:



*Sumber: Data Penelitian 2011*

<sup>11</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut di jawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur *generalization* sekolah. Skor terkecil yang diberikan adalah 0 untuk Tidak Pernah hingga skor terbesarnya yaitu 2 untuk pilihan jawaban Selalu.

Berdasarkan grafik 5.6 di atas, melalui perhitungan statistik dari variabel kurikulum terselubung, secara keseluruhan dari 105 responden, dapat dilihat bahwa kecenderungan mekanisme *generalization* yang tinggi yaitu sebesar 60%. Hal ini menunjukkan kecenderungan proses kurikulum terselubung yang berjalan dalam mekanisme *generalization* terbilang tinggi, dengan kata lain bahwa proses penanaman nilai, pemberian pengalaman yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme pemberian pengetahuan dan pengalaman oleh guru di sekolah telah berjalan efektif. Sedangkan siswanya terlihat bahwa kecenderungan mekanisme *generalization* yang rendah adalah sebesar 40%.

Dimensi *generalization* ini sangat terkait dengan bagaimana sekolah memberikan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan kepada siswanya melalui pemberian praktik maupun proses pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Hal tersebut terlihat dari cara guru memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswanya seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Kebanyakan orang salah mengartikan, atau mungkin kurang memahami. Demokrasi memang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tapi perlu diingat bahwa kebebasan itu ada tanggungjawabnya. Ada kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat, seperti perbedaan agama, suku/etnis, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut adalah kekayaan, khasanah tersendiri. Okelah, bebas asal tidak menyinggung orang lain, tidak ganggu/merusak, ehmm... toleransi aja, saling menghargai dan menghormati. Ya, kan... demokrasi mengajarkan kita untuk terbuka, toleran terhadap perbedaan. Kalau tadi pertanyaannya untuk penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan ya penting. Sekolah kan sebagai agen sosialisasi, bahkan sekarang dirasa sebagai agen sosialisasi yang utama.*

*Ya itu tadi, bebas ada batasan-batasannya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan/keterlibatan seseorang didalam suatu kelompok untuk mengambil bagian dalam kegiatan. Terus toleransi itu ya menghargai, menghormati orang lain, perbedaan-perbedaan yang ada.*

*Kurikulum terselubung sebagai salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang terus dikembangkan. Ehmm.. menurut saya cukup efektif guna penanaman nilai-nilai demokrasi. Artinya ada komunikasi dua arah antara siswa-guru.”* (wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)

Berbagai macam pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan sikap-perilaku demokratis telah diberikan oleh sekolah melalui guru atau pengajar

kepada siswanya melalui mekanisme *generalization* ini. Seperti yang telah diutarakan oleh informan tersebut bahwa pemberian materi pembelajaran tentang nilai-nilai demokrasi diberikan melalui proses belajar di kelas dengan diskusi dan juga melalui praktik. Namun efektif atau tidaknya mekanisme *generalization* tersebut sangat bergantung dari cara guru memberikan materi kepada siswanya. Efektifnya metode pembelajaran seperti yang telah diutarakan oleh responden tersebut terlihat dari mudah atau tidaknya materi pembelajaran itu diserap, yang lebih jauh lagi sangat terkait dengan cara guru memberikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran diskusi di kelas yang menarik akan membuat siswa menjadi mudah memahami materi yang diajarkan. Seperti yang diutarakan oleh seorang guru berikut ini:

*“Itu tadi saya katakan bahwa semua yang kita butuhkan itu terangkum di dalam kurikulum formal. Nah, guna mensinergiskan antara yang formal dengan terselubung diperlukan adanya suatu rekayasa sosial.*

*Misalnya kita ciptakan ‘ruang-ruang’ interaksi antar-siswa. Lucu kan kalau tiga tahun sekolah di sini kenalnya cuma itu-itu aja.*

*Kita guru-guru kan sebatas fasilitator... mesti inovatif.*

*Guru mesti inovatif, kalau gak ya akan tersisih. Anak-anak kan sudah canggih. Jadi bagaimana guru bisa membuat kelas itu ‘hidup’. Guru harus memperhatikan mobilitas di dalam kelas, karakteristik siswa.”*

(wawancara mendalam dengan informan Y, 12 Oktober 2011)

Dengan efektifnya proses yang terjadi di dalam mekanisme *generalization* seperti yang telah dijelaskan di atas maka akan berdampak langsung kepada pengetahuan, sikap dan lebih jauh lagi mampu mengubah perilaku siswa. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengetahuan dan pengalaman yang diserap oleh siswa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dari dimensi pengetahuan dan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Meskipun survei menunjukkan masih ada sebanyak 40% mekanisme penanaman nilai, pemberian pengalaman yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi melalui *generalization* yang rendah. Dengan kata lain bahwa di sini masih terdapat proses penanaman nilai, pemberian pengalaman oleh guru di sekolah kurang/tidak berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan masih ada kekuarangan dalam proses penanaman nilai, melalui cara penyampaian materi yang kurang dimengerti oleh siswa ataupun metode praktik yang kurang disukai oleh sejumlah siswa.

Berikut disajikan tabel 5.5 tentang pernyataan yang berhubungan dengan *generalization* di sekolah:

**Tabel 5.5**  
**Pernyataan Terkait Dimensi *Generalization***

No	Pernyataan	Selalu	Kadang - Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini membiasakan kepada siswa akan adanya jaminan kebebasan pribadi	33,3%	61,9%	4,8%
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menjelaskan kepada siswa untuk bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, mengingatkan adanya kebebasan individu lain	68,6%	31,4%	0%
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	85,7%	24,3%	0%
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi	66,7%	30,5%	2,9%
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	61,9%	38,1%	0%
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menerangkan tentang partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	57,1%	42,9%	0%
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menjelaskan tentang adanya kesempatan yang sama untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan	61%	39%	0%
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, GOR, gedung serba guna, dll)	60%	35,2%	4,8%
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menerangkan tentang adanya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah	76,2%	23,8%	0%
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kesempatan yang sama bagi siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini	63,8%	36,2%	0%
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menyerukan penggunaan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)	57,1%	38,1%	4,8%
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menghimbau kepada siswa untuk memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan	63,8%	31,4%	4,8%
13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu kepada siswa (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi di sekolah ini	71,4%	26,7%	1,9%
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)	84,8%	14,3%	1%
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu kepada siswa tentang adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)	69,5%	27,6%	2,9%

16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk melakukan toleransi di dalam kehidupan bersama	81,9%	17,1%	1%
17.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk berlapang dada, terbuka, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	84,8%	13,3%	1,9%

Sumber: Data Penelitian 2011

Tabel 5.5 diatas memperlihatkan bahwa penanaman nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme generalisasi ini masih ada kekurangan, dan yang paling menonjol adalah belum optimalnya bapak/ibu guru di sekolah ini dalam mensosialisasikan kepada siswa tentang adanya jaminan kebebasan pribadi. Padahal efektif atau tidaknya mekanisme *generalization* tersebut sangat bergantung dari cara guru memberikan materi kepada siswanya, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Kurangnya sosialisasi sekolah tentang adanya jaminan kebebasan pribadi diperlihatkan dari persentase sebesar 4,8% siswa yang merasa tidak pernah menerima ajaran tersebut dan sebesar 61,9% untuk siswa yang merasa hanya kadang-kadang menerima ajaran tentang adanya jaminan kebebasan pribadi dari bapak/ibu guru di sekolah.

#### 5.1.2.b Dimensi *Modelling*

Dimensi berikutnya dari variabel kurikulum terselubung yang akan dijelaskan ialah *modelling* sekolah. *Modelling* disini adalah suatu bentuk keteladanan dari pihak sekolah (bapak/ibu guru) dalam berperilaku yang demokratis. Dimensi ini merupakan sebuah proses dimana seorang individu menirukan cara berpikir, berperasaan, serta berperilaku dari orang lain yang dianggap berarti dan berkuasa di dalam lingkungan sosialnya. Bagi seorang murid, guru merupakan salah satu pihak yang dianggap berkuasa di dalam lingkungan sosialnya terutama di sekolah. Mekanisme *modelling* diawali dengan perhatian anak terhadap perilaku yang dianggap *significant other* dan mengingatnya dalam memori. Tahap selanjutnya adalah imitasi perilaku. Perilaku diulangi terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karenanya *role model* dari seorang guru memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku siswanya. Oleh karena itu, keberadaan guru dan tentunya juga teman di sekolah yang memiliki latar belakang beragam dapat

menjadi acuan bagi individu (siswa) dalam berperilaku. Siswa mendapatkan *modelling* (atau keteladanan) yang tinggi jika dalam persepsinya ia telah melihat guru dan teman-temannya di sekolah telah dapat menunjukkan perilaku demokratis yang positif, yaitu telah dapat menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Dengan perilaku demokratis guru dan teman yang cenderung positif dapat menjadi acuan bagi individu untuk juga berperilaku yang positif. Sedangkan siswa mendapatkan *modelling* (keteladanan) yang rendah jika ia merasa bahwa guru dan teman-teman di sekolahnya belum dapat berperilaku yang demokratis. Dan jika guru dan teman berperilaku yang cenderung negatif diasumsikan dapat membuat individu juga berperilaku yang negatif.

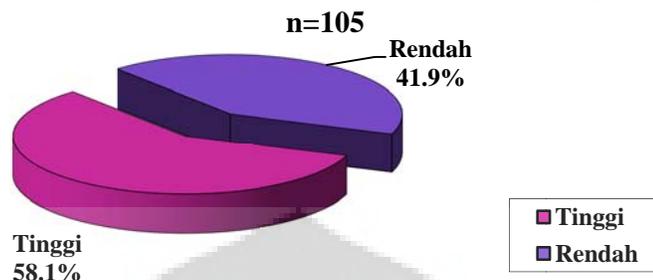
Kemudian dimensi *modelling* ini dikategorikan menjadi 2 yaitu tinggi dan rendah. Dalam hal ini *modelling* yang tinggi menandakan bahwa proses penanaman nilai, pemberian pengalaman, pemberian contoh/keteladanan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi oleh guru di sekolah telah berjalan efektif. Sebaliknya, untuk *modelling* yang rendah menandakan bahwa proses penanaman nilai, pemberian pengalaman, pemberian contoh/keteladanan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi oleh guru di sekolah kurang/tidak berjalan efektif.

Untuk *modelling* ini peneliti menggunakan 3 pilihan jawaban, yaitu Selalu, Kadang-Kadang, Tidak Pernah<sup>12</sup>. Penggunaan ketiga pilihan jawaban ini digunakan bersamaan dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan proses *modelling* yang terjadi di sekolah ini. Seperti cara seorang guru dalam memberikan contoh/keteladanan langsung kepada siswa dan mengubah perilakunya dengan melakukan pembiasaan. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, dengan 105 responden maka didapatkan hasil seperti pada grafik 5.7 di bawah ini.

---

<sup>12</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut di jawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur *modelling* sekolah. Skor terkecil yang diberikan adalah 0 untuk Tidak Pernah hingga skor terbesarnya yaitu 2 untuk pilihan jawaban Selalu.

**Grafik 5.7**  
**Kurikulum Terselubung Dimensi *Modelling***



Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan grafik 5.7 di atas, melalui perhitungan statistik dari dimensi *modelling*, secara keseluruhan dari 105 responden penelitian, dapat dilihat kecenderungan proses kurikulum terselubung yang berjalan dalam mekanisme *modelling* terbilang tinggi yaitu sebesar 58,1%. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa guru di sekolah ini telah memberikan contoh/keteladanan mengenai sikap dan perilaku demokratis pada responden (individu siswa). Keteladanan guru dalam memberikan contoh kepada siswanya terlihat dari cara guru itu bersikap dan berperilaku dalam rutinitas di sekolah. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*“Sebagai guru ya mengajarkan, dan mencontohkan, memberi teladan yang baik..*

*Sekarang ini sudah barang tentu guru-guru memberikan, mengajarkan, dan mencontohkan, memberi teladan yang baik. Mensosialisasikan bagaimana kebebasan yang bertanggungjawab, pentingnya partisipasi, dan juga pentingnya toleransi. Di kelas, di luar kelas, setiap saat, kapan saja dan di mana saja, Mas. Karena guru itu digugu dan ditiru.”*  
(wawancara mendalam dengan informan Z, 12 Oktober 2011)

Mengenai keteladanan para guru ini Kepala Sekolah mengatakan bahwa salah satu upaya sekolah di sekolah dalam mengurangi perbedaan pada murid yang beragam adalah dengan membangun suasana yang kekeluargaan antara pengajar dengan murid seperti yang diungkapkan olehnya berikut ini:

*“Ya.. layaknya anak dengan orang tua. Kami guru-guru semua prinsipnya asah-asih-asuh.*

*Pertama, memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga sekolah ini. Karena sebagai seorang pemimpin (orang tua), menjadi panutan. Maka dari itu guru-guru harus selalu memberikan contoh yang baik.*

*Kedua, mengajak dan melibatkan semua komponen yang ada.”*  
(wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)

Namun walaupun begitu ada pendapat lain dari responden dengan tingkat *modelling* yang rendah, yakni sebesar 41,9%. Hal ini menandakan bahwa sekolah belumlah optimal dalam memberikan contoh/keteladanan. Artinya masih ada teladan guru yang kurang/tidak baik, masih ada guru yang belum mampu memberikan contoh sikap dan perilaku yang demokratis.

Berikut ini akan disajikan tabel yang menunjukkan distribusi persentase pernyataan yang berhubungan dengan dimensi *modelling*.

**Tabel 5.6**  
**Pernyataan Terkait Dimensi *Modelling***

No	Pernyataan	Selalu	Kadang - Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan pribadi-siswa	42,9%	54,3%	2,9%
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, sesuai aturan, patuh pada tata-tertib yang ada	82,9%	17,1%	0%
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	87,6%	11,4%	1%
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi	74,3%	25,7%	0%
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini ikut-serta menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	65,7%	28,6%	5,7%
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	57,1%	38,1%	4,8%
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah	69,5%	29,5%	1%
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan penggunaan fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)	60%	30,5%	9,5%
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk memanfaatkan fasilitas sekolah	74,3%	24,8%	1%
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/peringatan hari besar nasional di sekolah ini	62,9%	36,2%	1%
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan penggunaan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)	57,1%	36,2%	6,7%
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan	64,8%	30,5%	4,8%

13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan perlakuan yang sama kepada siswanya (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya), tidak diskriminatif	79%	21%	0%
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)	87,6%	12,4%	0%
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)	73,3%	24,8%	1,9%
16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan tindakan toleransi di dalam kehidupan bersama	86,7%	13,1%	0%
17.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertindak terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	81%	19%	0%

Sumber: Data Penelitian 2011

Jika melihat pernyataan “Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan pribadi-siswa” pada tabel 5.6, dapat dilihat bahwa dalam penerapan mekanisme *modelling* terkait nilai demokrasi ini masih terdapat kekurangan. Hal tersebut terlihat ketika seorang guru sebagai seorang role model yang memiliki peranan penting bagi siswanya, belum sepenuhnya mampu memberikan keteladanan. Masih terdapat siswa yang merasa gurunya belum sepenuhnya bisa memberikan “ruang” untuk berekspresi secara individual bebas, persentase sebesar 2,9% dari siswa yang merasa Bapak/Ibu guru tidak pernah memberikan kebebasan pribadi-siswa dan sebesar 54,3% untuk siswa yang merasa kadang-kadang gurunya memberikan kebebasan pribadi-siswa di sekolah ini.

Secara teoritik dimensi *modelling* ini berimplikasi positif terhadap perilaku demokratis siswa, yaitu seperti siswa bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Namun disadari bahwa semakin baiknya mekanisme *modelling* yang terjadi di sekolah sangat bergantung dari seberapa sering role model itu memberikan contoh sehingga siswa memperhatikan dan mengingat kebiasaan seorang guru yang dilakukan secara berulang yang kemudian menjadi kebiasaan siswa itu sendiri. Begitupun juga sebaliknya, semakin buruk mekanisme *modelling* yang terjadi di sekolah, maka berkecenderungan menyebabkan rendahnya perilaku demokratis siswa. Buruknya mekanisme dalam *modelling* dapat terjadi karena role model jarang memberikan contoh berupa sikap maupun perilaku yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi kepada siswanya.

### 5.1.2.c Dimensi *Reward-Punishment*

Dimensi yang terakhir yang akan dijelaskan selanjutnya adalah mekanisme *reward and punishment* terhadap individu terkait dengan perilaku demokratis. Dimensi *reward and punishment* merupakan sebuah proses dimana seorang individu diberikan sanksi ketika melanggar aturan dan diberikan imbalan ketika patuh terhadap aturan yang dijalankan oleh sekolah. Peraturan di sini merupakan hasil dari persetujuan antara *significant others* dengan siswa sebagai pihak yang meniru dan mengulangi perilaku dari *significant others*. Melalui *reward and punishment* yang diberikan oleh orang lain diharapkan adanya kecenderungan individu untuk melakukan perilaku yang sama. Oleh karenanya, pelaksanaan *reward and punishment* yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi menjadi cukup efektif dalam membentuk perilaku demokratis siswa. Proses dalam mekanisme ini juga ditentukan oleh tingkat disiplin yang diterapkan di sekolah dalam menjalankan aturan tata tertib secara konsekuen serta akibat yang dikenakan pada siswa.

Kemudian kategori *reward* dan *punishment* sekolah ini dibagi menjadi dua, yaitu tinggi dan rendah. Dalam hal ini siswa mendapatkan *reward* dan *punishment* yang tinggi dari sekolah jika ia telah mendapatkan dua hal tersebut dari guru ataupun teman (siswa lainnya), manakala mereka menunjukkan perilaku demokratis yang positif ataupun negatif. Sedangkan siswa mendapatkan *reward* dan *punishment* yang rendah jika ia merasa belum atau tidak mendapatkan bahwa dua hal tersebut dari guru maupun temannya manakala mereka menunjukkan perilaku demokratis yang positif ataupun negatif.

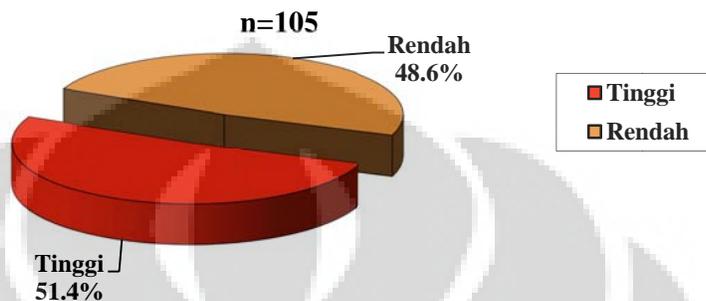
Untuk *reward and punishment* ini peneliti menggunakan 3 pilihan jawaban, yaitu Selalu, Kadang-Kadang, Tidak Pernah<sup>13</sup>. Penggunaan ketiga pilihan jawaban ini digunakan bersamaan dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan *reward and punishment* yang terjadi di sekolah ini. Perlu ditekankan di sini bahwa peran guru dan teman dalam mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* ini sudah termasuk kualitas yang diberikan dan

---

<sup>13</sup> Penggunaan pernyataan/pertanyaan tersebut di jawab dengan pilihan jawaban yang telah disediakan untuk mengukur *reward and punishment* sekolah. Skor terkecil yang diberikan adalah 0 untuk Tidak Pernah hingga skor terbesarnya yaitu 2 untuk pilihan jawaban Selalu.

juga kuantitas/frekuensi melakukan mekanisme tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 105 orang responden maka didapatkan hasil seperti disajikan pada grafik 5.8 di bawah ini:

**Grafik 5.8**  
**Kurikulum Terselubung Dimensi *Reward and Punishment***



Berdasarkan grafik 5.8 di atas, melalui perhitungan statistik dari dimensi *reward and punishment*, secara keseluruhan dari 105 responden penelitian, memperlihatkan kecenderungan proses kurikulum terselubung yang berjalan dalam mekanisme *reward and punishment* tinggi yaitu sebesar 51,4%. Hal ini telah mengindikasikan bahwa di sekolah ini telah memberikan imbalan dan sanksi manakala seorang siswa menunjukkan perilaku demokratis yang positif ataupun negatif. Dan berdasarkan wawancara kepada beberapa responden, pada dasarnya mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang berkaitan dengan perilaku demokratis siswa ini meskipun distribusi frekuensi di atas menggambarkan bahwa pemberian *reward* dan *punishment* menunjukkan angka yang lebih besar pada kategori tinggi namun tinggi disini dapat diartikan bahwa pemberian keduanya bersifat jarang. Begitupun juga dengan tingkat pemberian yang rendah dapat diartikan tidak pernah dilakukan.

Beratnya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar ternyata telah membuat siswa menjadi lebih patuh kepada peraturan dan beradaptasi dengan peraturan yang ada, lebih jauh lagi mampu membiasakan dirinya terkait dengan peraturan yang diberikan (yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi), seperti yang telah diungkapkan oleh informan B sebagai berikut:

*“Ada, (pemberian punishment) misalnya jika kita melanggar kita akan disuruh nyanyi di lapangan, atau dikeluarkan dari kelas. kita akan diberi*

*poin, trus lama-lama bisa diskorsing deh atau panggilan orang tua.”*  
(wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

Mengenai pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* yang diberikan oleh guru terkait dengan perilaku demokratis ini, Kepala Sekolah mengatakan bahwa memang tidak ada aturan-aturan khusus yang dibuat oleh sekolah dalam mengatur perilaku demokratis. Selama ini aturan resmi tertulis yang dibuat oleh sekolah hanya terkait dengan masalah kedisiplinan siswa ditambah dengan beberapa aturan tidak tertulis lainnya yang mengatur norma antar sesama anggota sekolah, baik itu antara guru dan siswa serta antara siswa-siswa di dalamnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan X berikut:

*“Secara tertulis memang tidak ada. Tetapi sekolah tentu membiasakan hal tersebut.*

*Aturan yang dibuat resmi pun yaitu soal disiplin siswa layaknya sekolah lain. Tapi bagaimanapun juga kan kita guru-guru semua berusaha memperhatikan tingkah laku anak-anak.”* (wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)

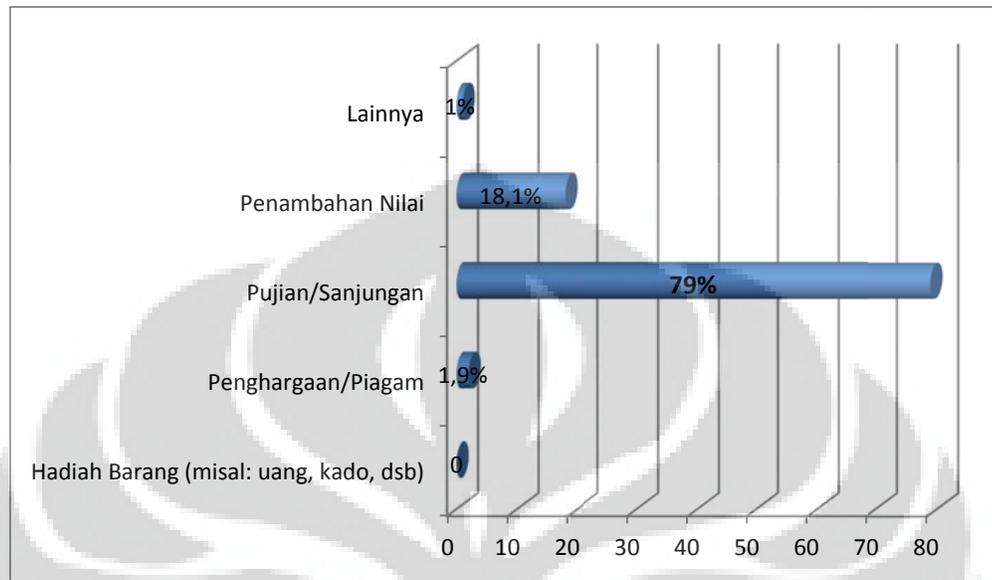
Dengan kutipan dari Kepala Sekolah tersebut maka dapat dikatakan bahwa mekanisme *reward punishment* ini belum tersistematis dengan baik di sekolah. Dari hal tersebut maka terdapat responden dengan tingkat *reward* dan *punishment* yang rendah atau dapat dikatakan tidak mendapatkan *reward* dan *punishment* sebagai imbalan atas perilakunya. Seperti yang terlihat pada hasil survey di mana tingkat *reward and punishment* yang rendah, yakni sebesar 48,6%. Hal ini menandakan bahwa sekolah belumlah optimal dalam pelaksanaan *reward and punishment*. Artinya masih ada guru yang kurang/tidak baik, masih ada guru yang belum mampu melaksanakan *reward and punishment* atas sikap dan perilakunya. Seperti dikatakan oleh seorang informan berikut:

*“Kalau guru yang melanggar, katanya sih gajinya dipotong tapi nggak tau bener pa nggak.*

*Ya jarang (pemberian reward).. paling kalau abis menang lomba, atau kalau kita berkelakuan baik, dipuji, kadang di kelas ada penambahan nilai gitu..”* (wawancara mendalam dengan informan A, 12 Oktober 2011)

Adapun bentuk *Reward* yang paling sering diberikan oleh sekolah adalah seperti tersaji dalam grafik 5.9 berikut ini

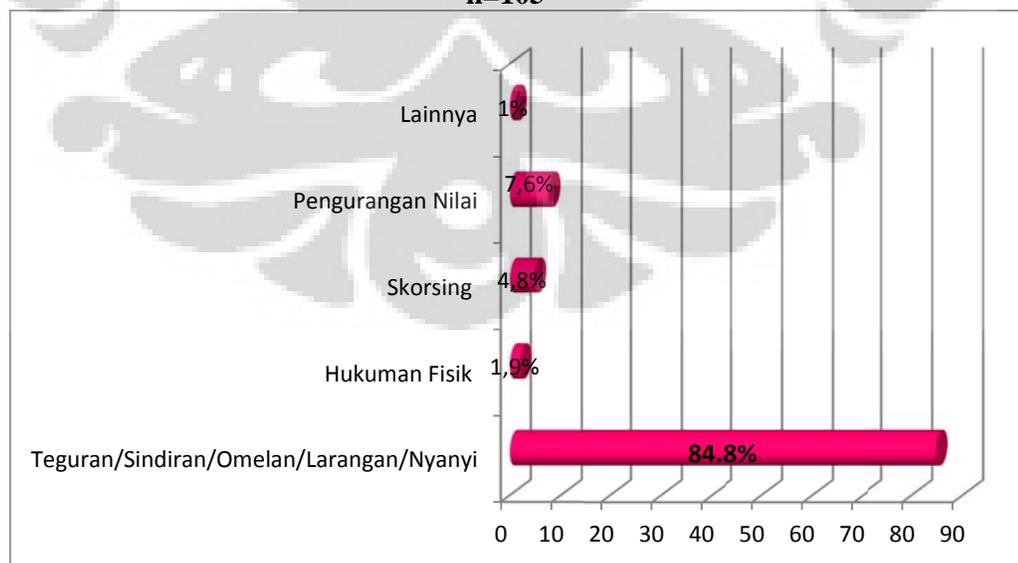
**Grafik 5.9**  
**Bentuk Reward**  
**n=105**



Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan grafik 5.9 di atas, melalui perhitungan statistik dari dimensi *reward and punishment*, secara keseluruhan dari 105 responden penelitian, menyatakan bahwa responden berkecenderungan menerima *reward* dari pihak sekolah dalam bentuk pujian/sanjungan, yakni sebesar 79%.

**Grafik 5.10**  
**Bentuk Punishment**  
**n=105**



Sumber: Data Penelitian 2011

Sedangkan bentuk *Punishment* yang paling sering diberikan oleh sekolah adalah seperti tersaji dalam grafik 5.10 di atas, yang mana melalui perhitungan statistik dari dimensi *reward and punishment*, secara keseluruhan dari 105 responden penelitian, menyatakan bahwa responden berkecenderungan menerima *punishment* dari pihak sekolah dalam bentuk teguran/sindiran/omelan/larangan/nyanyi, yakni sebesar 84,8%.

Berikut disajikan tabel 5.7 tentang pernyataan yang berhubungan dengan pemberian *reward and punishment*.

**Tabel 5.7**  
**Pernyataan Terkait Dimensi *Reward and Punishment***

No	Pernyataan	Selalu	Kadang - Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa bertindak tidak memperhatikan batasan-batasan, tidak sesuai aturan, tidak patuh pada tata-tertib	81%	18,1%	1%
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan	62,9%	34,3%	2,9%
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa aktif di dalam kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi	62,9%	32,4%	4,8%
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini	17,1%	60%	22,9%
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa berpartisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)	25,7%	58,1%	16,2%
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak berperan-serta dalam kegiatan musyawarah	26,7%	44,8%	28,6%
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menggunakan fasilitas publik secara baik	54,3%	32,4%	13,3%
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa yang sembarangan dalam memanfaatkan fasilitas sekolah	69,5%	29,5%	1%
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/ peringatan hari besar nasional di sekolah ini	39%	52,4%	8,6%
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menggunakan "haknya dipilih-memilih" dalam suksesi/pemilihan ketua kelas, osis, pemilu, dsb	29,5%	53,3%	17,1%
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa memperlakukan orang lain tidak berdasar prinsip kesetaraan	45,7%	46,7%	7,6%
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa bertindak diskriminatif (misal: hanya mau berteman dengan yang seagama, satu etnis/suku, satu kelas sosial-ekonomi)	53,3%	36,2%	10,5%
13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter	47,6%	42,9%	9,5%

	manusia)			
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak bertanggung jawab atas kebebasan perbuatannya (perbedaan paham/keyakinan/pendapat yang menimbulkan perselisihan)	65,7%	33,3%	1%
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak bertoleransi dengan sesama	68,6%	27,6%	3,8%
16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa bertindak terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada	72,4%	19,0%	8,6%

Sumber: Data Penelitian 2011

Jika melihat pernyataan “Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi *Reward* ketika siswa menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini” dan pernyataan “Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi *Reward* ketika siswa berpartisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)” pada tabel 5.7, dapat dilihat bahwa dalam penerapan mekanisme *reward and punishment* yang terkait nilai-nilai demokrasi ini masih terdapat kekurangan. Hal tersebut terlihat ketika seorang siswa melakukan suatu tindakan yang diharapkan oleh sekolah yaitu manakala siswa berperan-serta, ikut berpartisipasi, menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang tersedia, namun seorang guru tidak secara penuh memberikan *reward* atas tindakan tersebut. Dengan kurangnya pemberian *reward* kepada siswa yang berperilaku sesuai harapan akan mampu berdampak kepada perilaku siswa itu sendiri sehingga ketika siswa tersebut tidak mendapatkan *reward*, akan merasa malas untuk melakukan tindakan yang diharapkan tersebut. Dari survei ada 60% siswa yang mengatakan guru kadang-kadang dan tidak pernah memberikan *reward* ketika ketika siswa berpartisipasi, menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang tersedia di sekolah ini.

Berdasarkan ketiga dimensi kurikulum terselubung yang telah dijelaskan di atas, maka hasil yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 105 responden, maka dapat dikatakan bahwa siswa SMA Negeri “X” Jakarta cenderung telah mendapatkan mekanisme kurikulum terselubung yang tinggi dari sekolah, yaitu diwakili oleh 54,3% dan sisanya 45,7% mendapatkan kurikulum terselubung dari sekolah yang rendah. Lebih banyaknya siswa yang mendapatkan mekanisme kurikulum terselubung yang tinggi dari sekolah dikarenakan dari tiga

dimensi yang menjadi pembentuk variabel kurikulum terselubung, masing-masing dimensi tersebut juga cenderung tinggi. Untuk lebih mudahnya berikut merupakan gambaran tabel persentase semua dimensi yang membentuk variabel kurikulum terselubung sekolah (tabel 5.8):

**Tabel 5.8**  
**Persentase Dimensi Kurikulum Terselubung**

<b>Dimensi Kurikulum Terselubung</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>
Generalisasi ( <i>Generalization</i> )	40%	60%
Menirukan Contoh ( <i>Modelling</i> )	41.9%	58.1%
Imbalan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> )	48.6%	51.4%

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dari tabel 5.8 di atas, terlihat bahwa masing-masing dimensi dalam kurikulum terselubung yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi menunjukkan mayoritas berada pada kolom tinggi. 60% untuk dimensi generalisasi (*generalization*), 58,1% untuk dimensi menirukan contoh (*modelling*) dan 51,4% untuk dimensi imbalan dan sanksi (*reward and punishment*). Selain itu, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa meskipun ketiga dimensi perilaku tersebut tinggi, namun persentase terbesar ditunjukkan pada dimensi generalisasi (*generalization*). Generalisasi (*generalization*) adalah mekanisme yang paling banyak ditangkap oleh siswa, yang diikuti oleh dimensi menirukan contoh (*modelling*) dan terakhir yang memiliki persentase terendah dalam dimensi imbalan dan sanksi (*reward and punishment*).

Mekanisme *generalization* ini merupakan mekanisme yang dilakukan sekolah melalui penanaman nilai, pemberian pengalaman dengan memberikan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi yang mana sesuai dengan visi-misi-tujuan dari kurikulum sekolah. Dengan asumsi bahwa semakin baik pengalaman yang diberikan melalui praktik-praktik langsung yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi maka akan semakin baik juga perilaku demokratis siswanya. Oleh karenanya mekanisme *generalization* dalam kurikulum terselubung ini cukup berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku siswa. Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui mekanisme *generalization* ini juga disampaikan melalui interaksi antar agen sosialisasi

sekolah, yang bisa terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sini siswa diberikan kebebasan dan kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung. Dengan berekspresi dalam bentuk kepanitiaan, kegiatan OSIS, kegiatan kulikuler, *talk show*, seminar, dan lain-lain. Oleh karena itu melalui mekanisme *generalization* ini para siswa dapat lebih mudah menerima dan menyerap nilai-nilai yang terkait dengan perilaku demokratis.

Di dalam sekolah pemberian *modelling* lebih dilihat siswa dalam proses penanaman nilai dikarenakan dalam sekolah yang beratmosfer demokratisasi ini dapat diberikan secara langsung oleh guru dan siswa lainnya melalui pemberian contoh/keteladanan sikap dan perilaku demokratis. Akan tetapi, peneliti menduga bahwa mekanisme *modelling* ini belumlah terlaksana secara optimal. Sedangkan keterbatasan dalam mekanisme *reward and punishment* sebagai dimensi dengan penerimaan yang terendah ini dikarenakan faktor sekolah masih belum mampu atau merasa kesulitan dalam memberikan *reward and punishment*.

## 5.2 Perbedaan Perilaku Demokratis Siswa IPA dan IPS

Seperti yang telah menjadi asumsi peneliti bahwa perbedaan jurusan IPA dan IPS, terkait pula dengan adanya perbedaan mata pelajaran yang diberikan di antaranya keduanya (kelompok jurusan IPA/IPS) berkecenderungan mempengaruhi perilakunya, khususnya perilaku demokratis. Dari hal tersebut maka peneliti mencoba untuk melihat apakah ada perbedaan kecenderungan perilaku demokratis siswa di antara kedua kelompok jurusan tersebut. Berikut merupakan tabel perbedaan perilaku demokratis siswa berdasarkan kelompok jurusan.

**Tabel 5.9**  
**Perbandingan Persentase**  
**Perilaku Demokratis Siswa jurusan IPA dan IPS**  
**n=105**

Kecenderungan Perilaku Demokratis Siswa	Jurusan	
	IPA	IPS
<b>Rendah</b>	23 (35,4%)	12 (30%)
<b>Tinggi</b>	<b>42</b> <b>(64,6%)</b>	<b>28</b> <b>(70%)</b>
<b>Total</b>	65 (100%)	40 (100%)

Sumber: Data Penelitian 2011

Dari tabel 5.9 di atas, melalui perhitungan statistik, secara keseluruhan dari 105 responden penelitian, membuktikan bahwa tidak ada perbedaan perilaku demokratis siswa, di antara keduanya, baik kelompok IPA maupun kelompok IPS sama-sama memiliki tingkat perilaku demokratis yang tinggi. Pada kelompok IPA kecenderungan siswa memiliki perilaku demokratis yang tinggi, yaitu sebesar 64,6%. Sedangkan untuk kelompok IPS kecenderungan siswa memiliki perilaku demokratis yang tinggi yaitu sebesar 70%. Hal ini menandakan bahwa baik kelompok jurusan IPA maupun IPS telah berperilaku demokratis yang positif, yaitu telah dapat menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Tidak adanya perbedaan perilaku demokratis siswa, di antara kelompok IPA maupun kelompok IPS, bisa dimengerti karena terdapat karakteristik responden yang homogeny (lihat suku/etnis, agama, dan kelas sosial: menengah dan atas).

### 5.3 Analisis Hubungan Antar-Variabel Penelitian

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen kurikulum terselubung dengan variabel dependen perilaku demokratis siswa. Dalam artian akan dijelaskan bagaimana pengaruh kurikulum terselubung terhadap perilaku demokratis siswa. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai hubungan antara dimensi masing-masing dari variabel independen dengan variabel dependennya. Penjelasan hubungan antar variabel ini dilakukan dengan memuatnya ke dalam tabel silang dan menginterpretasikannya. Untuk menentukan kekuatan hubungan antar variabel, akan dilakukan uji hipotesis<sup>14</sup> dengan statistik *Somer's d* untuk melihat signifikansi dan kekuatan dari hubungan tersebut. Selain itu, variabel-variabel yang ditampilkan pada bagian ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang terkait sebagai landasan berpikir dalam membahas hubungan antar variabel. Peneliti menggunakan tingkat kepercayaan

---

<sup>14</sup> *Ho*: Tidak terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa  
*Ha*: Terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa

sebesar 95%, yang artinya kesalahan dalam penelitian yang dapat ditoleransi kurang dari 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila signifikansi yang tercantum dalam tabel uji statistik sama dengan atau lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, sebaliknya apabila signifikansi yang tercantum dalam tabel uji statistik lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima. Pun apakah hubungan-hubungan antar variabel tersebut berlaku di tingkat populasi, sekali lagi peneliti tegaskan bahwa penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *non-probability sampling*.

### 5.3.1 Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa

Melalui kapasitasnya, sekolah sebagai sebuah institusi sosial yang mana berperan sebagai agen sosialisasi dan agen kontrol sosial, melakukan kegiatan reproduksi. Dimana sekolah menghasilkan sebuah produk tidak dalam bentuk material tetapi cenderung sebagai *human capital*. Sekolah sebagai salah satu bentuk institusi pendidikan formal memiliki peran penting terutama dalam penanaman nilai. Sekolah dalam melakukan penanaman nilai melalui dua cara, yaitu dengan kurikulum formal, dimana di dalamnya diajarkan keahlian dan pengetahuan, dan yang kedua melalui kurikulum terselubung, yang di dalamnya diajarkan mengenai norma dan juga nilai yang ditransmisikan melalui aturan, rutinitas, tampilan kelas, dan lain sebagainya (Lawson, Jones & Moores, 2000: 64). Kurikulum terselubung yang dalam penelitian ini berupa keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang dijabarkan dalam mekanisme yang menurut Roland Meighan terdiri dari dimensi *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan pemberian *reward-punishment* (imbalan-sanksi).

Peran sekolah dalam proses internalisasi (sosialisasi-kontrol lewat berbagai kesempatan dan cara) ini diharapkan dapat mengubah perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang mewarnai struktur masyarakat, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai demokrasi, dimana mereka tidak hanya mengenalnya tetapi juga mempraktikkannya dalam segala gerak kehidupannya. Perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada

kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Dalam konteks ini tentu kiranya dipandang perlu untuk mengedepankan budaya sekolah yang positif, sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai yang dianut dari sekolah yang bersangkutan. Terkait penelitian ini, budaya sekolah yang coba ditumbuhkembangkan di SMA Negeri “X” Jakarta, salah satu adalah dengan nilai-nilai demokrasi. Dimana sesuai visi-misi-tujuan dari sekolah yaitu “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”, - “Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab”.

Pada bagian ini merupakan analisis utama peneliti dimana variabel-variabel utama di dalam penelitian ini adalah kurikulum terselubung sebagai variabel independen dan perilaku demokratis siswa sebagai variabel dependennya. Dalam analisis ini peneliti mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan melihat kekuatan hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis, sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kurikulum terselubung. Lebih jauh lagi akan dilakukan intepretasi dari hubungan kedua variabel tersebut, yang kemudian akan dikaji lagi menggunakan analisis yang lebih mendalam. Hal itu dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 5.10**  
**Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap**  
**Perilaku Demokratis Siswa**  
**n=105**

		Kurikulum Terselubung		Total
		Rendah	Tinggi	
Perilaku Demokratis Siswa	Rendah	52.1%	43.9%	50 47.6%
	Tinggi	47.9%	56.1%	55 52.4%
Total		48 100%	57 100%	105 100%

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel 5.10 di atas, terlihat bahwa responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang tinggi menyatakan bahwa sekolah

memiliki penerapan kurikulum terselubung yang tinggi, yaitu sebesar 56,1%. Sedangkan pada responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang rendah menyatakan bahwa sekolah memiliki penerapan kurikulum terselubung yang rendah, yakni sebesar 52,1%. Selain menggunakan penghitungan dengan tabel silang, juga dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji statistik Sommers'd tentang kurikulum terselubung dan perilaku demokratis siswa menunjukkan ada hubungan yang nyata diantara kedua variabel tersebut (lihat tabel 5.11).

**Tabel 5.11**  
**Uji Somers'd Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa**

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi
Kurikulum Terselubung (independen) dan Perilaku Demokratis Siswa (dependen)	0,382	0,003

Sumber: Data Penelitian 2011

*Ho: Tidak terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa*

*Ha: Terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa*

Berdasarkan perhitungan statistik diatas (tabel 5.11), maka didapatkan kekuatan hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa, mempunyai kekuatan hubungan yang cukup atau sedang dengan nilai sebesar 0,382. Artinya hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup atau sedang. Selain itu, dengan nilai p value atau signifikansi sebesar 0,003 dan menggunakan tingkat kepercayaan yang menjadi standard peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *Ho* ditolak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekolah melakukan proses sosialisasinya melalui dua cara, yaitu *pertama* dengan kurikulum formal, dimana di dalamnya diajarkan *skill* (keahlian) dan *knowledge* (pengetahuan), dan *kedua* melalui dengan *hidden curriculum* (kurikulum terselubung), yang di

dalamnya diajarkan mengenai norma dan juga nilai yang ditransmisikan melalui aturan, rutinitas, tampilan kelas, dan lain sebagainya Lawson, Jones & Moores, 2000: 64). Namun dalam penelitian ini digunakan kurikulum terselubung sebagai faktor yang membentuk perilaku pada siswa di sekolah. Dengan proses tersebut maka sekolah dalam artian menanamkan nilai-nilai demokratis, seperti kebebasan dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengukur proses yang terjadi di dalam kurikulum terselubung tersebut maka fokus penelitian ini yaitu kurikulum terselubung yang berupa keseluruhan interaksi, rutinitas, atau proses-proses sosial yang relatif sistematis sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang dijabarkan dalam mekanisme yang menurut Roland Meighan terdiri dari dimensi *generalization* (generalisasi), *modelling* (mengikuti contoh), dan pemberian *reward-punishment* (imbalan-sanksi).

Perilaku demokratis adalah perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, yang memiliki implikasi baik secara positif maupun negatif. Implikasi positif dan negatif ini sangat bergantung dari bagaimana manusia sebagai seorang individu itu memaknai arti/makna demokrasi dalam kehidupan bersama. Perilaku demokratis yang positif, artinya seorang individu telah dapat menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Perilaku demokratis ini pada sebagian besar siswa diakui terbentuk karena pengaruh dari penanaman nilai yang telah ditanamkan oleh sekolah melalui pembiasaan. Seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Kita ketahui ada pengelompokan siswa, gangster-gengster, peergroup kalau dalam istilah sosiologinya, itu wajar di usia mereka. Tapi yang terpenting bagaimana ini menciptakan sesuatu yang positif. Makanya memahami perbedaan diantara siswa, peergroup, dan orang lain ya perlu diajarkan... sebagai hal yang perlu ‘dibiasakan’.”* (wawancara mendalam dengan informan Y, 12 Oktober 2011)

Ada hal yang menarik dari hasil paparan tabel 5.11 di atas, hubungan yang terjadi antara kurikulum terselubung sebagai variabel independen dan perilaku demokratis siswa sebagai variabel dependen cenderung cukup atau sedang dengan nilai 0,382. Hasil tersebut menunjukkan bahwa memang kurikulum terselubung telah berperan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kurikulum terselubung di SMA Negeri “X” Jakarta sudah diterapkan secara cukup efektif. Akan tetapi hasil tersebut (kekuatan hubungan 0,382=cukup atau sedang) juga menunjukkan bahwa selain mekanisme kurikulum terselubung ada beberapa faktor yang juga mendasari pembentukan perilaku demokratis siswa.

Berdasarkan hasil observasi, kurikulum formal maupun kurikulum terselubung di sekolah ini dibuat sesuai dengan salah satu dari visi-misi-tujuan sekolah yaitu nilai-nilai demokrasi, hal ini didukung dengan ekstrakurikuler ataupun acara-acara tertentu yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai demokrasi. Peneliti melihat terdapat beberapa faktor yang ada di dalam sekolah itu yang mampu mengubah perilaku siswa di sekolah seperti bagaimana struktur dan budaya sekolah yang dibuat dan ditumbuhkembangkan terkait kondisi sosial di sekolah, acara-acara ekstrakurikuler ataupun *event-event* tertentu yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai demokrasi, dan juga *exemplification* (kedekatan personal antara guru-guru dengan siswa) menurut Inkeles berpengaruh dalam mengembangkan daya nalar dan pembentuk perilaku siswa (dalam Hilarius, 2005), serta segala kebiasaan yang terkait dengan tujuan yang ada dalam kurikulum sekolah. Peneliti beranggapan bahwa beberapa hal ini ternyata cukup menjadi faktor lain di sekolah yang mempengaruhi pembentukan perilaku demokratis siswa.

Faktor *pertama* ialah terkait dengan struktur sekolah itu sendiri yang diwujudkan dari fasilitas fisik, sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah dan kurikulum nyata. SMA Negeri “X” Jakarta ini menerapkan kurikulum KTSP, dan sebagai sekolah negeri RSBI. Dengan hal tersebut maka tentunya konsekuensinya ialah sekolah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas ataupun kebutuhan bagi para siswa untuk beraktualisasi diri, dan juga guna mewujudkan visi-misi-tujuan dari sekolah itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama

dimana sekolah yang menerapkan kurikulum KTSP, dan sebagai sekolah negeri RSBI maka model pembelajarannya sangat menuntut siswa untuk lebih aktif, diskusi, kerja kelompok, presentasi hampir setiap mata pelajaran, dan lain sebagainya. Dengan bertemunya siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda di dalam/luar kelas tersebut dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal satu sama lain dan secara langsung maupun tidak memberikan “ruang” tersendiri bagi mereka untuk bertukar pikir, mengemukakan pendapat, saling menghargai perbedaan, dan bebas disertai tanggung jawab untuk berekspresi.

Faktor *kedua* ialah karena adanya ekstrakurikuler atau *event-event* tertentu yang di dalamnya secara tidak langsung mengajarkan dan memberikan wawasan mengenai nilai-nilai demokrasi (demokratisasi). Ekstrakurikuler di SMA Negeri “X” Jakarta ini merupakan bagian dari kegiatan kurikuler yang diperuntukkan bagi siswa untuk meningkatkan sisi non-akademis mereka. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dipilih siswa, secara bebas, menurut peminatan atau hobi mereka masing-masing. Untuk ekstrakurikuler di sekolah ini pun tidak ada pembatasan anggota di dalamnya, yaitu di sini dalam arti tidak ada pembatasan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, semua memiliki kesempatan yang sama, kecuali ekskul rohani yang memang diperuntukkan sebagai wadah untuk siswa-siswi SMA Negeri “X” Jakarta dari tiap-tiap agama agar bisa bersama mengadakan acara keagamaan masing-masing. Dengan tidak adanya pembatasan anggota tersebut akhirnya siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat bertemu dalam satu wadah, dimana kesamaan minat merekalah yang akhirnya menjadi salah satu faktor integrasi, dan menjadikan perbedaan masing-masing itu bukan sebagai satu masalah namun sesuatu yang lumrah dan harus dihormati. Adanya OSIS dan MPK juga mengajarkan kepada mereka secara langsung tentang kehidupan demokratis di sekolah. Selain itu dengan mengikuti perlombaan antar sekolah membuat mereka mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan berbagai karakter siswa dari sekolah lain, yang berbeda dengan mereka. *Event-event* tertentu yang diadakan oleh sekolah juga turut serta menanamkan nilai-nilai demokrasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 4, sekolah mengadakan acara seperti bakti sosial, seminar, *talkshow* ataupun acara lain yang mana sedikit banyak memberikan wawasan dan pengalaman mengenai

urgensi nilai-nilai demokrasi yakni kebebasan dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Selain itu perlu peneliti kemukakan di sini bahwa sekolah ini bermitra dengan ICW dan KPK. Kedua lembaga ini seringkali mengadakan seminar/talkshow yang memberikan wawasan pendidikan dan pengalaman mengenai pendidikan antikorupsi dan pentingnya tegaknya pilar-pilar demokrasi bagi kehidupan berbangsa. Hal tersebut seperti yang diuraikan dalam kutipan langsung dari informan berikut ini:

*“Kami ingin mempelopori gerakan antikorupsi di seluruh sekolah. Ini untuk kebaikan, ....prihatin dengan saling serang antarlembaga negara yang seharusnya menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi.”* (dalam aksi dukung pemberantasan korupsi melalui gerakan 1.000 tanda tangan, turut hadir fungsional KPK dan ICW)

Faktor *ketiga* ialah mengenai *exemplification*, yaitu mengenai kedekatan yang terjadi antara guru dan juga siswa pada umumnya. Ahli pendidikan John Dewey (dalam Agus Salim, 2005), menyatakan bahwa:

- a. hubungan personal antara guru dan siswa akan lebih meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar.
- b. guru akan lebih berhasil mengajak siswa sukses dalam belajar melalui pendekatan-pendekatan intuitif yang menguntungkan dalam proses belajar.

Kedekatan antara siswa dengan guru di sekolah dibutuhkan, dengan model *informal communication* yang dapat memanfaatkan situasi perbedaan di dalam kelas, yaitu guru yang memiliki asumsi lebih liberal dengan melaksanakan *personal approach* atau hubungan interpersonal (Samovar & Porter, 2001: 228-229, dalam Agus Salim, 2005: 149). Menjadi guru dimana guru harus menjadi milik semua siswa tidak mengandung sekat-sekat penanda dan juga pemisah di antara pribadi yang terlibat dalam proses belajar di sekolah (Agus Salim, 2005: 149). Berdasarkan observasi di SMA Negeri “X” Jakarta ini, peneliti memang melihat adanya perbedaan hubungan yang terjadi antara siswa dengan guru-guru yang melakukan pendekatan formal dan pendekatan informal. Guru-guru yang telah melaksanakan *personal approach* kepada siswa secara umum, membuat siswa dapat merasakan perhatian yang sama dari guru, yang membuat mereka

tidak merasa didiskriminasi atau membeda-bedakan. Kedekatan ini diakui oleh para beberapa siswa yang menjadi informan, yang menyatakan bahwa mereka lebih nyaman dan senang dengan guru-guru yang dekat dengan semua anak. Melalui observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri “X” Jakarta ini memang tidak semua guru sudah melakukan *personal approach* ini dengan baik. Untuk pendekatan ini pun juga pada dasarnya sudah dihimbau oleh Kepala Sekolah kepada guru, namun dalam pelaksanaannya memang tak mudah, karakteristik yang dimiliki masing-masing guru tersebut serta ada tidaknya kesempatan bagi guru menjadi faktor tidak mudahnya dilakukan pendekatan tersebut.

Faktor *keempat* ialah mengenai segala kebiasaan, regulasi, dan juga simbol-simbol yang terkait dengan tujuan yang ada dalam kurikulum sekolah. Dalam artian segala kebiasaan, regulasi, dan juga simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan seluruh warga sekolah tentu sejalan dengan visi-misi-tujuan sekolah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SMA Negeri “X” Jakarta ini merupakan sebuah sekolah dengan visi-misi-tujuan “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”, - “Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab” sehingga segala kebiasaan, regulasi, dan juga simbol-simbol pun secara spesifik lebih diarahkan kepada pembentukan sikap dan perilaku siswa.

Jadi dari uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor lain di sekolah dalam mewujudkan perilaku demokratis siswa, selain melalui mekanisme kurikulum terselubung (*generalization, modelling* dan *reward and punishment*) berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti. Faktor lain tersebut secara langsung atau tidak langsung turut menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Selanjutnya, dimensi-dimensi dari kurikulum terselubung (*generalization, modelling* dan *reward and punishment*) juga akan dilihat hubungannya dengan perilaku demokratis siswa.

### 5.3.2 Hubungan antara Mekanisme *Generalization* terhadap Perilaku Demokratis Siswa

Bagian ini akan menjelaskan hubungan mekanisme generalisasi sebagai salah satu dimensi dari variabel kurikulum terselubung yang mempengaruhi variabel perilaku demokratis siswa. Dalam analisis ini peneliti ingin membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan melihat seberapa luas generalisasi ini mempengaruhi perilaku demokratis siswa serta melakukan analisis untuk mengkajinya dengan lebih mendalam (lihat tabel 5.12).

**Tabel 5.12**  
**Hubungan antara Mekanisme Generalisasi terhadap**  
**Perilaku Demokratis Siswa**  
**n=105**

		<i>Generalization</i>		Total
		Rendah	Tinggi	
Perilaku Demokratis Siswa	Rendah	52.1%	29.8%	42 47.6%
	Tinggi	47.9%	70.2%	63 52.4%
Total		48 100%	57 100%	105 100%

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, terlihat bahwa responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang tinggi menyatakan bahwa sekolah memiliki penerapan mekanisme generalisasi yang tinggi, yaitu sebesar 70,2%. Sedangkan pada responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang rendah menyatakan bahwa sekolah memiliki penerapan mekanisme generalisasi yang rendah, yakni sebesar 52,1%. Selain menggunakan penghitungan dengan tabel silang, juga dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji statistik Sommers'd tentang mekanisme generalisasi dan perilaku demokratis siswa menunjukkan ada hubungan yang nyata diantara kedua variabel tersebut (lihat tabel 5.13).

**Tabel 5.13**  
**Uji Somers'd Hubungan antara Mekanisme *Generalization* terhadap**  
**Perilaku Demokratis Siswa**

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi
Mekanisme Generalisasi (independen) dan Perilaku Demokratis Siswa (dependen)	0,481	0,005

*Sumber: Data Penelitian 2011*

*Ho: Tidak terdapat hubungan antara generalisasi dengan perilaku demokratis siswa*

*Ha: Terdapat hubungan antara generalisasi dengan perilaku demokratis siswa*

Berdasarkan perhitungan statistik diatas (tabel 5.13), maka didapatkan kekuatan hubungan antara mekanisme generalisasi dengan perilaku demokratis siswa, mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat, dengan nilai sebesar 0,481. Artinya hubungan antara mekanisme generalisasi dengan perilaku demokratis siswa memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup kuat. Selain itu, dengan nilai p value atau signifikansi sebesar 0,005 dan menggunakan tingkat kepercayaan yang menjadi standard peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *Ho* ditolak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat hubungan antara mekanisme generalisasi dengan perilaku demokratis siswa.**

Peran sekolah dalam mekanisme generalisasi ini mempunyai pengaruh terhadap pembentukan kecenderungan perilaku demokratis siswa. Mekanisme generalisasi tinggi menandakan bahwa sekolah telah memiliki kecenderungan proses penanaman nilai dan pemberian pengalaman yang efektif. Maksudnya *generalization* di sini merupakan mekanisme yang dilakukan sekolah melalui penanaman nilai, pemberian pengalaman dengan memberikan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan visi-misi-tujuan dari kurikulum sekolah. Berbagai macam pengalaman yang diberikan oleh sekolah kepada siswanya dilakukan dengan mengadakan berbagai macam praktik-praktik langsung yang berkaitan dengan tujuan dari kurikulum sekolah yang bersangkutan. Seperti yang tertuang dalam visi-misi-tujuan dalam kurikulum SMA Negeri "X" Jakarta yaitu "Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global", - "Membentuk siswa yang

memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab”. Sehingga praktik-praktik yang diberikan oleh sekolah ini, salah satunya adalah segala macam praktik yang berkaitan langsung dengan mewujudkan-membentuk siswa yang memiliki sikap/perilaku demokratis.

Pada dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, mekanisme generalisasi yang dilakukan oleh sekolah melalui kurikulum terselubung dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi ini cukup terimplementasi dengan baik yang memiliki implikasi secara positif. Artinya seorang individu telah dapat menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Lebih jauh lagi, jika melihat uji hubungan antara mekanisme generalisasi dengan perilaku demokratis siswa maka dapat dilihat bahwa adanya kekuatan hubungan yang cukup kuat, yaitu 0,481. Cukup kuatnya pengaruh mekanisme generalisasi ini terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa ini dapat dilihat dari efektifnya penggunaan metode pembelajaran praktik yang disukai oleh siswa dan dianggap lebih mudah dipahami. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

*“Ya, seperti membuat kelompok diskusi, ya begitu juga pada cara lain seperti lewat ekskul.*

*....secara garis besar itu (praktik) cukup efektif.”* (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

Pengaruh dari mekanisme generalisasi ini juga tergambar dari pemahaman informan tentang arti penting demokrasi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal tersebut seperti yang diutarakan sebagaimana berikut:

*“Ya.. demokratisasi segala bidang, termasuk di dunia pendidikan. Ini bukan era orde baru lagi. Jadi semua orang tahu akan hak asasi, seperti hak mendapatkan pendidikan.”* (wawancara mendalam dengan informan Z, 12 Oktober 2011)

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti melihat adanya semangat dan ketertarikan siswa serta kebiasaan dari sekolah terhadap proses belajar-mengajar di kelas maupun di luar kelas. Untuk proses belajar dikelas, hampir semua mata pelajaran menuntut keaktifan para siswa

melalui presentasi, diskusi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Guru kelas yang mengajar berperan sebagai fasilitator, memberikan berbagai macam issue (stimulan-stimulan) yang kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi tanya jawab. Model pembelajaran yang “menggairahkan” ini mampu meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran yang berlangsung hingga akhirnya proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, suasana kelas pun “hidup”. Yang tentunya proses ini sangat bergantung dari kemampuan seorang guru dalam menciptakan suasana yang demokratis, kebebasan berbicara menyampaikan pendapat yang disertai tanggung jawab, menghormati/menghargai pendapat siswa yang lain, berpartisipasi memberikan ide/gagasan/masukan/saran, dan bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sedangkan untuk kegiatan di luar kelas (kulikuler) sekolah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan visi-misi-tujuan dari kurikulum sekolah, memberikan praktik-praktik langsung kepada siswanya. Lebih jauh lagi, khususnya dalam membentuk perilaku demokratis siswa.

### 5.3.3 Hubungan antara Mekanisme *Modelling* terhadap Perilaku Demokratis Siswa

Selanjutnya yang akan peneliti jelaskan ialah mengenai hubungan antara mekanisme *modelling* sebagai salah satu dimensi dari kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa. Dalam analisis ini peneliti mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan memperkirakan seberapa kuat mekanisme *modelling* ini mempengaruhi perilaku demokratis siswa. Hal tersebut dapat digambarkan melalui tabel 5.14 di bawah ini:

**Tabel 5.14**  
**Hubungan antara Mekanisme *Modelling* terhadap Perilaku Demokratis Siswa**  
n=105

		<i>Modelling</i>		Total
		Rendah	Tinggi	
Perilaku Demokratis Siswa	Rendah	51.9%	36.8%	46 47.6%
	Tinggi	48.1%	63.2%	59 52.4%
Total		48 100%	57 100%	105 100%

Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan tabel 5.14 di atas, terlihat bahwa responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang tinggi menyatakan bahwa sekolah memiliki penerapan mekanisme *modelling* yang tinggi, yaitu sebesar 63,2%. Sedangkan pada responden yang memiliki kecenderungan perilaku demokratis yang rendah menyatakan bahwa sekolah memiliki penerapan mekanisme *modelling* yang rendah, yakni sebesar 51,9%. Selain menggunakan penghitungan dengan tabel silang, juga dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji statistik Sommers'd tentang mekanisme *modelling* dan perilaku demokratis siswa menunjukkan ada hubungan yang nyata diantara kedua variabel tersebut (lihat tabel 5.15).

**Tabel 5.15**  
**Uji Somers'd Hubungan antara Mekanisme *Modelling* terhadap Perilaku Demokratis Siswa**

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi
Mekanisme <i>Modelling</i> (independen) dan Perilaku Demokratis Siswa (dependen)	0,426	0,004

*Sumber: Data Penelitian 2011*

*Ho: Tidak terdapat hubungan antara modelling dengan perilaku demokratis siswa*

*Ha: Terdapat hubungan antara modelling dengan perilaku demokratis siswa*

Berdasarkan perhitungan statistik diatas (tabel 5.15), maka didapatkan kekuatan hubungan antara mekanisme *modelling* dengan perilaku demokratis siswa, mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat, dengan nilai sebesar 0,426. Artinya hubungan antara mekanisme *modelling* dengan perilaku demokratis siswa memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup kuat. Selain itu, dengan nilai p value atau signifikansi sebesar 0,004 dan menggunakan tingkat kepercayaan yang menjadi standard peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *Ho* ditolak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat hubungan antara mekanisme *modelling* dengan perilaku demokratis siswa.**

Dalam konteks sekolah yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya guru dan juga teman, mempengaruhi pembentukan perilaku demokratis siswa. Guru bertanggung jawab untuk menampilkan nilai-nilai demokrasi yang diajarkan

melalui perilaku mereka yang konsisten dengan nilai tersebut. Ketika guru memberikan teladan yang baik maka siswa juga cenderung akan meneladani dengan juga berperilaku demokratis yang tinggi. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang telah dijelaskan melalui dimensi *generalisasi* tentunya harus ditunjang dengan keteladanan yang diperlihatkan guru melalui perilaku. Begitupun juga perilaku siswa lainnya, jika siswa lainnya (teman di sekolah) cenderung tidak memilih-milih dalam berteman, khususnya berkaitan dengan agama, suku/etnis atau kelas sosial maka individu (siswa) juga akan cenderung untuk berperilaku yang sama dan dapat menghargai perbedaan di antara siswa-siswa lainnya. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa peran guru dan teman (siswa lainnya) dalam mekanisme *modelling* yang tinggi mengindikasikan bahwa dalam persepsi siswa, guru-guru di sekolah dan teman-teman di sekolah secara umum telah memberikan teladan atau menjadi contoh dalam berperilaku demokratis. Sebaliknya, peran guru dan juga teman dalam mekanisme *modelling* yang rendah mengindikasikan bahwa dalam persepsi siswa, baik guru maupun teman sekolah cenderung tidak/kurang melakukan perannya dalam memberikan keteladanan terkait perilaku demokratis.

Adanya hubungan seperti yang diuji pada tabel 5.14 dan tabel 5.15, menandakan bahwa guru dan juga teman sekolah yang telah memberikan teladan yang baik dalam berperilaku yang demokratis akan turut mendorong individu untuk berperilaku yang sama. Seperti yang dituturkan informan:

*“Ya... rasakan pengaruhnya dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi, melatih (memberi contoh) kita biar berperilaku itu (demokratis). Semua... Guru, orang tua, temen..”* (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

Mengenai keteladanan para guru ini, kepala sekolah mengatakan bahwa salah satu upaya sekolah dalam menanamkan perilaku terkait dengan nilai-nilai demokrasi adalah dengan pembiasaan yang dilakukan kepada siswa, seperti yang diungkapkan olehnya dalam kutipan berikut ini:

*“Penanaman tersebut melalui rutinitas sehari-hari, di dalam maupun di luar kelas. Interaksi antara siswa, guru, tata usaha, dan semua warga sekolah. Kami melakukannya dengan cara pembiasaan.. Justru dengan pembiasaan, dapat merubah perilaku para siswa.. Kalau hanya dikasih ilmu tapi ngga diaplikasikan, pengalaman di lapangan, menurut saya*

*kurang berpengaruh. Makanya semua guru maupun staff, semua warga sekolah ini juga melakukan pembiasaan untuk berperilaku toleran dan partisipatif, bebas dengan tanggungjawab, kita semua sebagai warga sekolah ini.”* (wawancara mendalam dengan informan X, 12 Oktober 2011)

Dengan melihat kutipan dari kepala sekolah tersebut maka dapat dikatakan bahwa peran seluruh warga sekolah dalam mekanisme *modelling* yang tinggi menandakan bahwa dalam persepsi siswa, guru-guru di sekolah ataupun kepala sekolah secara umum telah memberikan keteladanan atau telah mampu menjadi contoh dalam berperilaku demokratis. Hal ini menandakan bahwa sekolah telah memiliki kecenderungan pemberian contoh/keteladanan yang efektif. Lebih jauh lagi, tingginya penerapan mekanisme dalam pemberian *modelling* ini mampu mengubah perilaku siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, yang memiliki implikasi baik secara positif maupun negatif. Implikasi positif dan negative ini sangat bergantung dari bagaimana manusia sebagai seorang individu itu memaknai arti/makna demokrasi dalam kehidupan bersama. Perilaku demokratis yang positif, artinya seorang individu telah dapat menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Luasnya pengaruh mekanisme *modelling* ini juga telah dibuktikan melalui tabel 5.14 dan 5.15 bahwa semakin tingginya pemberian *modelling* terkait dengan nilai-nilai demokrasi maka siswa akan berkecenderungan semakin berperilaku demokratis. Kuatnya pengaruh mekanisme *modelling* terhadap perilaku demokratis siswa ini dikarenakan adanya pemberian contoh perilaku yang sesuai dengan visi-misi-tujuan SMA Negeri “X” Jakarta, yang akhirnya membuat siswa merasa mudah meniru perilaku tersebut.

#### **5.3.4 Hubungan antara Mekanisme *Reward and Punishment* terhadap Perilaku Demokratis Siswa**

Selanjutnya yang akan peneliti jelaskan ialah mengenai hubungan antara mekanisme *reward and punishment* sebagai salah satu dimensi dari kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa. Dalam analisis ini peneliti

mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan memperkirakan seberapa kuat mekanisme *reward and punishment* ini mempengaruhi perilaku demokratis siswa, serta melakukan analisis untuk mengkajinya dengan lebih mendalam. Hal tersebut dapat digambarkan melalui tabel 5.16 di bawah ini.

**Tabel 5.16**  
**Hubungan antara Mekanisme *Reward-Punishment* terhadap Perilaku Demokratis Siswa**  
**n=105**

		<i>Reward-Punishment</i>		Total
		Rendah	Tinggi	
Perilaku Demokratis Siswa	Rendah	56.3%	42.1%	51 48.6%
	Tinggi	43.8%	57.9%	54 51.4%
Total		48 100%	57 100%	105 100%

Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan tabel 5.16 di atas, maka dapat diketahui bahwa sebesar 57,9% responden yang memiliki perilaku demokratis yang tinggi mendapatkan penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* yang tinggi dari sekolah. Sedangkan 56,3% responden yang memiliki perilaku demokratis yang cenderung rendah mendapatkan penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* yang rendah pula. Uji statistik Sommers'd tentang mekanisme *reward and punishment* dan perilaku demokratis menunjukkan ada hubungan yang nyata diantara kedua variabel tersebut (lihat tabel 5.17).

**Tabel 5.17**  
**Uji Somers'd Hubungan antara Mekanisme *Reward-Punishment* terhadap Perilaku Demokratis Siswa**

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi
Mekanisme <i>Reward-Punishment</i> (independen) dan Perilaku Demokratis Siswa (dependen)	0,161	0,014

Sumber: Data Penelitian 2011

*Ho: Tidak terdapat hubungan antara reward-punishment dengan perilaku demokratis siswa*

*Ha: Terdapat hubungan antara reward-punishment dengan perilaku demokratis siswa*

Berdasarkan perhitungan statistik diatas (tabel 5.13), maka didapatkan kekuatan hubungan antara mekanisme *reward-punishment* dengan perilaku demokratis siswa, mempunyai kekuatan hubungan yang cukup lemah, dengan nilai sebesar 0,161. Artinya hubungan antara mekanisme *reward-punishment* dengan perilaku demokratis siswa memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup lemah. Selain itu, dengan nilai p value atau signifikansi sebesar 0,014 dan menggunakan tingkat kepercayaan yang menjadi standard peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa *H<sub>0</sub>* ditolak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat hubungan antara mekanisme *reward-punishment* dengan perilaku demokratis siswa.**

Salah satu bagian penting dalam proses sosialisasi di sekolah ialah bagaimana sekolah (guru selaku *significant other*) memberikan motivasi kepada anak didiknya agar mau mempelajari pola tingkah laku tertentu. Motivasi itu dibedakan menjadi dua tipe yaitu *reward* (hadiah) dan *punishment* (sanksi/hukuman). Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka fungsi keduanya digunakan untuk memotivasi siswa untuk berperilaku yang demokratis.

Terdapatnya penerapan mekanisme *reward and punishment* sebagai salah satu bentuk sosialisasi yang diberikan agen kepada individu juga mampu memberikan sebuah kontrol sosial atas perilaku individu menjadi lebih terarah, seperti yang diterapkan di sekolah ini yaitu peraturan yang disesuaikan dan sejalan dengan visi-misi-tujuan sekolah. Dengan diberikannya *reward*, maka diharapkan seseorang dapat menyadari bahwa perilaku yang telah dilakukannya merupakan perilaku positif yang akhirnya membuat individu tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dan dapat menjadi sebuah kebiasaan karena pengulangan tindakan tersebut. Sedangkan *punishment* diberikan ketika individu melakukan hal yang tidak diharapkan orang lain atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat sehingga dengan diberikannya *punishment* tersebut, individu diharapkan tidak melakukan hal yang sama. Berkaitan dengan penelitian ini, *reward* diberikan ketika siswa cenderung berperilaku berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, yang memiliki implikasi baik secara positif. Artinya seorang siswa telah dapat menunjukkan perilaku yang

berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti bertindak bebas dengan disertai rasa tanggung jawab, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berprinsip pada kesetaraan antar-warga negara, saling menghormati/menghargai, dan bertoleransi. Demikianpun sebaliknya.

Hal lainnya yang dapat dilihat dari tabel di atas (tabel 5.16 dan 5.17) ialah mengenai hubungan di antara kedua variabel yang cenderung lemah. Lemahnya hal tersebut dikarenakan sekolah kurang begitu serius dalam penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* kepada semua warga sekolah baik kepada para siswa maupun guru-gurunya. Hal ini seperti yang dirasakan oleh informan berikut:

*“Ada, (pemberian punishment) jika kita melanggar kita akan diberi poin, trus lama-lama bisa diskorsing deh atau panggilan orang tua. Kalau guru yang melanggar, katanya sih gajinya dipotong tapi nggak tau bener pa nggak.*

*Ya jarang.. (pemberian reward) paling kalau abis menang lomba, atau kalau kita berkelakuan baik, dipuji, kadang di kelas ada penambahan nilai gitu..”* (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

*“Ada, (pemberian punishment) misalnya jika kita melanggar kita akan disuruh nyanyi di lapangan, atau dikeluarkan dari kelas. Kalau guru yang melanggar, enggak tau tuh.”* (wawancara mendalam dengan informan B, 21 Oktober 2011)

Hasil uji Somers'd pada tabel 5.17 juga telah menunjukkan bahwa mekanisme *reward and punishment* tersebut memiliki pengaruh yang cukup lemah terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa, yaitu sebesar 0,161. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada kenyataannya lemahnya pengaruh ini terjadi karena mekanisme *reward and punishment* yang dijalankan disekolah ini tidak terimplementasi dengan baik sehingga kurang mampu mempengaruhi perilaku siswa. Bentuk pemberian *reward and punishment* yang paling sering diberikan itu berbentuk verbal, yaitu mencakup pujian/sanjungan (sebagai *reward*) dan teguran/sindiran (sebagai *punishment*). Dan pada dasarnya pemberian *reward and punishment* tersebut dirasa berpengaruh dalam membentuk perilaku mereka. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

“Sebenarnya ada sarana kotak pengaduan, hanya kurang minatnya, enggak ada... (pemberian reward). Jadi terkadang kita menyampaikan saran dan kritik lewat tulisan di mading, atau kita langsung aja bilang ke gurunya, atau ke guru BK.” (wawancara mendalam dengan informan A, 21 Oktober 2011)

### 5.3.5 Perbandingan Pengaruh Hubungan antara Mekanisme Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa

Dalam sub-bab ini peneliti akan melihat perbandingan kekuatan hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa. Perbandingan ini untuk melihat di antara dimensi-dimensi kurikulum terselubung (mekanisme generalisasi, mekanisme *modeling*, mekanisme *reward and punishment*) yang menjadi fokus penelitian ini. Berikut tabel perbandingan kekuatan hubungan antara kurikulum terselubung terhadap kecenderungan pembentukan perilaku demokratis siswa (tabel 5.18).

**Tabel 5.18**  
Perbandingan Pengaruh Pada Dimensi Kurikulum Terselubung terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi	Keterangan
Generalisasi dengan Perilaku Demokratis Siswa	0,481	0,005	Arah hubungan positif/asimetris. Bentuk hubungan bersifat linier. Kekuatan hubungan: cukup kuat.
Modelling dengan Perilaku Demokratis Siswa	0,426	0,004	Arah hubungan positif/asimetris. Bentuk hubungan bersifat linier. Kekuatan hubungan: cukup kuat.
<i>Reward-Punishment</i> dengan Perilaku Demokratis Siswa	0,161	0,014	Arah hubungan positif/asimetris. Bentuk hubungan bersifat linier. Kekuatan hubungan: cukup lemah.

Sumber: Data Penelitian 2011

Secara keseluruhan hubungan antara mekanisme kurikulum terselubung terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa adalah sebagai berikut (tabel 5.19):

**Tabel 5.19**  
**Hubungan antara Kurikulum Terselubung terhadap**  
**Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa**

Uji Statistik Variabel	Nilai	Signifikansi	Keterangan
Kurikulum Terselubung (independen) dan Perilaku Demokratis Siswa (dependen)	0,382	0,003	Arah hubungan positif/asimetris. Bentuk hubungan bersifat linier. Kekuatan hubungan: cukup/sedang.

*Sumber: Data Penelitian 2011*

Dari tabel (5.18 dan 5.19) di atas, terlihat bahwa masing-masing dimensi dari mekanisme kurikulum terselubung pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa, dimana hubungan antara kurikulum terselubung dengan perilaku demokratis siswa tersebut memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup atau sedang, yakni 0,382. Dapat dilihat juga bahwa semakin tinggi mekanisme kurikulum terselubung mengenai nilai-nilai demokrasi maka akan semakin tinggi pula perilaku demokratis siswa. Meskipun tabel tersebut telah memperlihatkan adanya pengaruh, namun pengaruh yang paling cukup kuat itu berasal dari mekanisme generalisasi. Lemah dan sedangnya kekuatan hubungan dikarenakan faktor-faktor lain yang turut andil dalam pembentukan perilaku demokratis siswa, yang sudah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti di masing-masing sub-bab.

Peneliti tegaskan kembali bahwa hubungan antara mekanisme generalisasi dengan perilaku demokratis siswa memiliki arah kekuatan hubungan yang positif cukup kuat, yaitu 0,481. Cukup kuatnya pengaruh mekanisme generalisasi ini terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa ini dapat dilihat dari efektifnya penggunaan metode pembelajaran praktik yang disukai oleh siswa dan dianggap lebih mudah dipahami. Seperti yang telah di jelaskan dalam sub-bab sebelumnya, mekanisme generalisasi tinggi ini menandakan bahwa SMA Negeri “X” Jakarta telah memiliki kecenderungan proses penanaman nilai dan pemberian pengalaman yang efektif. Maksudnya *generalization* di sini merupakan mekanisme yang dilakukan SMA Negeri “X” Jakarta melalui penanaman nilai, pemberian pengalaman dengan memberikan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan visi-misi-tujuan dari kurikulumnya. Berbagai macam pengalaman yang diberikan

oleh SMA Negeri “X” Jakarta kepada siswanya dilakukan dengan mengadakan berbagai macam praktik-praktik langsung yang berkaitan dengan tujuan dari kurikulum sekolah yang bersangkutan. Seperti yang tertuang dalam visi-misi-tujuan dalam kurikulum SMA Negeri “X” Jakarta yaitu “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”, - “Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis serta bertanggung jawab”. Sehingga praktik-praktik yang diberikan oleh SMA Negeri “X” Jakarta ini, salah satunya adalah segala macam praktik yang berkaitan langsung dengan mewujudkan-membentuk siswa yang memiliki sikap/perilaku demokratis.



## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini terlihat sangat menarik karena berdasarkan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa hasil analisis kedua variabel independen dan dependen dalam penelitian (termuat dalam bab-bab sebelumnya) ini telah menjawab pertanyaan penelitian bahwa dari temuan-temuan yang ada di lapangan, yang dielaborasi dengan pengujian statistik, dapat dilihat adanya hubungan antara Peran Kurikulum Terselubung terhadap Perilaku Demokratis Siswa. Hubungan tersebut bersifat positif, artinya tingginya penerapan/mekanisme kurikulum terselubung mengenai nilai-nilai demokrasi menyebabkan semakin tingginya kecenderungan perilaku demokratis siswa. Demikian juga sebaliknya, artinya rendahnya penerapan/mekanisme kurikulum terselubung mengenai nilai-nilai demokrasi menyebabkan semakin rendahnya kecenderungan perilaku demokratis siswa. Di samping itu, jika dilihat dari kekuatan hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut menunjukkan kekuatan hubungan yang cukup/sedang antara variabel kurikulum terselubung sebagai variabel independen dengan variabel perilaku sebagai variabel dependen.

1. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa segala mekanisme dalam kurikulum terselubung yang telah dijalankan oleh SMA Negeri “X” Jakarta mampu mengubah perilaku siswa. Lebih jauh lagi telah dibuktikan bahwa pengaruh dari kurikulum terselubung tersebut mampu mengubah perilaku demokratis siswa, sesuai dengan visi sekolah yakni “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan **demokratis** mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”. Dan juga sesuai dengan salah satu misi sekolah yakni “Membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, **demokratis** serta bertanggung jawab”.

Terkait dengan hasil analisis tersebut, peneliti melaporkan bahwa semua dimensi dari variabel kurikulum terselubung mampu mempengaruhi

perilaku demokratis siswa. Hasil analisis membuktikan bahwa pengaruh yang paling cukup kuat dalam membentuk perilaku demokratis siswa diberikan melalui mekanisme *generalization*. Wujud dari dimensi *generalization* di sini berupa mekanisme yang dilakukan oleh SMA Negeri “X” Jakarta melalui penanaman nilai, pemberian pengalaman dengan memberikan berbagai macam kegiatan/praktik-praktik langsung yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Tentu hal ini diberikan oleh agen sosialisasi di sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa lainnya, dsb. Dimensi *modelling* juga memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk perilaku demokratis siswa, dimana segala bentuk keteladanan perilaku mengenai nilai-nilai demokrasi yang diberikan oleh guru ternyata mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Sedangkan dimensi *reward and punishment* merupakan dimensi yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan dengan dimensi *generalization* dan *modelling*, walaupun dalam hal ini dimensi *reward and punishment* juga memiliki pengaruh yang cukup lemah terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa.

Jika merujuk pada landasan teori, variabel perilaku yang dibangun dari dimensi-dimensi seperti pengetahuan, sikap dan tindakan mampu memperlihatkan keterkaitannya satu sama lain. Dalam hal ini dengan tingginya dimensi pengetahuan maka akan memperlihatkan juga tingginya dimensi sikap dan yang terakhir akan menyebabkan tingginya dimensi tindakan juga. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam landasan teori bahwa dimensi pengetahuan merupakan dasar untuk pembentukan tingkatan-tingkatan ranah kognitif berikutnya, dalam hal ini seseorang untuk dapat memiliki perasaan atau keyakinan terhadap suatu objek, terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan tentang objek tersebut, lebih jauh lagi tindakan nyata dapat dijadikan suatu kesimpulan tentang sikap dan pikiran seseorang. Landasan teori tersebut telah dibuktikan dari hasil analisis (pada bab 5) yang menunjukkan persentase tingginya pada dimensi pengetahuan, yang diikuti oleh tingginya persentase pada dimensi sikap dan juga persentase tertingginya tindakan.

Jika merujuk pada landasan teori, variabel perilaku dibangun dengan dimensi-dimensi, seperti pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan tindakan (perilaku nyata). Hasil analisis (pada bab 5) menunjukkan bahwa penerapan/mekanisme kurikulum terselubung, mempengaruhi ketiga dimensi perilaku tersebut. Uraian di bab 5 memperlihatkan bahwa keberadaan variabel kurikulum terselubung dalam membentuk dimensi-dimensinya yang dihubungkan dengan variabel perilaku (dimensi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan nyata) memiliki kekuatan yang cenderung cukup/sedang.

2. Sesuai dugaan awal peneliti, terkait ada-tidaknya faktor-faktor lain yang turut andil dalam membentuk perilaku demokratis tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi faktor-faktor itu, yang antara lain:
  - Manajemen sekolah yang menerapkan prinsip demokratis. Juga membudayakan demokrasi di sekolah. Hal ini dilihat dari simbol-simbol yang terpampang di sekolah, pembiasaan di kelas ataupun di luar kelas untuk berdiskusi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerja kelompok, diberikannya kebebasan berpendapat, berekspresi, menekankan toleransi anatar agama, suku/etnis serta kelas sosial. Di sini sekolah juga senantiasa berkoordinasi dengan komite sekolah dan masyarakat, yang mana memiliki fungsi menjembatani antara kebutuhan/aspirasi orang tua/wali murid dengan pihak sekolah. Dan hal lain yang cukup penting adalah adanya sosok atau figur dari kepala sekolah yang santun, terbuka, dan penuh dengan kelembutan. Dalam artian terdapat *leadership* yang positif yang ditumbuhkembangkan oleh pimpinan sekolah terkait.
  - Adanya ekstrakurikuler dan *event-event* tertentu di sekolah, seperti bakti sosial, seminar, *talkshow* ataupun acara lain yang sedikit banyak memberikan wawasan dan pengalaman mengenai urgensi nilai-nilai demokrasi yakni kebebasan, partisipasi, dan toleransi. Dengan mengikuti *event-event* tersebut siswa kerap mempunyai kesempatan untuk mengikuti lomba antar sekolah, yang turut mengenalkannya pada siswa-siswa dari sekolah lain yang tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda. Selain itu perlu peneliti kemukakan di sini bahwa sekolah bermitra dengan

ICW dan KPK. Kedua lembaga ini seringkali mengadakan seminar/talkshow yang memberikan wawasan pendidikan dan pengalaman mengenai antikorupsi dan tegaknya pilar-pilar demokrasi.

- Melalui observasi partisipatoris dan wawancara mendalam, peneliti berkesimpulan bahwa adanya kedekatan hubungan guru dan siswa secara personal. Kedekatan (perhatian dan kehangatan) ini turut membantu jalannya proses dalam mewujudkan visi-misi sekolah. Guru yang memiliki kedekatan personal, menjadikan siswa merasa diperhatikan, dan bisa untuk *sharing*. Bahkan ada guru yang diidolakan, menjadi *role model* atau menjadi referensi utama siswa.
- Kelompok teman sebaya (*peer group*) atau biasa responden menyebutnya “gangster” ternyata memiliki kecenderungan juga sebagai faktor pembentuk perilaku demokratis siswa. *Peer group* yang memiliki ikatan yang dekat dengan siswa dapat mempengaruhi persepsi siswa dalam berperilaku di masyarakat.
- Media massa ternyata memiliki kecenderungan juga sebagai faktor pembentuk perilaku demokratis siswa. Media massa dengan kecanggihannya, yang mana sarat akan informasi, membuat siswa lebih mudah untuk mengakses/mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai demokratisasi yang terjadi di masyarakat.

Secara sosiologis, penelitian ini melihat bahwa faktor yang dominan dimana turut andil dalam membentuk perilaku demokratis tersebut adalah manajemen sekolah yang inklusif serta didukung adanya mitra sekolah yang mana seringkali mengadakan *event-event* guna memberikan wawasan, praktek langsung, dan pengalaman mengenai urgensi nilai-nilai demokrasi.

## 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan penelitian ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat diperhatikan oleh berbagai pihak (*stakeholders*), seperti praktisi pendidikan terutama oleh pihak sekolah, pemangku kebijakan (pemerintah), keluarga (orang tua) sebagai salah

satu agen pendidik yang bersifat informal, dan juga untuk penelitian selanjutnya. Berikut rekomendasi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini:

1. Penanaman nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri “X” Jakarta ini belumlah optimal. Oleh karena itu perlu kiranya untuk lebih dikembangkan lagi. Seyogyanya penanaman nilai-nilai demokrasi tidak hanya mengandalkan melalui pelajaran agama, sosiologi ataupun kewarganegaraan, pembiasaan praktek nilai-nilai demokrasi tersebut harus dapat terintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran lainnya dan rutinitas sekolah.
2. Kegiatan informal siswa, melalui ekstrakurikuler ataupun *event-event* tertentu seperti bakti sosial, seminar, *talkshow* ataupun acara-acara lainnya harus lebih dikembangkan lagi sebagai salah satu cara yang cukup efektif kepada siswa untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini perlu dilakukan karena siswa lebih mudah memahami dan menyerap proses belajar praktik langsung dibandingkan proses belajar dikelas (teori).
3. Guru merupakan media yang terpenting dalam melakukan penanaman nilai di sekolah. Oleh karenanya seorang guru harus terus ditingkatkan keteladanannya terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan perilaku demokratis. Untuk mendukung proses tersebut, penting di sini seorang guru harus memiliki keterbukaan kepada siswa untuk menjaga agar proses menirukan contoh (*modelling*) ini berjalan efektif. Di samping itu memang pendekatan personal-emosional atau kedekatan penuh perhatian, kasih sayang, dan kehangatan yang terjalin antara guru dan seluruh siswa harus ditingkatkan. Hal ini dibutuhkan agar siswa dari semua kalangan, khususnya kalangan minoritas, tidak merasa terpinggirkan. Acara-acara yang melibatkan kerja sama antara guru dan juga siswa dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kedekatan personal di antara keduanya. Ini juga terkait dengan pemberian imbalan dan sanksi, dalam hal ini seorang guru diharuskan untuk sering memberikan pujian kepada siswa. Walaupun itu

merupakan hal yang wajar namun cukup berpengaruh pada tindakan siswa selanjutnya. Dan untuk lebih meningkatkan semangat siswa, perlu didukung dengan pemberian imbalan berupa barang/benda.

4. Terkait dengan proses penanaman nilai-nilai demokrasi pihak sekolah bekerjasama dengan pihak terkait seharusnya sering mengadakan penyuluhan kepada orang tua siswa agar orang tua siswa itu sendiri juga harus lebih terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan anaknya. Kesadaran akan penanaman nilai demokrasi harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Meskipun keluarga memiliki lingkup yang kecil, namun bentuk penghormatan mengenai kebebasan berpendapat yang terdapat perbedaan di dalamnya sedikit banyak dapat memberikan gambaran mengenai adanya perbedaan di masyarakat, sehingga akhirnya bentuk penghormatan tersebut dapat diterapkan kembali di masyarakat luas. Seperti hal-hal kecil dalam menentukan menu makan bersama, pemilihan tempat untuk berlibur keluarga, pemilihan jurusan studi anak, mentradisikan diskusi di meja makan (makan malam bersama), dan lain sebagainya. Dengan keterbukaan tersebut maka orang tua akan cenderung dapat berperilaku demokratis dan akhirnya dapat memberikan suatu bentuk keteladanan atau contoh yang baik dan juga positif bagi anaknya dalam berperilaku demokratis.
5. Pentingnya peran pemerintah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam perkembangan penanaman nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat luas, khususnya melalui sektor pendidikan. Hal ini dianggap dikarenakan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai regulator, pemerintah sepatutnya untuk terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kebijakan demokratisasi, termasuk dalam hal pendidikan (sekolah). Pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan kebijakan. Dipandang perlu untuk melihat karakteristik dari sekolah di mana ia berada, kebijakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Landasan nilai dan ideologis dari pendidikan hendaknya lebih dipertegas dalam tujuan pembuatan kurikulum yang diaktualisasikan melalui kapasitas guru dalam

memahami tujuan yang menjadi filosofi dasar dari tujuan pendidikan di Indonesia.

6. Hal lainnya yang disarankan adalah agar penelitian selanjutnya untuk dapat lebih melihat, menelaah, dan mengkaji secara lebih mendalam variabel lain dalam konteks hubungan antara kurikulum terselubung terhadap perilaku demokratis siswa, yang dilakukan oleh agen sosialisasi lain, seperti keluarga, *peer group*, LSM, dan media massa. Selain itu penelitian ini dapat dilakukan di sekolah dengan karakteristik yang berbeda (sekolah yang homogen, misal sekolah berbasis agama). Selain itu studi dapat dilanjutkan dengan studi sosiologi lainnya demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dengan metode yang berbeda dari penelitian ini.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Apple, Michael W.C.(1990).*Ideology and Curriculum*.Routledge,New York.
- Babbie, Earl R. (1995). *The Practice of Social Research: Seven edition*. Belmont,California: Wadsworth Publishing Company.
- Budiardjo, Miriam.(2008).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.(Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan.(2005).*Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W.(2003).*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.London: Sage Publication.
- Dahl, Robert A.(2001).*Perihal Demokrasi:Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*.(Ed. Ke-1).Penerjemah: A. Rahman Zainuddin.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, Robert. etc.(2003).*The Democracy Sourcebook*. Massachusetts:MIT Press.
- Darmaningtyas.(1999).*Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis:Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Durkheim, Emile.(1990).*Pendidikan Moral (Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan)*.Penerjemah:Lukas Ginting. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elifson, Kirk, Richard P. Runyon, and Audrey Haber. (1998). *Fundamentals of Social Statistic:Third Edition*.USA: Mc.Graw Hills.
- Fatah, Eep Saefulloh.(1994).*Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Frank H. Farley and Neal J. Gordon.(1981).*Psychology and Education*.USA:McCuthan Publishing Corporation.
- Freire, Paulo.(1999).*The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*.Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Haralambos and Holoborn.(2004).*Sociology: Themes and Perspective, Sixth Edition*. London: HarperCollins Publishers Limited.

- Hasley, A.H., etc.(1997).*Education: Culture, Economy, and Society*.New York:Oxford University Press Inc.
- Henry Giroux and David Purple.(1983).*The Hidden Curriculum and Moral Education*.USA:McCuthan Publishing Corporation.
- Jalaluddin dan Abdullah Idi.(2007).*Filsafat Pendidikan:Manusia, Filsafat dan Pendidikan*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Johnson, Doyle Paul.(1986).*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.Di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang.Jakarta:PT Gramedia.
- Kartono, Kartini.(1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.Bandung: Mandar Maju.
- Makka, A. Makmur-Editor.(2002).*Demokratisasi Tak Boleh Henti*.Jakarta: The Habibie Center.
- Maliki, Zainudin.(2008).*Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Meyer, Thomas.(2009).*Demokrasi:Sebuah Pengantar untuk Penerapan*. Jakarta: Friederich-Ebert-Stiftung.
- Michael Rush & Philip Althoff.(1995).*Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Nasikun.(2000). *Sistem Sosial Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neuman, Laurance W.,(2004).*Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. Massachusetts: Needham Heights.
- Pannen, Paulina, dkk.(1999).*Cakrawala Pendidikan*.Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman.(2003).*Teori Sosiologi Modern*.(Ed. Ke-6). Diterjemahkan oleh Alimandan.Jakarta:Prenada Media.
- Robinson, Philip.(1986).*Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*.Alih Bahasa oleh Hasan Basari.Jakarta: CV Rajawali.
- Rohman, Arif.(2009).*Politik Ideologi Pendidikan*.Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rosyada, Dede.(2004).*Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Soeprapto, Riyadi.(2002).*Interaksionisme Simbolik*.Malang:Averroes Press.

Sowarsono dan Alvin.(2006).*Perubahan sosial dan Pembangunan*.Jakarta: LP3S.

Sumarsono, Harlan.(2009).*Paradoks Demokrasi:Politik, Polemik dan Problematik; Demokratisasi dan Relokasi Kekuatan di Indonesia*.Jakarta: IND HILL CO.

Sunarto, Kamanto.(2004).*Pengantar Sosiologi*.(Edisi Revisi).Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Turner, Jonathan and Leonard Beeghley.(1981).*The Emergence of Sociological Theory*.Illinois:The Dorsey Press.

Varma, S.P.(2007).*Teori Politik Modern*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Vembrianto, St.(1993).*Sosiologi Pendidikan*.Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zanten, Wim Van.(1994). *Statistika untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Tesis:**

Beresaby, Rheinatus Alfonsus.(2004).*Demokrasi Dialogis dalam pemikiran Anthony Giddens*.FIB UI Depok.

Bulan, Wahidah R.(2006).*Praktek Demokrasi di Kota Depok (Studi tentang Demokratisasi di tingkat lokal)*.FISIP UI Depok.

Nathalia, Zulifma.(2006).*Memahami Proses Demokrasi Pendidikan Melalui Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sebuah Etnografi Ruang Kelas di SDN Kranji X Bekasi*.FISIP UI Depok.

Saragih, Albina Rosalina.(2001).*Pembentukan Modernitas Individu Melalui Kurikulum Terselubung (Studi Komparatif di Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pendidikan Formal)*.FISIP UI Depok.

**Skripsi:**

Adnan, Ricardi S..(1992).*Pengaruh Kurikulum Terselubung Terhadap Keberhasilan Siswa Sekolah Lanjutan Atas (Studi Kasus SMA Negeri 8 Jakarta)*.FISIP UI Depok.

Andini, Dwi.(2004).*Peranan Guru dalam Sosialisasi Nilai Pluralisme di Sekolah Dasar Islam (Studi Kasus: Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Depok)*. FISIP UI Depok.

Hilarius, Yoseph.(2005). *Pengaruh Peran Guru dengan Sikap Siswa terhadap Disiplin Sekolah*. FISIP UI Depok.

Nuraini, Syarifah.(2009).*Hubungan Sosialisasi Sekolah dan Sosialisasi Keluarga dengan Perilaku Multikulturalis Siswa (Studi pada SMA Negeri 78 Jakarta)*. FISIP UI Depok.

Seda, Francisia SSE.(1987).*Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus Mengenai Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi)*.FISIP UI Depok.

Ulhak, Zia.(2009).*Implementasi Nilai Demokrasi dalam Kegiatan OSIS di Sekolah (Studi pada SMPN 5 Kota Malang)*.Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

**Internet:**

Amirin, Tatang M. (2011).*Populasi dan sampel penelitian 3: Pengambilan sampel dari populasi tak-terhingga dan tak-jelas*. Diambil dari [tatangmanguny.wordpress.com](http://tatangmanguny.wordpress.com) diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 03.33 WIB

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=28&notab=34](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=34) diakses pada tanggal 18 Agustus 2010 pukul 16.10 WIB

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.uwsp.edu/education/lwilson/kencus's-area/transformati-nilai-nilai-demokrasi-dalam-lembaga-dan-masyarakat.htm> diakses pada tanggal 9 Juni 2010 pukul 11.49 WIB

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=72269>

<http://karya-ilmiah.um.ac.id>

[http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/195207251978031%20ACE%20SURYADI/Risalah\\_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/195207251978031%20ACE%20SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf) diakses pada tanggal 4 April 2010 pukul 09.45 WIB

<http://old.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=viewcat&ceid=2&catid=4> diakses pada tanggal 4 April 2010 pukul 09.50 WIB

<http://www.ispi.or.id/2010/08/12/arah-kebijakan-pembangunan-pendidikan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 April 2010 pukul 10.00 WIB

<http://luznadamai.wordpress.com/2010/03/13/john-dewey-dan-demokrasi/> diakses pada tanggal 9 Juni 2010 pukul 11.55 WIB

<http://sman13jkt.sch.id> diakses pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB

<http://forum.sman13jkt.sch.id> diakses pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB

<http://kompas.com> diakses pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 13.30 WIB

<http://persma.com/baca/2009/10/20/demokratisasi-pendidikan-guna-membangun-pengetahuan.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 13.30 WIB

<http://www.simpuldemokrasi.com/program-sekolah-demokrasi/progress-report/1751-demokratisasi-pendidikan.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 13.35 WIB

<http://mkpd.wordpress.com/2007/10/30/demokratisasi-pendidikan-kajian-pada-jenjang-pendidikan-dasar/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 13.33 WIB

<http://kompas.com> diakses pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 13.30 WIB

<http://groups.yahoo.com/group/tionghoa-net/message/85111> diakses pada tanggal 27 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB

<http://politik.kompasiana.com/2011/09/27/akankah-%E2%80%9Ckelas-menengah%E2%80%9D-berperan-merubah-indonesia-yang-saat-ini-korup/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2011 pukul 12.31 WIB

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/03/30/kelompok-kelas-menengah-indonesia-kian-berkembang> diakses pada tanggal 27 Oktober 2011 pukul 12.32 WIB

**Undang-Undang:**

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

**Koran:**

Harian SINDO, Kamis 10 Februari 2011

Harian Republika, Kamis 3 Maret 2011

**Lain-lain:**

HandOuts Draft Kuliah Pengantar Ilmu Politik oleh Meidi Kosandi. FISIP UI Depok

HandOuts Kuliah Sosiologi Politik oleh Iwan Gardono Sudjatmiko. FISIP UI Depok

DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA, 06 April 2011



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>No. Kuesioner</b>	
<b>Tgl. Pengisian</b>	
<b>Pewawancara</b>	
<b>Waktu Mulai</b>	
<b>Waktu Selesai</b>	



## **Kuesioner Penelitian**

“Pendidikan dan Demokrasi:  
Peran Kurikulum Terselubung Terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa  
(Studi pada SMA Negeri “X” Jakarta)”

Dengan hormat,

Selamat pagi/siang/sore/malam,

Saya Rahmat Saleh, mahasiswa S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) sedang menyusun Skripsi sebagai tugas akhir saya dengan judul “*Pendidikan dan Demokrasi: Peran Kurikulum Terselubung Terhadap Pembentukan Perilaku Demokratis Siswa (Studi pada SMA Negeri “X” Jakarta)*”. Saat ini sedang melaksanakan pengumpulan data dalam bentuk kuesioner untuk keperluan penyusunan skripsi tersebut.

Untuk itu saya mohon bantuan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk dapat menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan dalam kuesioner ini. Seluruh informasi yang Bpk/Ibu/Sdr/i berikan akan **dijaga kerahasiaannya** dan akan digunakan seperlunya sebagai bahan penulisan skripsi, dalam rangka penelitian yang bersifat akademis.

Saya sangat berharap Bpk/Ibu/Sdr/i dapat menjawab dengan **jujur, lengkap dan apa adanya**. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini. Atas kesediaan dan kerjasama Bpk/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

**Rahmat Saleh**

## Identitas Responden

No.	Pertanyaan / Pernyataan	Kategori Jawaban
1	Nama	
2	Kelas	
3	Umur	Tahun
4	Jenis Kelamin ( <i>lingkari</i> )	1. Laki-laki      2. Perempuan
5	Agama ( <i>pilih satu;lingkari</i> )	1. Islam      2. Kristen Protestan      3. Kristen Katolik 4. Hindu      5. Budha      6. Konghucu
6	Kegiatan ekstrakurikuler yang sedang/pekerjaan diikuti. (sebutkan dan boleh lebih dari satu)	1. Rohani ( <i>sebutkan</i> ): _____ 2. Olahraga ( <i>sebutkan</i> ): _____ 3. Kesenian dan Budaya ( <i>sebutkan</i> ): _____ 4. Lainnya: a. Pramuka b. Paskibraka c. KIR d. PMR e. Pecinta Alam f. Patroli Keamanan Sekolah g. lainnya ( <i>sebutkan</i> ): _____
7	Pengeluaran per bulan (di dalamnya termasuk uang jajan, uang pulsa, uang transport, uang rekreasi/jalan-jalan) ( <i>sebutkan</i> )	Rp _____
8	Fasilitas media informasi yang paling sering dikonsumsi ( <i>pilih satu;lingkari</i> )	1. Televisi 2. TV Kabel 3. Surat Kabar 4. Radio 5. Ensiklopedia 6. Majalah 7. Internet 8. Lainnya ( <i>sebutkan</i> ): _____

## Data Orangtua Responden

	Pertanyaan / Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ayah	Ibu
9	Suku bangsa orangtua (pilih satu;lingkari)	1. Jawa 2. Sunda 3. Minang 4. Madura 5. Batak 6. Betawi 7. Ambon 8. Bugis 9. Bali 10. Tionghoa 11. Lainnya (sebutkan): _____	1. Jawa 2. Sunda 3. Minang 4. Madura 5. Batak 6. Betawi 7. Ambon 8. Bugis 9. Bali 10. Tionghoa 11. Lainnya (sebutkan): _____
10	Agama orangtua (pilih satu;lingkari)	1. Islam 2. Kristen Protestan 3. Kristen Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu	1. Islam 2. Kristen Protestan 3. Kristen Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu
11	Pendidikan terakhir orangtua (lingkari)	1. Tidak Sekolah 2. Tidak Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SMP/Sederajat 5. Tamat SMU/Sederajat 6. Tamat Diploma/D1-D3 7. Tamat Sarjana/S1 8. Tamat Pasca-sarjana/S2-S3	1. Tidak Sekolah 2. Tidak Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SMP/Sederajat 5. Tamat SMU/Sederajat 6. Tamat Diploma/D1-D3 7. Tamat Sarjana/S1 8. Tamat Pasca-sarjana/S2-S3
12	Pekerjaan orangtua (lingkari)	1. Tidak bekerja 2. Pegawai Negeri Sipil 3. Karyawan Swasta 4. Pedagang 5. Petani 6. TNI/POLRI 7. Guru/Dosen 8. Wiraswasta 9. Lainnya: _____	1. Tidak bekerja 2. Pegawai Negeri Sipil 3. Karyawan Swasta 4. Pedagang 5. Petani 6. TNI/POLRI 7. Guru/Dosen 8. Wiraswasta 9. Lainnya: _____
13	Penghasilan orangtua perbulan (sebutkan)	Rp _____	Rp _____

## Dimensi Pengetahuan

**Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 4 pilihan yaitu (**beri tanda** ✓):

Keterangan:

- TT** : Jika Kamu **Tidak Tahu**
- KT** : Jika Kamu **Kurang Tahu**
- T** : Jika Kamu **Tahu**
- ST** : Jika Kamu **Sangat Tahu**

No	Pernyataan	TT	KT	T	ST
	Saya Tidak Tahu/Kurang Tahu/Tahu/Sangat Tahu:				
1.	mengenai adanya jaminan kebebasan pribadi				
2.	mengenai adanya kebebasan individu lain				
3.	mengenai kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan				
4.	mengenai kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi				
5.	setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya melalui sarana/media yang ada di sekolah ini				
6.	mengenai partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)				
7.	setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk ikut-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan				
8.	mengenai adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)				
9.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah				
10.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini				
11.	mengenai adanya jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)				
12.	mengenai adanya kesetaraan antar-warga				
13.	setiap siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi, sebagai siswa di sekolah ini				
14.	mengenai perlunya saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)				
15.	mengenai adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)				
16.	mengenai toleransi di dalam kehidupan bersama				
17.	perlunya sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada				

## Dimensi Sikap

**Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 4 pilihan yaitu (**beri tanda** ✓):

Keterangan:

**STS** : Jika Kamu **Sangat Tidak Setuju**

**TS** : Jika Kamu **Tidak Setuju**

**S** : Jika Kamu **Setuju**

**SS** : Jika Kamu **Sangat Setuju**

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	Saya Sangat Tidak Setuju/Tidak Setuju/Setuju/Sangat Setuju:				
1.	mengenai adanya jaminan kebebasan pribadi				
2.	mengenai adanya kebebasan individu lain				
3.	mengenai kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan				
4.	mengenai kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi				
5.	setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya melalui sarana/media yang ada di sekolah ini				
6.	mengenai partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)				
7.	setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk ikut-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan				
8.	mengenai adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)				
9.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah				
10.	setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini				
11.	mengenai adanya jaminan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)				
12.	mengenai adanya kesetaraan antar-warga				
13.	setiap siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi, sebagai siswa di sekolah ini				
14.	mengenai perlunya saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)				
15.	mengenai adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)				
16.	mengenai toleransi di dalam kehidupan bersama				
17.	perlunya sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada				

**Dimensi Tindakan: Perilaku Nyata**

**Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 4 pilihan yaitu (**beri tanda** ✓):

Keterangan:

**STS** : Jika pengalaman Kamu **Sangat Tidak Sesuai**

**TS** : Jika pengalaman Kamu **Tidak Sesuai**

**S** : Jika pengalaman Kamu **Sesuai**

**SS** : Jika pengalaman Kamu **Sangat Sesuai**

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	Saya Sangat Tidak Sesuai/Tidak Sesuai/Sesuai/Sangat Sesuai:				
1.	pengalaman akan adanya jaminan kebebasan pribadi				
2.	selama ini bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, mengingat adanya kebebasan individu lain				
3.	pengalaman menggunakan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan				
4.	menggunakan kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi				
5.	menggunakan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini				
6.	berpartisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)				
7.	selama ini ada kesempatan yang sama untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan				
8.	selama ini saya telah menggunakan akses publik yang tersedia (misal: taman kota, perpustakaan umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)				
9.	pengalaman selama ini adanya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah ini				
10.	menggunakan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini				
11.	pernah menggunakan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)				
12.	selama ini saya telah memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan antar-warga				
13.	pengalaman sebagai siswa, (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi di sekolah ini				
14.	pengalaman saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)				
15.	selama ini saya telah bertanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)				
16.	selama ini saya telah melakukan toleransi di dalam kehidupan bersama				
17.	selama ini saya telah berlapang dada, terbuka, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada				

**Dimensi Generalisasi****Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 3 pilihan yaitu (**beri tanda** √):Pilih salah satu: **Selalu** mengalaminya, **Kadang-Kadang** mengalaminya, atau **Tidak Pernah** mengalaminya

No	Pernyataan	Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini membiasakan kepada siswa akan adanya jaminan kebebasan pribadi			
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menjelaskan kepada siswa untuk bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, mengingatkan adanya kebebasan individu lain			
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan			
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/berkumpul/berorganisasi			
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini			
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menerangkan tentang partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)			
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menjelaskan tentang adanya kesempatan yang sama untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan			
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kesempatan/akses yang sama bagi warga atas fasilitas publik (misal: taman kota, perpustakaan umum, GOR, gedung serba guna, dll)			
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menerangkan tentang adanya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas sekolah			
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu tentang adanya kesempatan yang sama bagi siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini			
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menyerukan penggunaan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)			
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini menghimbau kepada siswa untuk memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan			
13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu kepada siswa (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya) memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi di sekolah ini			
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)			
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi tahu kepada siswa tentang adanya tanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)			
16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk melakukan toleransi di dalam kehidupan bersama			
17.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mengajarkan kepada siswa untuk berlapang dada, terbuka, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada			

## Dimensi Modelling

**Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 3 pilihan yaitu (**beri tanda √**):  
Pilih salah satu: **Selalu** mengalaminya, **Kadang-Kadang** mengalaminya, atau **Tidak Pernah** mengalaminya

No	Pernyataan	Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan pribadi-siswa			
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertindak dengan memperhatikan batasan-batasan, sesuai aturan, patuh pada tata-tertib yang ada			
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan			
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kebebasan untuk membuat kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi			
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini ikut-serta menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini			
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan partisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)			
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk berperan-serta dalam kegiatan musyawarah			
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan penggunaan fasilitas publik (misal: taman kota, perpus umum, gelanggang olahraga, gedung serba guna, dll)			
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk memanfaatkan fasilitas sekolah			
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekskul/kepanitiaan/peringatan hari besar nasional di sekolah ini			
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan penggunaan hak untuk ikut serta dalam suksesi (seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua kelas, osis, pemilu, dll)			
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memperlakukan orang lain berdasar prinsip kesetaraan			
13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberikan perlakuan yang sama kepada siswanya (apapun agamanya, suku/etnisnya, kondisi status sosial-ekonominya), tidak diskriminatif			
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)			
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertanggung jawab atas kebebasan dan perbedaan-perbedaan (perbedaan pendapat, agama/keyakinan, suku/etnis, kondisi status sosial-ekonomi)			
16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini mencontohkan tindakan toleransi di dalam kehidupan bersama			
17.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini bertindak terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada			

## Dimensi Reward and Punishment

**Petunjuk Pengisian:** Di belakang setiap pernyataan tersedia 3 pilihan yaitu (**beri tanda** ✓):  
Pilih salah satu: **Selalu** mengalaminya, **Kadang-Kadang** mengalaminya, atau **Tidak Pernah** mengalaminya

**Reward** : hadiah/imbalan (dapat berupa: pujian/sanjungan, hadiah barang, uang, kado, piagam, penambahan nilai)

**Punishment** : sanksi/hukuman (dapat berupa: teguran/sindiran/omelan/larangan, bernyanyi, hukuman fisik, skorsing, pengurangan nilai)

No	Pernyataan	Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa bertindak tidak memperhatikan batasan-batasan, tidak sesuai aturan, tidak patuh pada tata-tertib			
2.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa berpendapat, berekspresi, secara lisan maupun tulisan			
3.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa aktif di dalam kelompok/berserikat/ berkumpul/berorganisasi			
4.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menyampaikan aspirasi melalui sarana/media yang ada di sekolah ini			
5.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa berpartisipasi dalam kehidupan bersama (misal dalam kegiatan musyawarah/pengambilan keputusan)			
6.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak berperan-serta dalam kegiatan musyawarah			
7.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menggunakan fasilitas publik secara baik			
8.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa yang sembarangan dalam memanfaatkan fasilitas sekolah			
9.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa terlibat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler/kepanitiaan/ peringatan hari besar nasional di sekolah ini			
10.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa menggunakan "haknya dipilih-memilih" dalam suksesi/pemilihan ketua kelas, osis, pemilu, dsb			
11.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa memperlakukan orang lain tidak berdasar prinsip kesetaraan			
12.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa bertindak diskriminatif (misal: hanya mau berteman dengan yang seagama, satu etnis/suku, satu kelas sosial-ekonomi)			
13.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa saling menghormati / menghargai keanekaragaman yang ada (keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia)			
14.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak bertanggung jawab atas kebebasan perbuatannya (perbedaan paham/keyakinan/pendapat yang menimbulkan perselisihan)			
15.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Punishment</i> ketika siswa tidak bertoleransi dengan sesama			
16.	Bapak/Ibu guru di sekolah ini memberi <i>Reward</i> ketika siswa bertindak terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut terhadap perbedaan-perbedaan yang ada			

**Bentuk *Reward* yang paling sering diberikan terkait dengan pernyataan perilaku di atas (*pilih salah satu: lingkari*)**

1. Hadiah barang (misal: uang, kado, dsb)
2. Penghargaan/Piagam
3. Pujian/Sanjungan (Bangga)
4. Penambahan Nilai
5. Lainnya (Sebutkan) .....

**Bentuk *Punishment* yang paling sering diberikan terkait dengan pernyataan perilaku di atas (*pilih salah satu: lingkari*)**

1. Teguran/Sindiran/Omelan/Larangan/Bernyanyi
2. Hukuman Fisik
3. Skorsing
4. Pengurangan Nilai
5. Lainnya (Sebutkan) .....

**PERIKSA KEMBALI SETIAP JAWABAN YANG TELAH KAMU ISI  
JANGAN SAMPAI ADA YANG TERLEWAT!  
\*TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI KALIAN\***



## Lampiran

### Pedoman Observasi dan Wawancara Sambil Lalu

- Subjek/objek yang diobservasi?
- Memastikan identitas subjek/objek tersebut.
- Mengambil gambar/dokumentasi.
- Memulai dengan pertanyaan ringan (basa-basi).
- Secara sepintas meminta subjek bercerita tentang pengalaman seperti apa perilaku sekarang atau dahulu?
- Bagaimana pelaksanaan kegiatan sekolah dalam keseharian?
- Membuat catatan kecil mengenai apa yang relevan terkait pertanyaan besar dari penelitian yang mana catatan kecil itu akan menjadi bahan penunjang untuk wawancara mendalam.

## **Pedoman Wawancara Kepala Sekolah**

### **Identitas:**

1. nama :
2. tempat/tgl lahir :
3. agama :
4. suku bangsa :
5. pendidikan :
6. tahun mulai bekerja:

### **Pertanyaan:**

1. Apa visi, misi serta tujuan dari sekolah ini?
2. Apa yang hendak dicapai dari visi, misi dan tujuan tersebut? Dan bagaimana pengoperasionalisasikannya? (Visi: Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global).
3. Apa yang menjadi ciri khas sekolah ini jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, baik itu negeri maupun swasta?
4. Berapa uang SPP? Apakah ada keringanan yang diberikan sekolah bagi siswa yang kurang mampu? (kelas regular/non-regular).
5. Pandangan Anda mengenai dunia pendidikan sekarang ini?
6. Apakah Anda mengetahui mengenai demokratisasi di institusi pendidikan (sekolah)? Darimana Anda mengetahuinya? Dalam kaitannya dengan perilaku/tindakan demokratis, bagaimana pendapat Anda?
7. Terkait dengan tema, bagaimana pandangan anda mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan sekarang ini? Menurut Anda, nilai-nilai demokrasi yang universal itu apa saja (yang sering Anda dengar)?
8. Lantas pandangan Anda mengenai kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?
9. Bagaimana dengan sekolah ini? Apakah ada penanaman nilai-nilai demokrasi itu di sekolah ini? Seperti apa implementasinya? (Salah satu misi: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis).
10. Bagaimana cara penanaman nilai-nilai demokrasi tersebut? Melalui media apa saja?
11. Pandangan Anda mengenai kurikulum terselubung? Bagaimana pandangan Anda mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi melalui kurikulum terselubung?
12. Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah ini? Baik itu secara agama dan suku serta kelas sosial?
13. Apakah ada kebijakan atau aturan yang dibuat untuk hal terkait?
14. Dalam posisi Anda sebagai Kepala Sekolah apa yang anda lakukan dalam mendukung penanaman dan implementasi dari nilai-nilai demokrasi?
15. Terakhir, apa saja yang Anda harapkan dengan mempraktikkan sikap/perilaku/tindakan berbasis nilai-nilai demokrasi kepada para siswa?

## **Pedoman Wawancara Guru**

### **Identitas:**

1. nama :
2. tempat/tgl lahir :
3. agama :
4. suku bangsa :
5. pendidikan :
6. tahun mulai bekerja:

### **Pertanyaan:**

1. Apa yang hendak dicapai dari visi, misi dan tujuan sekolah ini?
2. Apa yang menjadi ciri khas sekolah ini jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, baik itu negeri maupun swasta?
3. Pandangan Anda mengenai dunia pendidikan sekarang ini?
4. Apakah Anda mengetahui mengenai demokratisasi di institusi pendidikan (sekolah)? Darimana Anda mengetahuinya? (Salah satu misi: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis).
5. Dalam kaitannya dengan sikap/perilaku/tindakan demokratis, bagaimana pendapat Anda?
6. Terkait dengan tema, bagaimana pandangan anda mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan sekarang ini? Menurut Anda, nilai-nilai demokrasi yang universal itu apa saja (yang sering Anda dengar)?
7. Lantas pandangan Anda mengenai kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?
8. Menurut anda pentingkah nilai-nilai demokrasi diajarkan pada siswa?
9. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi, sebagai guru apa yang Anda lakukan untuk mendukung penanaman nilai-nilai tersebut? Langkah-langkah apa saja yang Anda ambil? (pengetahuan-sikap-tindakan nyata).
10. Apakah ada hambatan? Hambatan apa yang pernah Anda alami dalam melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi tersebut?
11. Apakah ada keterlibatan aktif siswa terhadap sosialisasi-internalisasi yang Anda berikan?
12. Selama Anda mengajar, bagaimana pandangan Anda tentang perilaku demokratis siswa di kelas? Di sekolah ini ? Secara umum, apakah para siswa sudah dapat dianggap berperilaku demokratis?
13. Bagaimana dengan interaksi antara Anda dan siswa di kelas maupun diluar kelas?
14. Apakah anda memberikan imbalan atau hukuman kepada siswa? Apa bentuknya?
15. Sikap/perilaku apa yang anda perlihatkan sehari-hari kepada siswa?
16. Terakhir, apa saja yang Anda harapkan, sebagai guru dengan mempraktikan sikap/perilaku/tindakan berbasiskan nilai-nilai demokrasi kepada para siswa?

## **Pedoman Wawancara Bidang Kurikulum/Kesiswaan**

### **Identitas:**

1. nama :
2. tempat/tgl lahir :
3. agama :
4. suku bangsa :
5. pendidikan :
6. tahun mulai bekerja:

### **Pertanyaan:**

1. Apa yang Anda ketahui tentang “Kurikulum”? Dan darimana asalnya?
2. Menurut Anda apa peran dari kurikulum dan seberapa penting perannya di sekolah?
3. Seperti kita ketahui bahwa ada kurikulum formal dengan kurikulum tersembunyi. Apa perbedaan antara keduanya?
4. Bagaimana penerapan dari kedua macam kurikulum tersebut? Apakah saling menopang, mendukung, menguatkan?
5. Visi sekolah: Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global. Secara spesifik sekolah hendak membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis. Apa yang Anda ketahui tentang kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi?
6. Pandangan Anda mengenai konsep kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?
7. Apakah ada pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum sekolah ini? Melalui apa? Bagaimana? Alasannya?
8. Seberapa pentingkah kurikulum tersembunyi dengan nilai-nilai itu disosialisasikan/internalisasikan kepada para siswa? Mengapa?
9. Menurut Anda, bagaimana cara menerapkan kurikulum tersembunyi yang baik agar tepat sasaran?
10. Apakah penerapan kurikulum tersembunyi di sekolah ini sudah berjalan dengan baik?
11. Apa harapan Anda dengan diadakannya kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi di Sekolah ini?

## Pedoman Wawancara Siswa

### Identitas:

1. nama :
2. tempat/tgl lahir :
3. agama :
4. suku bangsa :

### Pertanyaan:

1. Apa alasan kamu masuk sekolah ini?
2. Salah satu misi sekolah: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis. Menurut kamu sikap/perilaku demokratis itu perilaku yang seperti apa?
3. Bagaimana pandangan kamu mengenai paham kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?
4. Apakah sekolah ini memberikan sebuah pengetahuan tentang itu? (kebebasan, partisipasi, dan toleransi).
5. Kegiatan seperti apa yang biasa diberikan oleh sekolah yang berkaitan dengan kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?
6. Dari pengalaman di sekolah, apakah guru mengajarkan tentang kebebasan (berpendapat secara lisan/tulisan, berserikat/berskumpul/berorganisasi/kepanitiaan, berekspresi)? Seperti apa? Apakah melalui mata pelajaran? Atau dengan cara-cara lain?
7. Menurut kamu itu efektif tidak?
8. Pernah ada atau tidak gambaran kejadian negatif di kalangan siswa karena selisih paham kebebasan? Seperti cek-cok mulut, sampai pada berkelahi? Kamu melihatnya bagaimana?
9. Secara umum, pengambilan keputusan/kebijakan sekolah apakah melalui musyawarah?
10. Dan pengambilan keputusan/kebijakan/penyusunan tata tertib itu apakah melibatkan para siswa? ada perwakilan siswa yang terlibat di dalamnya?
11. Menurut kamu bagaimana untuk menyampaikan aspirasi/keinginan/kritik-saran siswa kepada pihak sekolah? Melalui sarana/media apa saja yang ada di sekolah ini? (kotak pengaduan, forum komunikasi osis/mpk, komite sekolah, dsb)
12. Apakah para siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ini? Apakah kamu merasakan hal itu?
13. Apakah ada penilaian tersendiri dari kepek/guru/teman kamu sendiri, bagi siswa yang terlibat aktif untuk memberikan ide/gagasan/saran/kritik? Seperti apa?

14. Bagaimana penerapan tata-tertib di sekolah ini? Misalnya jika kamu melanggar tata tertib (telat) pemberian *punishment* -hukuman- seperti apa? Sebaliknya, bagaimana jika guru yang melanggar tata tertib itu?
15. Disamping itu, ada pemberian *reward*-kah dari guru? seperti apa?
16. Seberapa penting menurut kamu toleransi dan suatu bentuk perlakuan adil?
17. Pendapat kamu mengenai keragaman di sekolah ini bagaimana? secara agama, etnis, dan kelas sosial?
18. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kaitannya dengan kebebasan? Toleransi?
19. Fungsi teman di sekolah seperti apa? Apakah menurut kamu mereka mengajarkan mengenai sikap/perilaku demokratis?
20. Apakah di sekolah kamu ikut ekstrakurikuler atau kegiatan lain di luar kegiatan belajar? Apakah menurut kamu dari kegiatan tersebut kamu mendapatkan tentang nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)
21. Bagaimana orang tua di rumah mengajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi (kebebasan, partisipasi, toleransi)? Seperti apa?
22. Pergaulan orang tua - kamu bagaimana? Apakah mereka memberikan contoh yang baik? Seperti apa?
23. Di antara guru-guru di sekolah, teman dan juga orang tua, siapa yang bisa kamu rasakan pengaruhnya dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)
24. Sumber informasi lain apakah ada? Seperti media apakah yang berpengaruh dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (Televisi, Buku, Surat Kabar, Radio, Ensiklopedia, Majalah, Internet)

## Lampiran

### Uji Realibilitas

Sebelum melakukan uji statistik, peneliti melakukan uji reliabilitas terlebih dahulu terhadap instrument yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner penelitian. Uji realibilitas dilakukan adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang digunakan handal atau tidak. Uji realibiltas ini menggunakan uji statistic *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu alat ukur dinyatakan realibel jika nilai *Cronbach Alpha*  $>0,6$  (Nunnally, 1967) dalam Ghozali (2005:42). Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan diperoleh nilai sebagai berikut:

**Tabel Uji Realibilitas Variabel Perilaku Demokratis Siswa**

No.	Dimensi Variabel Perilaku	<i>N of Items</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
1.	Pengetahuan	1-17	0,885
2.	Sikap	1-17	0,910
3.	Tindakan Nyata	1-17	0,868

Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak ada nilai *Cronbach Alpha* yang berada di bawah nilai 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variable perilaku adalah realibel (*Cronbach Alpha*  $>0,6$ ).

**Tabel Uji Realibilitas Variabel Kurikulum Terselubung (*Hidden Curriculum*)**

No.	Dimensi Variabel <i>Hidden Curriculum</i>	<i>N of Items</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
1.	<i>Generalization</i>	1-17	0,877
2.	<i>Modelling</i>	1-17	0,862
3.	<i>Reward-Punishment</i>	1-17	0,882

Sumber: Data Penelitian 2011

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak ada nilai *Cronbach Alpha* yang berada di bawah nilai 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variable *Hidden Curriculum* adalah realibel (*Cronbach Alpha*  $>0,6$ ).

Lampiran

**PengetahuanCompute**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	47.00	1	1.0	1.0	1.0
	48.00	2	1.9	1.9	2.9
	49.00	2	1.9	1.9	4.8
	50.00	4	3.8	3.8	8.6
	51.00	15	14.3	14.3	22.9
	52.00	4	3.8	3.8	26.7
	53.00	4	3.8	3.8	30.5
	54.00	7	6.7	6.7	37.1
	55.00	9	8.6	8.6	45.7
	56.00	3	2.9	2.9	48.6
	57.00	1	1.0	1.0	49.5
	58.00	1	1.0	1.0	50.5
	59.00	7	6.7	6.7	57.1
	60.00	5	4.8	4.8	61.9
	61.00	5	4.8	4.8	66.7
	62.00	3	2.9	2.9	69.5
	63.00	9	8.6	8.6	78.1
	64.00	9	8.6	8.6	86.7
	65.00	4	3.8	3.8	90.5
	66.00	6	5.7	5.7	96.2
	67.00	1	1.0	1.0	97.1
	68.00	3	2.9	2.9	100.0
Total		105	100.0	100.0	

Statistics		
PengetahuanCompute		
N	Valid	105
	Missing	0
Median		58.0000

RECODE PengetahuanCompute (Lowest thru 58.0000=1) (58.0001 thru Highest=2) INTO PengetahuanRec. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=PengetahuanRec /ORDER=ANALYSIS.

**Statistics**

SikapCompute

N	Valid	105
	Missing	0
Median		63.0000

**SikapCompute**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50.00	2	1.9	1.9	1.9
	51.00	5	4.8	4.8	6.7
	52.00	1	1.0	1.0	7.6
	53.00	1	1.0	1.0	8.6
	54.00	4	3.8	3.8	12.4
	55.00	5	4.8	4.8	17.1
	56.00	4	3.8	3.8	21.0
	57.00	4	3.8	3.8	24.8
	58.00	4	3.8	3.8	28.6
	59.00	5	4.8	4.8	33.3
	60.00	4	3.8	3.8	37.1
	61.00	3	2.9	2.9	40.0
	62.00	5	4.8	4.8	44.8
	63.00	9	8.6	8.6	53.3
	64.00	12	11.4	11.4	64.8
	65.00	7	6.7	6.7	71.4
	66.00	5	4.8	4.8	76.2
	67.00	10	9.5	9.5	85.7
	68.00	15	14.3	14.3	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

RECODE SikapCompute (Lowest thru 63.0000=1) (63.0001 thru Highest=2) INTO SikapRec. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=SikapRec /ORDER=ANALYSIS.

**TindakanCompute**

**Statistics**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 38	1	1.0	1.0	1.0
42	1	1.0	1.0	1.9
45	2	1.9	1.9	3.8
47	1	1.0	1.0	4.8
48	3	2.9	2.9	7.6
49	2	1.9	1.9	9.5
50	6	5.7	5.7	15.2
51	15	14.3	14.3	29.5
52	7	6.7	6.7	36.2
53	5	4.8	4.8	41.0
54	6	5.7	5.7	46.7
55	2	1.9	1.9	48.6
56	8	7.6	7.6	56.2
57	8	7.6	7.6	63.8
58	7	6.7	6.7	70.5
59	4	3.8	3.8	74.3
60	7	6.7	6.7	81.0
61	5	4.8	4.8	85.7
62	3	2.9	2.9	88.6
63	4	3.8	3.8	92.4
64	4	3.8	3.8	96.2
65	1	1.0	1.0	97.1
66	1	1.0	1.0	98.1
67	1	1.0	1.0	99.0
68	1	1.0	1.0	100.0
Total	105	100.0	100.0	

TindakanCompute		
N	Valid	105
	Missing	0
Median		56.00

```
RECODE TindakanCompute (Lowest thru 56.00=1) (56.01 thru
Highest=2) INTO TindakanRec.EXECUTE.FREQUENCIES
VARIABLES=TindakanRec/ORDER=ANALYSIS.
```

GeneralisasiCompute					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	1	1.0	1.0	1.0
	29	1	1.0	1.0	1.9
	33	1	1.0	1.0	2.9
	34	1	1.0	1.0	3.8
	35	1	1.0	1.0	4.8
	36	1	1.0	1.0	5.7
	37	1	1.0	1.0	6.7
	38	4	3.8	3.8	10.5
	39	2	1.9	1.9	12.4
	40	7	6.7	6.7	19.0
	41	1	1.0	1.0	20.0
	42	4	3.8	3.8	23.8
	43	2	1.9	1.9	25.7
	44	9	8.6	8.6	34.3
	45	8	7.6	7.6	41.9
	46	8	7.6	7.6	49.5
	47	9	8.6	8.6	58.1
	48	16	15.2	15.2	73.3
	49	15	14.3	14.3	87.6
	50	5	4.8	4.8	92.4
	51	8	7.6	7.6	100.0
Total		105	100.0	100.0	

Statistics		
GeneralisasiCompute		
N	Valid	105
	Missing	0
Median		47.00

```

RECODE GeneralisasiCompute (Lowest thru 47.00=1) (47.01 thru
Highest=2) INTO GenRec.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=GenRec
/ORDER=ANALYSIS.

```

**Statistics**

ModellingCompute

N	Valid	105
	Missing	0
Median		47.00

**ModellingCompute**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 29	1	1.0	1.0	1.0
30	1	1.0	1.0	1.9
35	3	2.9	2.9	4.8
36	1	1.0	1.0	5.7
38	1	1.0	1.0	6.7
39	2	1.9	1.9	8.6
40	6	5.7	5.7	14.3
41	6	5.7	5.7	20.0
42	4	3.8	3.8	23.8
43	6	5.7	5.7	29.5
44	4	3.8	3.8	33.3
45	4	3.8	3.8	37.1
46	8	7.6	7.6	44.8
47	8	7.6	7.6	52.4
48	12	11.4	11.4	63.8
49	19	18.1	18.1	81.9
50	9	8.6	8.6	90.5
51	10	9.5	9.5	100.0
Total	105	100.0	100.0	

```
RECODE ModellingCompute (Lowest thru 47.00=1) (47.01 thru
Highest=2) INTO ModelRec.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=ModelRec
/ORDER=ANALYSIS.
```

**RPcompute**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 23	2	1.9	1.9	1.9
26	3	2.9	2.9	4.8
27	2	1.9	1.9	6.7
28	1	1.0	1.0	7.6
30	3	2.9	2.9	10.5
31	3	2.9	2.9	13.3
32	2	1.9	1.9	15.2
33	5	4.8	4.8	20.0
34	3	2.9	2.9	22.9
35	6	5.7	5.7	28.6
36	2	1.9	1.9	30.5
37	8	7.6	7.6	38.1
38	7	6.7	6.7	44.8
39	7	6.7	6.7	51.4
40	5	4.8	4.8	56.2
41	5	4.8	4.8	61.0
42	4	3.8	3.8	64.8
43	9	8.6	8.6	73.3
44	11	10.5	10.5	83.8
45	9	8.6	8.6	92.4
46	5	4.8	4.8	97.1
47	2	1.9	1.9	99.0
48	1	1.0	1.0	100.0
Total	105	100.0	100.0	

**Statistics**

RPcompute

N	Valid	105
	Missing	0
Median		39.00

```
RECODE RPcompute (Lowest thru 39.00=1) (39.01 thru Highest=2) INTO
Rprec.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Rprec
/ORDER=ANALYSIS.
```

### Statistics

PerilakuDemokratis

N	Valid	105
	Missing	0
Median		5.00

### PerilakuDemokratis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	7.6	7.6	7.6
4	13	12.4	12.4	20.0
5	29	27.6	27.6	47.6
6	55	52.4	52.4	100.0
Total	105	100.0	100.0	

```
RECODE PerilakuDemokratis (Lowest thru 5.00=1) (5.01 thru  
Highest=2) INTO PDrec.  
EXECUTE.
```

### Statistics

KurTer

N	Valid	105
	Missing	0
Median		5.00

### KurTer

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	8.6	8.6	8.6
4	10	9.5	9.5	18.1
5	29	27.6	27.6	45.7
6	57	54.3	54.3	100.0
Total	105	100.0	100.0	

```
RECODE KurTer (Lowest thru 5.00=1) (5.01 thru Highest=2) INTO  
KurTerRec.  
EXECUTE.
```

Lampiran

### **Wawancara dengan Kepala Sekolah**

Rabu, 12 Oktober 2011, pukul 12.30-13.15 WIB di Ruang Kepala Sekolah

Tanya (T)      Jawab (J)

T: Selamat siang, Pak..

J: Ya, de.. selamat siang..

T: Maaf, ini mengganggu Bapak.

J: Oo.. tidak. Silakan duduk!

T: Iya, terimakasih. Langsung saja, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak sapa?

J: Nama lengkap saya “informan X”

T: Untuk tempat dan tanggal lahir di mana?

J: Jakarta, 1 Desember 1958

T: Agama?

J: Islam

T: Oya, pendidikan terakhir Bapak?

J: Magister pendidikan

T: Sejak kapan Bapak bekerja di sini? Dan kenapa tertarik di sekolah ini?

J: Ya sejak tahun akhir 2010 yang lalu. itu ditugaskan oleh Dinas Pendidikan.

T: Apa visi, misi serta tujuan dari sekolah ini?

J: Untuk Visi dari SMA Negeri “X” Jakarta adalah “Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global”. Nah dari visi tersebut diturunkan ke dalam misi. Dan ini agar tepat sasaran maka harus diselaraskan dengan tujuan dari sekolah. Visi, misi, tujuan sekolah ini kamu bisa lihat, di depan sekolah terpampang spanduk besar-jelas, di ruang TU, guru, wakasek, dan ruang kelas juga bisa kamu lihat.

T: Apa yang hendak dicapai dari visi, misi dan tujuan tersebut? Dan bagaimana pengoperasionalisasikannya? (Visi: Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global).

J: Tentunya output yang dihasilkan adalah generasi-generasi penerus bangsa, yang berkualitas. Dan kaitannya dengan visi sekolah tersebut (demokratis) kita semua bersepakat bahwa dibutuhkan kerja sama, partisipasi dari semua pihak (stakeholder), para guru-pengajar dan seluruh warga sekolah ini, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat secara luas.

T: Apa yang menjadi ciri khas sekolah ini jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, baik itu negeri maupun swasta?

J: Sekolah ini menjadi sekolah unggulan di wilayah Jakarta Utara. Juga ditetapkan sebagai sekolah unggulan di wilayah DKI Jakarta. Sekarang ini sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Yang menjadi ciri khas sekolah ini adalah karakter, dalam arti pembiasaan perilaku sopan santun, berbudi pekerti, siswanya aktif juga.

T: Pandangan Bapak mengenai dunia pendidikan sekarang ini?

J: Saya kira perlu adanya perbaikan. Dunia pendidikan harus menjawab tantangan zaman, sesuai kondisi masyarakat. Tidak hanya IQ tetapi penting bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi dan spiritual. Mengingat makin pudarnya nilai-nilai kejujuran, ya to.. masih ada koruptor, minimnya rasa tanggung jawab.

T: Apakah Bapak mengetahui mengenai demokratisasi di institusi pendidikan (sekolah)? Darimana mengetahuinya? Dalam kaitannya dengan perilaku/tindakan demokratis, bagaimana pendapat Bapak?

J: Saat ini kita hidup di tengah era keterbukaan, demokrasi sebagai suatu model yang diyakini akan membawa perubahan perbaikan pada semua aspek kehidupan. Termasuk juga di bidang pendidikan, demokratisasi ini menjadi suatu keharusan. Secara umum adalah prinsip dari, oleh, dan untuk kita. Institusi pendidikan, sekolah ini pun dikembangkan atas prinsip itu. Artinya apa, bahwa partisipasi, peran serta semua warga sekolah, orang tua/wali murid, komite, masyarakat, mitra sekolah, merupakan subjek sekaligus objek utama.

T: Terkait dengan tema, bagaimana pandangan Bapak mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan sekarang ini? Menurut Bapak, nilai-nilai demokrasi yang universal itu apa saja (yang sering didengar)?

J: Kebanyakan orang salah mengartikan, atau mungkin kurang memahami. Demokrasi memang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tapi perlu diingat bahwa kebebasan itu ada tanggungjawabnya. Ada kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat, seperti perbedaan agama, suku/etnis, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut adalah kekayaan, khasanah tersendiri. Okelah, bebas asal tidak menyinggung orang lain, tidak ganggu/merusak, ehmm... toleransi aja, saling menghargai dan menghormati. Ya, kan... demokrasi mengajarkan kita untuk terbuka, toleran terhadap perbedaan. Kalau tadi pertanyaannya untuk penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan ya penting. Sekolah kan sebagai agen sosialisasi, bahkan sekarang dirasa sebagai agen sosialisasi yang utama.

T: Lantas pandangan Bapak mengenai kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J: Ya itu tadi, bebas ada batasan-batasannya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan/keterlibatan seseorang didalam suatu kelompok untuk mengambil bagian dalam kegiatan. Terus toleransi itu ya menghargai, menghormati orang lain, perbedaan-perbedaan yang ada.

T: Bagaimana dengan sekolah ini? Apakah ada penanaman nilai-nilai demokrasi itu di sekolah ini? Seperti apa implementasinya? (Salah satu misi: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis).

J: Sesuai visi, misi, tujuan dari sekolah ini tentunya ada penanaman nilai-nilai demokrasi itu. Seperti kegiatan diskusi dalam belajar mengajar di kelas, siswa dibiasakan untuk bisa bekerja kelompok, berani berpendapat menyampaikan aspirasi, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi, mengadakan acara-acara. Maka dari itu guru-guru harus selalu memberikan contoh yang baik. Selain itu sekolah juga mengadakan rapat komite yang mana mengajak, melibatkan semua komponen.

T: Bagaimana cara penanaman nilai-nilai demokrasi tersebut? Melalui media apa saja?

J: Penanaman tersebut melalui rutinitas sehari-hari, di dalam maupun di luar kelas. Interaksi antara siswa, guru, tata usaha, dan semua warga sekolah. Kami melakukannya dengan cara pembiasaan.. Justru dengan pembiasaan, dapat merubah perilaku para siswa.. Kalau hanya dikasih ilmu tapi ngga diaplikasikan, pengalaman di lapangan, menurut saya kurang berpengaruh. Makanya semua guru maupun staff, semua warga sekolah ini juga melakukan pembiasaan untuk berperilaku toleran dan partisipatif, bebas dengan tanggungjawab, kita semua sebagai warga sekolah ini.

T: Pandangan Bapak mengenai kurikulum terselubung? Bagaimana pandangan Bapak mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi melalui kurikulum terselubung?

J: Kurikulum terselubung sebagai salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang terus dikembangkan. Ehmm.. menurut saya cukup efektif guna penanaman nilai-nilai demokrasi. Artinya ada komunikasi dua arah antara siswa-guru.

T: Bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah ini? Baik itu secara agama dan suku serta kelas sosial?

J: Dengan bertoleransi. Yaaa.. toleransi menjadi suatu nilai yang harus ditanamkan.

T: Apakah ada kebijakan atau aturan yang dibuat untuk hal terkait?

J: Secara tertulis memang tidak ada. Tetapi sekolah tentu membiasakan hal tersebut.

T: Dalam posisi Bapak sebagai Kepala Sekolah apa yang Bapak lakukan dalam mendukung penanaman dan implementasi dari nilai-nilai demokrasi?

J: Pertama, memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga sekolah ini. Karena sebagai seorang pemimpin, menjadi panutan. Kedua, mengajak dan melibatkan semua komponen yang ada.

T: Terakhir, apa saja yang Bapak harapkan dengan mempraktikan sikap/perilaku/tindakan berbasis nilai-nilai demokrasi kepada para siswa?

J: Akan terlahir generasi-generasi penerus bangsa, yang berkualitas, demokratis, itu tadi ya.. kebebasan yang bertanggungjawab, aktif untuk berperan-serta di dalam kegiatan masyarakat, dan bertoleransi.

T: Baik, Pak. Terimakasih banyak atas waktunya. Saya rasa cukup.

Lampiran

### **Wawancara dengan Wakasek bidang kurikulum**

Senin, 10 Oktober 2011, pukul 13.02-14.10 WIB di Ruang Komite Sekolah

Tanya (T)      Jawab (J)

T: Selamat siang, Pak..

J: Ya.. selamat siang..

T: Sebelumnya maaf ini mengganggu Bapak. Terimakasih atas kesediaannya. Langsung saja, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak sapa?

J: Nama lengkap saya “informan Y”

T: Untuk tempat dan tanggal lahir di mana?

J: Simpang Langsat Kadap, 11 Agustus 1972

T: Agama?

J: Islam

T: Oya, pendidikan terakhir Bapak?

J: S2, sekarang sedang studi doktoral

T: Sejak kapan Bapak bekerja di sini?

J: Sejak tahun 1998.

T: Apa yang Bapak ketahui tentang “Kurikulum”? Dan darimana asalnya?

J: Secara sederhana kurikulum adalah segala apa yang kita butuhkan. Apapun itu. Bagaimana mencapainya. Langkah-langkah strategis apa yang mesti dipersiapkan. Dan kebetulan saya berkecimpung di bidang kurikulum pendidikan (S2), sekarang sedang studi S3 juga tentang kurikulum.

T: Menurut Bapak apa peran dari kurikulum dan seberapa penting perannya di sekolah?

J: Ya jelas penting, sangat penting. Kalau gak ada kurikulum, mau apa kita coba. Yang ada omong kosong.

T: Seperti kita ketahui bahwa ada kurikulum formal dengan kurikulum terselubung. Apa perbedaan antara keduanya?

J: Perlu diketahui bahwa kurikulum itu banyak. Memang diantaranya ada kurikulum formal dan terselubung. Kurikulum formal itu apa yang tertulis dengan jelas di visi, misi, tujuan, program kerja sekolah. Nah, untuk mewujudkan yang formal ini diperlukan “skenario” melalui rutinitas, aktivitas keseharian.

T: Bagaimana penerapan dari kedua macam kurikulum tersebut? Apakah saling menopang, mendukung, menguatkan?

J: Tentu saling mendukung lah..

T: Visi sekolah: Terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas dan demokratis mengakar pada budaya bangsa serta mampu bersaing di era global. Secara spesifik sekolah hendak membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis. Apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi?

J: Terlebih dahulu kita mestinya sadari bahwa kita ini sedang menyiapkan manusia-manusia brutal lho. Sekian lama dan mungkin masih berlangsung sampai sekarang, kalau yang terjadi dominasi guru di kelas. Padahal siswa memiliki potensi yang perlu di salurkan. Nah, dominasi guru bisa jadi menghambat itu. Dan pada akhirnya siswa salah dalam menyalurkan aspirasinya. Makanya sekolah ini penting untuk memberikan “ruang” interaksi, nilai-nilai demokrasi itu ya bagian kecil, tapi memang penting seperti memberi kebebasan, melihat kebutuhan siswa dengan melibatkannya, mengajarkan toleransi, kejujuran, nilai-nilai kebaikan yang lain.

T: Pandangan Bapak mengenai konsep kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J: Kebebasan yang tidak mengganggu orang lain. Partisipasi itu ya turut serta, terlibat di dalam kegiatan tertentu. Kalau toleransi seperti menghargai dan menghormati orang lain.

T: Apakah ada pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum sekolah ini? Melalui apa? Bagaimana? Alasannya?

J: Itu tadi saya katakan bahwa semua yang kita butuhkan itu terangkum di dalam kurikulum formal. Nah, guna mensinergiskan antara yang formal dengan terselubung diperlukan adanya suatu rekayasa sosial. Kamu dari sosiologi tahu akan itu kan. Misalnya kita ciptakan ruang-ruang interaksi antar-siswa. Lucu kan kalau tiga tahun sekolah di sini kenalnya cuma itu-itu aja. Kayak sekarang ini sekolah sebentar lagi mau ngadain pameran. Dimana masing-masing kelas akan merias kelasnya dengan berbagai kertas warna-warni. Coba gmn menurut kamu, atau guru di sini pun kayaknya gak kepikiran bahwa ini perlu direkayasa. Saya minta kelas A untuk bawa kertas warna kuning, kelas B bawa kertas warna hijau. Yasudah biarkan saja, mereka sendiri gmn caranya bisa merias kelasnya dengan kertas warna-warni. Pembagian tugas di kelas seperti apa, mereka yang atur. Kita guru-guru kan sebatas fasilitator... mesti inovatif.

T: Seberapa pentingkah kurikulum terselubung dengan nilai-nilai itu disosialisasikan/internalisasikan kepada para siswa? Mengapa?

J: Kita ketahui ada pengelompokan siswa, gangster-gengster, peergroup kalau dalam istilah sosiologinya, itu wajar di usia mereka. Tapi yang terpenting bagaimana ini menciptakan sesuatu yang positif. Makanya memahami perbedaan diantara siswa, peergroup, dan orang lain ya perlu diajarkan. Kamu baca bukunya John Dewey, ia sebut sebagai hal yang perlu “dibiasakan”.

T: Menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan kurikulum terselubung yang baik agar tepat sasaran?

J: Guru mesti inovatif, kalau gak ya akan tersisih. Anak-anak kan sudah canggih. Jadi bagaimana guru bisa membuat kelas itu “hidup”. Guru harus memperhatikan mobilitas di dalam kelas, karakteristik siswa.

T: Apakah penerapan kurikulum terselubung di sekolah ini sudah berjalan dengan baik?

J: Proses tersebut masih berjalan, dan kami terus lakukan perbaikan.

T: Apa harapan Bapak dengan diadakannya kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi di Sekolah ini?

J: Melalui sekolah akan lahir individu-individu yang cerdas, peduli, aktif berperan serta di dalam kegiatan masyarakat. Bukan sebaliknya, yang tercipta robot-robot yang beringas.

T: Baik, Pak. Makasih banyak.. Luar biasa..

J: Sama-sama..

### **Wawancara dengan guru mapel sekaligus pembina OSIS**

Senin, 10 Oktober 2011, pukul 09.20-10.15 WIB di teras, depan ruang wakasek.

Tanya (T)      Jawab (J)

T: Selamat pagi, Pak..

J: Pagi..

T: Sebelumnya maaf ini mengganggu Bapak.. Langsung saja, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak sapa?

J: Ya, itu tadi nama lengkap saya, singkat dan padat: “informan Z”

T: Untuk tempat dan tanggal lahir di mana?

J: Koto Tuo, 01 Januari 1964

T: Agama?

J: Islam

T: Suku bangsa?

J: Minang, WNI

T: Oya, pendidikan terakhir Bapak?

J: S1

T: Sejak kapan Bapak bekerja di sini?

J: Sejak tahun 1991.

T: Apa yang hendak dicapai dari visi, misi dan tujuan sekolah ini?

J: visi, misi, tujuan sekolah ini secara umum menghendaki akan lahirnya siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur, tidak hanya pintar, cerdas. Selain itu kami, kita semua tentu berharap nantinya siswa bisa lebih menghargai orang lain, menghormati adanya perbedaan, dan mandiri, serta siap bermasyarakat.

T: Apa yang menjadi ciri khas sekolah ini jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, baik itu negeri maupun swasta?

J: Yaa.. itu tadi, Mas. Perilaku, budi pekertinya yang santun. Kalau secara prestasi bisa dikatakan yaaa.. lumayanlah, baik akademik maupun non-akademik.

T: Pandangan Bapak mengenai dunia pendidikan sekarang ini?

J: Menurut saya pribadi, rasa-rasanya sistem pendidikan kita perlu dirubah.

T: Maksudnya?

J: Ehm.. kok selama ini dunia pendidikan kita terlalu menekankan pentingnya IQ. Padahal ada EQ dan SQ yang juga penting. Nah, dengan EQ dan SQ ini saya yakin bahwa ini bekal berharga bagi siswa kelak ketika mereka bersosialisasi, bermasyarakat.

T: Apakah Bapak mengetahui mengenai demokratisasi di institusi pendidikan (sekolah)? Darimana Bapak mengetahuinya? (Salah satu misi: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis).

J: Ya.. demokratisasi segala bidang, termasuk di dunia pendidikan. Ini bukan era orde baru lagi. Jadi semua orang tahu akan hak asasi, seperti hak mendapatkan pendidikan. Betul bahwa salah satu visi, misi, dan tujuan dari sekolah ini adalah membentuk perilaku demokratis siswa. Bisa mas lihat di depan (maksudnya: papan/spanduk visi, misi, dan tujuan sekolah). Untuk itu siswa terbiasa dengan diskusi, musyawarah, pada setiap pelajaran atau kegiatan di kelas/luar kelas. Mereka membiasakan diri untuk diskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Tentunya ini bukan dalam rangka kontek-mencontek. Disamping itu metode belajar di sini adalah pemecahan masalah secara kelompok/bersama. Ini artinya menuntut siswa untuk bertukar pikiran, berani menyampaikan pendapatnya.

T: Dalam kaitannya dengan sikap/perilaku/tindakan demokratis, bagaimana pendapat Bapak?

J: Penting... penting, Mas. Asalkan tidak *kebablasan*. Terkadang orang memaknai demokrasi itu semanya sendiri. Padahal ada kebebasan orang lain. Bebas tapi bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai koridor. Mas lebih tahu tentang inilah..

T: Terkait dengan tema, bagaimana pandangan Bapak mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi oleh lembaga pendidikan sekarang ini? Menurut Bapak, nilai-nilai demokrasi yang universal itu apa saja (yang sering Bapak dengar)?

J: Sekolah kan sebagai salah satu agen sosialisasi, selain keluarga, media massa, teman sebaya, dan masyarakat itu sendiri. Nah, sekolah, lembaga pendidikan memiliki peran yang penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa. Secara universal nilai-nilai itu ada kebebasan, hak-hak asasi, kesempatan yang sama, menghargai,

supremasi hukum. Ini ditopang dengan pilar-pilar demokrasi, harus ditegakkan. Dengan nilai-nilai demokrasi itu sebagai prinsip kebaikan.

T: Lantas pandangan Bapak mengenai kebebasan? (serta partisipasi dan toleransi)

J: Kebebasan ya.. yang bertanggung jawab, karena ada kebebasan orang lain. Sekarang kita mesti aspiratif-partisipatif dari kita, oleh kita, dan untuk kita, siswa, masyarakat, semua pihak. Dari bawah ke atas. Bukan jamannya lagi top-down. Misal adanya kegiatan-kegiatan ya dari masyarakat, dari siswa sendiri. Kami pihak sekolah bersama komite ya tentu memfasilitasi. Ada kemauan, kemampuan, demi tujuan bersama kok. Nah, sejalan dengan kebebasan dan partisipasi berbagai pihak tentu muncul beragam perbedaan. Maka dari itu penting untuk kemudian kita bertoleransi, menghargai orang lain, menghormati perbedaan, saling menjaga..

T: Menurut Bapak pentingkah nilai-nilai demokrasi diajarkan pada siswa?

J: Jawabannya ya penting.

T: Dalam kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi, sebagai guru apa yang Bapak lakukan untuk mendukung penanaman nilai-nilai tersebut? Langkah-langkah apa saja yang Bapak ambil? (pengetahuan-sikap-tindakan nyata).

J: Sekarang ini sudah barang tentu guru-guru memberikan, mengajarkan, dan mencontohkan, memberi teladan yang baik. Mensosialisasikan bagaimana kebebasan yang bertanggungjawab, pentingnya partisipasi, dan juga pentingnya toleransi. Di kelas, di luar kelas, setiap saat, kapan saja dan di mana saja, Mas. Karena guru itu *digugu dan ditiru*. Jangan sampai: guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

T: Apakah ada hambatan? Hambatan apa yang pernah Bapak alami dalam melakukan penanaman nilai-nilai demokrasi tersebut?

J: Sejauh ini belum saya temui.

T: Apakah ada keterlibatan aktif siswa terhadap sosialisasi-internalisasi yang Bapak berikan?

J: Iyaa.. Ada keterlibatan secara aktif dari semua siswa, secara umum.

T: Selama Bapak mengajar, bagaimana pandangan Bapak tentang perilaku demokratis siswa di kelas? Di sekolah ini? Secara umum, apakah para siswa sudah dapat dianggap berperilaku demokratis?

J: Mereka mayoritas ya sudah menunjukkan perilaku yang demokratis.

T: Bagaimana dengan interaksi antara Bapak dan siswa di kelas maupun diluar kelas?

J: Ya.. layaknya anak dengan orang tua. Kami guru-guru semua prinsipnya asah-asih-asuh.

T: Apakah Bapak memberikan imbalan atau hukuman kepada siswa? Apa bentuknya?

J: Iya terkadang bila dirasa perlu kita memberikan imbalan, sebaliknya juga dengan hukuman. Imbalan bisa berupa pujian, sanjungan, ucapan selamat/bangga, dan sebagainya. Sedangkan hukuman bisa berupa teguran lisan, meminta mereka bernyanyi, atau kita keluarkan dari kelas.

T: Sikap/perilaku apa yang Bapak perhatikan sehari-hari kepada siswa?

J: Sebagai guru ya mengajarkan, dan mencontohkan, memberi teladan yang baik..

T: Terakhir, apa saja yang Bapak harapkan, sebagai guru dengan mempraktikkan sikap/perilaku/tindakan berbasiskan nilai-nilai demokrasi kepada para siswa?

J: Harapannya anak-anak bisa bermasyarakat dengan baik. Bisa menghargai orang lain. Turut serta merubah keadaan, ya aktif memperbaiki kondisi sekitar. Mampu hidup mandiri dalam bingkai kebersamaan.

T: Baik, Pak. Saya rasa cukup. Terimakasih banyak..

J: Iya, sama-sama..

### **Wawancara dengan Siswa**

Jumat, 21 Oktober 2011, pukul 09.00-10.00 WIB di teras, depan ruang kelas.

Tanya (T)      Jawab (J)

T: Selamat pagi, dik..

J: Pagi kak..

T: Sebelumnya maaf ini mengganggu.. Langsung saja, kalau boleh tahu siapa nama lengkapmu?

J: Nama lengkap saya, “informan A”

T: Untuk tempat dan tanggal lahir di mana?

J: 31 Januari 1995

T: Agama?

J: Kristen Protestan

T: Suku bangsa?

J: Jawa

T: Apa alasan kamu masuk sekolah ini?

J: Karena sekolah ini termasuk sekolah terbaik di Jakarta. Lagian deket dengan rumah juga. Hehehe..

T: Kamu udah kelas XII tentu tahu dong salah satu misi sekolah: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis. Menurut kamu sikap/perilaku demokratis itu perilaku yang seperti apa?

J: Ehm.. ya gitu deh.. misalnya kayak ngasih kesempatan buat nanya pas diskusi kelas, pas ada presentasi, trus nerima kritik dan saran, pokoknya saling nerima.. ng-hargai pendapat oaring lain.

T: Bagaimana pandangan kamu mengenai paham kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J: Kalau kebebasan ya kita bebas mo ngapain aja tapi tetep pada batasan tertentu, bebas yang sopan, bisa dipertanggung jawabkan. Kalau partisipasi itu ikut serta, terlibat deh. Toleransi itu saling menghargai pendapat, menerima saran dari orang lain.

T: Apakah sekolah ini memberikan sebuah pengetahuan tentang itu? (kebebasan, partisipasi, dan toleransi).

J: iya kak..

T: Kegiatan seperti apa yang biasa diberikan oleh sekolah yang berkaitan dengan kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J: Di sekolah misalnya siswa bebas mengikuti kegiatan yang disukainya. Mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di sekolah, bisa terlibat jadi panitia. Toleransi antarsiswa yang beda agama, menghargai hari-hari besar agama masing-masing.

T: Dari pengalaman di sekolah, apakah guru mengajarkan tentang kebebasan (berpendapat secara lisan/tulisan, berserikat/berskumpul/berorganisasi/kepanitiaan, berekspresi)? Seperti apa? Apakah melalui mata pelajaran? Atau dengan cara-cara lain? Menurut kamu itu efektif tidak?

J: Iya, misalnya kegiatan OSIS, ekstrakurikuler. Di pelajaran PKn, pelajaran yang lain juga kan presentasi di depan kelas trus diskusi gitu. Menurut saya itu cukup efektif.

T: Pernah ada atau tidak gambaran kejadian negatif di kalangan siswa karena selisih paham kebebasan? Seperti cek-cok mulut, sampai pada berkelahi? Kamu melihatnya bagaimana?

J: enggak pernah, kak..

T: Secara umum, pengambilan keputusan/kebijakan sekolah apakah melalui musyawarah?

J: Iya, keputusan atau kebijakan sekolah melalui musyawarah guru, kepala sekolah, orang tua/wali murid, ada komite sekolah.

T: Dan pengambilan keputusan/kebijakan/penyusunan tata tertib itu apakah melibatkan para siswa? ada perwakilan siswa yang terlibat di dalamnya?

J: Kalau itu saya kurang tahu, kak. Karena dulu sejak masuk udah disosialisasiin. Mungkin ada perwakilan dari OSIS dulu.

T: Menurut kamu bagaimana untuk menyampaikan aspirasi/keinginan/kritik-saran siswa kepada pihak sekolah? Melalui sarana/media apa saja yang ada di sekolah ini? (kotak pengaduan, forum komunikasi osis/mpk, komite sekolah, dsb).

J: Sebenarnya ada sarana kotak pengaduan, hanya kurang minatnya. Jadi terkadang kita menyampaikan saran dan kritik lewat tulisan di madding, atau kita langsung aja bilang ke gurunya, atau ke guru BK.

T: Apakah para siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ini? Apakah kamu merasakan hal itu?

J: Iya, kak..

T: Apakah ada penilaian tersendiri dari kepek/guru/teman kamu sendiri, bagi siswa yang terlibat aktif untuk memberikan ide/gagasan/saran/kritik? Seperti apa?

J: Menurut saya iya, kak. Misalnya jadi lebih dikenal, disanjung, lebih deket aja dengan guru..

T: Bagaimana penerapan tata-tertib di sekolah ini? Misalnya jika kamu melanggar tata tertib (telat) pemberian *punishment* -hukuman- seperti apa? Sebaliknya, bagaimana jika guru yang melanggar tata tertib itu?

J: Ada, jika kita melanggar kita akan diberi poin, trus lama-lama bisa diskorsing deh atau panggilan orang tua. Kalau guru yang melanggar, katanya sih gajinya dipotong tapi nggak tau bener pa nggak.

T: Disamping itu, ada pemberian *reward*-kah dari guru? seperti apa?

J: Ya jarang.. paling kalau abis menang lomba, atau kalau kita berkelakuan baik, dipuji, kadang di kelas ada penambahan nilai gitu..

T: Seberapa penting menurut kamu toleransi dan suatu bentuk perlakuan adil?

J: Penting banget.. Indonesia itu majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, etnis, bahasa daerah, budayanya, beda agama, keyakinan, beda status sosial, ada yang kaya-miskin. Kan bisa menimbulkan perbedaan pendapat, pemahaman. Makanya toleransi penting, terbuka terhadap perbedaan-perbedaan itu.

T: Pendapat kamu mengenai keragaman di sekolah ini bagaimana? secara agama, etnis, dan kelas sosial?

J: Beragam banget. Enggak masalah dengan adanya keragaman, justru kita bisa belajar saling menghargai satu sama lain.

T: Bagaimana kamu menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kaitannya dengan kebebasan? Toleransi?

J: Pokoknya saling menghormati aja. Enggak usah saling mencela..

T: Fungsi teman di sekolah seperti apa? Apakah menurut kamu mereka mengajarkan mengenai sikap/perilaku demokratis?

J: Iyalah.. dari temen kita bisa belajar untuk saling menjaga perasaan, menghargai pendapat..

T: Apakah di sekolah kamu ikut ekstrakurikuler atau kegiatan lain di luar kegiatan belajar? Apakah menurut kamu dari kegiatan tersebut kamu mendapatkan tentang nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)

J: Iya. Iya, kak.

T: Bagaimana orang tua di rumah mengajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi (kebebasan, partisipasi, toleransi)? Seperti apa?

J: Oo.. misalnya dengan saling memberi pendapat dan saran, pas dulu saya bebas memilih jurusan IPA atau IPS, partisipasi nentuin menu makanan di rumah..

T: Pergaulan orang tua - kamu bagaimana? Apakah mereka memberikan contoh yang baik? Seperti apa?

J: Iya, orang tua bersikap demokratis.

T: Di antara guru-guru di sekolah, teman dan juga orang tua, siapa yang bisa kamu rasakan pengaruhnya dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)

J: Orang tua, teman juga..

T: Sumber informasi lain apakah ada? Seperti media apakah yang berpengaruh dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (Televisi, Buku, Surat Kabar, Radio, Ensiklopedia, Majalah, Internet)

J: Iya ada, biasanya dari berita di televisi

T: Oke, dik. Makasih ya..

### **Wawancara dengan Siswa**

Jumat, 21 Oktober 2011, pukul 11.00-11.30 WIB di kantin.

Tanya (T)      Jawab (J)

T: Selamat pagi, dik..

J: Pagi kak..

T: Sebelumnya maaf ini mengganggu.. Langsung saja, kalau boleh tahu siapa nama lengkapmu?

J: Nama lengkap saya, “informan B”

T: Untuk tempat dan tanggal lahir di mana?

J: 15 Februari 1995

T: Agama?

J: Islam

T: Suku bangsa?

J: Ehm.. ayah jawa, ibu sunda, kak..

T: Apa alasan kamu masuk sekolah ini?

J: Karena untuk mempermudah melanjutkan kuliah. Kan sekolah ini sekolah yang bagus di sini..

T: Kamu udah kelas XII tentu tahu dong salah satu misi sekolah: Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis. Menurut kamu sikap/perilaku demokratis itu perilaku yang seperti apa?

J: Perilaku demokratis itu adalah perilaku yang sifatnya terbuka dengan adanya perbedaan.

T: Bagaimana pandangan kamu mengenai paham kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J: Paham kebebasan ialah sikap lepas, bebas berbuat sesuka hati. Partisipasi: mengikuti sesuatu, membantu. Toleransi itu sikap saling menghargai sesama.

T: Apakah sekolah ini memberikan sebuah pengetahuan tentang itu? (kebebasan, partisipasi, dan toleransi).

J: iya kak. Sekolah ini memberikan itu.

T: Kegiatan seperti apa yang biasa diberikan oleh sekolah yang berkaitan dengan kebebasan? Partisipasi? Dan toleransi?

J:Ya, seperti membuat kelompok diskusi, ya begitu juga pada cara lain seperti lewat ekskul.

T: Dari pengalaman di sekolah, apakah guru mengajarkan tentang kebebasan (berpendapat secara lisan/tulisan,berserikat/berskumpul/berorganisasi/ kepanitiaan, berekspresi)? Seperti apa? Apakah melalui mata pelajaran? Atau dengan cara-cara lain? Menurut kamu itu efektif tidak?

J: Iya, secara garis besar itu cukup efektif.

T: Pernah ada atau tidak gambaran kejadian negatif di kalangan siswa karena selisih paham kebebasan? Seperti cek-cok mulut, sampai pada berkelahi? Kamu melihatnya bagaimana?

J: Perselisihan paham ada tapi enggak sampai berantem. Karena masih muda aja, mereka masih mementingkan ego masing-masing. Saya melihatnya itu hal yang wajar karena itu proses pembentukan jati diri.

T: Secara umum, pengambilan keputusan/kebijakan sekolah apakah melalui musyawarah?

J: Iya, di sekolah dilakukan musyawarah.

T: Dan pengambilan keputusan/kebijakan/penyusunan tata tertib itu apakah melibatkan para siswa? ada perwakilan siswa yang terlibat di dalamnya?

J: Kayaknya enggak deh. Harusnya ada perwakilan dari siswa.

T: Menurut kamu bagaimana untuk menyampaikan aspirasi/keinginan/kritik-saran siswa kepada pihak sekolah? Melalui sarana/media apa saja yang ada di sekolah ini? (kotak pengaduan, forum komunikasi osis/mpk, komite sekolah, dsb).

J: Melalui OSIS, bisa melalui BK, atau kesiswaan, terkadang langsung ke kepek (kalau lagi nengok ke kelas)

T: Apakah para siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ini? Apakah kamu merasakan hal itu?

J: Iya, kak..

T: Apakah ada penilaian tersendiri dari kepek/guru/teman kamu sendiri, bagi siswa yang terlibat aktif untuk memberikan ide/gagasan/saran/kritik? Seperti apa?

J: Iya, kak. Diberi pujian..

T: Bagaimana penerapan tata-tertib di sekolah ini? Misalnya jika kamu melanggar tata tertib (telat) pemberian *punishment* -hukuman- seperti apa? Sebaliknya, bagaimana jika guru yang melanggar tata tertib itu?

J: Ada, misalnya jika kita melanggar kita akan disuruh nyanyi di lapangan, atau dikeluarkan dari kelas. Kalau guru yang melanggar, enggak tau tuh.

T: Disamping itu, ada pemberian *reward*-kah dari guru? seperti apa?

J: Ya, dipuji, kadang di kelas ada penambahan nilai gitu..

T: Seberapa penting menurut kamu toleransi dan suatu bentuk perlakuan adil?

J: Sangat penting..

T: Pendapat kamu mengenai keragaman di sekolah ini bagaimana? secara agama, etnis, dan kelas sosial?

J: Menurut saya perbedaan itu indah, dengan cara saling menghormati.

T: Bagaimana kamu menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kaitannya dengan kebebasan? Toleransi?

J: Ya dengan toleransi

T: Fungsi teman di sekolah seperti apa? Apakah menurut kamu mereka mengajarkan mengenai sikap/perilaku demokratis?

J: Iya.. untuk melatih kita biar bisa toleransi

T: Apakah di sekolah kamu ikut ekstrakurikuler atau kegiatan lain di luar kegiatan belajar? Apakah menurut kamu dari kegiatan tersebut kamu mendapatkan tentang nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)

J: Iya. Ikut, kak.

T: Bagaimana orang tua di rumah mengajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi (kebebasan, partisipasi, toleransi)? Seperti apa?

J: Oo.. misalnya dengan makan malam bersama dan membicarakan hal-hal yang terjadi atau topik tertentu.

T: Pergaulan orang tua - kamu bagaimana? Apakah mereka memberikan contoh yang baik? Seperti apa?

J: Iya, baik. Seperti mendengarkan pendapat kita.

T: Di antara guru-guru di sekolah, teman dan juga orang tua, siapa yang bisa kamu rasakan pengaruhnya dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (kebebasan, partisipasi, toleransi)

J: Semua. Guru, orang tua, temen..

T: Sumber informasi lain apakah ada? Seperti media apakah yang berpengaruh dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi? (Televisi, Buku, Surat Kabar, Radio, Ensiklopedia, Majalah, Internet)

J: Iya ada, biasanya dari televisi dan internet

T: Oke, dik. Makasih ya..

J: Iya, sama-sama kak..

## Lampiran

### **Gambaran Umum Program Kerja Kesiswaan**

#### 1. Penerimaan Siswa Baru

- Melaksanakan PSB offline sesuai jadwal dari Diknas DKI Jakarta.
- Melaksanakan PSB on line sesuai jadwal dari Diknas DKI Jakarta.
- Jumlah siswa yang diterima 9 rombongan sejumlah 360 siswa.
- Kriteria Penerimaan disesuaikan dengan Juknis PSB tahun 2010-2011.
- Pelaksanaan oleh Panitia PSB Sekolah.
- Membuat laporan akhir PSB online

#### 2. Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2009-2010 dengan hasil NEM tertinggi 33,40 dan terendah 25,60.

#### 3. Penyusunan Kelas

- Pendataan siswa yang naik kelas dan siswa mengulang (kelas XI dan XII).
- Penyusunan kelas X, XI dan XII.
- Persiapan daftar atau buku kelas, buku hadir dan buku nilai.
- Pengaturan ruang kelas.
- Pengisian buku induk.
- Pembuatan buku klaper.

#### 4. Pembukuan Tahun Pelajaran 2010-2011.

- Upacara hari pertama tanggal 14 Juli 2010.
- Mengadakan masa orientasi bagi siswa kelas X baru.
- Penyampaian aturan tata tertib sekolah, wawasan Wiyata Mandala, cara belajar yang baik dan penggunaan Fasilitas sekolah.
- Pelaksanaan atau penegakan aturan tata tertib sekolah.

#### 5. Pemilihan Pengurus OSIS Baru (Agustus s/d September 2010).

- Inventaris Prestasi Siswa.
- Penyampaian Program Kerja.
- Pemilihan Pengurus OSIS.
- Peresmian Pengurus OSIS.

- Penataran Pengurus OSIS.

#### 6. Pembinaan Kerohanian.

- Perayaan Maulid Nabi Muhamad SAW.
- Perayaan Natal.
- Perayaan Idul Fitri.
- Perayaan Idul Adha.
- Perayaan Paskah.
- Kegiatan Rohani Islam.
- Pelajaran Agama Kristen dan Katolik.
- Pesantren Kilat.

#### 7. Pelepasan Siswa Kelas XII.

Tiga hari setelah pengumuman UN siswa dikembalikan kepada orang tua sekaligus menyerahkan STK dan Ijazah asli serta semua surat yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

### **Gambaran Umum Program Kerja Kurikulum**

#### 1. KTSP

- Mendalami isi KTSP Standar kompetensi, nara sumber dari Pusat Kurikulum.
- Melatih membuat soal dengan baik dan benar.
- Melatih guru membuat analisa ulangan harian.

#### 2. Menyusun Program Pengajaran

- Membuat Program Semester, Silabus, Satuan pengajaran dan Rencana Pengajaran dan Penilaian.

#### 3. Penilaian

- Mengadakan Ulangan Harian.
- Mengadakan UTS dan UAS, untuk tiap 6 bulan sekali bagi kelas X, XI dan XII.
- Mengadakan Try Out Ujian Nasional.
- Mengadakan Pra Ujian Nasional.
- Melaksanakan Ujian Nasional dan Ujian sekolah.
- Melaksanakan Ujian Parktik.

#### 4. Penyampaian Laporan Kemajuan

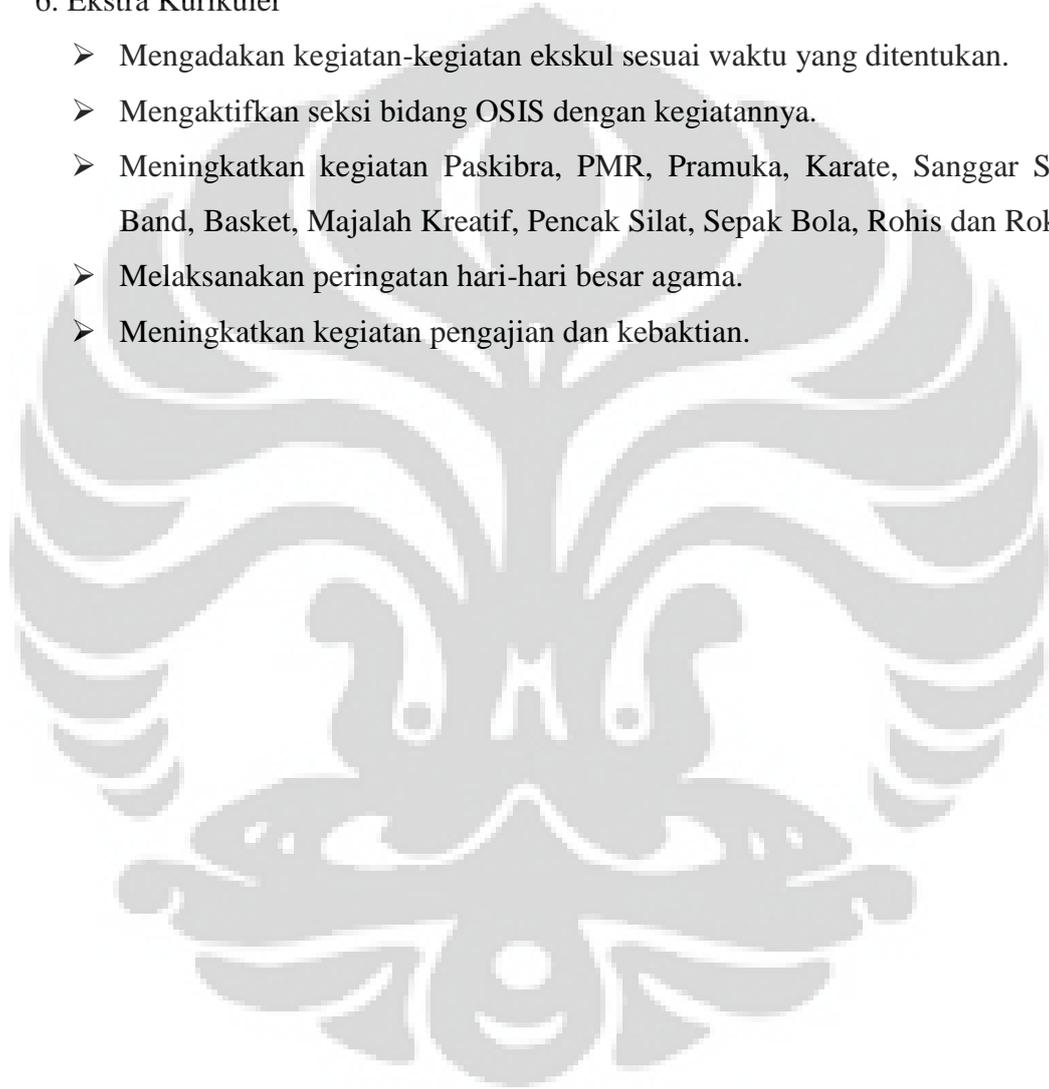
- Menyampaikan raport bayangan/tengah semester 2 kali dalam setahun.
- Menyampaikan raport untuk kelas X, XI dan XII setiap semester.
- Menyampaikan laporan hasil Nilai Try Out Ujian Nasional

#### 5. Program Pengayaan

- Menambah jam pelajaran kelas XII pada semester 2 (dua).

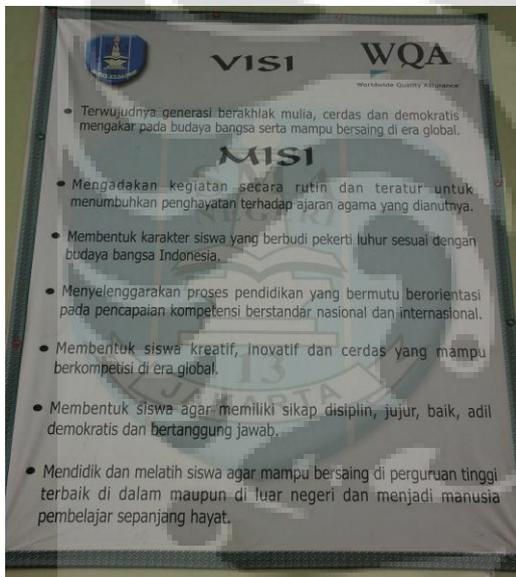
#### 6. Ekstra Kurikuler

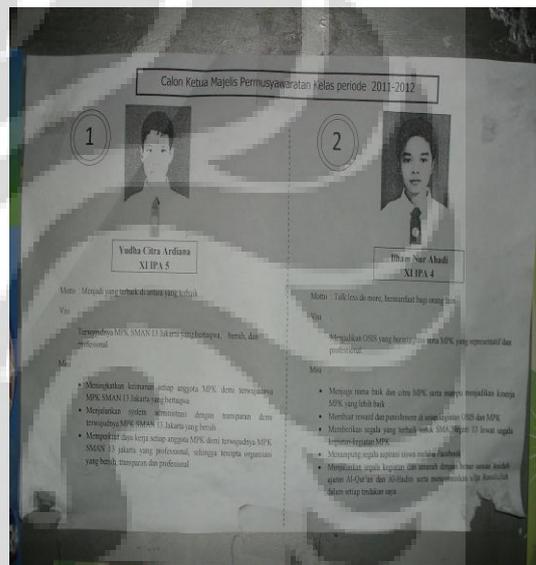
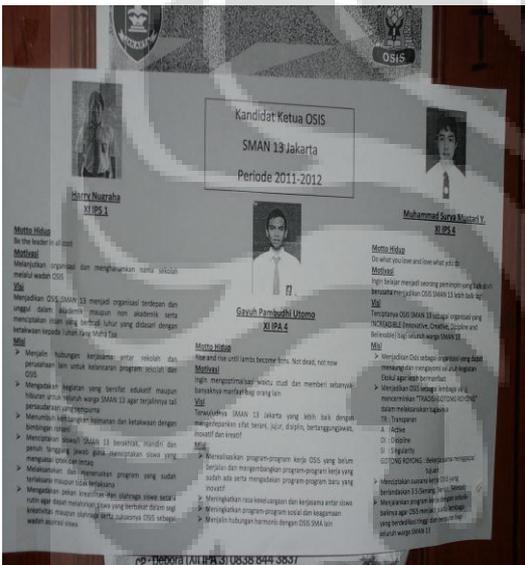
- Mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai waktu yang ditentukan.
- Mengaktifkan seksi bidang OSIS dengan kegiatannya.
- Meningkatkan kegiatan Paskibra, PMR, Pramuka, Karate, Sanggar Seni, Band, Basket, Majalah Kreatif, Pencak Silat, Sepak Bola, Rohis dan Rokris.
- Melaksanakan peringatan hari-hari besar agama.
- Meningkatkan kegiatan pengajian dan kebaktian.



## Lampiran

(Sumber: Data Dokumentasi Penelitian 2011)





Sebagai tindak lanjut untuk menghadapi tahun ajaran baru dan periode kepemimpinan baru MPK SMAN 13 Jakarta, maka kami selaku BPH MPK SMAN 13 periode 2010-2011 akan mengadakan OPEN RECRUITMENT calon pengurus MPK periode 2011-2012 yang akan dilaksanakan pada Senin 18 Juli 2011 di ruang kelas XII IPA 2 pukul 15:15 WIB. Terimakasih





Wakil kurikulum : drs. Achmad saifudin , M.Pd

## I. KURIKULUM

### 1. KTSP

- Mendalami isi KTSP Standar kompetensi, nara sumber dari Pusat Kurikulum.
- Melatih membuat soal dengan baik dan benar.
- Melatih guru membuat analisa ulangan harian.

### 2. Menyusun Program Pengajaran

- Membuat Program Semester, Silabus, Satuan pengajaran dan Rencana Pengajaran dan Penilaian.

### 3. Penilaian

- Mengadakan Ulangan Harian.
- Mengadakan UTS dan UAS, untuk tiap 6 bulan sekali bagi kelas X, XI dan XII.
- Mengadakan Try Out Ujian Nasional.
- Mengadakan Pra Ujian Nasional.
- Melaksanakan Ujian Nasional dan Ujian sekolah.
- Melaksanakan Ujian Parktik.

### 4. Penyampaian Laporan Kemajuan

- Menyampaikan raport bayangan/tengah semester 2 kali dalam setahun.
- Menyampaikan raport untuk kelas X, XI dan XII setiap semester.
- Menyampaikan laporan hasil Nilai Try Out Ujian Nasional

### 5. Program Pengayaan

- Menambah jam pelajaran kelas XII pada semester 2 (dua).

### 6. Ekstra Kurikuler

- Mengadakan kegiatan-kegiatan ekskul sesuai waktu yang ditentukan.
- Mengaktifkan seksi bidang OSIS dengan kegiatannya.
- Meningkatkan kegiatan Paskibra, PMR, Pramuka, Karate, Sanggar Seni, Band, Basket, Majalah Kreatif, Pencak Silat, Sepak Bola, Rohis dan Rokris.
- Melaksanakan peringatan hari-hari besar agama.
- Meningkatkan kegiatan pengajian dan kebaktian.

Program Kerja Kurikulum

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	STRATEGI	PENJAWAB
<b>JULI 2007</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran	Menyusun program kerja guru	Koord. MP
2	1 s.d 10	Pengaturan kelas X, XI IPA, XI IPS , XII IPA, XII IPS	Siswa & Guru	Tersusunnya daftar nama siswa 26 kelas	Pembagian kelas berdasarkan rangking nilai, jenis kelamin serta agama	Kur
		Menyusun pembagian tugas mengajar, wali kelas, piket, Koordinator Mata Pelajaran	Penugasan guru dalam menunjang proses belajar mengajar	Tersusunnya perangkat Kurikulum	Pembagian jam mengajar guru berdasarkan analisa 24 jam pelajaran perguruan.	Kur
		Pembuatan Jadwal Pelajaran	Pengaturan proses belajar mengajar	Tersusunnya roster pelajaran	Membuat jadwal mengajar guru untuk 5 hari kerja	Kur
3	5 s.d. 7	Lapor diri siswa	Seluruh siswa mendaftarkan diri kembali	100% siswa lapor diri	Siswa mendaftar	KESISWAAN
4	12 s.d. 14	Hari efektif pertama Tahun Pelajaran 2010/2011	Pengaturan proses belajar mengajar	Siswa dan guru hadir tepat waktu	Mengabsen siswa dan guru	Kur
		Kelas X MOS	Siswa & Guru	Siswa kelas X mengenal dan memahami lingkungan sekolah	Memberikan materi wiyata mandala dan kedisiplinan	KESISWAAN
		Kelas XI dan XII belajar efektif	Siswa & Guru	KBM berlangsung tertib	Mengabsen dan memantau guru mengajar	Kur
		Pembagian Buku Wali Kelas	Wali kelas	Terprogram kerja wali kelas	Memantau perkembangan siswa	Kur

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	STRATEGI	PENJAWAB
5	30	Pengumpulan Program Kerja Guru ((Program tahunan, Program semester, RPP, KKM, dan Silabus)	Guru	Terkumpul 63 program kerja guru	Mendata guru yang telah menyerahkan program kerjanya	Kur
<b>AGUSTUS 2007</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	1. Pertemuan rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord.MP
2	2 s.d 6	Pekan Ulangan Harian 1	Siswa	Nilai	Memberikan ulangan harian	Kur
3	11 s.d 13	Perkiraan libur awal Ramadhan 1431 H	Guru dan Siswa	Siswa		
4	17	Perayaan Kemerdekaan (Libur Umum)	Guru dan Siswa	Siswa		PANITIA
<b>SEPTEMBER 2007</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	KBM		Koord. MP
2	3 s.d. 17	Perkiraan libur Idul Fitri 1431 H	Siswa	Pengem. Diri		Sekolah
3	20 s.d 30	Belajar Efektif	Siswa	Siswa	Tercapai KBM yang efektif	Kur
<b>OKTOBER 2010</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	KBM		Koord. MP
2	6 s.d. 13	UTS	Siswa	Nilai 75% diatas KKM	Membuat jadwal pelaksanaan UTS	
3	14 s.d. 22	Remedial	Siswa	Nilai 100% diatas KKM	Membuat jadwal pelaksanaan Remedial	
4	23	Pembagian Rapor Tengah Semester	Siswa	Ortu	Memanggil ortu untuk menerima laporan nilai	
5	25 s.d 29	Rekrutment Peserta OSN	Siswa	Memiliki Tim OSN	Mendata dan mencari siswa untuk menjadi peserta OSN	
<b>NOVEMBER 2010</b>						

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	STRATEGI	PENJAWAB
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord. MP
2	8 s.d. 10	Perkiraan TO 1 MKKS	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
3	1 s.d. 19	Supervisi Akademik	Guru			Kur
4	1 s.d. 5	Rapat Koordinasi Piket	Mengevaluasi kegiatan PBM	Ketuntasan belajar	Mengevaluasi kinerja piket	Kur
5	1 s.d. 5	Rapat Koordinasi Guru kelas XII	Mengevaluasi kegiatan PBM	Ketuntasan belajar	Mengevaluasi KBM	Kur
6	8 s.d. 12	Rapat Koordinasi Guru kelas XI	Mengevaluasi kegiatan PBM	Ketuntasan belajar	Mengevaluasi KBM	Kur
7	8 s.d. 12	Rapat Koordinasi Guru kelas X	Mengevaluasi kegiatan PBM	Ketuntasan belajar	Mengevaluasi KBM	Kur
8	29 s.d 30	UAS	Siswa	Nilai $\geq 7,5$	Mengevaluasi KBM	Kur
<b>DESEMBER 2010</b>						
1	1 s.d. 6	UAS	Siswa	Nilai $\geq 7,5$	Mengevaluasi KBM	Koord. MP
2	7	1 Hijriah (Libur Umum)				
3	8 s.d. 10	Remedial	Siswa	Nilai $\geq 7,5$		Kur
4	13 s.d. 15	Pengolahan Nilai	Tim	Selesai jadwal		SAS
5	16	Rapat Dewan Guru				Kepsek.
6	18	Pembagian Rapor semester ganjil	Siswa	Ortu	Membagikan nilai rapor	Kur
7	20 s.d. 31	Libur semester ganjil				Wali Kelas
<b>JANUARI 2011</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		
2	3	Awal semester genap				Kur
3	17 s.d. 19	TO MKKS ke 2	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
4	3 s.d. 28	Belajar Efektif				Kur

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	STRATEGI	PENJAWAB
<b>FEBRUARI 2011</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord. MP
2	7 s.d. 25	Supervisi Akademik				Kur
3	14 s.d. 16	TO ke 3 MKKS	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
4	21 s.d. 25	Pekan Ulangan Harian				Kur
<b>MARET 2011</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord. MP
2	1 s.d. 3	Pra UN	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
3	7 s.d. 15	UTS Genap	kelas X	penjurusan		Kur
4	16 s.d. 18	Remedial		IPA / IPS		Kur
5	25	Pembagian Rapot bayangan				Kur
6	28 s.d. 31	UN Utama	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Mendapatkan peringkat 1	Kur
<b>APRIL 2011</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord. MP
2	1	UN Utama	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
3	4 s.d. 8	UN Susulan	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
4	6 s.d. 12	Ujian Praktik UN	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
5	18 s.d. 20	Ujian Nasional Sekolah	Siswa kelas XII	Nilai $\geq 7,5$	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
6	25	Pengumuman Kelulusan	Siswa kelas XII	Lulus 100% dan Peringkat Un nomor 2 di DKI Jakarta	Membimbing siswa dan memotivasi siswa	Kur
7	25 s.d. 29	Penyerahan Nilai Rapor kelas XII				Kur

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	STRATEGI	PENJAWAB
<b>MEI 2011</b>						
1	Minggu ke 2 dan ke 4	Pertemuan Rutin Koord. MP Sekolah	Guru	Guru Mata Pelajaran		Koord. MP
2	2 s.d. 4	Pengolahan dan pencetakan nilai rapor kelas XII	Siswa			Kur
3	6	Pembagian Rapor kelas XII	Ortu			Kur
4	2 s.d. 31	Belajar efektif	Siswa Kelas XII			Kur
<b>JUNI 2011</b>						
1	6 s.d. 14	UAS Genap	Guru	Guru Mata Pelajaran	Membuat jadwal pelaksanaan	Kur
2	15 s.d. 17	Remedial	Siswa	Nilai $\geq 7,6$	Membuat jadwal pelaksanaan	Kur
3	20 s.d. 21	Pengolahan nilai	Siswa		Mengentri nilai dari guru	Kur
5	22	Rapat Wali kelas	Siswa	Naik 100%	Meneliti dan mengecek kelengkapan nilai siswa serta ketuntasannya	Kur
6	23	Rapat Pleno Kenaikan dan Penjurusan	Siswa	Naik 100%		Kur
7	25	Pembagian Raport	Guru	Kenaikan 100%		Kur
8	26 s.d. 30	Libur Semester Genap	Siswa dan Guru	2 minggu		Kur



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

## SMA 13 JAKARTA

Jl. Seroja No. 1 Koja Jakarta Utara Telp. 4303676 - Fax. 4304580

### NAMA DAN KODE GURU TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KO DE	NAMA GURU	PNS PTT	
<b>A Pendidikan Agama</b>			
1	A1	Drs. H. Amin Nuh	PNS
2	A2	Lukmayuzi, S.Pd	HNR
3	A3	H. Mahmud Al Bugis	HNR
4	A4	Lemaran Marbun	PNS
5	A5	Risma Nainggolan, S.Pd	PNS
<b>B Kewarganegaraan</b>			
6	B1	Dra. Ermawati Siagian	PNS
7	B2	Dra. Retno Listiarty	PNS
8	B3	Drs. Taslim	CPNS
<b>C Bahasa Indonesia</b>			
9	C1	Dra. Delfina Elida	PNS
10	C2	Ida Usmanti S.Pd.	PNS
11	C3	Dra. Rosnani	CPNS
12	C4	Dra. Asih Rawanis	CPNS
13	C5	Dra. Widayati	CPNS
<b>D Bahasa Inggris</b>			
14	D1	H. Ali Akbar Liun	PNS
15	D2	Dra. Hj. Elmy Wahyuningrur	PNS
16	D3	Dra. Dwi Wahyuningsih, M.P	PNS
17	D4	Aryani S.Pd.	PNS
18	D5	Dra. Soleha	CPNS
19	D6	Drs. M. Irwan Mainur	CPNS
20	D7	Gustion, S.Pd	HNR
<b>E Sejarah</b>			
21	E1	Dra. Rosdiana Nainggolan	PNS
22	E2	Dra. Dwi Hartini	PNS
23	E3	Drs. S. Adi Priyono M.Pd.	PNS
<b>F Penjaskes</b>			
24	F1	Drs. Jiwa Sitepu	PNS
25	F2	Drs. Rasmadi	PNS
26	F3	Johan Permana, S.Pd	HNR
<b>G Matematika</b>			
27	G1	Dra. Mariam Ulfah	PNS
28	G2	Dra. Siti Peni R	PNS
29	G3	Drs. H. BK. Noormandiri, M.	PNS
30	G4	Dra. Sri Endang Arumarianti	PNS
31	G5	Drs. Herman Syafri, M.Pd	PNS
32	G6	Dra. R. Leni Murzaini	CPNS
<b>H Fisika</b>			
33	H1	Drs. Supriyono	PNS
34	H2	Philemon Sembiring	PNS
35	H3	Drs. Achmad Saifudin, M.Pd	PNS
36	H4	Drs. Sarwin, M.Pd	PNS
37	H5	Drs. Adriansyah	PNS

SMAN 13 JKT/F-KUR/024			
KO DE	NAMA GURU	PNS PTT	
<b>I Biologi</b>			
38	I1	Dra. Asmarni	PNS
39	I2	Dra. Erni Gustifa	PNS
40	I3	Drs. Agus Jaya	PNS
<b>J Kimia</b>			
41	J1	Dra. Hj. Iis Rosidah	PNS
42	J2	Dra. Nursyamsiah, M.Pd	PNS
43	J3	Dra. Ade Amalia	CPNS
44	J4	Eka Barkah, S.Pd	HNR
<b>K Ekonomi</b>			
46	K2	Drs. Iing Suhari WS	PNS
47	K3	Drs. Nana Sudiana	CPNS
48	K4	Dra. Sri Endah Nurnaningsih	CPNS
<b>L Geografi</b>			
49	L1	Drs. Nanang Kosasih, M.Pd	PNS
50	L2	Dra. Sarlota JMD	PNS
<b>M Seni Budaya</b>			
51	M1	Drs. Ahmad Hamidi	PNS
52	M2	Margareta Woro, S.Pd.	PNS
<b>N Sosiologi</b>			
53	N1	Dra. Enny Sukilah	PNS
54	N2	Dra. Septini	CPNS
<b>P B K</b>			
55	P1	Drs. H. Aswad Syahrir, MM	PNS
56	P2	Drs. Slamet Marwanto	PNS
57	P3	Dra. Siti Salimah	PNS
58	P4	Drs. La biru, M.Pd	PNS
59	P5	Dra. Rosmawar Nasution	PNS
60	P6	Dra. Dwi Daryani	CPNS
<b>Q Bahasa Jerman dan Jepang</b>			
61	Q1	Wahono	PNS
62	Q2	Fitri Hesti, SS.	HNR
63	Q3	Siti Fatchia R., SS.	HNR
<b>R T I K</b>			
65	R1	Budi Halus Santoso	HNR
66	R2	Ir. Okta Rizal	HNR
66	R3	Drs. Adriansyah	PNS
<b>S Muat</b>			
66	S1	Soleha, S.Pd	CPNS
67	S2	M. Irwan Mainur, S.Pd	CPNS
68	S3	Gustion, S.Pd.	HNR

Jakarta, 12 Juli 2010  
Kepala Sekolah,

Drs. H. Aswad Syahrir, MM  
NIP. 131 681 360

Lampiran

**SUSUNAN PENGURUS KOMITE SMA NEGERI “X” JAKARTA  
PRIODE 2009 – 2012**

Penasehat : Dewan Pendidikan Jakarta Utara  
Agustomo Martodihardjo

Ketua : Ir. Imron Harun

Wakil Ketua : Drs. H. Basuki Hasan.Msi

Sekretaris : Drs. Ing S. Wirjasondjaja

Wakil Sekretaris : Ny. Inne Ekawati

Bendahara : Ny. Sri Mulyati

Wakil Bendahara : Ny. Hesti Anani

Humas : Drs. Yusran J.B. MM

Sekretariat : Dra. Dwi Hartini

Pramu Raharjo. SE

Bidang-bidang

1. Jaringan kerjasama dan sistem informasi : Ir. Teddy Hilman
2. Pengelolaan sumber dana sekolah : Ny. Endang Sri.H
3. Pengendalian kualitas pendidikan : Ny. Rosati
4. Potensi sumberdaya sekolah : Miki Hermanto.SP
5. Pengendalian sarana dan prasarana : Syafri, SH.MKn
6. Administrasi dan ketatausahaan : Hj. Ratna Said. SE



DINAS PENDIDIKAN  
**KOMITE SMA NEGERI "X" JAKARTA**

Jalan Seroja No.1, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230  
Telepon 4303676 - Faximili 4304580

Nomor : 0027/Komite-SMAN"X"/VIII/2011  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **Undangan Rapat Orang tua  
Peserta Didik Baru Kelas X**

08 September 2011

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Orang tua Peserta Didik Baru  
Kelas X - Tahun Pelajaran 2011-2012  
SMA Negeri "X" Jakarta  
di  
T e m p a t**

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan salam sejahtera semoga Bapak/Ibu Orang tua Peserta Didik SMA Negeri "X" Jakarta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin

Sehubungan telah memasuki bulan ke-tiga dalam tahun pelajaran 2011-2012, maka dengan ini kami Pengurus Komite dan Kepala Sekolah mengundang Bapak/Ibu Orang tua Peserta Didik Baru Kelas X untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

hari : Sabtu  
tanggal : 10 September 2011  
waktu : Pukul 07.30 sampai dengan selesai  
tempat : Halaman Sekolah dan Ruang Kelas  
acara : Membicarakan Program Kerja Sekolah  
Tahun Pelajaran 2011-2012

mengingat pentingnya kegiatan di maksud, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir tepat waktu dan kami harap tidak mewakilkan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan tertima kasih

Kepala Sekolah

Pengurus Komite Sekolah



Drs. Muhammad Effendi, M.Pd  
NIP. 19581201 198403 1 007



Jr. Imran Harun  
Ketua

Tembusan Yth.

1. Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara